



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2025-2029

Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara
Jl. Tjilik Riwut KM 7,5 Natai Sedawak, Kec.Sukamara,
Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah



BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang: a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah mempunyai peran penting dalam menentukan arah kebijakan dan prioritas Pembangunan daerah secara bertahap guna mempercepat terwujudnya masyarakat adil dan makmur sesuai dengan amanat Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam menentukan arah kebijakan dan prioritas Pembangunan daerah serta penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih periode Tahun 2025-2029, diperlukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang serta memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029, Kepala Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);

19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 123);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukamara Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2012 Nomor 14);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 112);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

dan

BUPATI SUKAMARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Bupati adalah Bupati Sukamara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Visi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi daerah yang diinginkan/terwujud pada tahun 2029 sebagai hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun.
13. Misi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi RPJMD 2025-2029.

14. Tujuan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029.
15. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD.
16. Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD.
17. Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik cascading (penurunan) kinerja.
18. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara relita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
19. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.
20. Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dan dampak).
21. Hari adalah hari kalender.

Pasal 2

- (1) Maksud dari penyusunan RPJMD adalah:
Maksud dari penyusunan RPJMD adalah sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha dalam membangun kesepahaman, kesepakatan, dan komitmen bersama, guna mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah secara berkesinambungan.
- (2) Tujuan dari penyusunan RPJMD, yaitu:
 - a. Tersusunnya RPJMD Tahun 2025-2029 yang dapat berkontribusi secara maksimal terhadap pencapaian target pembangunan jangka menengah nasional;
 - b. Tersusunnya RPJMD Tahun 2025-2029 yang memberikan ruang optimal bagi pembangunan daerah sesuai dengan karakteristik inovasi, inovasi dan pengembangan daerah; dan
 - c. Mewujudkan rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 3

RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2025–2029 adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Pasal 4

- (1) Sistematika RPJMD meliputi:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. BAB III : Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
 - d. BAB IV : Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - e. BAB V : Penutup.
- (2) Isi dan penjabaran lebih rinci RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup keterhubungan dan kesesuaian Visi/Misi dengan Tujuan Sasaran, Keterhubungan dan Kesesuaian Program-program prioritas dengan Tujuan dan Sasaran, Keterhubungan dan Kesesuaian program-program RPJMD Tahun 2025-2029 dengan program Perangkat Daerah dalam Renstra PD Tahun 2025-2029 Kabupaten Sukamara yang dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJMD.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERUBAHAN RPJMD

Pasal 6

Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. terjadi perubahan yang mendasar mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah dan perubahan kebijakan nasional.

Pasal 7

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada pasal 6, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
Pada tanggal 20 Agustus 2025



Diundangkan di Sukamara
Pada tanggal 20 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2025 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA, PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH : 05,45/2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan daerah, setiap dokumen perencanaan pembangunan yang dihasilkan harus mengacu atau berpedoman kepada dokumen perencanaan yang ada di atas (pada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi). Hal ini bertujuan untuk menjaga keterpaduan dan keselarasan pembangunan nasional, pembangunan di tingkat provinsi sampai pembangunan di tingkat kabupaten/kota.

Sistem perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Renstra Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dengan melibatkan masyarakat. Sebagai satu kesatuan sistem, masing-masing dokumen saling terkait dan konsisten dimana RPJPD memayungi arah kebijakan bagi RPJMD dalam 4 (empat) periode lima tahunan. Sedangkan, RPJMD memberi pedoman bagi RKPD melalui arah kebijakan tahunan dalam 5 (lima) tahun. Selain itu, RPJMD juga menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai pedoman perencanaan lima tahun masing-masing Perangkat Daerah. Selanjutnya, Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang menjadi masukan bagi penyusunan RKPD.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah, maka setiap daerah termasuk Kabupaten Sukamara diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Dokumen perencanaan ini diharapkan akan mengarahkan setiap daerah untuk dapat mencapai tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah seperti tercantum dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dengan demikian RPJMD Tahun 2025-2029 Kabupaten Sukamara merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dengan demikian Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang disusun, selain sebagai upaya untuk memberikan arah dan langkah kerja untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dalam Nawa Bhakti Satya tentunya juga perlu selaras dan mendukung ketercapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden RI dalam Asta Cita sebagaimana tertuang di dalam RPJMD Tahun 2025-2029. Hal tersebut dimaksudkan agar segala daya upaya pemerintah daerah untuk menjalankan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini dapat sejalan dengan upaya pemerintah pusat dalam rangka mengoptimalkan seluruh hasil pembangunan untuk sebesar-besar kemanfaatan bagi masyarakat.

Perda tentang RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029 terdiri dari 5 bab dan 8 pasal yang mengatur mengenai pengertian, sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Sukamara, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD, Serta lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perda tentang RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 123

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH TAHUN 2025-2029



KATA PENGANTAR

RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029

Tabé Salamat Lingu Nalatai Salam Sahujud Karendem Malempang

Adil Ka' Talino, Bacuramin Ka'Saruga, Basengat Ka' Jubata

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur patut kita haturkan kehadiran Tuhan YME, karena berkah-Nya sehingga dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029 telah selesai disusun. Dokumen ini merupakan wujud rencana pembangunan di Kabupaten Sukamara selama periode lima tahun ke depan. Konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan harus dilakukan sebagai upaya mengarahkan segala sumber daya pembangunan untuk mencapai target pembangunan secara berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Perda RPJPD Tahun 2025-2045, serta dengan dilantikannya Bupati dan Wakil Bupati Sukamara pada tanggal 20 Februari 2025, maka Kabupaten Sukamara berkewajiban untuk segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Penyusunan dimulai dari Rancangan Teknokratik (Rantek) RPJMD, dimana sebagian substansinya dijadikan masukan dalam penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029.

Penyusunan dokumen RPJMD ini juga dilakukan dengan mempertimbangan keberadaan RPJPD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2045, khususnya tema pembangunan yang tertuang dalam periode pembangunan lima tahun pertama. Disamping itu, keberadaan mandat pembangunan pada tingkat Provinsi Kalimantan Tengah perlu menjadi perhatian untuk keselarasan pembangunan wilayah. Beberapa dokumen perencanaan sektoral lain juga menjadi pertimbangan, seperti rencana penanggulangan kemiskinan daerah, ketenagakerjaan, dll. Secara keruangan, keberadaan RTRW Kabupaten Sukamara juga sangat berpengaruh terhadap hasil perhitungan dan perancangan dalam dokumen ini. Perhitungan hasil kinerja pembangunan selama lima tahun sebelumnya juga menjadi pertimbangan dalam mengarahkan proses perbaikan substansi pembangunan di Kabupaten Sukamara.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029 selain mengacu pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagaimana disampaikan pada saat kampanye, juga berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tata cara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.





Demikian kata pengantar yang dapat kami haturkan, semoga dengan adanya dokumen ini, beberapa substansi perencanaan jangka menengah lima tahun ke depan dapat ternaungi dalam dokumen ini. Selain itu, keberlanjutan pembangunan dapat terwujud selama lima tahun ke depan. Ucapan terima kasih patut Kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu mewujudkan dokumen ini. Para elemen pemerintah daerah Kabupaten Sukamara dan Kalimantan Tengah, Forkopimda, seluruh elemen masyarakat, para akademisi, serta para elemen media yang terus konsisten dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat Kabupaten Sukamara. Semoga dokumen ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sukamara, 20 Agustus 2025
Bupati Sukamara

H. MASDUKI, S.T





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3. Hubungan antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya	5
1.4. Maksud dan Tujuan	9
1.5. Sistematika Penulisan	10
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH.....	12
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah	12
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi.....	12
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	46
2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah.....	66
2.1.4. Aspek Pelayanan Umum.....	74
2.2. Gambaran Keuangan Daerah.....	123
2.2.1. Kinerja Keuangan Daerah Masa Lalu	124
2.2.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	142
2.2.3. Kerangka Pendanaan.....	145
2.3. Permasalahan dan Isu Strategis	150
2.3.1. Potensi Daerah.....	151
2.3.2. Permasalahan Pembangunan Daerah.....	156
2.3.3. Isu Strategis.....	177
BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM, PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	190
3.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	190
3.1.1. Visi dan Misi.....	190
3.1.2. Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.....	196
3.2. Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas	200
3.2.1. Strategi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukamara.....	200
3.2.2. Arah Kebijakan Daerah Kabupaten Sukamara.....	209
3.2.3. Program-Program Prioritas Daerah	212
BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	259
4.1. Program Perangkat Daerah	259
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	293
BAB V PENUTUP	347
5.1. Kaidah Pelaksanaan.....	347
5.2. Pedoman Transisi.....	348





DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Luas Daerah Kabupaten Sukamara menurut Kecamatan Tahun 2025	12
Tabel 2. 2 Kelas Kemiringan Lahan dan Sebarannya di Kabupaten Sukamara	15
Tabel 2. 3 Ketinggian Wilayah dan Sebarannya di Kabupaten Sukamara	16
Tabel 2. 4 Suhu Udara di Kabupaten Sukamara Hasil Pengamatan Unsur Iklim menurut Bulan di Stasiun Meteorologi Iskandar Tahun 2024.....	17
Tabel 2. 5 Kondisi Hujan di Kabupaten Sukamara Hasil Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Meteorologi Iskandar Tahun 2024	17
Tabel 2. 6 Luas Curah Hujan di Kabupaten Sukamara.....	18
Tabel 2. 7 Formasi Geologi di Kabupaten Sukamara	19
Tabel 2. 8 Jenis Tanah di Kabupaten Sukamara	20
Tabel 2. 9 Penggunaan Lahan Kabupaten Sukamara (Ha).....	22
Tabel 2. 10 Nama-nama Sungai yang melintasi Wilayah Kabupaten Sukamara 2023 25	
Tabel 2. 11 Status Kualitas Air di Kabupaten Sukamara Tahun 2024	25
Tabel 2. 12 Indikator Kinerja Persampahan Kabupaten Sukamara.....	28
Tabel 2. 13 Indeks Kerentanan Kabupaten Sukamara	29
Tabel 2. 14 Jumlah Desa/Kelurahan yang Mengalami Bencana Alam Banjir di Sukamara Tahun 2020-2021 dan 2024	31
Tabel 2. 15 Luas Kawasan Rawan Bencana Kebakaran dan Banjir (m ²)	31
Tabel 2. 16 Jumlah dan Distribusi/Persebaran Penduduk Kabupaten Sukamara berdasarkan Kecamatan Tahun 2020-2024.....	33
Tabel 2. 17 Data Jumlah Penduduk Tahun 2020-2024 dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2020-2024 Per Kecamatan di Kabupaten Sukamara ...	34
Tabel 2. 18 Kepadatan Penduduk Kabupaten Sukamara Tahun 2024	35
Tabel 2. 19 Kepadatan Penduduk Kabupaten Sukamara berdasarkan Tahun Sensus 2010 dan 2020	35
Tabel 2. 20 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2024.....	36
Tabel 2. 21 Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Sex Ratio per Kecamatan Tahun 2023 dan Tahun 2024	36
Tabel 2. 22 Proyeksi Penduduk Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029.....	39
Tabel 2. 23 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur	41
Tabel 2. 24 Proyeksi Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sukamara.....	42
Tabel 2. 25 Proyeksi Jumlah Penduduk Usia Produktif.....	42
Tabel 2. 26 Proyeksi Jumlah Penduduk Usia Tua	43
Tabel 2. 27 Proyeksi Angka Ketergantungan	45
Tabel 2. 28 Rasio Ketergantungan Penduduk di Kabupaten Sukamara	67
Tabel 2. 29 Nilai PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024.....	69
Tabel 2. 30 Distribusi Persentase PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024.....	70
Tabel 2. 31 Nilai PDRB ADHK menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024.....	72
Tabel 2. 32 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Sukamara Tahun 2020- 2024.....	78
Tabel 2. 33 Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten Sukamara Tahun 2020- 2024.....	80
Tabel 2. 34 Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024.....	83
Tabel 2. 35 Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024.....	84





Tabel 2. 36 Capaian Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020-2024.....	85
Tabel 2. 37 Capaian Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024 ...	86
Tabel 2. 38 Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Sukamara Tahun 2020- 2024.....	87
Tabel 2. 39 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024.....	88
Tabel 2. 40 Capaian Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024	89
Tabel 2. 41 Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Kabupaten Sukamara Tahun 2020- 2024.....	90
Tabel 2. 42 Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024.....	91
Tabel 2. 43 Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024.....	93
Tabel 2. 44 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	94
Tabel 2. 45 Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024.....	94
Tabel 2. 46 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Sukamara Tahun.....	95
Tabel 2. 47 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Gawai dan Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir di Kabupaten Sukamara Tahun 2023*	96
Tabel 2. 48 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024.....	97
Tabel 2. 49 Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024.....	98
Tabel 2. 50 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Sukamara	99
Tabel 2. 51 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024	100
Tabel 2. 52 Capaian Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024	100
Tabel 2. 53 Capaian Kinerja Urusan Persandian Kabupaten Sukamara Tahun.....	101
Tabel 2. 54 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Sukamara Tahun	102
Tabel 2. 55 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Sukamara Tahun.....	103
Tabel 2. 56 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Sukamara Tahun.....	103
Tabel 2. 57 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Sukamara Tahun 2020- 2024.....	104
Tabel 2. 58 Capaian Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Sukamara Tahun.....	105
Tabel 2. 59 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Sukamara Tahun.....	106
Tabel 2. 60 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Sukamara Tahun.....	106
Tabel 2. 61 Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Kabupaten Sukamara Tahun.....	107
Tabel 2. 62 Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024	108
Tabel 2. 63 Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Kabupaten Sukamara Tahun.....	109
Tabel 2. 64 Capaian Kinerja Urusan Keuangan Kabupaten Sukamara Tahun 2020- 2024.....	109
Tabel 2. 65 Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian Kabupaten Sukamara Tahun	110
Tabel 2. 66 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024	111
Tabel 2. 67 Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024.....	112
Tabel 2. 68 Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024.....	112





Tabel 2. 69 Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Dewan Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024.....	113
Tabel 2. 70 Capaian Kinerja Urusan Pelaksanaan Pengawasan Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024.....	114
Tabel 2. 71 Capaian Kinerja Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara Tahun	115
Tabel 2. 72 Capaian Kinerja Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024.....	115
Tabel 2. 73 Capaian Kinerja Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024	115
Tabel 2. 74 Capaian Kinerja Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024.....	116
Tabel 2. 75 Capaian Kinerja Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024.....	116
Tabel 2. 76 Capaian Kinerja Urusan Pelaksana Unsur Pemerintah Umum Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024.....	117
Tabel 2. 77 Capaian SPM Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024.....	118
Tabel 2. 78 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024.....	126
Tabel 2. 79 Kinerja Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024	129
Tabel 2. 80 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024	131
Tabel 2. 81 Perkembangan Neraca Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024	138
Tabel 2. 82 Analisis Rasio Neraca Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019-2023	140
Tabel 2. 83 Proporsi Belanja untuk Pemenuhan Aparatur terhadap Total Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024	142
Tabel 2. 84 Analisis Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024	143
Tabel 2. 85 Realisasi Pembiayaan Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024.....	144
Tabel 2. 86 Surplus/Defisit Riil APBD Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024.....	145
Tabel 2. 87 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Sukamara	145
Tabel 2. 88 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029	147
Tabel 2. 89 Proyeksi Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029	149
Tabel 2. 90 Permasalahan Kurangnya Cakupan dan Kualitas Pelayanan Penunjang Pengembangan Sumber Daya Manusia	158
Tabel 2. 91 Permasalahan Ketidaksesuaian Kebutuhan dan Ketersediaan Tenaga Kerja	159
Tabel 2. 92 Permasalahan Kurangnya Nilai Tambah dan Cakupan Pemasaran UMKM Lokal.....	160
Tabel 2. 93 Permasalahan Sistem Pelayanan Investasi Belum Optimal.....	161
Tabel 2. 94 Permasalahan Kurang Efektifnya Mekanisme Tata Kelola Pemerintahan di Bidang Pelayanan Publik.....	162
Tabel 2. 95 Permasalahan Kurangnya Peraturan Tata Cara Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	167
Tabel 2. 96 Permasalahan Luntturnya Penerapan Ideologi Pancasila dan Rawannya Konflik Horizontal	167
Tabel 2. 97 Permasalahan Kurangnya Pemahaman akan Aturan-Aturan Pemanfaatan Lahan	170





Tabel 2. 98 Permasalahan Belum Optimalnya Kerja Sama Lintas Sektor dalam Pemberdayaan Masyarakat	171
Tabel 2. 99 Permasalahan Kurangnya Partisipasi dan Perlindungan bagi Perempuan dan Anak dalam Pelaksanaan Pembangunan.....	172
Tabel 2. 100 Permasalahan Kurangnya Kesadaran Masyarakat akan Aktivitas Pelestarian Lingkungan Hidup.....	173
Tabel 2. 101 Permasalahan Belum Meratanya Cakupan Pelayanan Permukiman dan Ekonomi Wilayah.....	174
Tabel 2. 102 Permasalahan Kurangnya Sarana dan Prasarana Penunjang Konektivitas Wilayah.....	175
Tabel 2. 103 Permasalahan Kurangnya Fasilitas dan Pengawasan Aktivitas Perhubungan.....	175
Tabel 2. 104 Permasalahan Kurangnya Penerapan Teknologi Digital dalam Menunjang Pelayanan Publik	176
Tabel 2. 105 Permasalahan Belum Optimalnya Pengendalian dan Evaluasi Penerapan Dokumen Perencanaan.....	177
Tabel 2. 106 Telaah Isu Strategis Kabupaten Sukamara	179
Tabel 3. 1 Persandingan Visi Kabupaten Sukamara dengan Visi Nasional dan Provinsi Kalimantan Tengah.....	191
Tabel 3. 2 Keterkaitan Visi RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029 pada masing-masing Misi	193
Tabel 3. 3. Keselarasan Antara Misi RPJPD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2045 dengan Misi RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029.....	194
Tabel 3. 4 Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029 dengan Misi RPJMN Tahun 2025-2029	194
Tabel 3. 5 Tabel Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029	197
Tabel 3. 6 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Misi 1 RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029	200
Tabel 3. 7 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Misi 2 RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029	202
Tabel 3. 8 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Misi 3 RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029	203
Tabel 3. 9 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Misi 4 RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029	205
Tabel 3. 10 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Misi 5 RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029	207
Tabel 3. 11 Pentahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029	210
Tabel 3. 12 Arah Kebijakan Jangka Menengah Kabupaten Sukamara	210
Tabel 3. 13 Misi, Tujuan, Sasaran dan Outcome Kabupaten Sukamara 2025 2029	213
Tabel 4. 1 Program Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara.....	260
Tabel 4. 2 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sukamara	294
Tabel 4. 3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Kabupaten Sukamara	296
Tabel 4. 4 Target SPM Tahun 2026-2030	328
Tabel 4. 5 Penyelarasan Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2045 dengan IKU dan IKD RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029.....	333
Tabel 4. 6 Penyelarasan Indikator RPJMN - RPJMD Provinsi – RPJMD Kabupaten ..	338





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Keterkaitan Antar Dokumen dalam Perencanaan Pembangunan	6
Gambar 1. 2 Grafik Hubungan RPJMD dengan Dokumen Lainnya dalam Sistem Perencanaan dan Penganggaran	9
Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kecamatan di Kabupaten Sukamara.....	13
Gambar 2. 2 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Sukamara	15
Gambar 2. 3 Peta Ketinggian Tempat (mdpl) Kabupaten Sukamara	16
Gambar 2. 4 Curah Hujan Kabupaten Sukamara	18
Gambar 2. 5 Peta Formasi Geologi di Kabupaten Sukamara.....	20
Gambar 2. 6 Peta Jenis Tanah di Kabupaten Sukamara	21
Gambar 2. 7 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Sukamara	23
Gambar 2. 8 Peta Kesesuaian Penggunaan Lahan terhadap Pola Ruang Kabupaten Sukamara.....	24
Gambar 2. 9 Peta Sebaran Cekungan Air Tanah (CAT) Kalimantan Tengah.....	26
Gambar 2. 10 Grafik Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukamara.....	27
Gambar 2. 11 Peta Kerentanan terhadap Perubahan Iklim Kabupaten Sukamara	29
Gambar 2. 12 Peta Kerawanan Bencana Banjir Kabupaten Sukamara.....	32
Gambar 2. 13 Peta Kerawanan Bencana Kebakaran di Kabupaten Sukamara	32
Gambar 2. 14 Piramida Penduduk Kabupaten Sukamara Tahun 2020.....	37
Gambar 2. 15 Piramida Penduduk Kabupaten Sukamara Tahun 2021.....	37
Gambar 2. 16 Piramida Penduduk Kabupaten Sukamara Tahun 2022.....	38
Gambar 2. 17 Piramida Penduduk Kabupaten Sukamara Tahun 2023.....	38
Gambar 2. 18 Piramida Penduduk Kabupaten Sukamara Tahun 2024	38
Gambar 2. 19 Grafik Perkembangan Proyeksi Penduduk Tahun 2025-2029.....	40
Gambar 2. 20 Grafik Proyeksi Proporsi Kelompok Umur Penduduk Kabupaten Sukamara.....	41
Gambar 2. 21 Proyeksi Perkembangan Penduduk Usia Sekolah	44
Gambar 2. 22 Grafik Proyeksi Angka Ketergantungan.....	45
Gambar 2. 23 Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Nasional Tahun 2010-2024.....	46
Gambar 2. 24 Grafik Perkembangan Persentase Penduduk Miskin (P0) Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Nasional Tahun 2010-2024	48
Gambar 2. 25 Grafik Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024.....	49
Gambar 2. 26 Grafik Analisis Tipologi Klassen Kabupaten/Kota di Prov. Kalimantan Tengah Tahun 2010.....	50
Gambar 2. 27 Grafik Analisis Tipologi Klassen Kabupaten/Kota di Prov. Kalimantan Tengah Tahun 2024.....	50
Gambar 2. 28 Grafik Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Nasional	52
Gambar 2. 29 Grafik Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Nasional Tahun 2010-2024.....	53
Gambar 2. 30 Grafik Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Nasional	54
Gambar 2. 31 Grafik Perkembangan Indeks Keluarga Sehat (IKS) Nasional Tahun 2020-2024.....	55
Gambar 2. 32 Grafik Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Nasional Tahun 2010-2024 (Tahun).....	56





Gambar 2. 33 Grafik Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Nasional Tahun 2010-2024	56
Gambar 2. 34 Grafik Angka Literasi/Numerisasi Kabupaten Sukamara Tahun 2021-2022	58
Gambar 2. 35 Grafik Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Sukamara Tahun 2023	59
Gambar 2. 36 Grafik Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.....	59
Gambar 2. 37 Nilai dan Pilar Indeks Literasi Digital Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2022	60
Gambar 2. 38 Grafik Nilai Pilar Indeks Masyarakat Digital (IMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2024	61
Gambar 2. 39 Grafik Indeks Masyarakat Digital (IMD) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.....	62
Gambar 2. 40 Grafik Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Nasional Tahun 2020-2024.....	62
Gambar 2. 41 Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2018-2023	63
Gambar 2. 42 Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2022.....	64
Gambar 2. 43 Grafik Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2023.....	65
Gambar 2. 44 Grafik Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Nasional Tahun 2010-2023.....	66
Gambar 2. 45 Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Sukamara Tahun 2011-2023.....	68
Gambar 2. 46 Grafik Transformasi Struktur Ekonomi dan Sektor Unggulan di Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024.....	71
Gambar 2. 47 Grafik Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2023.....	73
Gambar 2. 48 Grafik Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2024.....	73
Gambar 2. 49 Grafik Indeks Demokrasi Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2021-2023.....	75
Gambar 2. 50 Grafik Nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dan Komponen Kabupaten Sukamara Tahun 2024.....	77
Gambar 2. 51 Grafik Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024.....	78
Gambar 2. 52 Perkembangan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024.....	125
Gambar 2. 53 Grafik Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024.....	128
Gambar 2. 54 Grafik Struktur Belanja Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024.....	133
Gambar 2. 55 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024.....	133
Gambar 2. 56 Perkembangan PDRB Sektor Pertanian, Perikanan, Kehutanan Tahun 2020-2024 (Milyar Rupiah)	151
Gambar 2. 57 Arah Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah.....	156
Gambar 2. 58 Keterkaitan Arah Kebijakan Pembangunan RPJPD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2045 dengan Masalah Utama RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029	157





BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Keterkaitan ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perencanaan pembangunan bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronasi dan sinergitas baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi pemerintah maupun antar Pusat dan Daerah. Selain itu, perencanaan pembangunan juga bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, optimalisasi partisipasi masyarakat, serta menjamin terciptanya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Bersama dengan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia, Pemerintah Kabupaten Sukamara pada tahun 2024 telah menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Dari hasil pemilihan tersebut, telah ditetapkan Kepala Daerah terpilih yaitu Bapak H. Masduki, S.T. sebagai Bupati dan Bapak Nur Efendi, S.H. sebagai Wakil Bupati untuk periode 2025-2030. Dengan ditetapkannya Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukamara melalui pelantikan pada tanggal 20 Februari 2025, Pemerintah Kabupaten Sukamara berkewajiban menyusun dan menetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 paling lambat 6 (enam) bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029 merupakan tahap I atau periode pertama dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2045. Sehingga penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2045 serta mengacu pada RPJMN Tahun 2025-2029 sebagai pedoman nasional serta RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 sebagai provinsi dimana Kabupaten Sukamara berada. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD





Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029 diarahkan agar sejalan dengan kebijakan nasional dan provinsi serta mampu merespons tantangan dan peluang pembangunan di tingkat daerah.

Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029 melewati beberapa tahapan, yaitu:

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan dokumen Rancangan Awal RPJMD;
3. Penyusunan dokumen Rancangan RPJMD;
4. Pelaksanaan kegiatan Musrenbang;
5. Perumusan Rencana Akhir RPJMD; dan
6. Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Proses persiapan penyusunan telah dilakukan sejak tahun 2024 dengan menyusun Rancangan Teknokratik RPJMD yang kemudian disempurnakan hingga Bupati dan Wakil Bupati dilantik. Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati telah dilaksanakan, maka mulai disusunlah Rancangan Awal RPJMD yang menjabarkan visi, misi, dan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati terpilih ke dalam visi, misi, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029. Proses penyusunan Rancangan RPJMD ini kemudian akan berlanjut hingga penetapan Peraturan Daerah yang telah disusun pada Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Dokumen RPJMD menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan daerah yang harus diacu oleh seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Sukamara. Lebih lanjut RPJMD Kabupaten Sukamara menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) 2025-2029 di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara. RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun sehingga pembangunan di Kabupaten Sukamara menjadi selaras dan lebih terarah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Pedoman dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029 ini adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya,





- dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
 8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);





10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 mengatur tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);





20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukamara Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 18);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 112).

1.3. Hubungan antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

Perwujudan perencanaan pembangunan daerah kabupaten membutuhkan keterkaitan erat antar dokumen perencanaan baik pada tingkat nasional maupun provinsi sehingga dapat tercipta suatu keselarasan pembangunan. Perencanaan pembangunan di daerah pada hakikatnya dilakukan untuk mendukung dan mewujudkan cita-cita pembangunan nasional. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, penyusunan dokumen RPJMD harus diselaraskan dengan dokumen perencanaan lainnya, seperti RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJPD Kabupaten, dan RTRW Kabupaten

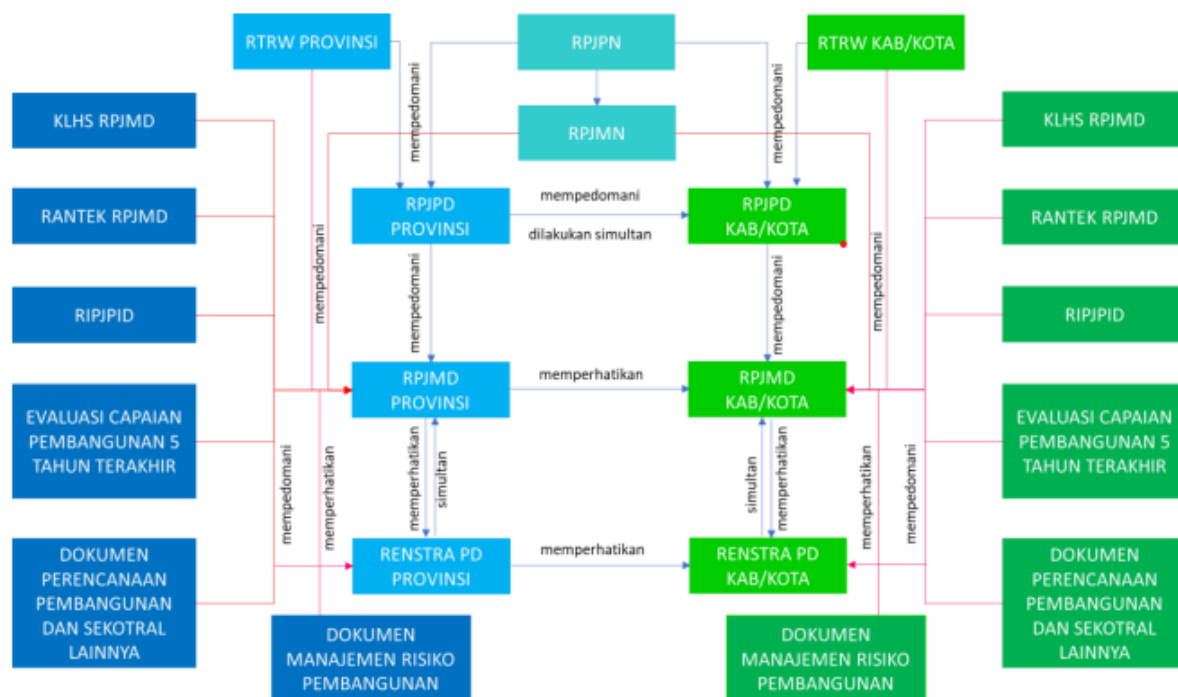
Penyelarasan Dokumen RPJMD dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya memberikan gambaran dan analisis tentang data-data berupa fakta dan isu





strategis daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang yang dapat menjadi dasar dalam penyusunan RPJMD. Arah pembangunan pada tingkat nasional merupakan pedoman bagi pembangunan pada tingkat di bawahnya, dan seterusnya. Telaah Visi dan Misi serta arah pembangunan sangat penting dilakukan dalam perumusan Isu Strategis dalam RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029. Keterkaitan antara dokumen RPJMD dan dokumen perencanaan lainnya tersaji pada bagan berikut:

Gambar 1.1 Keterkaitan Antar Dokumen dalam Perencanaan Pembangunan



1.3.1. Hubungan RPJMD Kabupaten Sukamara dengan RPJMN, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, dan RPJPD Kabupaten Sukamara

Penyusunan RPJMD Kabupaten Sukamara antara lain memperhatikan RPJMN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2029 dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan arah kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.

Sebagai bagian dari Provinsi Kalimantan Tengah, RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029 juga mengacu serta memperhatikan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 melalui penyelarasan tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten dengan arah serta prioritas pembangunan daerah provinsi, arah kebijakan, dan prioritas untuk





bidang pembangunan dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.

Sedangkan untuk keterkaitan dengan dokumen Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2045, RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029 merupakan Pembangunan Jangka Menengah yang menjadi Tahap I dari tahapan pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045. Arah kebijakan pembangunan Tahap I memiliki tema “Penguatan Fondasi pembangunan dan Ekonomi”. Pada tahap ini penguatan dan peningkatan pada hal-hal yang bersifat mendasar menjadi fondasi untuk pembangunan pada tahap-tahap selanjutnya. Penguatan fondasi pembangunan tidak hanya terbatas pada peningkatan fasilitas pelayanan dasar, sarana prasarana, dan infrastruktur, tetapi juga mencakup berbagai aspek pada misi-misi RPJPD seperti inisiasi-inisiasi reformasi tata kelola pemerintahan, supremasi hukum, pemberdayaan masyarakat, pemerataan, dan pembangunan berkelanjutan.

Dalam penyusunan RPJMD berpedoman pada RPJPD Kabupaten Sukamara tahun 2025-2045 dengan cara menyelaraskan sasaran strategis, arah kebijakan, dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.

1.3.2. Hubungan RPJMD Kabupaten Sukamara dan RTRW

Penyusunan RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029 berpedoman pada arah kebijakan pengembangan wilayah yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik RTRW Nasional, RTRW Provinsi maupun RTRW Kabupaten Sukamara. Penyusunan RPJMD Kabupaten Sukamara juga mengintegrasikan rencana struktur ruang dan pola ruang yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukamara Tahun 2012-2032 sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Sukamara sebagai bentuk operasionalisasi perwujudan rencana struktur dan pola ruang dalam RTRW.

1.3.3. Hubungan RPJMD Kabupaten Sukamara dengan KLHS RPJMD

KLHS RPJMD merupakan rangkaian analisis sistematis menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program dalam RPJMD.

Penyusunan RPJMD secara kaidah perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah perlu mengintegrasikan pertimbangan rekomendasi isu





strategis, permasalahan, dan sasaran hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD dengan maksud agar penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah dapat menghasilkan prioritas pembangunan daerah yang secara efektif dan efisien dapat mewujudkan pelaksanaan agenda tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) yang memuat 17 tujuan/*goals* dan 4 pilar yang meliputi Pilar Sosial, Pilar Ekonomi, Pilar Lingkungan, serta Pilar Hukum dan Tata Kelola.

1.3.4. Hubungan RPJMD Kabupaten Sukamara dengan Renstra Perangkat Daerah

RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029 menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam perumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintah Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada sasaran dan indikator serta target kinerja dalam RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) selanjutnya menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahun selama 5 (lima) tahun dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

1.3.5. Hubungan RPJMD Kabupaten Sukamara dengan RKPD

RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukamara mulai tahun 2026, 2027, 2028, 2029, hingga 2030 melalui penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta program perangkat daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 5 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029. Dalam pelaksanaannya tahunan RPJMD melalui RKPD menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

1.3.6. Hubungan RPJMD Kabupaten Sukamara dengan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah

RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029 menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan selanjutnya menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja



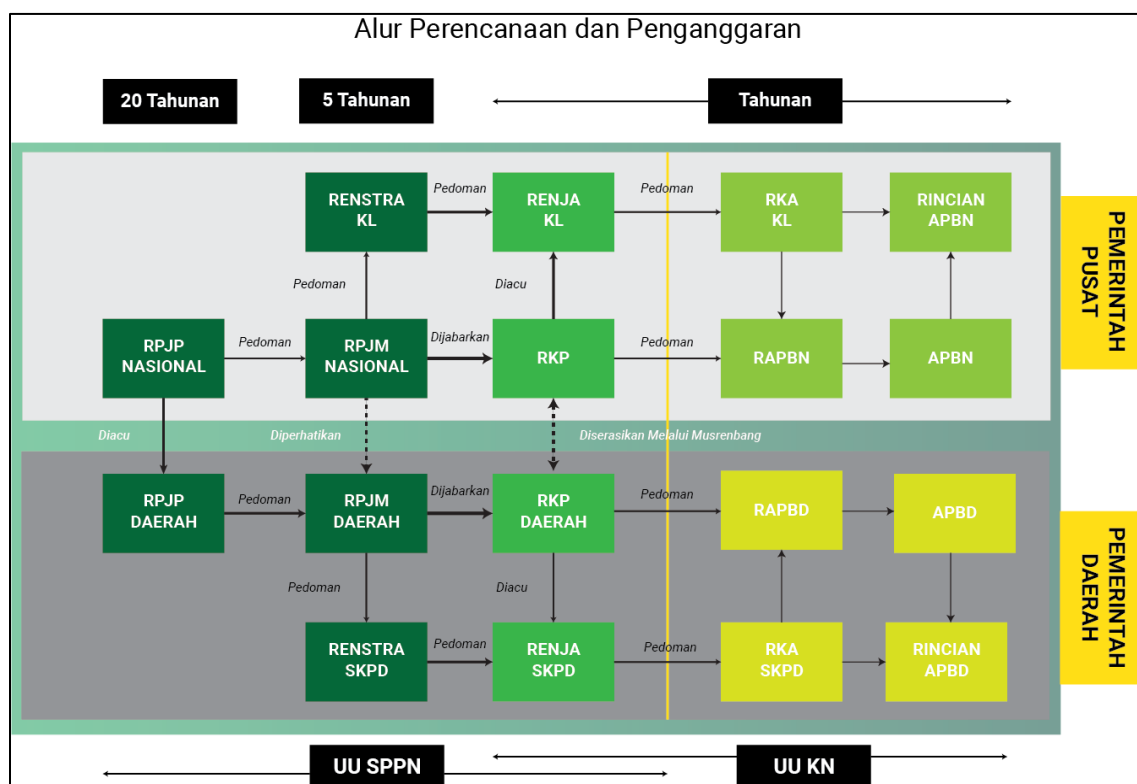


(Renja) Perangkat Daerah setiap tahun selama 5 (lima) tahun dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

1.3.7. Hubungan RPJMD Kabupaten Sukamara dengan Dokumen Lainnya dalam Sistem Perencanaan dan Penganggaran

Gambaran tentang hubungan antara RPJMD dengan dokumen lainnya sebagai kesatuan sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan ditunjukkan pada gambar berikut.

Gambar 1. 2 Grafik Hubungan RPJMD dengan Dokumen Lainnya dalam Sistem Perencanaan dan Penganggaran



Sumber: UU Nomor 24 Tahun 2004 dan UU Nomor 17 Tahun 2003

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029 adalah untuk menjabarkan dan memberikan gambaran umum tentang kondisi Kabupaten Sukamara dengan menggunakan metode dan pendekatan kerangka pikir secara ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran Pembangunan daerah Kabupaten Sukamara.

Tujuan kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029 yaitu:





1. Menjabarkan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan.
2. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang terukur untuk periode 2025-2029, sesuai dengan RPJPD dan RTRW daerah Kabupaten Sukamara.
3. Merumuskan rencana pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan yang realistis dan berkelanjutan.
4. Menetapkan program prioritas dengan target kinerja dan pagu anggaran indikatif untuk pelaksanaan tahun 2025-2030.
5. Menyediakan acuan resmi bagi pemerintah daerah, DPRD, masyarakat, dan dunia usaha dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan, serta acuan untuk evaluasi kinerja dan keuangan tahunan setiap Perangkat Daerah (PD).

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 yang terdiri dari 5 (lima) bab, sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Paling sedikit memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen Perencanaan pembangunan lainnya, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Gambaran umum kondisi daerah paling sedikit Memuat aspek yaitu geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.
2. Gambaran keuangan daerah paling sedikit memuat penjelasan tentang realisasi APBD tahun anggaran 2020-2024 dan proyeksi keuangan daerah tahun 2025-2030.
3. Permasalahan dan isu strategis paling sedikit memuat permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah.

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

1. Memuat visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2025-2029.
2. Memuat strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah





BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

1. Program Perangkat Daerah paling sedikit memuat daftar program perangkat daerah tahun 2025-2030 dalam mencapai kinerja pembangunan daerah. Indikator program, target, dan pagu indikator program Perangkat Daerah Tahun 2025-2030.
2. Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah paling sedikit memuat target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2025-2030 melalui indikator kinerja utama (IKU) dan target penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2025-2030 melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD).

BAB V PENUTUP

Memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.





BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

a. Posisi dan Peran Strategis Daerah

Kabupaten Sukamara merupakan salah satu wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah yang terletak pada koordinat 2°19' - 3°07' Lintang Selatan dan 110°25' - 111°09' Bujur Timur. Secara administrasi, Kabupaten Sukamara terdiri atas 5 kecamatan yaitu Kecamatan Sukamara, Kecamatan Pantai Lunci, Kecamatan Balai Riam, Kecamatan Permata Kecubung, serta Kecamatan Jelai dengan luas total Kabupaten Sukamara yaitu sebesar 3.827 km² atau 2,49 persen dari luas keseluruhan Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten Sukamara terletak di bagian barat dari Provinsi Kalimantan Tengah. Batas wilayah Kabupaten Sukamara dengan wilayah di sekitarnya adalah sebagai berikut.

Sebelah Utara : Kecamatan Lamandau dan Kecamatan Bulik
Sebelah Timur : Kecamatan Kotawaringin Lama dan Kecamatan
Sebelah Selatan : Laut Jawa
Sebelah Barat : Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang

Jumlah desa/kelurahan yang terdapat di Kabupaten Sukamara yaitu sebanyak 32 desa/kelurahan yang terdiri dari 3 kelurahan dan 29 desa. Kecamatan Sukamara terdiri dari 2 kelurahan dan 6 desa, Kecamatan Jelai terdiri dari 1 kelurahan dan 4 desa, Kecamatan Balai Riam terdiri dari 8 desa, Kecamatan Pantai Lunci terdiri dari 4 desa, serta Kecamatan Permata Kecubung yang terdiri dari 7 desa, seperti yang terdapat pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Luas Daerah Kabupaten Sukamara menurut Kecamatan Tahun 2025

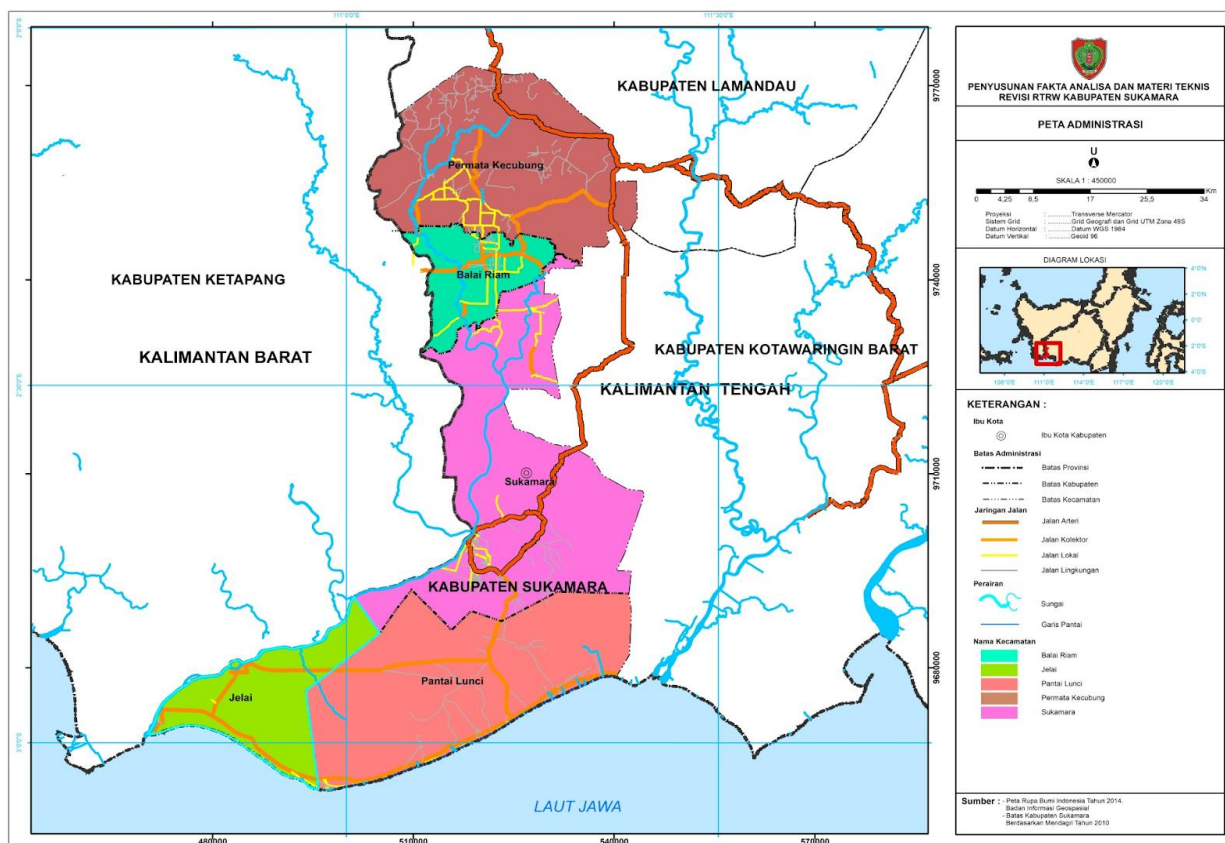
No	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Luas Wilayah (km ²)	Proporsi (%)
1	Sukamara	2	6	1.028	26,86
2	Jelai	1	4	796	20,80
3	Balai Riam	-	8	539	14,08
4	Pantai Lunci	-	4	804	21,01
5	Permata Kecubung	-	7	660	17,25
Jumlah		3	29	3.827	100,00

Sumber: Kabupaten Sukamara Dalam Angka 2025



Kecamatan yang memiliki luasan terbesar di Kabupaten Sukamara yaitu Kecamatan Sukamara dengan luas sebesar 1.028 km² dan memiliki persentase 26,86 persen dari keseluruhan luas wilayah di Kabupaten Sukamara. Kecamatan Pantai Lunci menjadi kecamatan dengan luas wilayah terbesar kedua di Kabupaten Sukamara dengan luas wilayah sebesar 804 km² yang menempati 21,01 persen dari luasan keseluruhan Kabupaten Sukamara. Kecamatan Jelai menjadi kecamatan dengan luas wilayah terbesar ketiga di Kabupaten Sukamara dengan luas wilayah sebesar 796 km² yang menempati 20,80 persen dari luasan Kabupaten Sukamara. Kecamatan Permata Kecubung merupakan kecamatan dengan luas wilayah sebesar 660 km² yang menempati 17,25 persen dari luasan Kabupaten Sukamara. Serta yang terakhir yaitu Kecamatan Balai Riam yang merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Kabupaten Sukamara dengan luas wilayah sebesar 539 km² atau hanya 14,08 persen dari luasan Kabupaten Sukamara. Secara administratif, Kabupaten Sukamara dapat dilihat sebagaimana pada gambar peta berikut.

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kecamatan di Kabupaten Sukamara



Sumber: Peta RTRW Kabupaten Sukamara 2012-2032

Peran strategis daerah mengacu pada rencana dan tindakan yang dirancang oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Peran strategis daerah sangat penting dalam konteks otonomi daerah, dimana pemerintah daerah memiliki kewenangan





untuk mengelola sebagian besar urusan pemerintahan dan pembangunan di tingkat lokal.

Peran strategis daerah Kabupaten Sukamara yaitu menjadi Pintu Gerbang Bagian Barat Provinsi Kalimantan Tengah, salah satunya didukung dengan keberadaan Jembatan Jelai yang dapat menghubungkan Provinsi Kalimantan Tengah dengan Provinsi Kalimantan Barat khususnya Kabupaten Ketapang. Keberadaan jembatan tersebut merupakan salah satu hal penting yang dapat digunakan untuk meningkatkan aksesibilitas yang akan menuju ke dua provinsi tersebut. Pembangunan Jembatan Jelai merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian Kabupaten Sukamara.

Sektor perkebunan dan agroindustri skala besar dengan komoditas utama berupa kelapa sawit di Kabupaten Sukamara merupakan salah satu sektor strategis yang menopang pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan Kalimantan. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berjalan positif yang ditunjukkan dengan kontribusi atau nilai PDRB sektor tersebut menyumbang nilai paling tinggi di Kabupaten Sukamara.

b. Potensi Sumber Daya Alam

1. Topografi

Kemiringan lereng terbagi menjadi beberapa kelas yaitu datar (0-8 %), landai (8-15 %), agak curam (15-25 %), curam (25-40 %), dan sangat curam (≥ 40 %). Kondisi lereng pada suatu wilayah dapat dijadikan sebagai suatu potensi pengembangan juga sekaligus dapat menjadi kendala dalam melakukan kegiatan pembangunan. Wilayah Kabupaten Sukamara mempunyai profil wilayah secara topografi yang cukup beragam. Bagian selatan yaitu di Kecamatan Jelai dan Pantai Lunci memiliki kelas kemiringan lahan pada interval 0-2 % dengan klasifikasi datar. Pada bagian tengah, yaitu Kecamatan Sukamara didominasi kelas kemiringan lahan 2-15 % atau datar-landai. Kecamatan Balai Riam dan Permata Kecubung mempunyai kelas kemiringan lahan yang berada pada interval 2-15 % dan 15-40 %, dengan kelas datar-landai dan agak curam-curam. Kelas kemiringan lahan dan sebarannya pada Kabupaten Sukamara disajikan pada tabel dan gambar berikut.



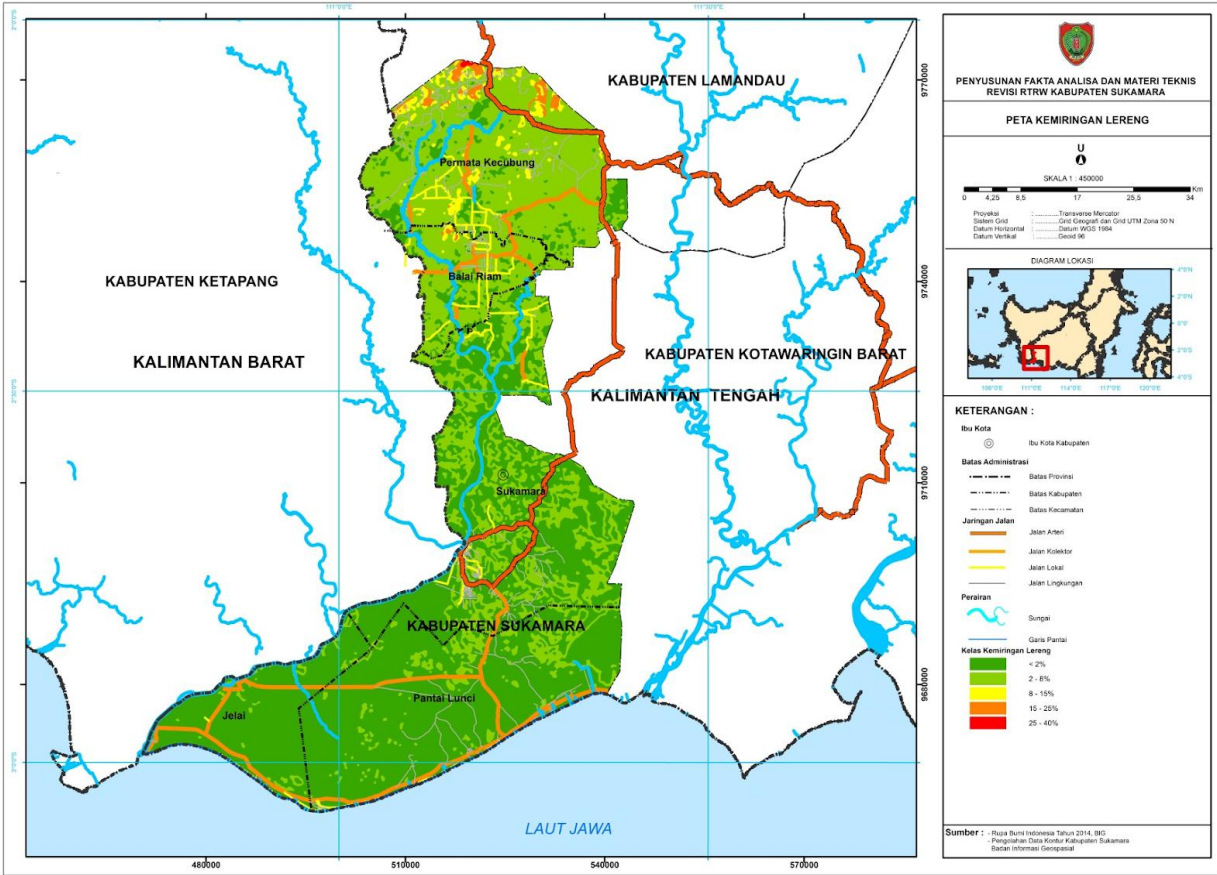


Tabel 2. 2 Kelas Kemiringan Lahan dan Sebarannya di Kabupaten Sukamara

No	Kecamatan	Kemiringan Lahan (%)					Luas (km ²)
		0-2	2-8	8-15	15-25	25-40	
1	Jelai	32.900	1.998	-	-	-	34.889
2	Pantai Lunci	78.745	9.487	-	-	-	88.233
3	Sukamara	61.306	37.887	-	-	-	99.193
4	Balai Riam	4.484	18.652	277	150	-	23.565
5	Permata Kecubung	9.141	63.982	37.887	2.252	134	80.126
Luas		186.578	132.008	4.894	2.403	134	326.018

Sumber: RTRW Kabupaten Sukamara Tahun 2012-2032

Gambar 2. 2 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Sukamara



Sumber: Peta RTRW Kabupaten Sukamara Tahun 2012-2032

Elevasi bentang wilayah Kabupaten Sukamara berada pada kisaran 0 – 100 meter di atas permukaan laut (dpl). Bagian selatan Kabupaten Sukamara, yaitu Kecamatan Jelai dan Pantai Lunci mempunyai elevasi 0–25 meter dpl, demikian juga bagian tengah yaitu Kecamatan Sukamara mempunyai elevasi yang relatif sama. Pada bagian utara yaitu Kecamatan Balai Riam dan Kecamatan Permata Kecubung, berada pada ketinggian/elevasi 25–100 meter dpl. Ketinggian tempat wilayah daerah yang berada pada bagian utara lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah bagian selatan, ini terlihat dari fisiografi wilayah bagian utara yang merupakan daerah berombak hingga gunung. Penjelasan lebih detail terkait dengan ketinggian wilayah Kabupaten Sukamara dan sebarannya disajikan pada tabel dan gambar berikut.

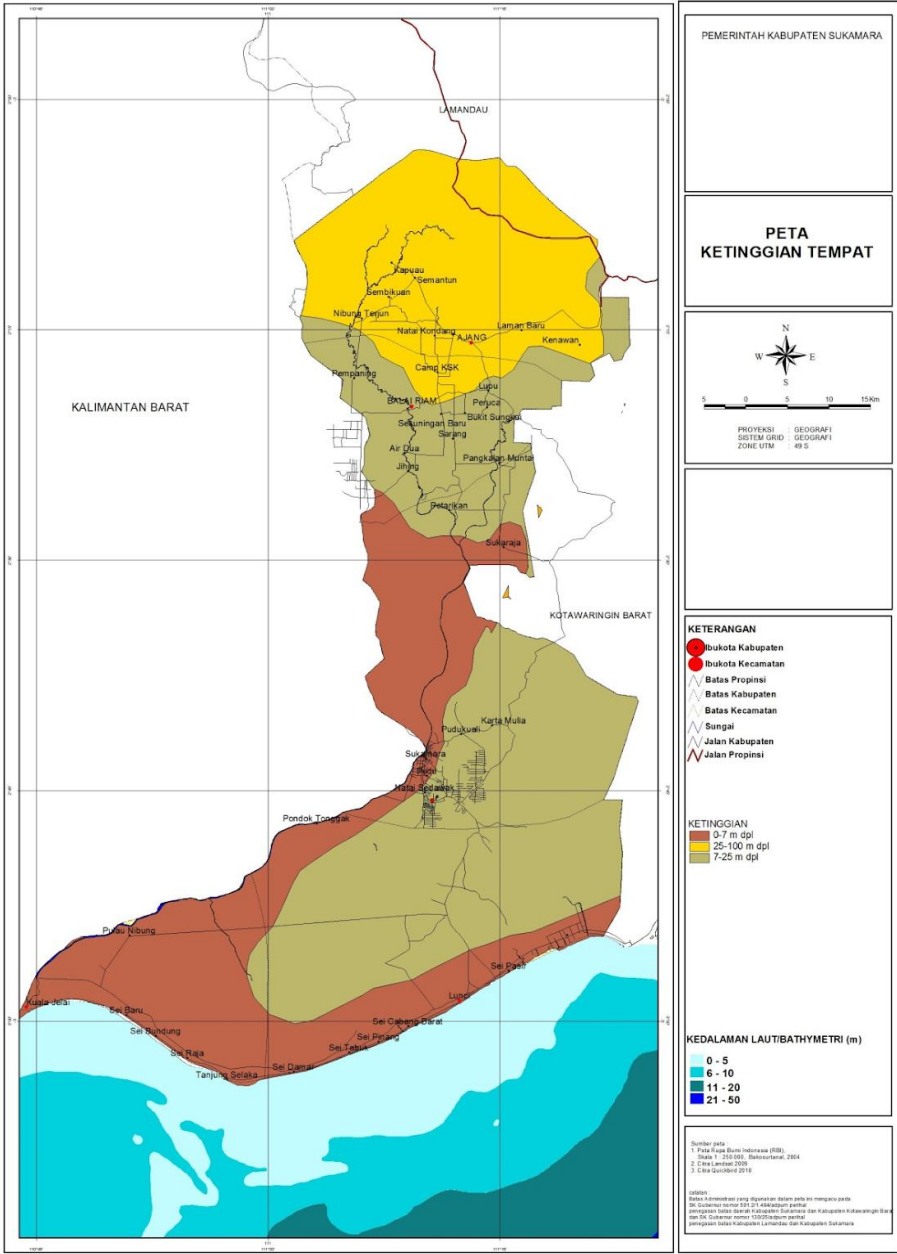


Tabel 2. 3 Ketinggian Wilayah dan Sebarannya di Kabupaten Sukamara

No	Kecamatan	Ketinggian Lahan (mdpl)				Luas	
		0-7	7-25	25-100	>100	Ha	(%)
1	Jelai	499,2	36,6	-	-	535,8	14
2	Pantai Lunci	270,8	741,6	-	-	1012	26,4
3	Sukamara	356,3	771	-	-	1127	29,5
4	Balai Riam	-	245,1	128,6	-	373,7	9,76
5	Permata Kecubung	-	92,8	685,1	-	777,9	20,3
Luas		1126	971	1729	0	3827	
(%)		29,4	25,4	45,2	0		100

Sumber: RTRW Kabupaten Sukamara Tahun 2012-2032

Gambar 2. 3 Peta Ketinggian Tempat (mdpl) Kabupaten Sukamara



Sumber: Peta RTRW Kabupaten Sukamara Tahun 2012-2032

2. Iklim

Kabupaten Sukamara yang berada di wilayah dataran rendah tentunya menjadi salah satu aspek yang mempengaruhi tipe iklim terutama pada unsur suhu udara dan curah hujan.





Suhu Udara

Suhu udara di Kabupaten Sukamara tergolong memiliki suhu yang sejuk, rata-rata suhu dalam setahun berkisar pada angka 27,22 derajat Celsius dan suhu dengan temperatur tersebut merata pada setiap bulan di Kabupaten Sukamara pada tahun 2024. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada berikut.

Tabel 2. 4 Suhu Udara di Kabupaten Sukamara Hasil Pengamatan Unsur Iklim menurut Bulan di Stasiun Meteorologi Iskandar Tahun 2024

Bulan	Suhu Udara (°C)		
	Minimum	Maksimum	Rata-Rata
Januari	20,10	34,90	26,93
Februari	20,40	35,30	27,21
Maret	21,40	35,30	27,39
April	23,30	35,20	27,76
Mei	21,80	34,70	27,82
Juni	21,40	34,40	27,13
Juli	20,80	33,80	26,78
Agustus	22,00	33,20	26,60
September	22,00	35,30	27,25
Oktober	22,20	35,30	27,71
November	22,80	34,80	27,14
Desember	22,80	35,70	26,90

Sumber: Kabupaten Sukamara Dalam Angka 2025

Curah Hujan

Berdasarkan data tahun 2024 diketahui Kabupaten Sukamara memiliki rata-rata curah hujan bulanan berkisar pada nilai 202,16 mm. Penjelasan lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 5 Kondisi Hujan di Kabupaten Sukamara Hasil Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Meteorologi Iskandar Tahun 2024

Bulan	Kondisi Hujan		
	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (hari)	Penyinaran Matahari (jam)
Januari	111,70	9	4,85
Februari	48,60	6	3,66
Maret	91,80	4	5,22
April	307,80	20	4,74
Mei	347,30	23	4,45
Juni	142,70	20	4,68
Juli	106,90	28	4,65
Agustus	162,30	31	5,40
September	171,00	30	6,22





Bulan	Kondisi Hujan		
	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (hari)	Penyinaran Matahari (jam)
Oktober	212,20	31	5,75
November	431,00	30	4,21
Desember	292,60	31	3,69

Sumber : Kabupaten Sukamara Dalam Angka 2025

Kondisi curah hujan di Kabupaten Sukamara pada masing-masing kecamatan berdasarkan luasannya dapat diketahui secara lebih detail pada tabel berikut ini.

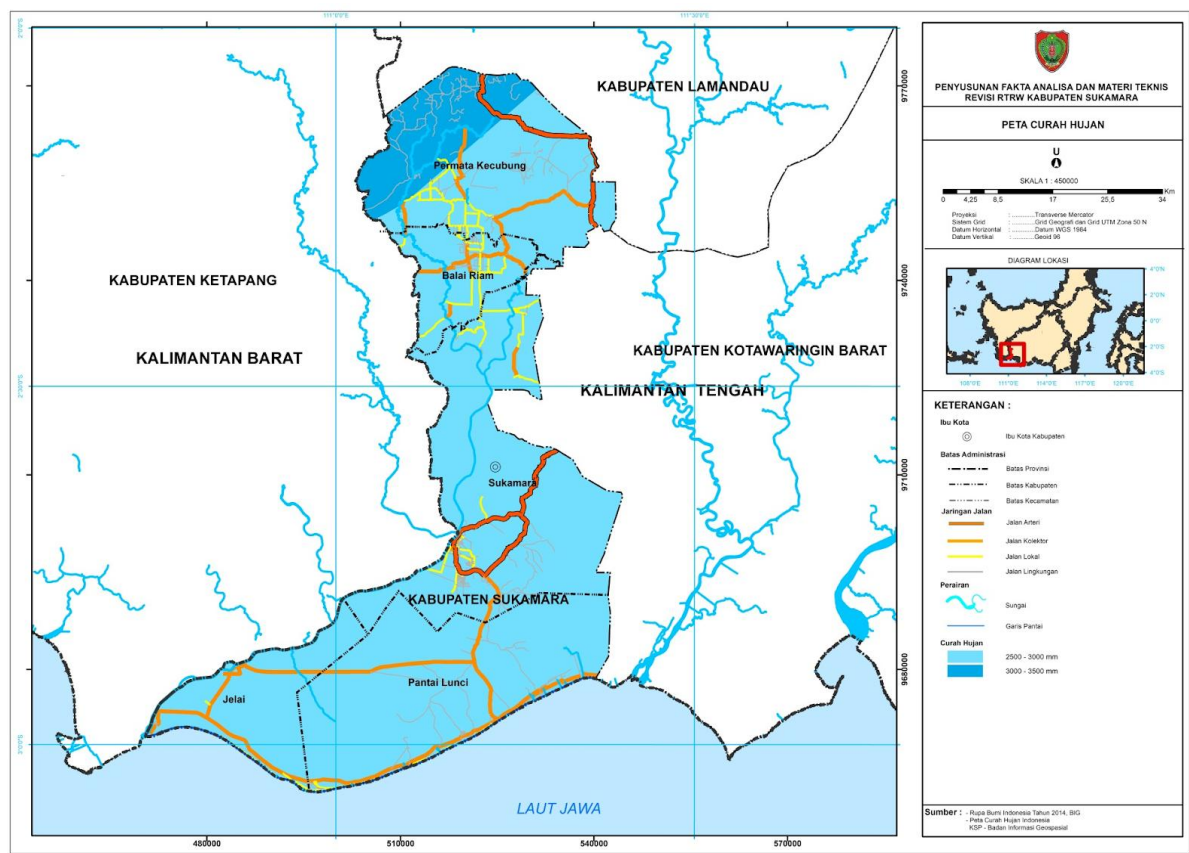
Tabel 2. 6 Luas Curah Hujan di Kabupaten Sukamara

Kecamatan	2500 - 3000 mm	3000 - 3500 mm	Luas
Balai Riam	23.544,04	-	23.544,04
Jelai	34.663,40	-	34.663,40
Pantai Lunci	88.226,54	-	88.226,54
Permata Kecubung	49.610,30	29.545,61	79.115,91
Sukamara	98.884,99	-	98.884,99
Total	294.929,26	29.545,61	324.474,86

Sumber: RTRW Kabupaten Sukamara Tahun 2012 - 2032

Secara spasial, sebaran rata-rata curah hujan tahunan dapat dilihat melalui gambar berikut.

Gambar 2. 4 Curah Hujan Kabupaten Sukamara



Sumber: Peta RTRW Kabupaten Sukamara Tahun 2012-2032



3. Geologi dan Tanah

Dalam konteks geologi regional, Kabupaten Sukamara berada di wilayah dataran rendah Kalimantan atau dikenal sebagai Cekungan Barito. Cekungan Barito secara fisik dibatasi oleh Pegunungan Schwaner di sisi utara dan Tinggian Meratus di sebelah timur. Secara umum proses geologi di wilayah tersebut dikontrol oleh proses sedimentasi di sungai, rawa, dan pesisir. Sebagai hasilnya, wilayah Kabupaten Sukamara didominasi oleh Endapan Rawa (Qar) dan Endapan Talus (Qs) berusia kuartar. Sementara, terdapat Formasi Dahor yang tersusun dari batupasir kuarsa putih kurang padat yang sebagian berupa pasir lepas, bersisipan lempung, lanau abu-abu, lignit dan limonit. Pada beberapa titik juga ditemukan sisipan kerakal kuarsa, kerakal batuan beku bersifat granitis dan batuan metasedimen. Formasi berasal dari era tersier dan diperkirakan berumur Miosen Akhir sampai Pliosen dengan lingkungan pengendapan paralik. Kondisi litologis dan proses tersebut secara langsung mempengaruhi kondisi pedologi dan tanah di Kabupaten Sukamara. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

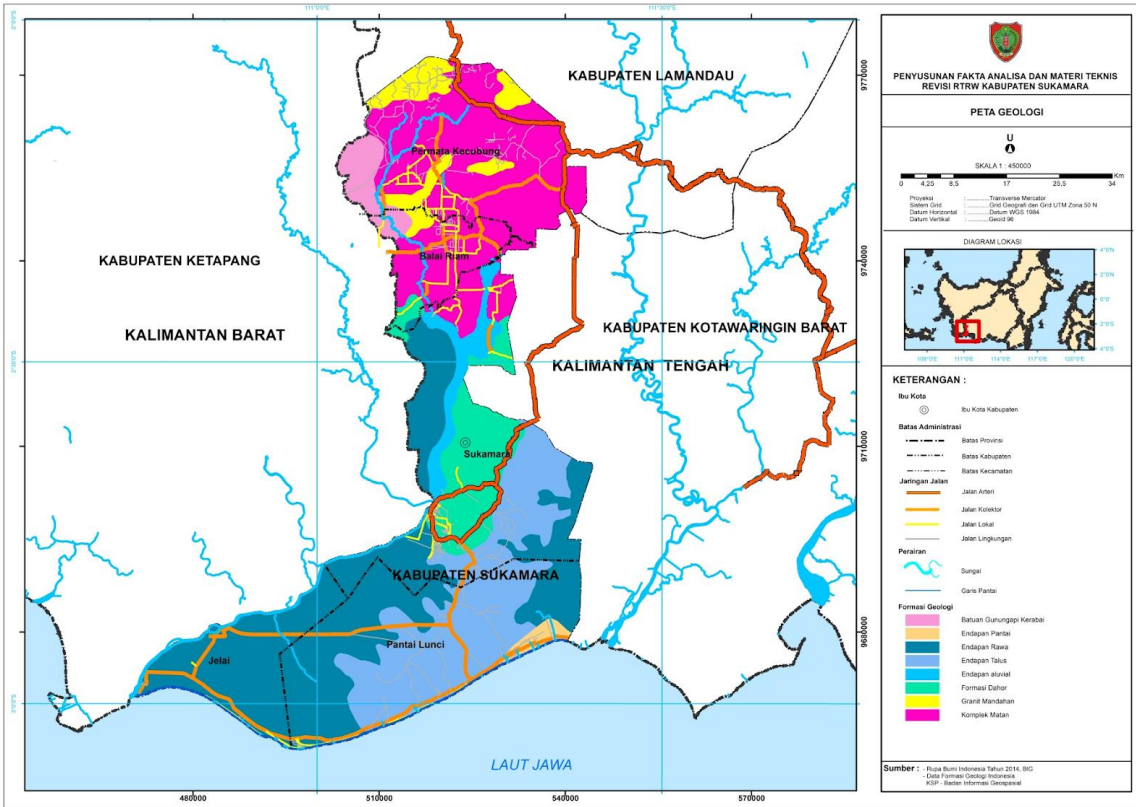
Tabel 2. 7 Formasi Geologi di Kabupaten Sukamara

Jenis Geologi	Balai Riam	Jelai	Pantai Lunci	Permata Kecubung	Sukamara	Luas Total
Batuan Gunungapi Kerabal	2.295,28	-	-	6.967,40	-	9.262,68
Endapan aluvial	16,00	18,13	69,83	-	10.226,55	10.330,52
Endapan Pantai	-	-	3.028,76	-	-	3.028
Endapan Rawa	298,23	34.645,27	41.747,55	-	31.426,06	108.117,11
Endapan Talus	-	-	43.380,38	-	21.556,17	64.936,55
Formasi Dahor	1.672,94	34.663,40	-	-	26.826,36	28.454,30
Granit Mandahan	1.328,71	-	-	12.163,70	-	13.492,42
Komplek Matan	17.977,86	-	-	60.024,80	8.849,85	86.852,51
Luas Total	23.544,03	-	88.226,53	79.155,91	98.885,00	324.474,86

Sumber: RTRW Kabupaten Sukamara Tahun 2012-2032



Gambar 2. 5 Peta Formasi Geologi di Kabupaten Sukamara



Sumber: Peta RTRW Kabupaten Sukamara Tahun 2012-2032

Wilayah Kabupaten Sukamara memiliki 5 jenis tanah yang berbeda. Jenis tanah yang ditemukan di Kabupaten Sukamara meliputi *Aquiq Dystrudepts*, *Psammentic Dystrudepts*, *Sapric Haplohemists*, *Sulfic Endoaquepts*, Tubuh Air, *Typic Dystrudepts*, *Typic Endoaquepts*, *Typic Haplaquepts*, *Typic Haplosaprists*, *Typic Hapludoxs*, *Typic Hapludults*, *Typic Kandiudoxs*, *Typic Kanhapludults*, *Typic Paleudults*, *Typic Quartzipsamments*, *Typic Rhodudults*, dan *Typic Sulfaquepts*.

Tabel 2. 8 Jenis Tanah di Kabupaten Sukamara

Jenis Tanah	Balai Riam	Jelai	Pantai Lunci	Permata Kecubung	Sukamara	Total
<i>Aquiq Dystrudepts</i>	-	-	-	11,03	1.092,57	1.103,60
<i>Belum Teridentifikasi</i>	658,82	201,4	20,55	10.829,57	2.679,86	14.390,20
<i>Sapric Haplohemists</i>	-	14.769,13	26.577,69	-	8.162,61	49.509,42
<i>Sulfic Endoaquepts</i>	-	2,38	-	-	20,46	22,84
<i>Sulfic Endoaquepts</i>	-	2.121,90	4.346,22	-	472,62	6.940,74
Tubuh air	-	24,72	-	-	23,84	48,56
<i>Typic Dystrudepts</i>	1.017,62	3.073,62	-	17.452,96	17.043,77	38.587,97
<i>Typic Endoaquepts</i>	135,66	-	-	158,77	1.942,98	2.237,41
<i>Typic Endoaquepts</i>	1.699,53	386,18	18.941,22	1.785,46	25.079,49	47.891,88
<i>Typic Haplaquods</i>	-	-	-	-	6.444,69	6.444,69
<i>Typic Haplosaprists</i>	-	-	-	-	5.213,22	5.213,22
<i>Typic Hapludoxs</i>	870,59	-	-	2.423,03	-	3.293,62
<i>Typic Hapludults</i>	5.925,90	-	-	21.218,97	3.041,96	30.186,83
<i>Typic Kandiudoxs</i>	-	-	-	-	124,14	124,14

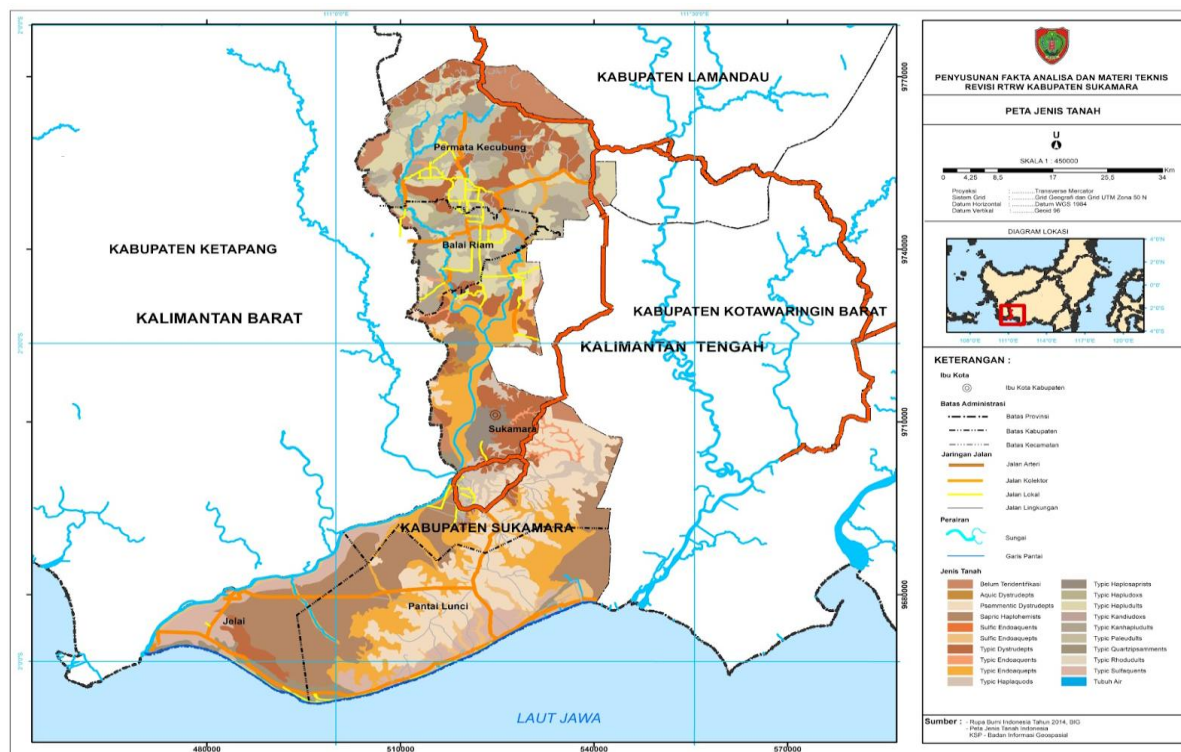


Jenis Tanah	Balai Riam	Jelai	Pantai Lunci	Permata Kecubung	Sukamara	Total
Typic Kanhapludults	8.250,73	-	-	9.353,04	590,24	18.194,01
Typic Paleudults	4.581,96	-	-	15.876,00	569,51	21.027,47
Typic Quartzipsammments	-	3.872,14	3.149,73	-	679	7.700,87
Typic Rhodudults	-	-	-	-	54,74	54,74
Typic Sulfaquents	-	10.211,94	10.568,93	-	1.110,13	21.891,01
Total	23.544,03	34.663,41	88.226,57	79.155,93	98.884,96	324.474,91

Sumber: RTRW Kabupaten Sukamara Tahun 2012-2032

Secara spasial sebaran jenis tanah di Kabupaten Sukamara dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2. 6 Peta Jenis Tanah di Kabupaten Sukamara



Sumber: Peta RTRW Kabupaten Sukamara Tahun 2012-2032

4. Penggunaan Lahan

Kabupaten Sukamara memiliki luas wilayah sebesar 3.827 km². Wilayahnya secara administratif terbagi menjadi 5 kecamatan. Kondisi fisiografis wilayahnya cukup bervariasi, mulai dari datar hingga berbukit sehingga penggunaan lahannya pun juga bervariasi. Penggunaan lahan pertanian dan perkebunan secara umum menjadi yang paling dominan untuk menggambarkan kondisi kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Kegiatan pertanian dan perkebunan masih dominan sehingga luasan lahan ini menjadi cukup dominan di antara penggunaan lahan lainnya.

Kondisi penggunaan lahan menunjukkan kecenderungan kegiatan ekonomi penduduk suatu wilayah. Dominasi penggunaan lahan memberikan gambaran



struktur ekonomi pada suatu wilayah. Data penggunaan lahan di Kabupaten Sukamara tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 9 Penggunaan Lahan Kabupaten Sukamara (Ha)

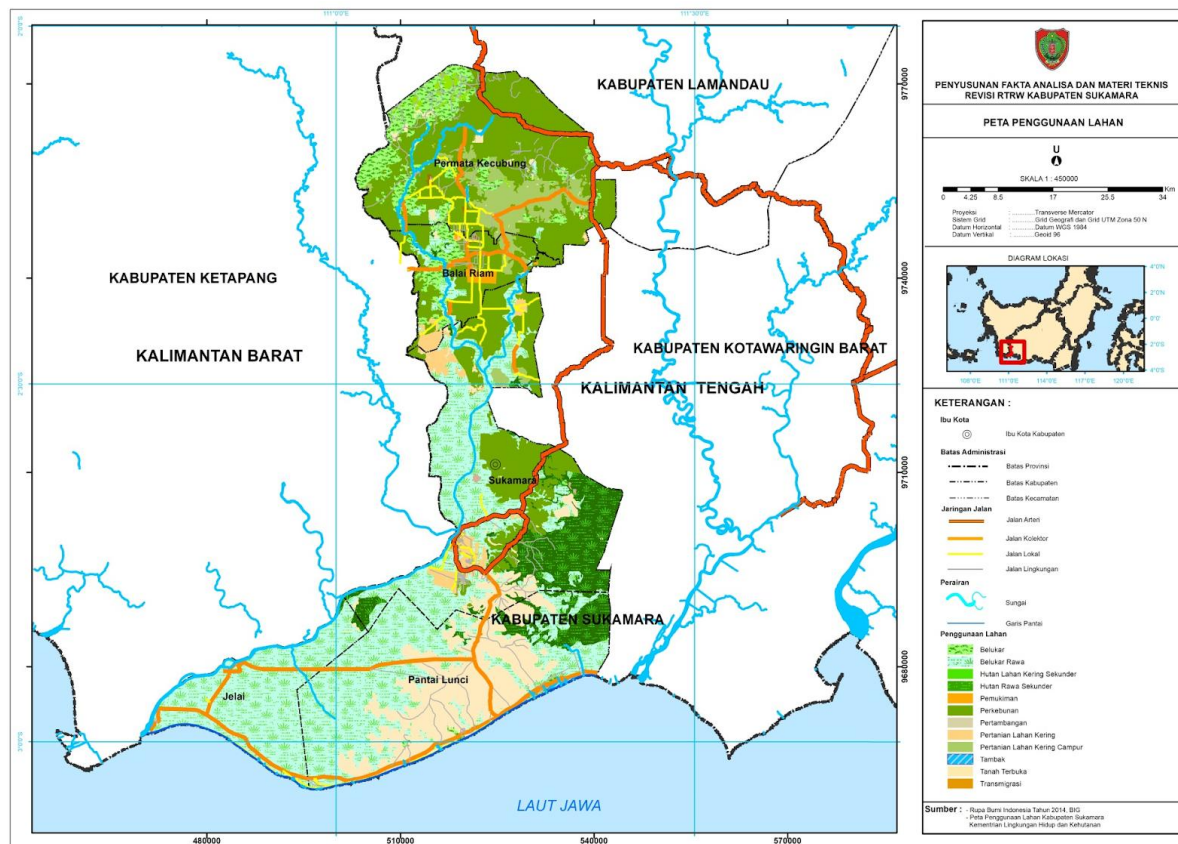
Penggunaan Lahan	Balai Riam	Jelai	Pantai Lunci	Permata Kecubung	Sukamara	Total
Belukar	4.085,19	-	1.421,93	14.880,63	59,25	20.447,00
Belukar rawa	26.008,42	34.232,23	45.701,10	647,23	38.683,73	121.872,70
Hutan lahan kering sekunder	-	-	-	1.112,42	-	1.112,42
Hutan rawa sekunder	198,18	407,39	7.395,74	-	19.928,40	27.929,70
Permukiman	1.197,51	-	-	122,11	701,21	2.020,82
Perkebunan	12.431,08	-	-	49.250,52	26.740,33	88.421,94
Pertambangan	-	-	16,19	14,61	187,68	218,48
Pertanian lahan kering	1.253,23	-	-	60,01	5.727,42	7.040,67
Pertanian lahan kering campur	1.404,89	-	-	11.529,81	1.047,04	13.981,74
Tambak	-	-	391,75	-	-	391,75
Tanah terbuka	160,08	125,95	33.299,18	1.295,45	5.822,60	40.703,25
Transmigrasi	193,42	-	-	253,21	-	446,63
Total	23.532,01	34.765,57	88.225,88	79.166,00	98.897,65	324.587,11

Sumber: RTRW Kabupaten Sukamara Tahun 2012-2032

Penggunaan lahan di Kabupaten Sukamara cenderung lebih didominasi oleh lahan pertanian dibandingkan dengan non pertanian seperti yang dapat dilihat secara lebih detail pada gambar berikut.



Gambar 2. 7 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Sukamara



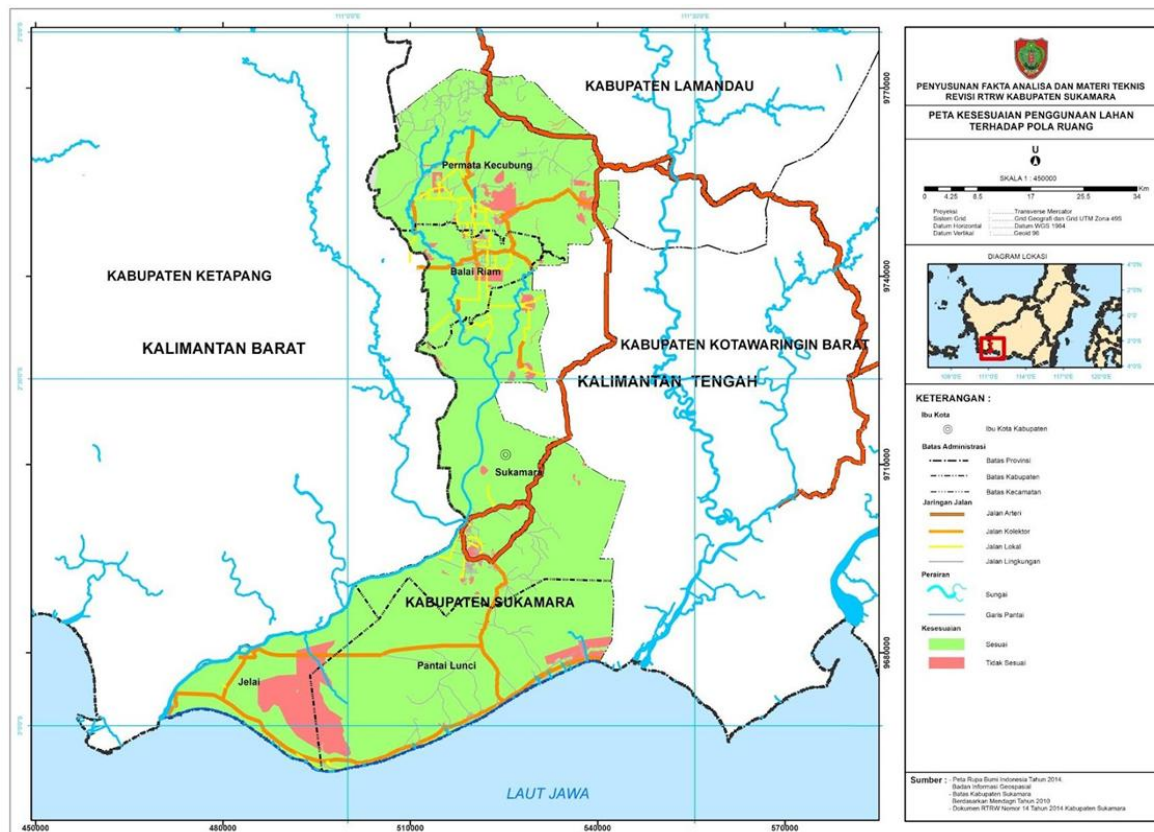
Sumber: Peta RTRW Kabupaten Sukamara Tahun 2012-2032

Penggunaan lahan pada dasarnya sudah diatur peruntukannya pada RTRW. Namun, dalam praktiknya banyak kasus penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan aturan RTRW. Hal tersebut karena lahan bersifat sangat dinamis sehingga rawan terjadinya penyimpangan. Hal tersebut terjadi pada perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Sukamara yang tidak semuanya sesuai dengan rencana pola ruang.

Berdasarkan hasil analisis *overlay* antara peta penggunaan lahan 2017 dengan rencana pola ruang Kabupaten Sukamara menunjukkan bahwa kondisi penggunaan lahan tersebut yang sesuai dengan RTRW memiliki luas sebesar 298.525,66 Ha, sedangkan luasan yang tidak sesuai yakni sebesar 25.041,37 Ha. Hal ini menandakan bahwa pola ruang Kabupaten Sukamara dan penggunaan lahan 2017 memiliki kesesuaian sebesar 92,26%. Kondisi ini merupakan kondisi yang baik terkait pelaksanaan rencana pola ruang di Kabupaten Sukamara, namun masih perlu ditingkatkan kesesuaian antara pola ruang dengan kondisi *eksisting*. Berdasarkan peta, dapat dilihat bahwa luasan ketidaksesuaian yang besar berada di Kabupaten Sukamara bagian Selatan. Pada gambar berikut tersaji peta kesesuaian penggunaan lahan terhadap pola ruang.



Gambar 2. 8 Peta Kesesuaian Penggunaan Lahan terhadap Pola Ruang Kabupaten Sukamara



Sumber: Peta RTRW Kabupaten Sukamara Tahun 2012-2032

5. Geohidrologi dan Hidrologi Permukaan

Kabupaten Sukamara berada pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Jelai yang memiliki lebih dari 40 anak sungai. Sedangkan dilihat dari kondisi drainase permukaan, Kabupaten Sukamara memiliki 3 kawasan yaitu :

- a. Daerah tidak pernah tergenang,
- b. Daerah tergenang secara periodik, dan
- c. Daerah tergenang secara terus menerus, yaitu sebagian di daerah Kecamatan Jelai dan sebagian di daerah Kecamatan Sukamara.

Terdapat 2 (dua) Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Sukamara, yaitu, DAS Jelai dengan panjangnya 209,22 km dan DAS Mapam dengan panjang 120,70 km (BPS Kabupaten Sukamara, 2024).

Terdapat beberapa sungai yang melintasi Kabupaten Sukamara. Sungai yang paling panjang dan terdalam yaitu Sungai Jelai yang memiliki panjang 209,2 km dengan kedalaman 8 m dimana Sungai Jelai melintasi kelurahan Kuala Jelai, Desa Pulau Nibung, dan Kelurahan Mendawai. Sedangkan Sungai Mapam dengan panjang 120,7 km dan kedalaman 5 m melalui Desa Air Dua, Balai Riam, Jihing, dan Petarikan. Sungai Riam dan Sungai Bila memiliki panjang yang sama yaitu 50 km dengan kedalaman yang sama juga yaitu 4 m. Akan tetapi, keduanya berbeda lokasi. Dimana Sungai Riam melalui hanya Desa Balai Riam, sedangkan Sungai Bila melalui Desa





Ajang, Laman Baru, dan Lupu Peruca yang selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 10 Nama-nama Sungai yang melintasi Wilayah Kabupaten Sukamara 2023

No	Nama Sungai	Panjang (km)	Kedalaman (m)	Desa/Kelurahan yang Dilalui
1	Sungai Jelai	209,2	8	Kuala Jelai, Pulau Nibung, Mendawai
2	Sungai Riam	50,0	4	Balai Riam
3	Sungai Bila	50,0	4	Ajang, Laman Baru, Lupu Peruca
4	Sungai Mapam	120,7	5	Air Dua, Balai Riam, Jihing, Petarikan

Sumber : Sukamara Dalam Angka, 2025

Selain secara kuantitas, kualitas air di Kabupaten Sukamara juga diperhatikan dengan mengacu pada Kisaran Status Mutu Air Sungai berdasarkan Kriteria Mutu Air Peraturan Pemerintah 82/2001 Kelas II. Status Kualitas Air di Kabupaten Sukamara Tahun 2024 yang teramati yaitu air sungainya, dimana untuk Sungai Jelai, Sungai Bila, dan Sungai Mapam statusnya memenuhi Baku Mutu dan Cemar Ringan. Selengkapnya disajikan tabel berikut.

Tabel 2. 11 Status Kualitas Air di Kabupaten Sukamara Tahun 2024

Jenis Air	Jumlah Titik Sampling	Kisaran Status Mutu Air Sungai berdasarkan Kriteria Mutu Air Peraturan Pemerintah 22/2021 Kelas II
Air Sumur		
1. Mendawai	1	-
2. Natai Sedawak	1	-
3. Padang	1	-
Air Laut		
1. Pantai Citra	1	-
2. Pantai Tanjung Nipah	1	-
Air Sungai		
1. Sungai Jelai	3	Memenuhi Baku Mutu dan Cemar Ringan
2. Sungai Riam	-	-
3. Sungai Bila	2	Memenuhi Baku Mutu dan Cemar Ringan
4. Sungai Mapam	3	Memenuhi Baku Mutu dan Cemar Ringan

Sumber : Sukamara Dalam Angka, 2025

Sebagian wilayah di selatan Kabupaten Sukamara termasuk ke dalam Cekungan Air Tanah (CAT) Palangkaraya-Banjarmasin dan memiliki potensi air tanah yang bervariasi. Pada wilayah CAT, terdapat wilayah air tanah yang tinggi dan berada di wilayah endapan dan juga dipengaruhi oleh kontur dan topografi. Berdasarkan hasil studi “Potensi Air Baku Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Lamandau” yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2004, potensi air tanah di Kabupaten Sukamara terbagi menjadi 3 zona untuk potensi air tanahnya yaitu :

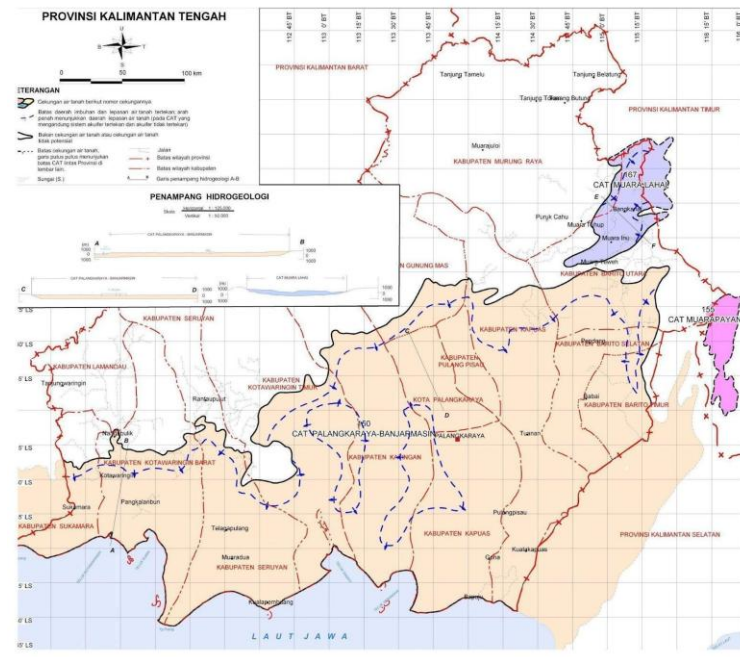
1. Potensi air tanah sangat tinggi, umumnya terletak pada daerah sepanjang sungai besar yaitu: Sungai Jelai. Potensi air yang besar ini terletak dari bantaran sungai sampai beberapa kilometer dari bantaran sungai sebagian Barat dan Timur.





2. Potensi air tanah tinggi, yang terdapat setelah daerah potensi air tanah sangat tinggi berangsur-angsur potensi air tanah berkurang sampai potensi air tanah yang tinggi.
3. Potensi air tanah rendah dimana merupakan daerah yang agak menjauhi sungai-sungai besar atau diantara dua sungai dan dataran selatan dari Pegunungan Schwarner.

Gambar 2. 9 Peta Sebaran Cekungan Air Tanah (CAT) Kalimantan Tengah



Sumber: [https://pamsimas.pu.go.id/data-aplikasi/data-peta/#iLightbox\[5f80d2eee46e7f24c66\]/0](https://pamsimas.pu.go.id/data-aplikasi/data-peta/#iLightbox[5f80d2eee46e7f24c66]/0)

Lingkungan Hidup Berkualitas

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah suatu ukuran yang menggambarkan kualitas dan keberlanjutan lingkungan hidup suatu wilayah. Dalam hal ini, IKLH mencakup beberapa parameter seperti Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Setiap parameter memiliki target yang ditetapkan, dan capaian diukur untuk menilai sejauh mana kualitas lingkungan hidup suatu wilayah memenuhi standar yang ditetapkan.

Indeks Kualitas Air (IKA) adalah hasil analisis perhitungan dari parameter pemantauan kualitas air sungai yang ada di Kabupaten Sukamara. Berdasarkan hasil pemantauan tersebut Kabupaten Sukamara memiliki kondisi kualitas air yang masih di bawah target yang ditetapkan yaitu sebesar 65. Pada tahun 2019, IKA di Kabupaten Sukamara adalah 57,8, berturut-turut mencapai 56,67 pada tahun 2020. 58,75 pada tahun 2021, 61,07 pada tahun 2022. 65,36 pada tahun 2023, dan 57,69 pada tahun 2024.

Kabupaten Sukamara memiliki kualitas udara yang cenderung menurun dari tahun ke tahun. Pemantauan kualitas udara di Sukamara dilakukan berdasarkan titik lokasi yang sudah ditentukan. Pada tahun 2019, kualitas udara di Kabupaten

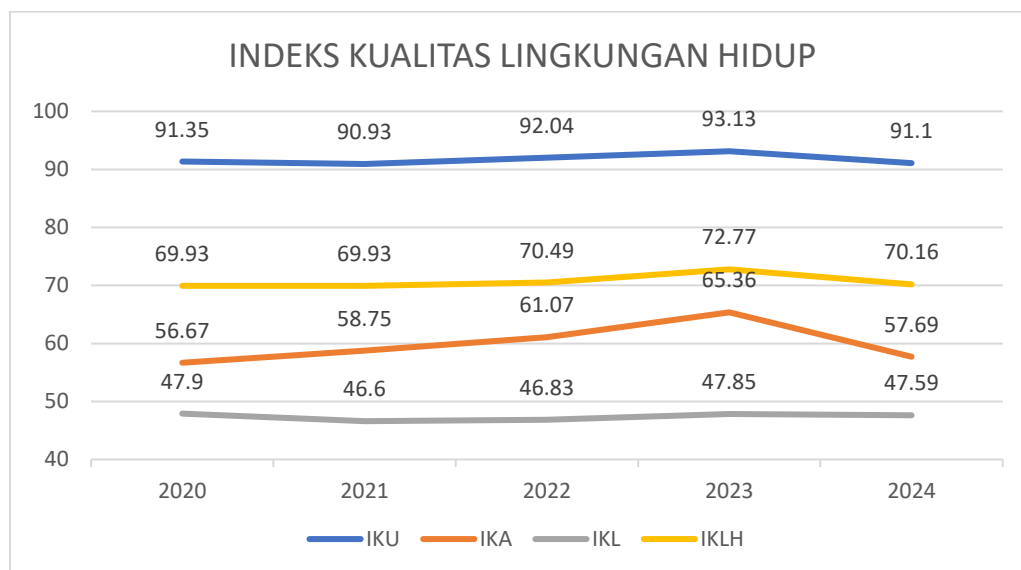


Sukamara adalah 91,35. Sementara itu di tahun 2021 menjadi 90,93, pada tahun 2022 meningkat menjadi 92,04. pada tahun 2023 dengan nilai 93,13 dan 91,10 pada tahun 2024. Hal ini disebabkan adanya penurunan kualitas udara yang bersumber dari polusi serta aktivitas manusia. Akan tetapi, sumber pencemaran udara juga dapat disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Kabupaten Sukamara memiliki lahan gambut yang cukup luas sehingga sangat rawan menurunkan kualitas udara akibat kabut asap yang dihasilkan.

Indeks Kualitas Lahan (IKL) adalah tingkat tutupan lahan bervegetasi Kabupaten Sukamara. Berdasarkan hasil perhitungan yang dimulai pada tahun 2019, diketahui bahwa kualitas lahan cenderung mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari tahun 2019 dengan nilai 27,76, Tahun 2020 dengan nilai IKL sebesar 47,9. Tahun 2021 sebesar 46,6. Tahun 2022 sebesar 46,83. Tahun 2023 sebesar 47,85 dan Tahun 2024 sebesar 47,59.

Dalam empat tahun terakhir, Kabupaten Sukamara secara konsisten memantau dan menilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai ukuran holistik untuk keberlanjutan lingkungan. Pada tahun 2019, IKLH mencapai skor 53, mencerminkan situasi lingkungan saat itu. Dalam dua tahun berikutnya, terlihat peningkatan berkelanjutan dengan nilai IKLH berturut-turut mencapai 68.62 pada tahun 2020, 69.93 pada tahun 2021, 70.49 pada tahun 2022, 72,77 pada tahun 2023 dan 70,16 pada tahun 2024.

Gambar 2. 10 Grafik Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukamara



Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029

2. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Sumber utama sampah di Kabupaten Sukamara meliputi sampah yang berasal dari pemukiman penduduk dengan kepadatan yang beragam, pasar tradisional yang menjadi pusat aktivitas ekonomi lokal, dan sektor industri dengan potensi dampak





yang signifikan terhadap aliran sampah. Infrastruktur pengelolaan sampah di Kabupaten Sukamara, sebagaimana terjadi di banyak daerah di Indonesia, menghadapi tantangan dalam menciptakan sistem yang efisien dan berkelanjutan. Keterbatasan fasilitas pengolahan dan daur ulang menciptakan kesenjangan dalam penanganan sampah, dan kurangnya tempat pembuangan akhir yang terkelola dengan baik membuka potensi pencemaran air dan udara.

Berdasarkan data indikator kinerja persampahan di Kabupaten Sukamara, diketahui bahwa secara bertahap Pemerintah Kabupaten Sukamara telah berhasil meningkatkan persentase jumlah sampah yang tertangani dari tahun ke tahun. Walaupun belum mencapai target yang dicanangkan, capaian tersebut telah membuktikan bahwa adanya upaya yang terus dilakukan dalam penanganan sampah. Pada tahun 2023, target persentase jumlah sampah yang tertangani yang ingin dicapai adalah 90%, akan tetapi capaian yang dicapai adalah 75%. Dalam hal ini masih terdapat *gap* yang perlu dikejar untuk segera dapat terpenuhi dari pemerintah daerah khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukamara.

Tabel 2. 12 Indikator Kinerja Persampahan Kabupaten Sukamara

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023
Timbulan sampah yang ditangani	ton	9,810.32	9,426.88	10,210.13	9,122.96	10,626.76	9,108.42	11,060.94	9.133,67*
Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	%	-	1.02	-	1.10	-	1.06	-	1,29*
Persentase cakupan area pelayanan	%	80	73.44	85	50	90	61.5	95	75*
Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	82	73.44	85	50	87	61.5	90	75*
Operasional TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	unit	1	1	1	1	1	1	1	1

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029

c. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

2. Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim

Nilai Indeks Kapasitas Adaptif, Indeks Kerentanan dan Sensitivitas, Nilai Kerentanan, Risiko Banjir dan Risiko Kekeringan Kabupaten Sukamara Tahun 2018 berdasarkan data SIDIK (Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 2.14. Berdasarkan perhitungan dan analisis data SIDIK tersebut, Indeks Kerentanan di Kabupaten Sukamara termasuk dalam kuadran 3, yaitu sedang.



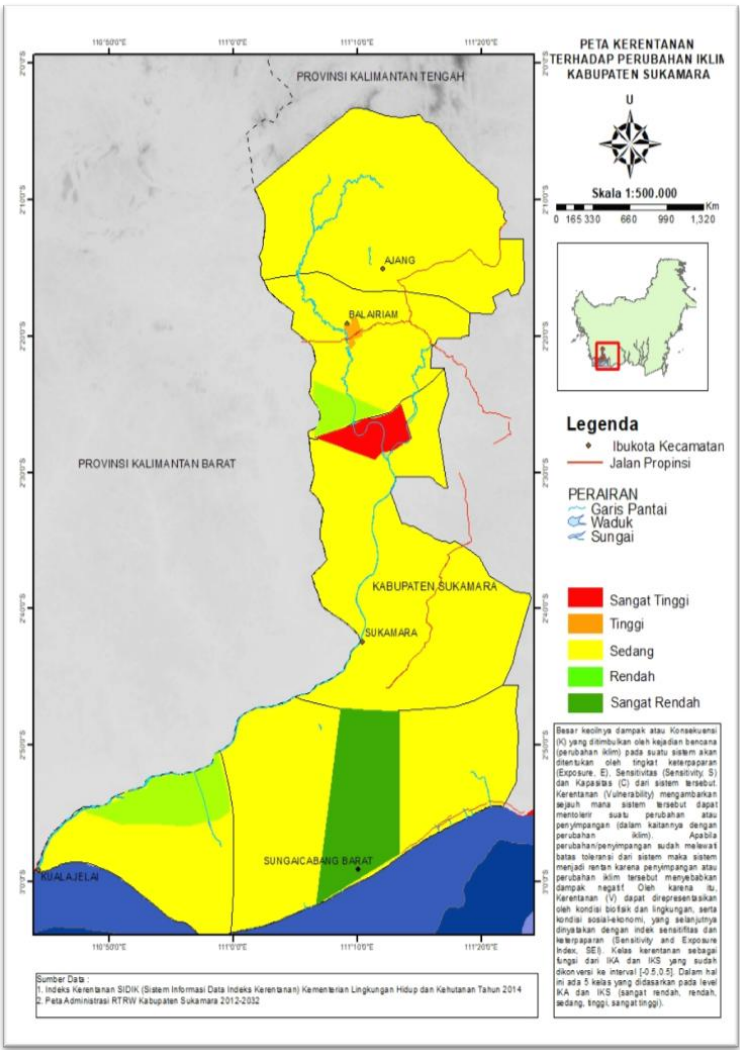
Tabel 2. 13Indeks Kerentanan Kabupaten Sukamara

Kecamatan	IKA	IKS	Kerentanan	Risiko Banjir	Risiko Kering
Jelai	0,567	0,4195	3	3	3
Pantai Lunci	0,58496	0,488	3	3	3
Sukamara	0,57604	0,4285	3	3	3
Balai Riam	0,54902	0,447	3	3	3
Permata Kecubung	0,56486	0,4125	3	3	3

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029

Peta kerawanan terhadap perubahan iklim di Kabupaten Sukamara berdasarkan data SIDIK dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2. 11 Peta Kerentanan terhadap Perubahan Iklim Kabupaten Sukamara



Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029

Berdasarkan data yang dihimpun, dampak perubahan iklim yang ada di Kabupaten Sukamara menimbulkan fenomena yang juga merubah kesinambungan di alam. Fenomena tersebut ada yang memiliki dampak besar dan juga dampak kecil.



Beberapa kejadian di Kabupaten Sukamara yang dipengaruhi oleh dampak perubahan iklim adalah sebagai berikut.

- 1) Terjadinya kenaikan muka air laut, gelombang tinggi, dan abrasi yang terjadi di wilayah Pantai Lunci dan Jelai.
- 2) Salah satu contoh dampak perubahan iklim dalam sektor pertanian di Provinsi Kalimantan Tengah adalah akibat adanya serangan hama belalang kembara (*Locusta migratoria*). Ledakan serangan hama belalang kembara yang terjadi dalam siklus setiap 10 tahun sekali. Hal ini dapat diamati dalam kejadian serangan belalang yang terjadi sudah 3 periode yaitu pada tahun 1994, 2004, dan 2014. Serangan hama belalang ini terjadi pada daerah Sampit, Kotawaringin, Pangkalan Bun, Lamandau dan Sukamara. Hampir semua lokasi yang menjadi serangan belalang kembara tersebut berada di wilayah pertanian.
- 3) Fenomena ikan-ikan yang mati dan mengambang di sungai besar ketika terjadinya hujan pertama di saat peralihan musim. Hal ini disebabkan oleh tingginya kadar asam yang terlarut di sungai, sehingga menyebabkan ikan-ikan tidak dapat hidup di air yang memiliki pH rendah. Kebakaran hutan dan lahan akibat musim kemarau yang panjang.

3. Indeks Risiko Bencana

Dampak risiko lingkungan hidup di Sukamara mencakup dua aspek krusial: kebencanaan dan kualitas lingkungan hidup. Kebencanaan lingkungan, seperti banjir dan kebakaran lahan, dapat disebabkan atau diperparah oleh kondisi persampahan yang tidak terkendali. Selain itu, kualitas lingkungan hidup di daerah ini dapat terancam oleh pencemaran air dan udara akibat manajemen sampah yang tidak efektif. Dalam konteks kebencanaan, tumpukan sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat menjadi pemicu atau memperburuk risiko banjir. Pembuangan sampah yang sembarangan, terutama di area drainase dan sungai, dapat menyumbat aliran air dan mengakibatkan genangan air yang meningkatkan potensi banjir. Lebih lanjut, ketidakmampuan sampah untuk menyerap air hujan dapat menghasilkan aliran permukaan yang lebih tinggi, meningkatkan risiko longsor terutama dalam kondisi tanah yang jenuh air.

Indeks Risiko Bencana Kabupaten Sukamara tahun 2020 di angka 144,40 masuk dalam kategori Risiko tinggi, tahun 2021 di angka 144,40, di tahun 2022 di angka 140,33 masuk dalam kategori Sedang, di tahun 2023 di angka 130,94 masuk dalam kategori sedang dan di tahun 2024 di angka 122,61 di kategori Risiko sedang.





4. Kebencanaan

Berdasarkan data BPS Kabupaten Sukamara, dapat diketahui bahwa bencana alam yang terjadi di Kabupaten Sukamara pada beberapa tahun terakhir adalah banjir dan kebakaran lahan. Tabel berikut menunjukkan banyaknya kejadian bencana alam banjir di Kabupaten Sukamara.

Tabel 2. 14 Jumlah Desa/Kelurahan yang Mengalami Bencana Alam Banjir di Sukamara Tahun 2020-2021 dan 2024

No	Kecamatan	2020	2021	2024
1	Jelai	2	-	1
2	Pantai Lunci	2	1	1
3	Sukamara	1	1	3
4	Balai Riam	-	2	4
5	Permata Kecubung	4	-	2
Sukamara		9	4	11

Sumber: Kabupaten Sukamara dalam Angka Tahun 2025

Tabel 2. 15 Luas Kawasan Rawan Bencana Kebakaran dan Banjir (m²)

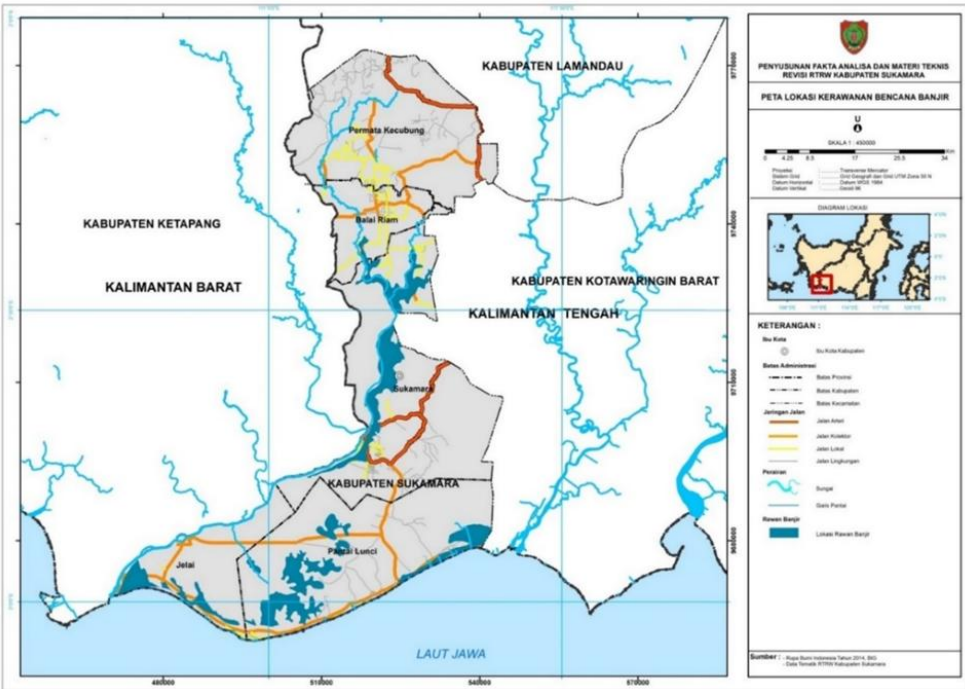
Kecamatan	Kerawanan Bencana Kebakaran	Kerawanan Bencana Banjir
Balai Riam	244,21	458,83
Jelai	17.667,80	3.892,17
Pantai Lunci	33.319,48	14.182,80
Sukamara	14.649,91	11.734,86
Grand Total	65.881,38	30.268,66

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa wilayah di Kabupaten Sukamara termasuk pada kawasan rawan bencana kebakaran dan banjir. Namun, Kabupaten Sukamara mayoritas memiliki kerawanan terhadap bencana kebakaran. Kecamatan Pantai Lunci sebagai daerah yang banyak memiliki kerawanan bencana kebakaran dan banjir. Sedangkan Kecamatan Balai Riam termasuk daerah yang memiliki sedikit kerawanan terhadap bencana kebakaran dan banjir.

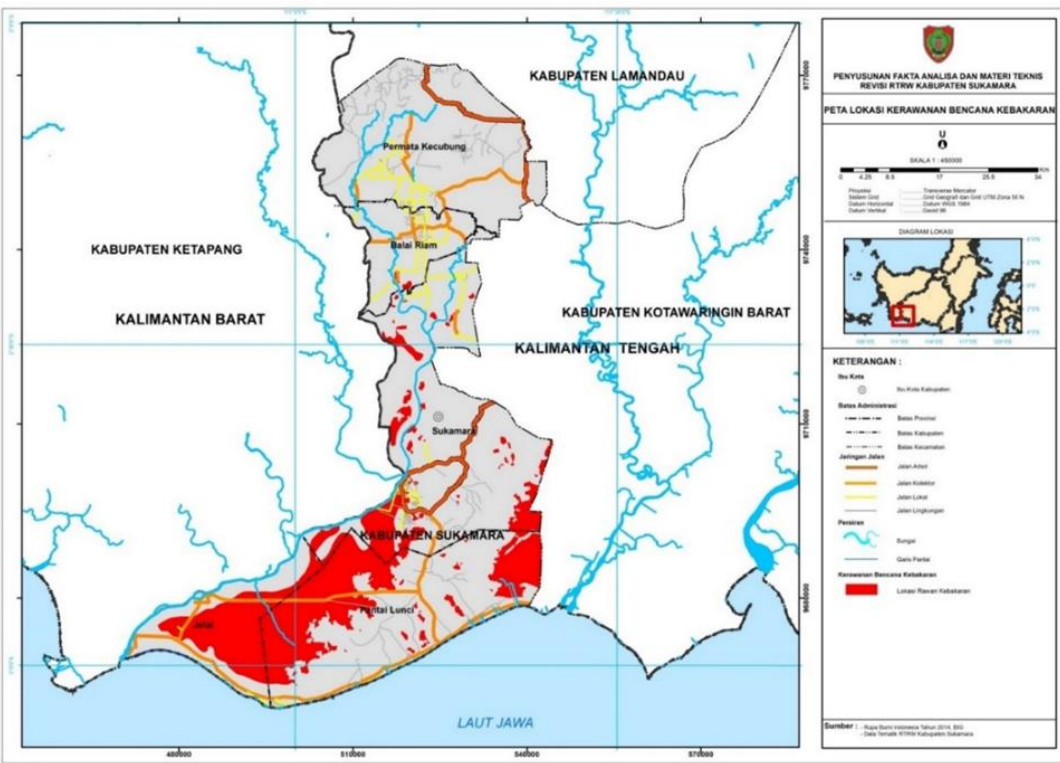


Gambar 2.12 Peta Kerawanan Bencana Banjir Kabupaten Sukamara



Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029

Gambar 2.13 Peta Kerawanan Bencana Kebakaran di Kabupaten Sukamara



Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029





d. Demografi

1. Jumlah dan Persebaran Penduduk

Kabupaten Sukamara merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah, terdiri dari 5 Kecamatan dan 32 desa/kelurahan. Sensus Penduduk pada tahun 2023 mencatat penduduk Kabupaten Sukamara pada tahun 2024 sebanyak 67.810 jiwa. Persebaran penduduk Kabupaten Sukamara selama 5 tahun terakhir dari tahun 2020 hingga 2024 (tabel 2.18) menunjukkan terdapat peningkatan selama 3 tahun dari 2020-2022. Kemudian pada tahun 2023 hingga 2024, jumlah penduduk yang tersebar di Kabupaten Sukamara mengalami penurunan sedikit di tahun 2023 kemudian naik kembali di tahun 2024. Pada tahun 2024 jumlah penduduk tertinggi di Kecamatan Sukamara dengan jumlah penduduk sebanyak 33.730 jiwa atau sekitar 49,74 persen dari total penduduk Kabupaten Sukamara. Hal ini sangat wajar karena Kecamatan Sukamara merupakan Ibukota Kabupaten. Ketersediaan fasilitas umum yang memadai merupakan salah satu penyebab penduduk terkonsentrasi di Kecamatan Sukamara.

Kecamatan Balai Riam memiliki jumlah penduduk sebesar 11.690 jiwa di tahun 2024, berikutnya adalah Kecamatan Permata Kecubung (10.730 jiwa), Kecamatan Pantai Lunci (6.040 jiwa). Kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil yaitu Kecamatan Jelai sebesar 5.620 jiwa atau sekitar 8,29 persen dari total penduduk Kabupaten Sukamara. Kondisi tersebut dapat menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kabupaten Sukamara untuk dapat merencanakan persebaran penduduk yang merata dengan cara peningkatan fasilitas-fasilitas umum yang memadai di seluruh kecamatan sehingga penduduk tidak terkonsentrasi di Ibukota Kabupaten. Hal ini untuk menghindari terbentuknya kota yang tidak teratur di masa yang akan datang akibat daya dukung lahan di Ibukota Kabupaten yang semakin rendah. Data persebaran penduduk per Kecamatan di Kabupaten Sukamara tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 16 Jumlah dan Distribusi/Persebaran Penduduk Kabupaten Sukamara berdasarkan Kecamatan Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024	Persentase Tahun 2024 (%)
1	Jelai	5.520	5.613	5.690	5.591	5.620	8,29
2	Pantai Lunci	5.867	6.348	6.070	5.990	6.040	8,91
3	Sukamara	30.893	30.752	32.410	32.969	33.730	49,74
4	Balai Riam	10.624	10.739	11.350	11.403	11.690	17,24
5	Permata Kecubung	10.560	10.900	11.320	10.680	10.730	15,83
Kab. Sukamara		63.464	64.352	66.850	66.633	67.810	100

Sumber: Kabupaten Sukamara Dalam Angka 2021-2025



2. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk suatu wilayah dapat diklasifikasikan dalam beberapa ukuran. Untuk mengukur tingkat lambat atau cepatnya pertumbuhan penduduk dapat digolongkan pada empat kategori, yaitu sangat lambat, lambat, cepat dan sangat cepat. Pertumbuhan penduduk kategori sangat lambat dengan laju pertumbuhan penduduk kurang dari 1 persen per tahun, sedangkan pertumbuhan penduduk kategori lambat dengan laju pertumbuhan penduduk antara 1-2 persen per tahun. Pertumbuhan penduduk kategori cepat dengan laju pertumbuhan penduduk di atas 2-3 persen per tahun dan pertumbuhan penduduk dikatakan sangat cepat dengan pertumbuhan penduduk besar dari 3 persen per tahun.

Pertumbuhan penduduk disebabkan oleh adanya kelahiran, dan migrasi baik imigrasi maupun emigrasi. Sampai dengan akhir tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Sukamara adalah sebesar 67.810 jiwa. Angka ini naik dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu 66.633 jiwa. Apabila dibanding tahun 2020, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sukamara adalah sebesar 1,78 persen, seperti tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 17 Data Jumlah Penduduk Tahun 2020-2024 dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2020-2024 Per Kecamatan di Kabupaten Sukamara

No	Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024	Laju Pertumbuhan Penduduk (2020-2024) (%)
1	Jelai	5.520	5.613	5.690	5.591	5.620	0,44
2	Pantai Lunci	5.867	6.348	6.070	5.990	6.040	0,81
3	Sukamara	30.893	30.752	32.410	32.969	33.730	2,37
4	Balai Riam	10.624	10.739	11.350	11.403	11.690	2,58
5	Permata Kecubung	10.560	10.900	11.320	10.680	10.730	0,42
Kab. Sukamara		63.464	64.352	66.850	66.633	67.810	1,78

Sumber: Kabupaten Sukamara Dalam Angka, 2021-2025

3. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk merupakan suatu indikator awal untuk menilai perkembangan wilayah, dan juga seluruh dampak yang ditimbulkannya. Wilayah dengan kepadatan tinggi biasanya berupa pusat permukiman penduduk, pusat kegiatan perekonomian, dan pusat suatu peradaban (Muta'ali, 2015). Kepadatan penduduk pada dasarnya merupakan jumlah penduduk yang menempati tiap satuan luas wilayah.

Jumlah penduduk Kabupaten Sukamara pada akhir tahun 2024 adalah 67.810 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Sukamara sebesar 33.730 jiwa atau sekitar 49,74 persen dari total penduduk Kabupaten Sukamara. Kepadatan penduduk Kabupaten Sukamara tahun 2024 adalah sebesar 18 jiwa per kilometer



persegi. Kecamatan terpadat terdapat di Kecamatan Sukamara sebesar 33 jiwa/km². Hal ini dikarenakan Kecamatan Sukamara merupakan pusat kegiatan pemerintahan di Kabupaten Sukamara sehingga penduduk lebih terkonsentrasi di lokasi tersebut. Sedangkan kecamatan dengan penduduk terjarang adalah Kecamatan Jelai yang hanya 7 jiwa/km². Secara lebih lengkap, Kepadatan penduduk Kabupaten Sukamara tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 18 Kepadatan Penduduk Kabupaten Sukamara Tahun 2024

No	Kecamatan	Luas		Penduduk		Kepadatan (Jiwa/km ²)
		km ²	%	Jiwa	%	
1	Jelai	796	20,80	5.620	8,29	7
2	Pantai Lunci	804	21,01	6.040	8,91	8
3	Sukamara	1028	26,86	33.730	49,74	33
4	Balai Riam	539	14,08	11.690	17,24	22
5	Permata Kecubung	660	17,25	10.730	15,83	16
Kab. Sukamara		3.827	100	67.810	100	18

Sumber : Kabupaten Sukamara Dalam Angka, 2025

Kepadatan penduduk Kabupaten Sukamara yang didasarkan pada tahun sensus 2010 dan 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 19 Kepadatan Penduduk Kabupaten Sukamara berdasarkan Tahun Sensus 2010 dan 2020

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Penduduk (Jiwa)		Kepadatan (Jiwa/km ²)	
			2010	2020	2010	2020
1	Jelai	796	4.412	5.520	6	7
2	Pantai Lunci	804	4.846	5.867	6	7
3	Sukamara	1.028	19.623	30.893	19	30
4	Balai Riam	539	6.649	10.624	12	20
5	Permata Kecubung	660	9.422	10.560	14	16
Kab. Sukamara		3.827	44.952	63.464	12	17

Sumber: Kabupaten Sukamara Dalam Angka, 2011 dan 2021

4. Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Definisi dari penduduk dewasa adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas dan lebih atau kurang dari 15 tahun tetapi sudah kawin atau pernah kawin. Sedangkan anak-anak adalah penduduk yang berumur kurang dari 15 tahun dan belum kawin. Komposisi penduduk Kabupaten Sukamara masih didominasi oleh penduduk dengan usia dewasa yaitu penduduk berusia 15 tahun ke atas sekitar 75,36 persen dari jumlah penduduk seluruhnya. Sedangkan untuk kategori anak-anak berkisar 24,64 persen. Berdasarkan kategori umur, jumlah penduduk paling banyak berada di kategori umur 35-39 tahun. Hal ini antara lain terjadi karena banyaknya penduduk yang datang ke Kabupaten Sukamara yang merupakan usia kerja/produktif baik dari segi kinerja maupun reproduksi, terutama pekerja di sektor perkebunan kelapa sawit dan sektor pekerjaan lainnya maupun di sektor pemerintahan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pada tabel berikut tersaji data penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin pada periode tahun 2024.



Tabel 2. 20 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Tahun 2024

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin (sex)		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	0 - 4	3.080	2.910	5.990
2	5 - 9	2.740	2.770	5.500
3	10 - 14	2.670	2.560	5.220
4	15 - 19	2.830	2.620	5.450
5	20 - 24	3.020	2.770	5.780
6	25 - 29	3.040	2.900	5.940
7	30 - 34	3.090	2.780	5.860
8	35 - 39	3.020	2.990	6.010
9	40 - 44	3.020	2.590	5.610
10	45 - 49	2.540	2.250	4.790
11	50 - 54	2.150	1.750	3.900
12	55 - 59	1.630	1.290	2.920
13	60 - 64	1.140	920	2.060
14	65 - 69	720	590	1.300
15	70 - 74	400	380	770
16	75 +	340	360	700
Kab. Sukamara 2024		35.410	32.400	67.810
Kab. Sukamara 2023		34.850	31.790	66.630
Kab. Sukamara 2022		33.672	31.721	66.850
Kab. Sukamara 2021		32.513	29.749	64.352
Kab. Sukamara 2020		33.387	30.077	64.352
Kab. Sukamara 2019		-	-	63.464
Kab. Sukamara 2018		32.998	29.046	64.950
Kab. Sukamara 2017		31.773	28.002	62.044
Kab. Sukamara 2010		23.879	21.073	59.775

Sumber: Kabupaten Sukamara Dalam Angka 2025

Jumlah penduduk di Kabupaten Sukamara mayoritas didominasi oleh penduduk laki-laki di seluruh kecamatannya. Hal tersebut juga ditunjukkan dengan besarnya *sex ratio* di Kabupaten Sukamara yang menunjukkan seluruh kecamatan memiliki nilai *sex ratio* lebih dari 100, artinya di Kabupaten Sukamara jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan pada tahun 2023 dan tahun 2024.

Tabel 2. 21 Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Sex Ratio per Kecamatan
Tahun 2023 dan Tahun 2024

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Sex Ratio Tahun 2023	Sex Ratio Tahun 2024
		Laki-Laki	Perempuan			
1.	Jelai	2.941	2.752	5.693	107	107
2.	Pantai Lunci	3.091	2.978	6.069	101	100
3.	Sukamara	17.003	15.410	32.413	110	109
4.	Balai Riam	5.968	5.380	11.348	109	109
5.	Permata Kecubung	6.119	5.203	11.322	117	117
Kab Sukamara		35.122	31.723	66.845	110	109

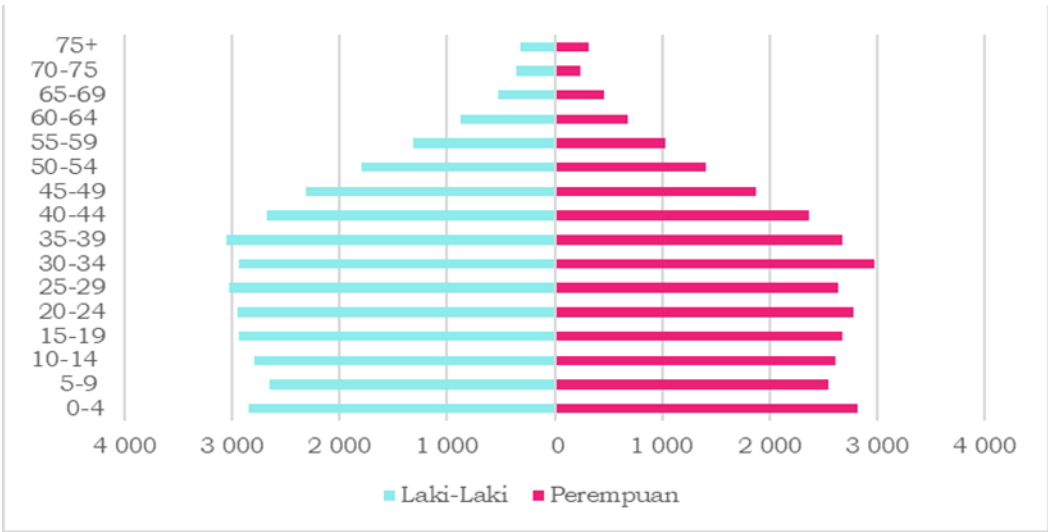
Sumber: Kabupaten Sukamara Dalam Angka 2024 dan 2025





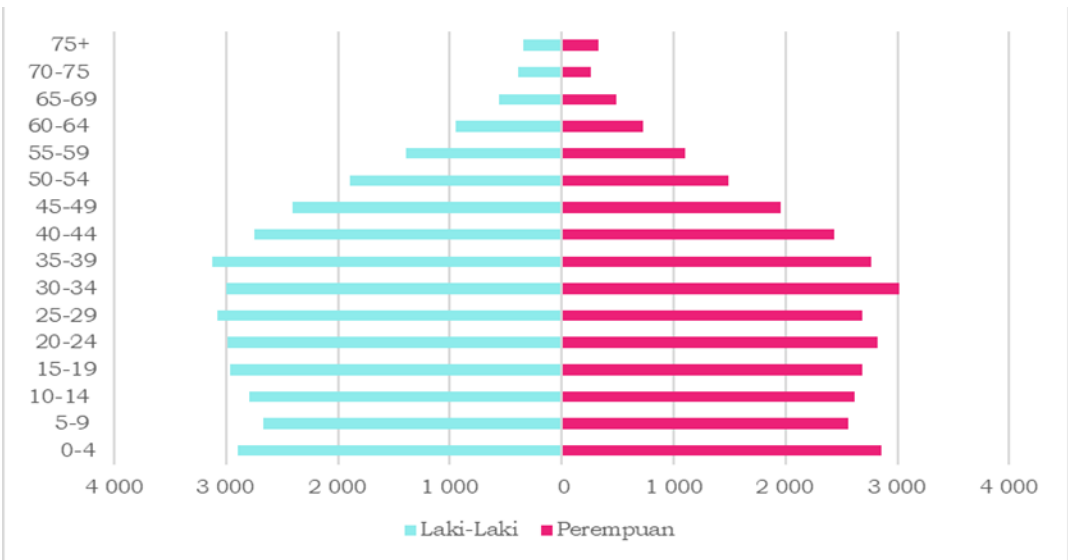
Adanya dinamika kependudukan dapat menjadi salah satu indikasi terjadinya dinamika sosial masyarakat, termasuk indikasi adanya transisi demografi. Transisi demografi adalah suatu perubahan struktur kependudukan yang terjadi karena perubahan fertilitas dan mortalitas pada suatu daerah. Hasil dari transisi demografi yang terjadi pada suatu daerah dapat diidentifikasi dengan melihat piramida penduduk. Piramida penduduk dapat menjelaskan dan menggambarkan struktur penduduk yang terbentuk dari hasil proses fertilitas dan mortalitas di suatu daerah. Berikut ini merupakan piramida penduduk Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024.

Gambar 2. 14 Piramida Penduduk Kabupaten Sukamara Tahun 2020



Sumber: Kabupaten Sukamara Dalam Angka, 2021

Gambar 2. 15 Piramida Penduduk Kabupaten Sukamara Tahun 2021

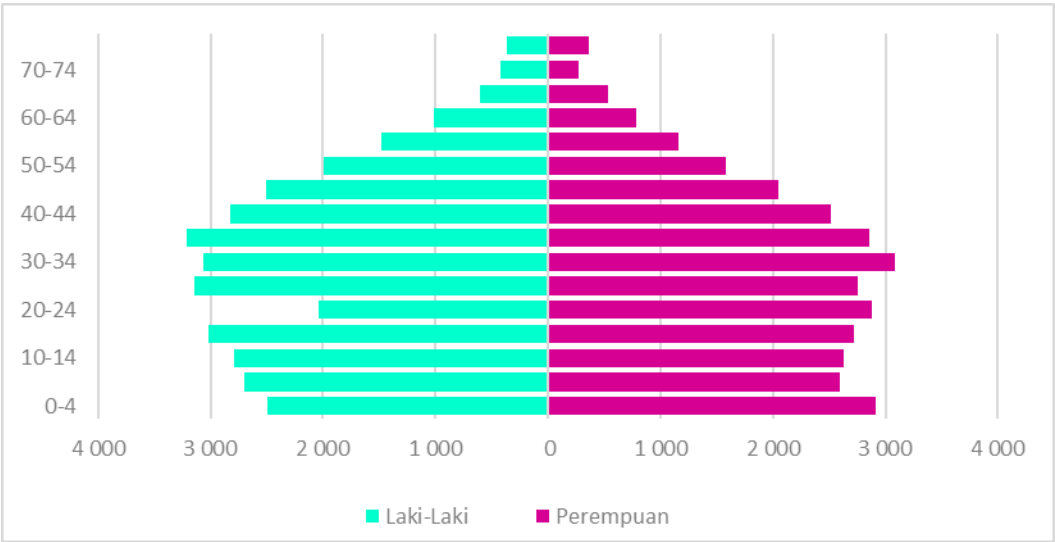


Sumber: Kabupaten Sukamara Dalam Angka, 2022



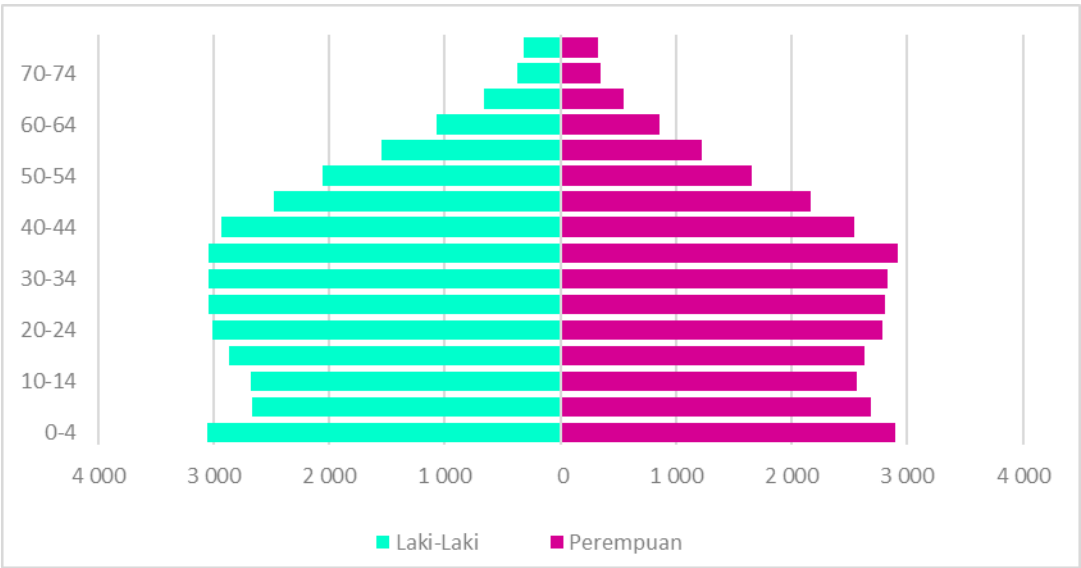


Gambar 2. 16 Piramida Penduduk Kabupaten Sukamara Tahun 2022



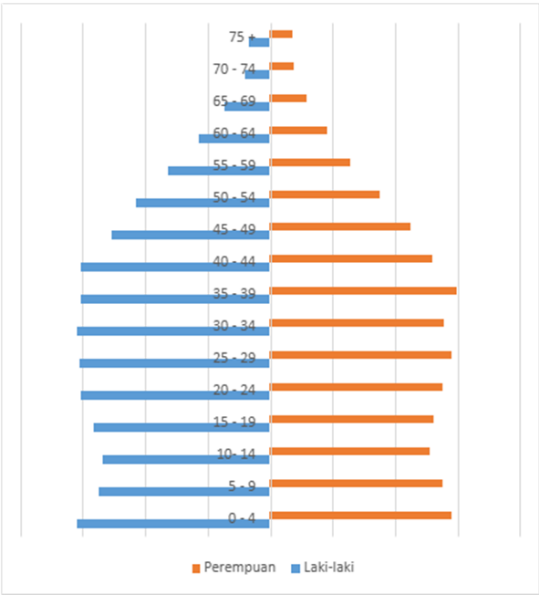
Sumber: Kabupaten Sukamara Dalam Angka, 2023

Gambar 2. 17 Piramida Penduduk Kabupaten Sukamara Tahun 2023



Sumber: Kabupaten Sukamara Dalam Angka, 2024

Gambar 2. 18 Piramida Penduduk Kabupaten Sukamara Tahun 2024



Sumber: Kabupaten Sukamara Dalam Angka, 2025





Berdasarkan piramida penduduk, diketahui bahwa proporsi usia penduduk di Kabupaten Sukamara dari tahun 2017-2024 mengalami perubahan yang menunjukkan proporsi usia produktif (15–64 tahun) semakin meningkat dan disisi lain proporsi penduduk usia belum produktif (0–14 tahun) justru juga mengalami peningkatan dan penduduk usia di atas 65 tahun tidak banyak perubahan.

5. Proyeksi Penduduk Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029 Proyeksi Jumlah Penduduk

Data dan informasi terkait jumlah penduduk saat ini dan masa yang akan datang sangat dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan wilayah. Proyeksi penduduk merupakan suatu indikator perhitungan yang digunakan untuk menunjukkan angka fertilitas, mortalitas, dan migrasi penduduk di masa depan. Jumlah penduduk pada setiap wilayah memiliki distribusi, kuantitas, komposisi, dan pertumbuhan yang berbeda sehingga untuk mencapai arah pembangunan wilayah yang lebih baik perlu mempertimbangkan karakteristik perkembangan penduduk di wilayah tersebut.

Tujuan dari perencanaan pembangunan wilayah adalah untuk mencapai arah perkembangan dan perubahan wilayah yang lebih baik bagi suatu komunitas, pemerintah, dan lingkungan dalam wilayah tertentu. Informasi terkait data kependudukan merupakan salah satu parameter yang digunakan untuk mengevaluasi kemajuan pembangunan yang sudah berjalan dan merumuskan kebijakan pembangunan yang akan berlangsung di masa yang akan datang. Selain parameter jumlah penduduk, perlu juga diperhatikan parameter terkait kepadatan penduduk, penduduk usia produktif, proyeksi anak usia sekolah, dan proyeksi angka ketergantungan untuk mencapai dan merencanakan pembangunan yang presisi.

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk di Kabupaten Sukamara, jumlah penduduk di Kabupaten Sukamara pada akhir periode RPJMD (2029) mencapai 73.472 jiwa. Jumlah penduduk tertinggi berada di Kecamatan Sukamara, sedangkan jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Jelai. Perbedaan distribusi jumlah penduduk dapat disebabkan oleh faktor wilayah yang berbeda maupun faktor lainnya. Dalam perkembangannya, jumlah penduduk di Kabupaten Sukamara diperkirakan mengalami pertumbuhan hingga 4.488 jiwa atau sekitar 6,5% dari tahun 2025 hingga 2029.

Tabel 2. 22 Proyeksi Penduduk Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029

No	Kecamatan	Penduduk Tahun 2020 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Jelai	5.520	6.447	6.571	6.696	6.821	6.946
2	Pantai Lunci	5.860	7.258	7.400	7.543	7.686	7.829



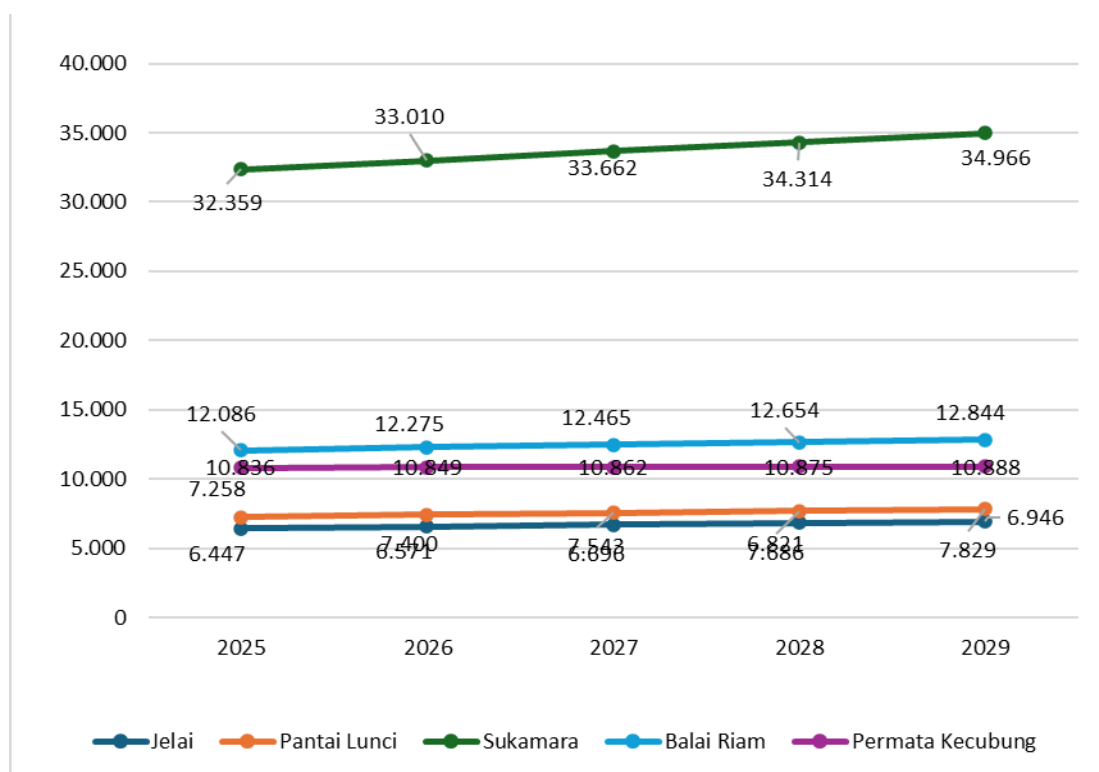


3	Sukamara	30.890	32.359	33.010	33.662	34.314	34.966
4	Balai Riam	10.620	12.086	12.275	12.465	12.654	12.844
5	Permata Kecubung	10.560	10.836	10.849	10.862	10.875	10.888
Kabupaten Sukamara		63.450	68.984	70.106	71.228	72.350	73.472

Sumber: Hasil pengolahan, 2025

Kondisi jumlah penduduk Kabupaten Sukamara tahun 2025-2029 menunjukkan kondisi yang terus meningkat tiap tahun. Selain itu, Kecamatan Jelai diperkirakan memiliki jumlah penduduk terkecil pada tahun 2025-2029. Kecamatan Sukamara diperkirakan dari tahun 2025-2029 memiliki jumlah penduduk tertinggi di Kabupaten Sukamara. Perkiraan perkembangan jumlah penduduk yang paling drastis dapat terlihat pada grafik, yaitu juga pada Kecamatan Sukamara yang ditunjukkan melalui grafik perkembangan proyeksi penduduk tahun 2025-2029.

Gambar 2. 19 Grafik Perkembangan Proyeksi Penduduk Tahun 2025-2029



Sumber: Hasil Pengolahan, 2025

Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

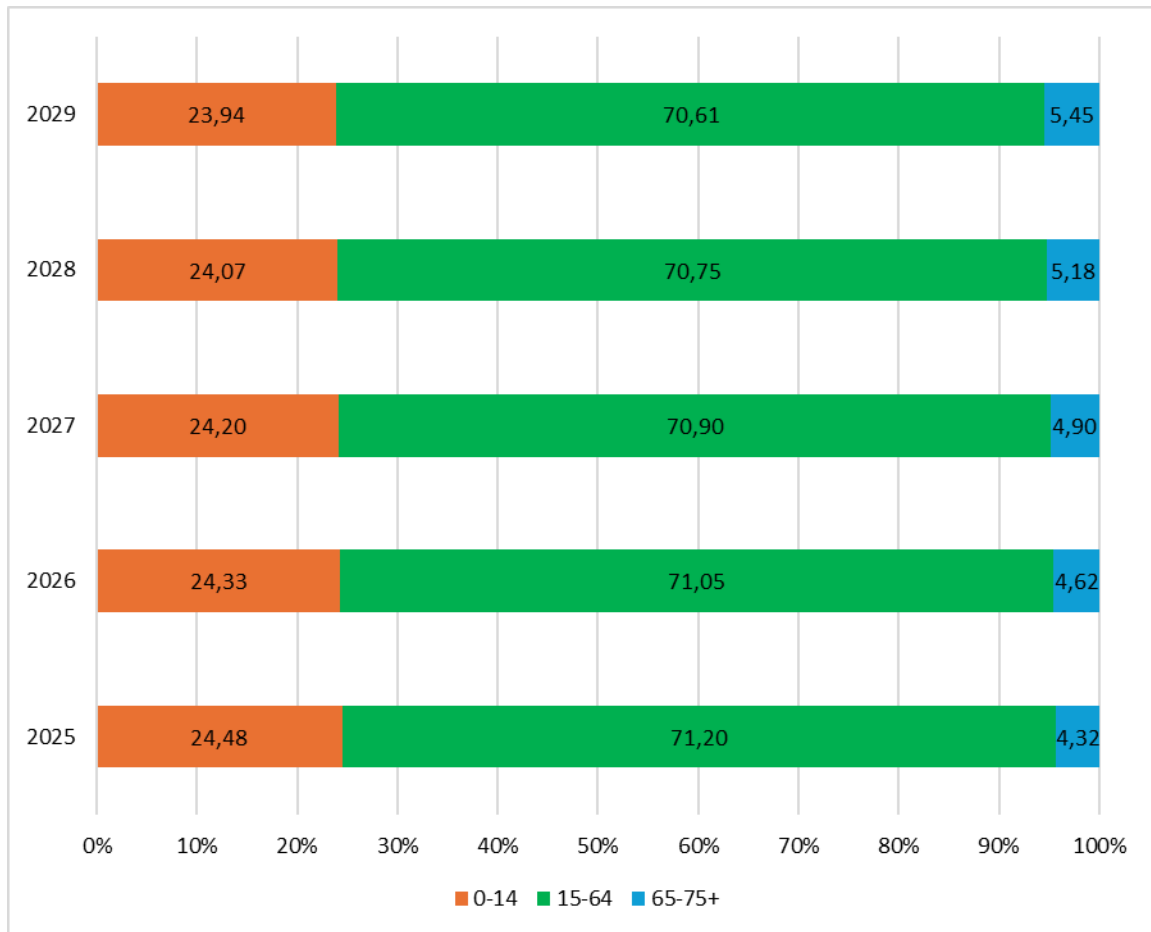
Proyeksi penduduk menurut kelompok umur digunakan untuk mengetahui proporsi usia penduduk di Kabupaten Sukamara. Hasil Proyeksi penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Sukamara menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak dibandingkan penduduk usia tidak produktif. Jumlah penduduk usia bayi, anak dan remaja (0-14 tahun) terlihat mulai menurun, sedangkan penduduk usia produktif (15-64 tahun) mulai menurun juga namun yang meningkat adalah penduduk usia lanjut (65-75+ tahun). Transisi jumlah





penduduk berdasarkan kelompok umur ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan fertilitas, mortalitas, dan migrasi penduduk.

Gambar 2. 20 Grafik Proyeksi Proporsi Kelompok Umur Penduduk Kabupaten Sukamara



Sumber: Hasil pengolahan, 2025

Tabel 2. 23 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2020 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
		2025	2026	2027	2028	2029
0-14 Tahun	16.190	16.884	17.060	17.236	17.412	17.588
15-64 Tahun	44.930	49.120	49.810	50.500	51.190	51.880
> 65 Tahun	2.330	2.980	3.236	3.492	3.748	4.004

Sumber: Hasil pengolahan, 2025

Proyeksi Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk per satuan luas wilayah. Proyeksi kepadatan penduduk di Kabupaten Sukamara digunakan untuk memperkirakan jumlah penduduk persatuan wilayah serta distribusinya. Secara keseluruhan, kepadatan penduduk di Kabupaten Sukamara pada tahun 2029 adalah sebesar 19 jiwa/ km². Kepadatan penduduk tertinggi pada tahun 2029 berada di Kecamatan Sukamara sedangkan untuk terendah berada di



Kecamatan Jelai. Kepadatan penduduk di Kecamatan Sukamara diperkirakan mencapai 34 jiwa/km² pada tahun 2029. Nilai ini lebih tinggi jika dibandingkan total rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Sukamara. Sedangkan untuk Kecamatan Jelai diperkirakan memiliki kepadatan penduduk terendah yakni sebesar 9 jiwa/km² pada tahun 2029.

Tabel 2. 24 Proyeksi Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Sukamara

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Proyeksi Jumlah Penduduk (Jiwa)					Proyeksi Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1	Jelai	796	6.447	6.571	6.696	6.821	6.946	8	8	8	9	9
2	Pantai Lunci	804	7.258	7.400	7.543	7.686	7.829	9	9	9	10	10
3	Sukamara	1.028	32.359	33.010	33.662	34.314	34.966	31	32	33	33	34
4	Balai Riam	539	12.086	12.275	12.465	12.654	12.844	22	23	23	23	24
5	Permata Kecubung	660	10.836	10.849	10.862	10.875	10.888	16	16	16	16	16
Kab. Sukamara		3.827	68.984	70.106	71.228	72.350	73.472	18	18	19	19	19

Sumber: Hasil pengolahan, 2025

Proyeksi Penduduk Usia Produktif

Proyeksi penduduk usia produktif merupakan salah satu analisis statistik yang dilakukan untuk memperkirakan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) pada suatu wilayah tertentu. Proyeksi ini digunakan untuk memberikan informasi terkait perubahan populasi penduduk usia produktif dalam jangka waktu tertentu. Proyeksi penduduk usia produktif penting dalam perencanaan jangka panjang suatu wilayah. Proyeksi penduduk secara efektif dapat memberikan gambaran terkait dinamika kondisi demografi penduduk yang dapat mempengaruhi kondisi ekonomi dan sosial yang terjadi di masyarakat. Pada tahun 2029, jumlah penduduk usia produktif di Kabupaten Sukamara diperkirakan mencapai 51.880 jiwa. Kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi pada tahun 2029 berada di Kecamatan Sukamara yakni 25.411 jiwa. Untuk kecamatan lainnya di Kabupaten Sukamara, jumlah penduduk usia produktif kurang dari 9.000 jiwa. Ketimpangan distribusi jumlah penduduk di Kabupaten Sukamara dapat disebabkan berbagai faktor baik sosial maupun ekonomi.

Tabel 2. 25 Proyeksi Jumlah Penduduk Usia Produktif

No	Kecamatan	Penduduk Usia Produktif 15-64 2020 (Jiwa)	Proyeksi Jumlah Penduduk Usia Produktif 15-64 (Jiwa)				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Jelai	4599	5.013	5.068	5.122	5.177	5.231
2	Pantai Lunci	4340	4.883	4.942	5.001	5.059	5.118
3	Sukamara	21893	23.777	24.186	24.594	25.003	25.411
4	Balai Riam	7739	8.397	8.490	8.583	8.675	8.768
5	Permata Kecubung	6359	7.050	7.125	7.200	7.276	7.351
Kab. Sukamara		44.930	49.120	49.810	50.500	51.190	51.880

Sumber: Hasil pengolahan, 2025



Proyeksi Penduduk Usia Tua

Proyeksi penduduk usia tua digunakan sebagai data analisis statistik untuk memperkirakan jumlah penduduk usia tua (65-75+ tahun) pada suatu wilayah tertentu. Proyeksi ini digunakan untuk memberikan informasi terkait perubahan populasi penduduk usia tua dalam jangka waktu tertentu. Selain proyeksi penduduk usia produktif, proyeksi penduduk usia tua juga penting dalam perencanaan jangka panjang suatu wilayah. Secara keseluruhan, tren proyeksi penduduk usia tua mengalami peningkatan dari tahun 2025 hingga 2029 di seluruh kecamatan di Kabupaten Sukamara. Pada tahun 2029, jumlah penduduk usia tua di Kabupaten Sukamara diperkirakan mencapai 3.705 jiwa. Kecamatan dengan jumlah penduduk usia tua tertinggi pada tahun 2029 berada di Kecamatan Sukamara yakni 1.890 jiwa. Untuk kecamatan lainnya di Kabupaten Sukamara, jumlah penduduk usia produktif kurang dari 600 jiwa saja. Dengan demikian, perlu untuk difokuskan perencanaan pembangunan fasilitas umum khususnya bidang kesehatan bagi wilayah dengan penduduk usia tua yang tinggi yaitu Kecamatan Sukamara. Distribusi penduduk di Kabupaten Sukamara memang secara total juga tertinggi di Kecamatan Sukamara maka menurut kelompok umur juga menjadi yang tertinggi. Dalam aspek kebencanaan juga penduduk usia tua atau yang disebut lanjut usia (lansia) masuk dalam kategori kaum rentan terhadap bencana sehingga pada kecamatan yang tinggi penduduk usia tuanya perlu lebih ditingkatkan upaya peningkatan ketangguhan bencana.

Tabel 2. 26 Proyeksi Jumlah Penduduk Usia Tua

No	Kecamatan	Penduduk Usia Tua 65-75+ 2020 (Jiwa)	Proyeksi Jumlah Penduduk Usia Tua 65-75+ (Jiwa)				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Jelai	230	296	316	335	355	374
2	Pantai Lunci	242	306	322	337	353	368
3	Sukamara	946	1.400	1.522	1.645	1.767	1.890
4	Balai Riam	259	419	462	504	547	589
5	Permata Kecubung	261	367	396	425	454	483
Kab. Sukamara		1.938	2.788	3.017	3.246	3.476	3.705

Sumber: Hasil pengolahan, 2025

Proyeksi Anak Usia Sekolah

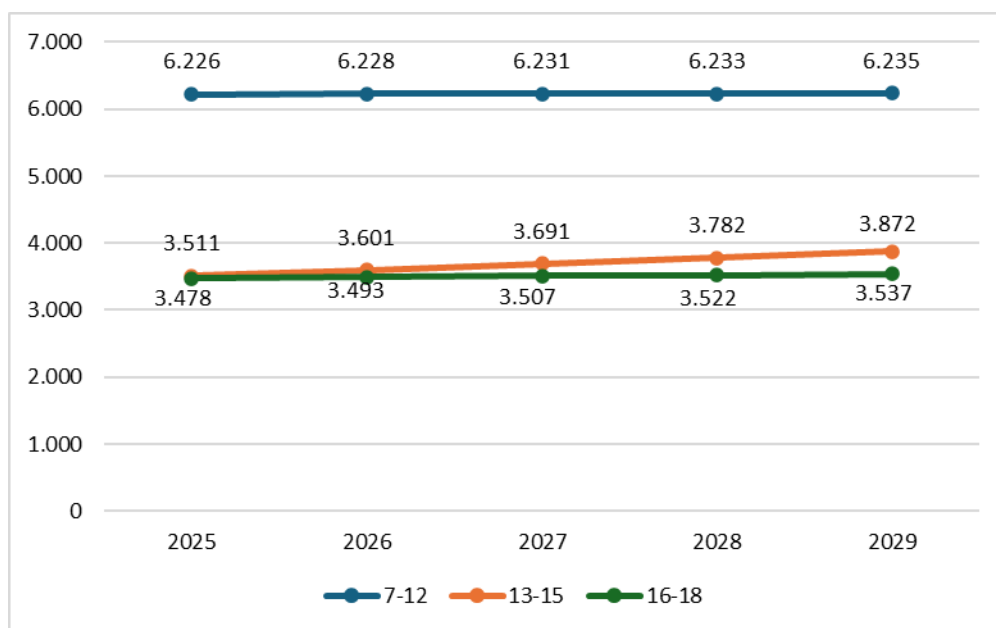
Proyeksi anak usia sekolah merupakan salah satu indikator penting dalam pengambilan keputusan dan kebijakan terkait perencanaan pendidikan bagi generasi muda. Proyeksi anak usia sekolah dalam studi kependudukan digunakan untuk memperkirakan jumlah anak dalam kelompok usia 7-12 tahun (SD/MI/ sederajat), 13-15 tahun (SMP/MTs/ sederajat), dan 16-18 tahun (SMA/SMK/MA/ sederajat). Proyeksi ini digunakan untuk memberikan pandangan





terkait jumlah dan distribusi anak usia sekolah yang terus berubah seiring waktu. Hasil proyeksi anak usia sekolah berdasarkan tingkatan SD/MI/ sederajat, SMP/MTs/ sederajat, dan SMA/SMK/MA/ sederajat memiliki tren yang berbeda. Hasil proyeksi penduduk usia SD/MI/ sederajat dan SMP/MTs/ sederajat memiliki tren yang cenderung semakin meningkat dari tahun 2025 hingga 2029. Demikian juga untuk tren proyeksi penduduk usia SMP/MTs/ sederajat dan SMA/SMK/MA/ sederajat namun polanya sedikit berbeda dimana peningkatan di tingkat SMA/SMK/MA/ sederajat peningkatannya rendah tidak setinggi Tingkat SD/MI/ sederajat. Perkembangan proyeksi penduduk usia sekolah dapat diamati pada gambar berikut.

Gambar 2. 21 Proyeksi Perkembangan Penduduk Usia Sekolah



Sumber: Hasil pengolahan, 2025

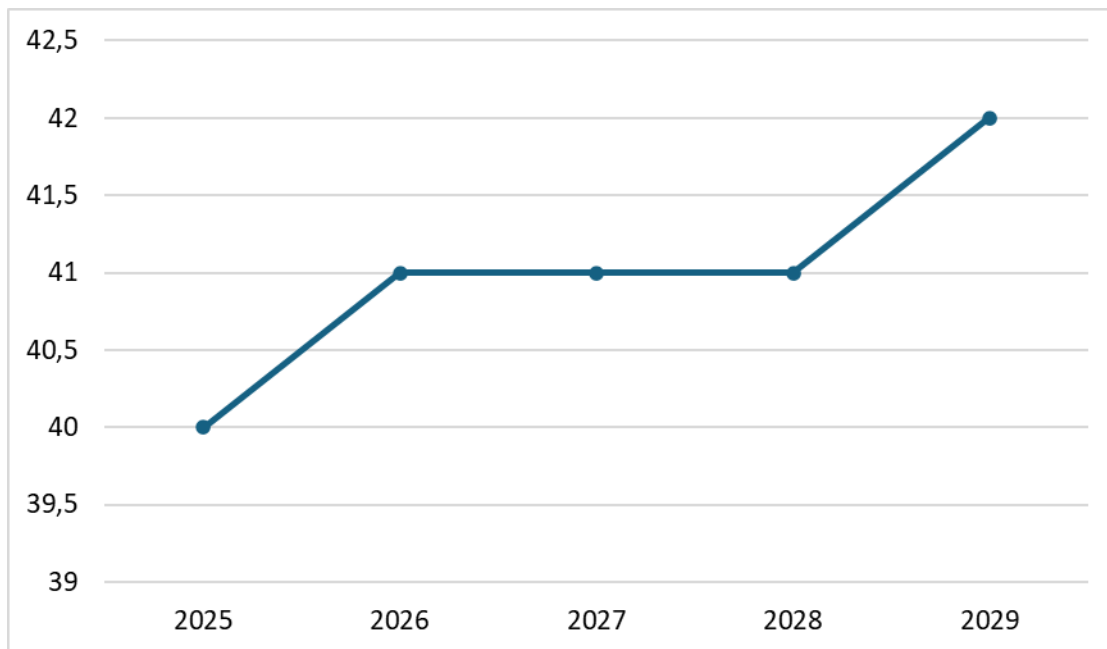
Proyeksi Angka Ketergantungan

Angka ketergantungan merupakan indikator demografis yang digunakan untuk mengukur hubungan antara jumlah penduduk usia tidak produktif (anak dan lansia) dengan penduduk usia kerja atau usia produktif. Proyeksi angka ketergantungan digunakan untuk memberikan gambaran masa depan terkait beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang usia tidak produktif (anak-anak dan lansia). Hasil proyeksi angka ketergantungan di Kabupaten Sukamara menunjukkan adanya tren yang semakin meningkat dari tahun 2025 hingga 2029. Semakin tinggi angka ketergantungan maka akan semakin tinggi jumlah penduduk tidak produktif yang harus ditanggung. Pada tahun 2029, angka ketergantungan diperkirakan mencapai 42 persen, angka ini menunjukkan bahwa terdapat 100 penduduk usia produktif yang akan menanggung 42 jiwa penduduk yang tidak produktif yang disajikan pada gambar dan proyeksi angka ketergantungan per kecamatan yang disajikan pada tabel berikut.





Gambar 2. 22 Grafik Proyeksi Angka Ketergantungan



Sumber: Hasil pengolahan, 2025

Tabel 2. 27 Proyeksi Angka Ketergantungan

No	Kecamatan	Proyeksi Angka Ketergantungan (%)				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Jelai	29	30	31	32	33
2	Pantai Lunci	49	50	51	52	53
3	Sukamara	36	36	37	37	38
4	Balai Riam	44	45	45	46	46
5	Permata Kecubung	54	52	51	49	48
Kab. Sukamara		40	41	41	41	42

Sumber: Hasil pengolahan, 2025

Bonus Demografi

Bonus Demografi merupakan kondisi ketika penduduk usia produktif (15-64 tahun) akan lebih besar dibanding usia nonproduktif (65 tahun ke atas) dengan proporsi lebih dari 60 persen dari total jumlah penduduk. Berdasarkan hasil analisis proyeksi penduduk berdasarkan kelompok umur dan angka ketergantungan menunjukkan bahwa Sukamara pada tahun 2029 akan mendapatkan Bonus demografi (*The Window of Opportunity*). Hal ini ditunjukkan dari besarnya angka ketergantungan (*Dependency Ratio*) Kabupaten Sukamara pada tahun 2029 adalah sebesar 42 persen. Bonus demografi terjadi apabila besarnya persentase angka ketergantungan di bawah 50 persen. Bahkan bonus demografi tersebut sudah didapatkan dari tahun 2025. Kondisi ini tentu memberi dampak yang sangat besar bagi Kabupaten Sukamara apabila mampu memanfaatkan momentum ini dengan



baik. Agar manfaat Bonus Demografi ini bisa dinikmati dan berdampak secara positif, maka harus memperhatikan 4 pilar, yaitu Keluarga Berencana (KB) sebagai upaya pengendalian penduduk, Pendidikan, Kesehatan, dan Ketenagakerjaan.

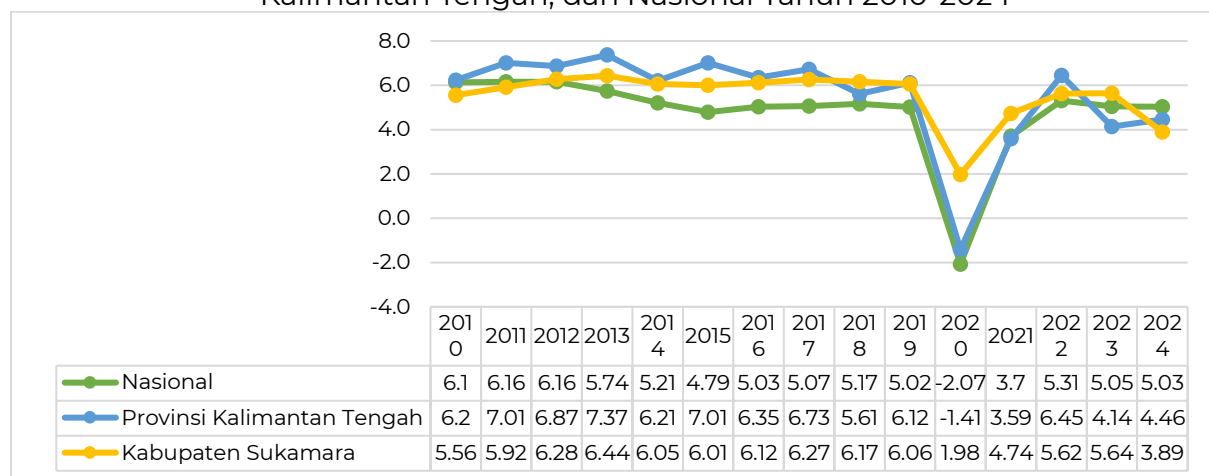
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

a. Kesejahteraan Ekonomi

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukamara dapat diketahui dengan menganalisis nilai tambah yang dihasilkan oleh setiap sektor produksi yang ada pada nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Selama tahun 2010-2024 terjadi perubahan nilai laju pertumbuhan PDRB ADHK yang fluktuatif. Dalam kurun waktu 15 tahun nilai laju pertumbuhan cenderung terus meningkat, dengan perubahan rata-rata sebesar 1,67 persen. Dengan laju pertumbuhan paling rendah terjadi pada tahun 2020 yakni sebesar 1,98 persen. Rendahnya nilai laju pertumbuhan tersebut disebabkan oleh pandemi COVID-19 di seluruh dunia yang mengakibatkan perekonomian dunia dan nasional mengalami guncangan. Meski demikian, nilai laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Sukamara pada tahun tersebut masih lebih tinggi daripada nilai laju pertumbuhan PDRB untuk Nasional dan Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu sebesar -2,07 persen untuk Nasional dan -1,41 persen untuk Provinsi Kalimantan Tengah. Pada tahun 2021, nilai laju pertumbuhan kembali mengalami kenaikan karena banyak program pemerintah terkait penanganan COVID-19 telah dijalankan, masyarakat sudah mulai mampu beradaptasi, sehingga perlahan-lahan laju pertumbuhan PDRB di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, serta Nasional mulai membaik.

Gambar 2. 23 Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Nasional Tahun 2010-2024



Sumber: <https://kalteng.bps.go.id/indicator/159/469/1/-seri-2010-laju-pertumbuhan-produk-domestik-regional-bruto-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-kalimantan-tengah.html>



2. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan menjadi salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menganalisis kesejahteraan ekonomi. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Kondisi kemiskinan dapat dianalisis menggunakan beberapa indikator, salah satu indikator yang sering digunakan untuk menganalisis kemiskinan adalah persentase penduduk miskin (P0) yang dianggap mampu merepresentasikan angka kemiskinan.

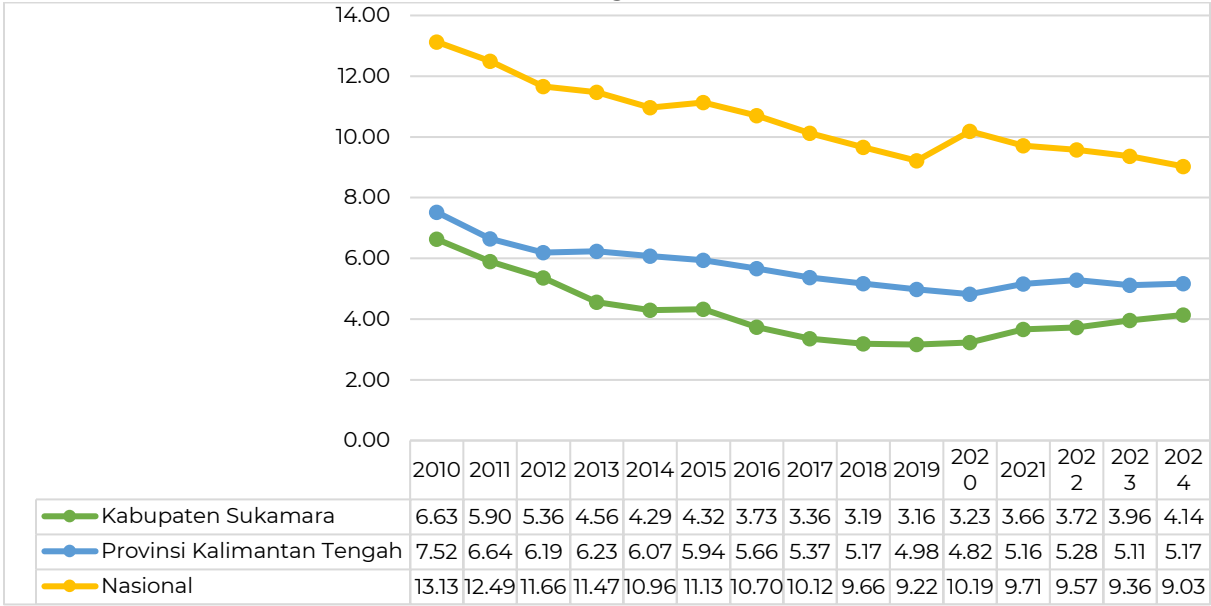
Persentase penduduk miskin di Kabupaten Sukamara tahun 2005-2022 menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Pada periode tahun 2011-2014 terjadi penurunan nilai sebesar 2,34 persen sehingga pada tahun 2014 persentase penduduk miskin (P0) Kabupaten Sukamara sebesar 4,29 persen. Pada tahun selanjutnya terjadi kenaikan sebesar 0,03 persen sehingga pada tahun 2015 persentase penduduk miskin (P0) di Kabupaten Sukamara sebesar 4,32 persen. Setelah kenaikan di tahun 2015, persentase penduduk miskin (P0) di Sukamara kembali mengalami penurunan selama beberapa tahun, dimana pada tahun 2019 nilainya sebesar 3,16 persen. Pada tahun 2020 nilainya naik sebesar 0,07 persen menjadi 3,23 persen dan pada tahun 2021 hingga 2022 nilainya naik menjadi 3,66 persen pada tahun 2021 dan 3,72 persen pada tahun 2022 serta 3,96 pada tahun 2023.

Kenaikan persentase penduduk miskin (P0) di Kabupaten Sukamara dan Provinsi Kalimantan Tengah yang terjadi pada tahun 2020-2024 disebabkan karena adanya upaya pemerintah pemulihan ekonomi setelah masa pandemi COVID-19, yang menyebabkan terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat sehingga pendapatannya menjadi berkurang namun telah kembali membaik. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa kondisi kemiskinan di Kabupaten Sukamara berkontribusi positif terhadap kondisi kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah. Berbeda dengan nilai persentase penduduk miskin (P0) di Kabupaten dan Provinsi, nilai P0 Nasional pada tahun 2020 justru mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, capaian persentase penduduk miskin Kabupaten Sukamara dapat dikatakan cenderung lebih baik jika dibandingkan dengan provinsi dan nasional pada tahun 2024, yaitu sebesar 4,14 persen untuk Kabupaten Sukamara, 5,17 persen untuk Provinsi Kalimantan Tengah, dan 9,03 persen untuk nasional pada tahun 2024.





Gambar 2. 24 Grafik Perkembangan Persentase Penduduk Miskin (P0) Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Nasional Tahun 2010-2024



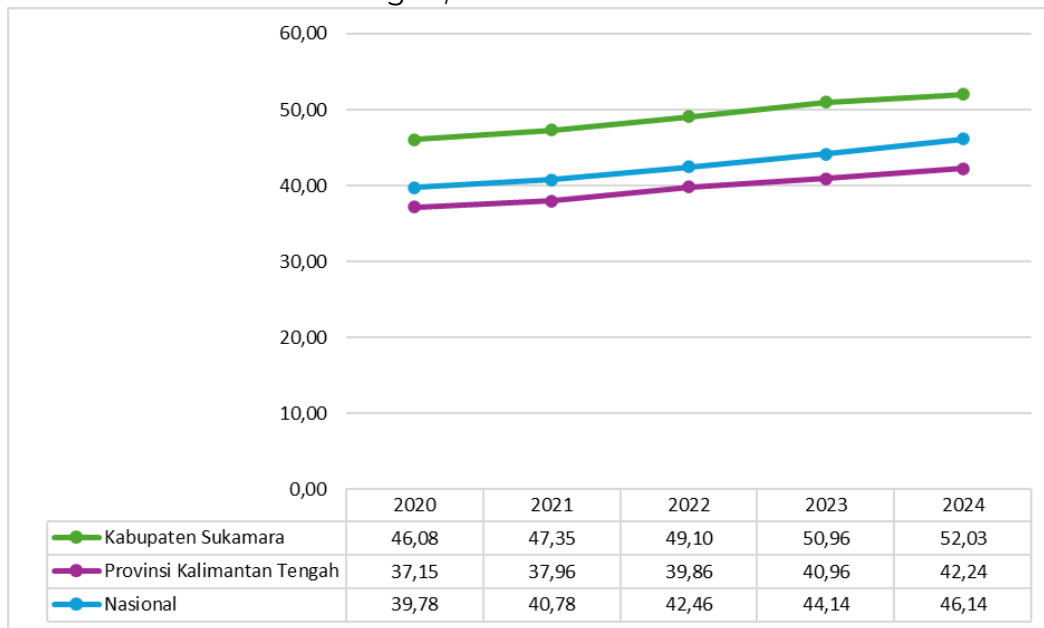
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011-2025

3. PDRB Per Kapita

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat juga baik. Indikator lain yang berhubungan dengan PDRB yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat adalah PDRB Per Kapita. PDRB per kapita merupakan pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk di suatu wilayah pada tahun tertentu. PDRB per kapita adalah indikator penting yang menggambarkan perkembangan ekonomi wilayah, sekaligus menunjukkan kinerja dan hasil pembangunan.

PDRB Per Kapita Kabupaten Sukamara dalam kurun waktu tahun 2020-2024 menunjukkan tren yang meningkat yaitu sebesar 46,08 juta rupiah pada tahun 2020 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya menjadi 52,03 juta rupiah pada tahun 2024. Kondisi PDRB Per Kapita Kabupaten Sukamara sejalan dengan kondisi Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional yang cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya hingga tahun 2024. Secara keseluruhan dari tahun 2020-2024, nilai PDRB per kapita Kabupaten Sukamara lebih tinggi daripada Provinsi dan Nasional.

Gambar 2. 25 Grafik Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Nasional Tahun 2020-2024



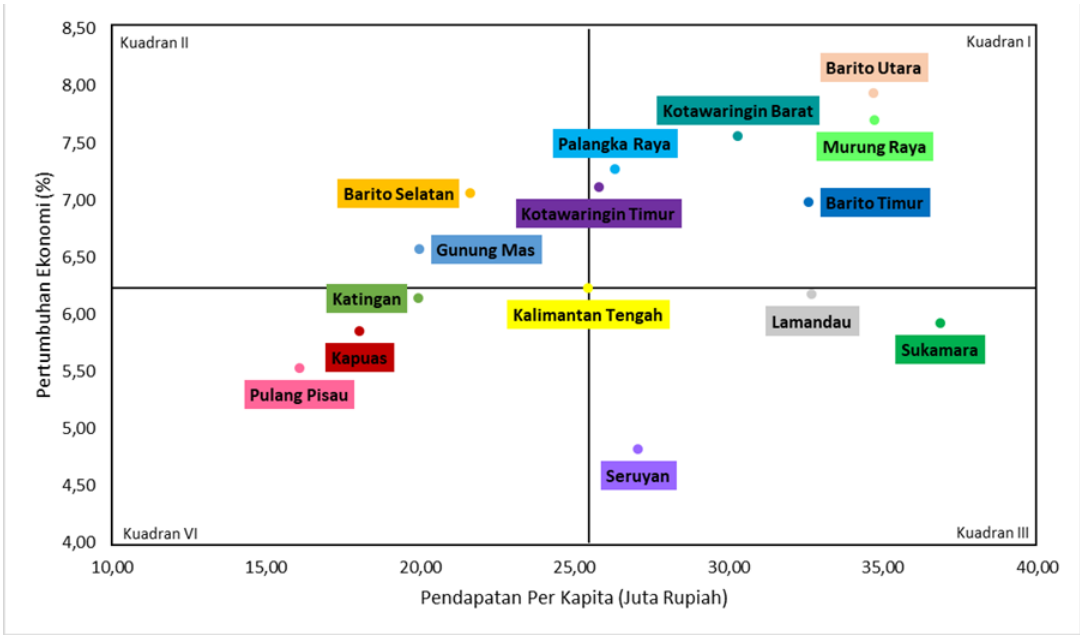
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020-2024

Untuk membandingkan nilai PDRB Per Kapita Kabupaten Sukamara dengan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah dapat menggunakan analisis tipologi klassen. Namun tipologi klassen tidak hanya menggunakan basis data PDRB Per Kapita tapi juga menggunakan data pertumbuhan ekonomi. Sehingga analisis ini mampu mengidentifikasi tingkat perkembangan suatu wilayah. Hasil tipologi klassen merupakan klasifikasi wilayah.

Menurut tipologi Klassen, wilayah dibagi menjadi menjadi empat klasifikasi yang pertama (Kuadran I) wilayah cepat maju dan cepat tumbuh yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita lebih tinggi dibanding rata-rata kabupaten/kota di provinsi. Kedua (Kuadran II) wilayah maju tapi tertekan yang memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi tapi tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibanding rata-rata kabupaten/kota di provinsi. Ketiga (Kuadran III) wilayah berkembang cepat yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi tapi tingkat pendapatan perkapita lebih rendah dari rata-rata kabupaten/kota di provinsi. Keempat (Kuadran IV) wilayah relatif tertinggal yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih rendah dibandingkan kabupaten/kota di provinsi. Berdasarkan analisis tipologi klassen pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2010 dan 2022, Kabupaten Sukamara berada di Kuadran III dan tidak mengalami perubahan. Dimana Kuadran III merupakan wilayah berkembang cepat.



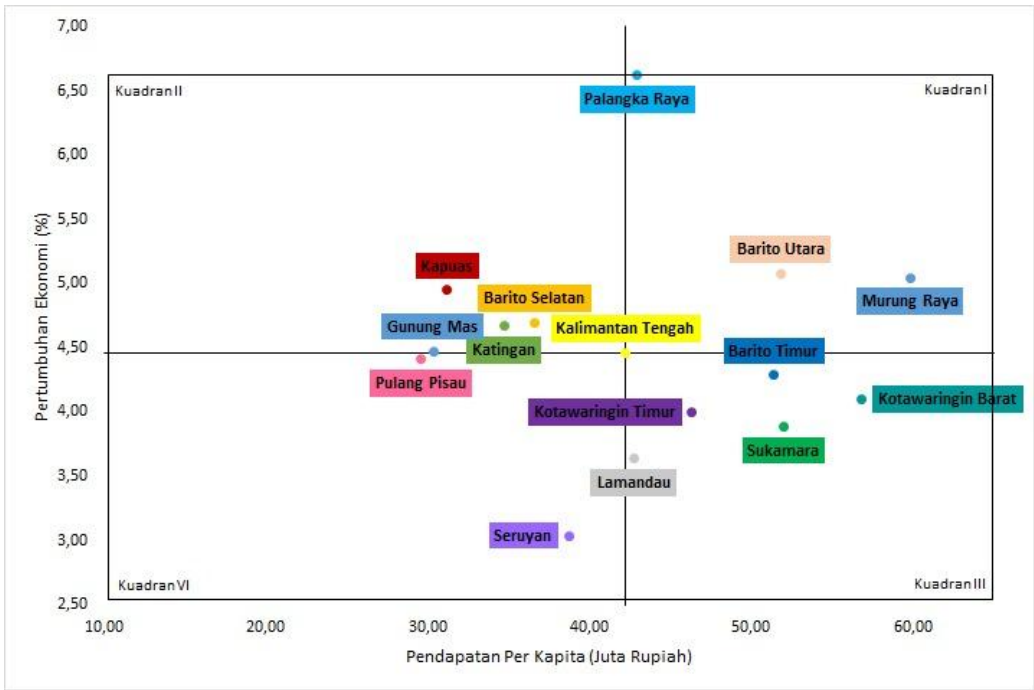
Gambar 2. 26 Grafik Analisis Tipologi Klassen Kabupaten/Kota di Prov. Kalimantan Tengah Tahun 2010



Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2011 (diolah)

Pada Tahun 2010, selain Kabupaten Sukamara kabupaten/kota yang berada di Kuadran III antara lain Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Seruyan. Pada Kuadran I terdapat Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Murung Raya, dan Kota Palangka Raya. Sementara itu pada Kuadran II ada Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Gunung Mas. Untuk Kuadran IV ada Kabupaten Katingan, Kabupaten Kapuas, dan Kabupaten Pulang Pisau.

Gambar 2. 27 Grafik Analisis Tipologi Klassen Kabupaten/Kota di Prov. Kalimantan Tengah Tahun 2024



Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2025 (diolah)





Selanjutnya, pada tahun 2024 tipologi Klassen kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah, posisi Kabupaten Sukamara bersama Kabupaten Kotawaringan Barat, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Lamandau berada di kuadran III. Kabupaten/kota yang berada di kuadran I antara lain Kota Palangka Raya, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Murung Raya. Kemudian Kabupaten/kota yang berada pada kuadran II antara lain Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Katingan. Kabupaten/kota yang berada di kuadran IV antara lain Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Seruyan.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja (penduduk usia kerja 15 tahun ke atas). Nilai TPT menunjukkan besar/kecilnya jumlah pasokan tenaga kerja yang belum termanfaatkan. Sedangkan pengertian pengangguran menurut BPS meliputi penduduk yang tidak bekerja tetapi dalam status mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

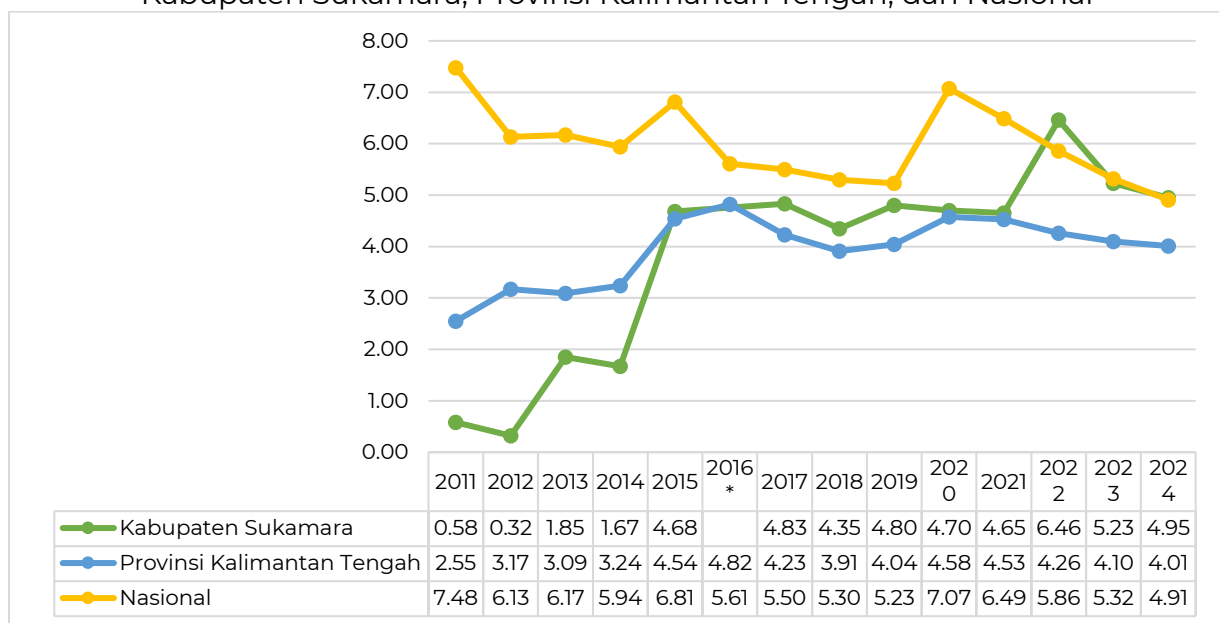
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sukamara tahun 2011-2022 mengalami tren yang fluktuatif tapi cenderung meningkat. Pada periode tahun 2011-2015 TPT Kabupaten Sukamara secara bergantian peningkatan dan penurunan setiap tahunnya, dengan penurunan hanya sekitar 0,18 persen-0,26 persen sedangkan peningkatan mencapai 1,53 persen-3,01 persen. Pada periode tahun 2017-2019 sempat terjadi penurunan TPT dari 4,83 persen pada tahun 2017 menjadi 4,35 persen pada tahun 2018, namun pada tahun 2019 nilainya kembali meningkat menjadi 4,80. Pada periode tahun 2020-2022, saat masa pandemi COVID-19 TPT Kabupaten Sukamara sempat mengalami penurunan di tahun 2021. Namun TPT mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 1,81% pada tahun 2022 dan kembali turun di tahun 5,23 (2023) dan 4,95 (2024). Peningkatan TPT yang terjadi pada tahun 2022 tersebut terjadi karena kondisi ekonomi yang masih tidak stabil serta kinerja pasar kerja yang belum sepenuhnya membaik.

Kondisi TPT Kabupaten Sukamara dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional kurang relevan. Pada periode tahun 2011-2016 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Kalimantan Tengah cenderung meningkat. Pada periode tahun 2017-2019 TPT Provinsi Kalimantan Tengah cenderung mengalami penurunan. Kenaikan dan penurunan TPT Provinsi Kalimantan Tengah hanya berkisar 0,05 persen-1,3 persen. Berbeda dengan Kabupaten Sukamara, TPT Provinsi Kalimantan Tengah pada periode tahun 2020-2023 justru mengalami penurunan meskipun tidak



signifikan. Sedangkan kondisi TPT Nasional cenderung mengalami tren menurun. Kenaikan signifikan terjadi pada tahun 2020, namun kembali turun pada periode tahun 2021-2024. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sukamara pada periode tahun 2011-2015 berada di bawah Provinsi Kalimantan Tengah. Namun pada periode tahun 2017-2024 TPT Kabupaten Sukamara berada di atas Provinsi Kalimantan Tengah. Secara keseluruhan TPT Kabupaten Sukamara berada di bawah TPT Nasional, hanya pada tahun 2022 TPT Kabupaten Sukamara lebih tinggi daripada TPT Nasional.

Gambar 2. 28 Grafik Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Nasional



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011-2024

Keterangan:

* : Data TPT Kabupaten Sukamara Tidak Tersedia

5. Indeks Gini

Ketimpangan pendapatan penduduk dapat dilihat melalui angka Rasio Gini atau Indeks Gini. Indeks Gini adalah ukuran ketimpangan pendapatan agregat yang angkanya berkisar 0 hingga 1. Semakin mendekati 1 maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk semakin tinggi, atau mendekati ketimpangan sempurna. Sebaliknya, semakin mendekati 0 tingkat ketimpangan pendapatan semakin rendah, atau mendekati pemerataan sempurna. Badan Pusat Statistik (BPS) mengategorikan Indeks Gini menjadi tiga tingkat, yaitu rendah (Indeks Gini < 0,3), sedang ($0,3 < \text{Indeks Gini} < 0,4$) dan tinggi (Indeks Gini > 0,4).

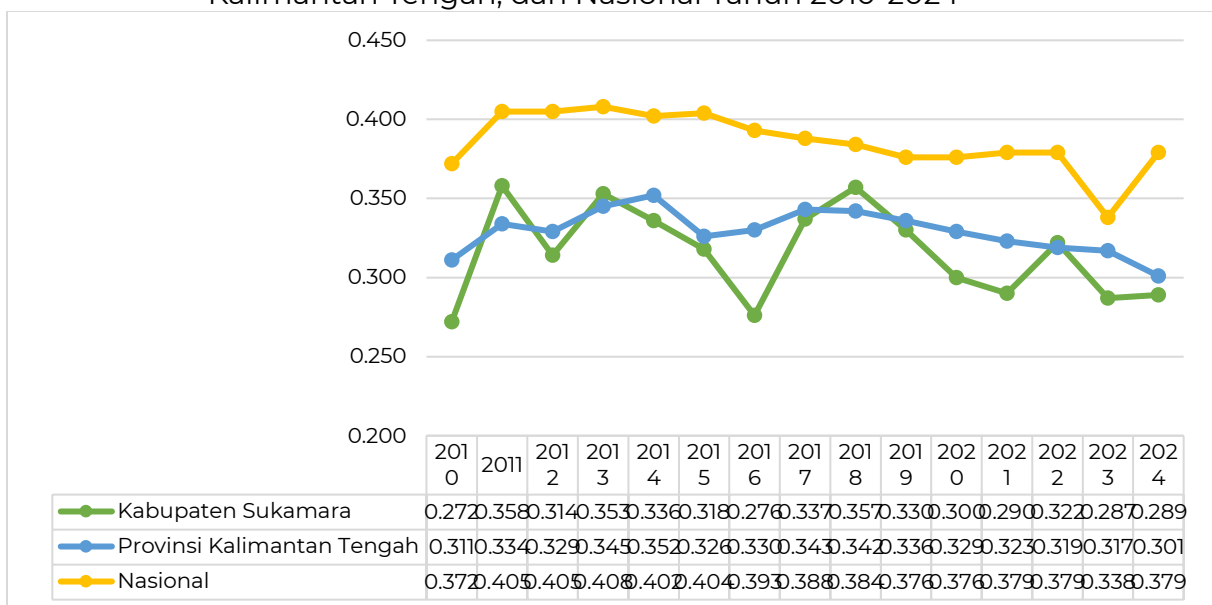
Indeks Gini Kabupaten Sukamara pada tahun 2010-2024 menunjukkan perubahan yang fluktuatif. Selama tahun 2010-2024 Indeks Gini tertinggi tercatat pada tahun 2011 sebesar 0,358 dan Indeks Gini terendah pada tahun 2010 sebesar 0,272. Pada periode tahun 2013-2016 Indeks Gini Kabupaten Sukamara mengalami



tren penurunan dari 0,353 yang masuk kedalam kategori ketimpangan sedang pada tahun 2013 menjadi 0,276 yang masuk kedalam kategori ketimpangan rendah pada tahun 2016. Namun, nilai Indeks Gini di Kabupaten Sukamara kembali naik selama 2 tahun berturut-turut, pada tahun 2017 naik menjadi 0,337 serta pada tahun 2018 menjadi 0,357. Indeks gini tahun 2019-2023 memiliki tren penurunan. Hal ini menyebabkan ketimpangan di Kabupaten Sukamara kembali masuk ke dalam ketimpangan kategori sedang. Kemudian pada periode selanjutnya tahun 2023-2024 nilai Indeks Gini Kabupaten Sukamara kembali naik hingga mencapai angka 0,289 , namun masih termasuk pada kategori ketimpangan rendah.

Selama 15 tahun Indeks Gini Kabupaten Sukamara selalu berada dibawah Indeks Gini Nasional. Sedangkan jika dibandingkan dengan Indeks Gini Provinsi Kalimantan Tengah, Indeks Gini Kabupaten Sukamara lebih sering berada di bawah Indeks Gini Provinsi Kalimantan Tengah. Tercatat pada tahun 2011, 2013, 2018, dan 2022 Indeks Gini Kabupaten Sukamara berada di atas Indeks Gini Provinsi Kalimantan Tengah.

Gambar 2. 29 Grafik Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Nasional Tahun 2010-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik dan Bank Dunia, 2010-2025

6. Indeks Pembangunan Manusia

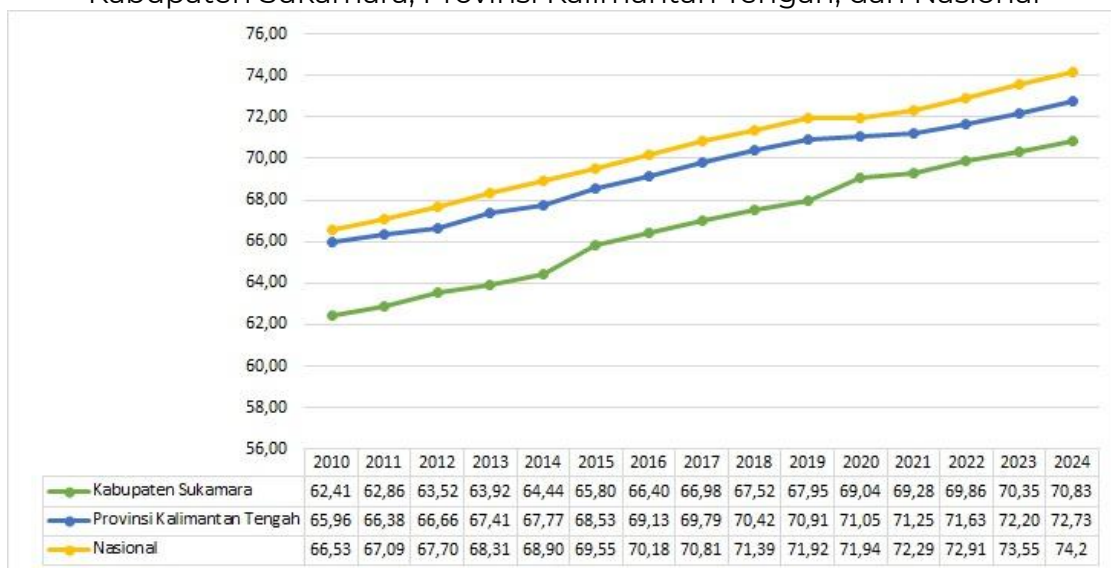
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur pencapaian hasil pembangunan dari suatu daerah/wilayah dalam tiga dimensi dasar pembangunan yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Dimana dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator angka harapan hidup, dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta dimensi standar hidup layak diwakili dengan indikator pengeluaran per kapita. Badan Pusat Statistik (BPS) mengelompokkan



capaian IPM menjadi empat kategori yaitu Rendah ($IPM < 60$), Sedang ($60 \leq IPM \leq 70$), Tinggi ($70 \leq IPM \leq 80$), dan Sangat Tinggi ($IPM \geq 80$).

Sejak tahun 2010, nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Sukamara terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dimana pada tahun 2010 nilai IPM Kabupaten Sukamara sebesar 62,41 terus meningkat hingga pada tahun 2023 mencapai 69,44 dan meningkat menjadi 70,83 di tahun 2024. Rata-rata pertumbuhan IPM di Kabupaten Sukamara adalah 0,82% per tahun. Dalam kurun waktu 15 tahun terjadi kenaikan IPM sebesar 7,44 poin. Perkembangan ini menunjukkan semakin membaiknya pembangunan manusia secara umum di Kabupaten Sukamara. Dengan capaian ini status pembangunan manusia di Kabupaten Sukamara tahun 2024 masih berada pada level sedang ($60 \leq IPM \leq 70$).

Gambar 2. 30 Grafik Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Nasional



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010-2024

b. Kesehatan untuk Semua

1. Indeks Keluarga Sehat

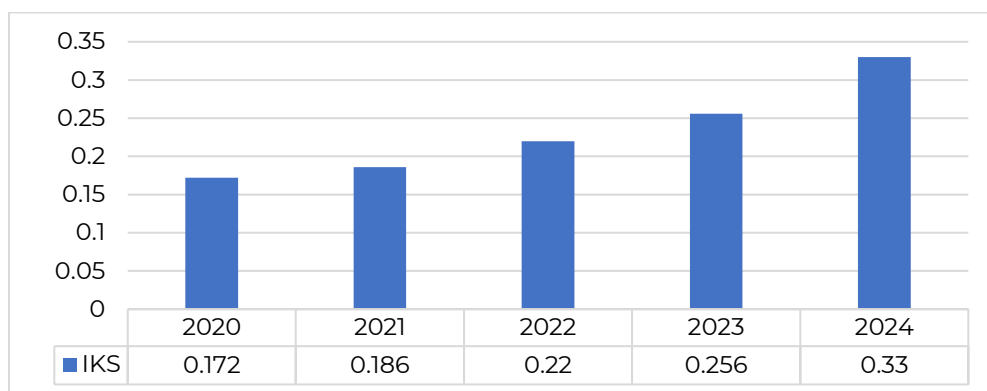
Keluarga yang sehat merupakan pondasi bagi masa depan bangsa. Keluarga yang sehat adalah keluarga dengan kesejahteraan fisik, mental, sosial, dan spiritual yang optimal. Kementerian Kesehatan telah menetapkan indeks yang digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan keluarga yakni Indeks Keluarga Sehat (IKS). Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan suatu perhitungan untuk mengetahui apakah keluarga tersebut termasuk keluarga sehat, prasehat, atau tidak sehat dengan ketentuan nilai IKS Sehat $> 0,80$, IKS Prasehat $0,50 - 0,80$, dan IKS Tidak Sehat $< 0,5$. Ada 12 indikator yang menyusun IKS yaitu keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB), Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan, bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap, bayi mendapatkan ASI eksklusif, balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan, penderita TB paru mendapatkan pengobatan sesuai



standar, penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur, penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan, anggota keluarga tidak ada yang merokok, keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), keluarga mempunyai akses sarana air bersih, dan keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat.

Data Indeks Keluarga Sehat (IKS) untuk Kabupaten Sukamara belum tersedia, sehingga data yang dianalisis hanya IKS Nasional. Nilai IKS Nasional pada tahun 2020 hanya sebesar 0,172. Nilainya terus naik setiap tahun, dimana pada tahun 2021 nilainya naik menjadi 0,186 dan pada tahun 2022 sebesar 0,22 kemudian nilai IKS Nasional kembali mengalami kenaikan menjadi 0,256 pada tahun 2023 dan naik menjadi 0,33 di tahun 2024. Secara keseluruhan, IKS Nasional masuk kategori IKS Tidak Sehat.

Gambar 2. 31 Grafik Perkembangan Indeks Keluarga Sehat (IKS) Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: Kementerian Kesehatan, 2020-2024

c. Pendidikan Berkualitas yang Merata

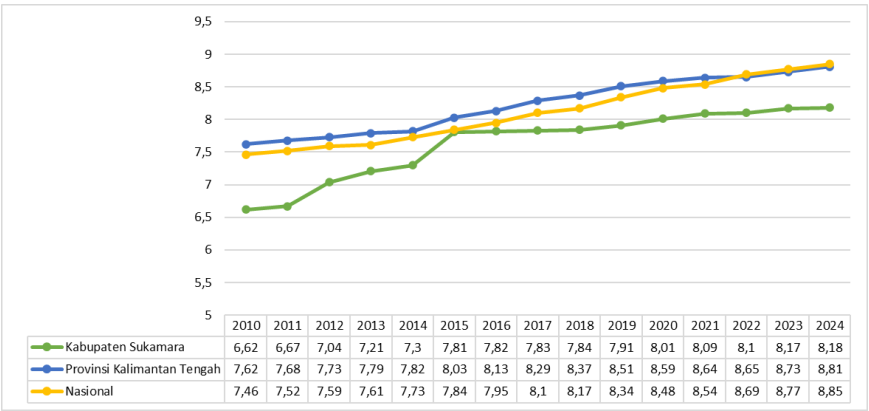
1. Rata-rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Sukamara dalam kurun waktu 2010-2024 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2024 rata-rata lama sekolah di Kabupaten Sukamara mencapai 8,18. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan angka rata-rata lama sekolah Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2024 yakni berada pada angka 8,81. Bila ditinjau dari tren kenaikan dari tahun 2010-2024 dapat diketahui bahwa sepanjang periode tersebut, sebagian besar penduduk di Kabupaten Sukamara belum menyelesaikan studi SMP. Hal ini dapat dilihat dari angka rata-rata lama sekolah yang masih dibawah 9 tahun. Pada tahun 2010-2019 sebagian besar penduduk Kabupaten Sukamara hanya bersekolah sampai kelas 7 semester 1 sedangkan pada tahun 2020-2024 hanya bersekolah sampai kelas 8 semester 1.





Gambar 2. 32 Grafik Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Nasional Tahun 2010-2024 (Tahun)

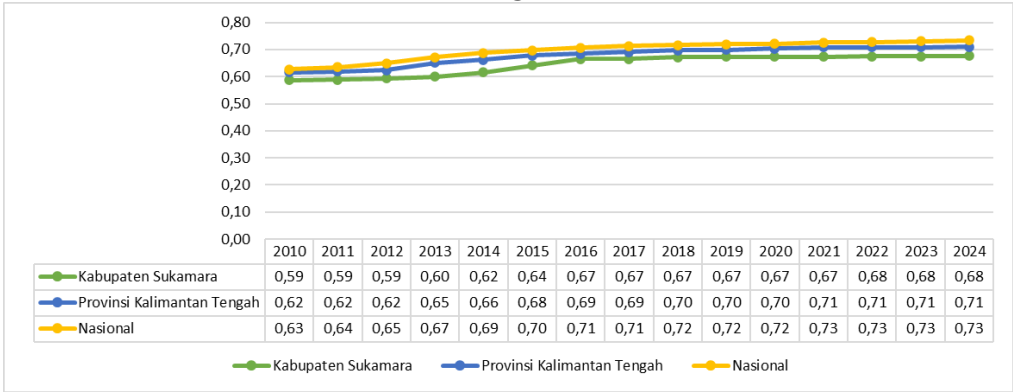


Sumber: Kabupaten Sukamara dalam Angka, 2011-2025

2. Harapan Lama Sekolah

Angka harapan lama sekolah di Kabupaten Sukamara dalam kurun waktu 2010-2024 terus mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan. Pada tahun 2024 harapan lama sekolah di Kabupaten Sukamara mencapai 0,68 Angka tersebut lebih rendah dibandingkan angka harapan lama sekolah Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2024 yakni berada pada angka 0,71. Pada tahun tersebut juga HLS Nasional lebih tinggi yaitu 0,73.

Gambar 2. 33 Grafik Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Nasional Tahun 2010-2024



Sumber: Kabupaten Sukamara dalam Angka, 2011-2025

3. Angka Literasi/Numerisasi

Literasi dan Numerisasi merupakan kompetensi atau kemampuan yang sifatnya general dan mendasar. Literasi merujuk pada kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, dan memahami informasi. Ini tidak hanya terbatas pada keterampilan dasar membaca dan menulis, tetapi juga melibatkan pemahaman yang mendalam terhadap teks, kemampuan menganalisis informasi, serta keterampilan berpikir kritis untuk mengevaluasi dan menggunakan informasi secara efektif. Literasi tidak hanya terkait dengan kata-kata tertulis, tetapi juga mencakup literasi numerik atau numerisasi. Numerisasi adalah kemampuan seseorang dalam memahami,





menggunakan dan berinteraksi dengan angka, serta menerapkan konsep-konsep matematika dalam berbagai situasi. Kemampuan ini melibatkan pemahaman terhadap bilangan, operasi matematika dasar, dan keterampilan dalam menggunakan angka dalam konteks sehari-hari maupun profesional.

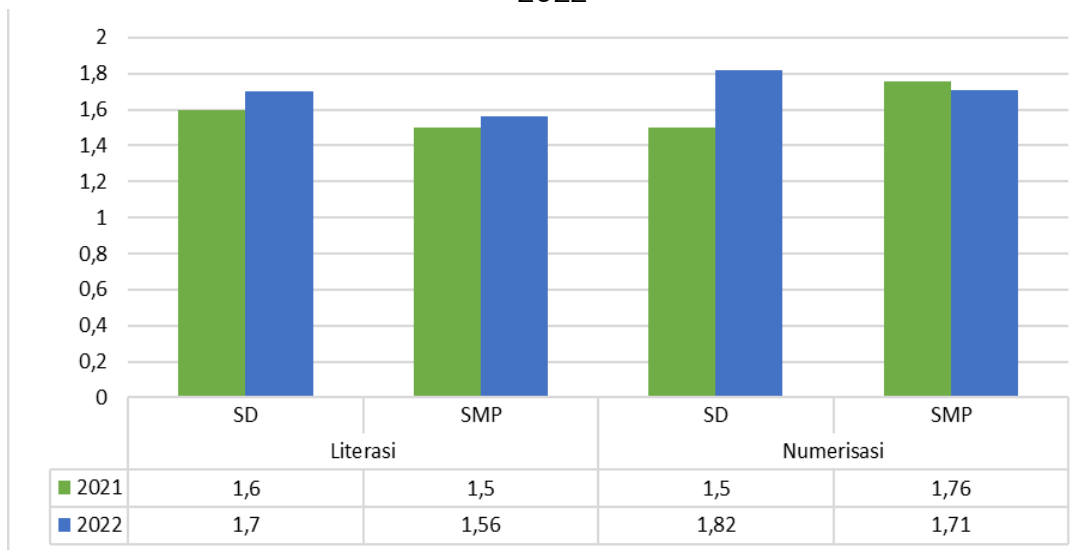
Penilaian kemampuan literasi/numerisasi dilakukan oleh pemerintah melalui pelaksanaan Asesmen Nasional (AN). Asesmen Nasional dilakukan untuk mengukur tingkat kemampuan literasi, numerisasi dan karakter siswa sebagai hasil proses belajar di satuan pendidikan. Asesmen Nasional dilakukan pada jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP) dan pendidikan menengah (SMA/SMK). Pengukuran kemampuan literasi/numerisasi dibagi menjadi 4 tingkat yaitu 1) Di atas kompetensi minimum (Mahir) dengan rentang nilai 2,10 - 3,00; 2) Mencapai kompetensi minimum (Cakap) dengan rentang nilai 1,80 - 2,09; 3) Dibawah kompetensi minimum (Dasar) dengan rentang nilai 1,40 - 1,79; dan 4) Jauh dibawah kompetensi minimum (Perlu Intervensi Khusus) dengan rentang nilai 1,00 - 1,39.

Angka literasi/numerisasi Kabupaten Sukamara dihitung pada tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pada periode tahun 2021-2022, Angka Literasi SD menunjukkan peningkatan angka dari 1,60 menjadi 1,70. Kondisi serupa juga terjadi pada Angka Literasi SMP yang meningkat dari 1,50 menjadi 1,56. Secara keseluruhan angka literasi di Kabupaten Sukamara masuk dalam kategori dasar atau berada di bawah kompetensi minimum, baik pada tingkat SD maupun SMP. Selain itu, data tersebut juga menunjukkan bahwa kemampuan literasi pada tingkat SD lebih tinggi daripada tingkat SMP.

Pada periode yang sama, Angka Numerisasi Kabupaten Sukamara juga mengalami peningkatan di tingkat SD maupun SMP. Angka Numerisasi SD pada tahun 2021 sebesar 1,5 dan meningkat menjadi 1,82 pada tahun 2022. Selain terjadi peningkatan nilai, juga terjadi perubahan kategori. Dimana pada tahun 2021, angka numerisasi SD Kabupaten Sukamara masuk ke dalam kategori dasar atau dibawah kompetensi minimum kemudian naik pada tahun 2022 menjadi cakap atau mencapai kompetensi minimum. Berbeda dengan angka numerisasi SD yang mengalami peningkatan, angka numerisasi SMP justru mengalami penurunan. Pada tahun 2021, angka numerisasi SMP sebesar 1,76 dan kemudian turun menjadi 1,71 pada tahun 2022. Angka numerisasi SMP Kabupaten Sukamara masuk dalam kategori dasar atau dibawah kompetensi minimum.



Gambar 2. 34 Grafik Angka Literasi/Numerisasi Kabupaten Sukamara Tahun 2021-2022



Sumber: Dokumen RPD Kabupaten Sukamara Tahun 2024-2026

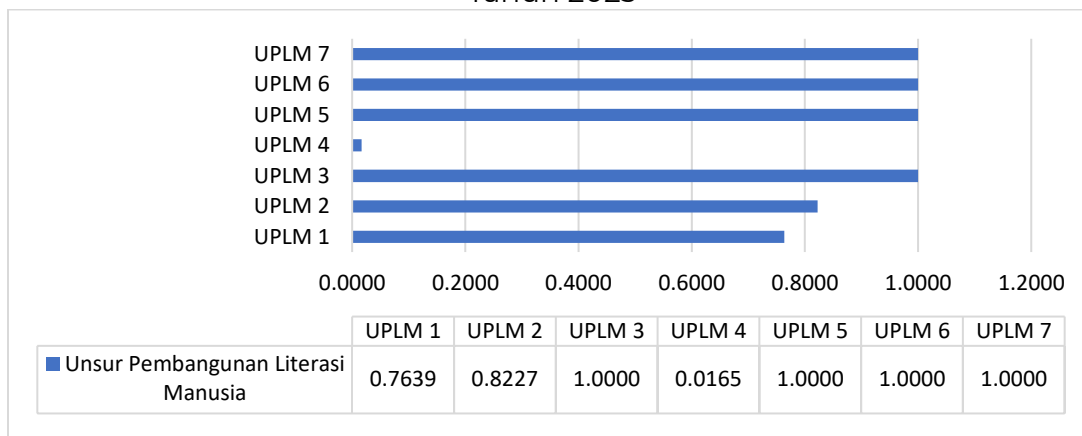
4. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas sumber daya manusia. Karena dengan literasi, tingkat pemahaman seseorang dalam mengambil kesimpulan dan informasi yang diterima menjadi lebih baik. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Terdapat tujuh unsur pembangunan literasi masyarakat, yaitu pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi, ketercukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan per hari, jumlah perpustakaan ber-SNP, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosial/promosi, dan anggota perpustakaan. Perpustakaan Nasional mengelompokkan nilai IPLM menjadi 5 kategori yaitu, Sangat Rendah (0-29,9), Rendah (30-49,9), Sedang (50-79,9), Tinggi (80-89,9), dan Sangat Tinggi (90-100).

Kabupaten Sukamara pada tahun 2023, memiliki nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) sebesar 80,04 dan masuk dalam kategori tinggi. Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) Kabupaten Sukamara Tahun 2023 menunjukkan besaran antara 0,0165 sampai 1. Rasio UPLM terbesar terjadi pada rasio ketercukupan tenaga perpustakaan, perpustakaan Ber-SNP, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi dan promosi, dan rasio anggota perpustakaan yaitu sebesar 1. Sedangkan, nilai rasio UPLM terendah terjadi pada rasio tingkat kunjungan masyarakat per hari yaitu sebesar 0,0165.



Gambar 2. 35 Grafik Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Sukamara Tahun 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2024

Keterangan:

UPLM 1 : Pemerataan Layanan Perpustakaan

UPLM 2 : Ketercukupan Koleksi Perpustakaan

UPLM 3 : Ketercukupan Tenaga Perpustakaan

UPLM 4 : Tingkat Kunjungan Masyarakat per Hari

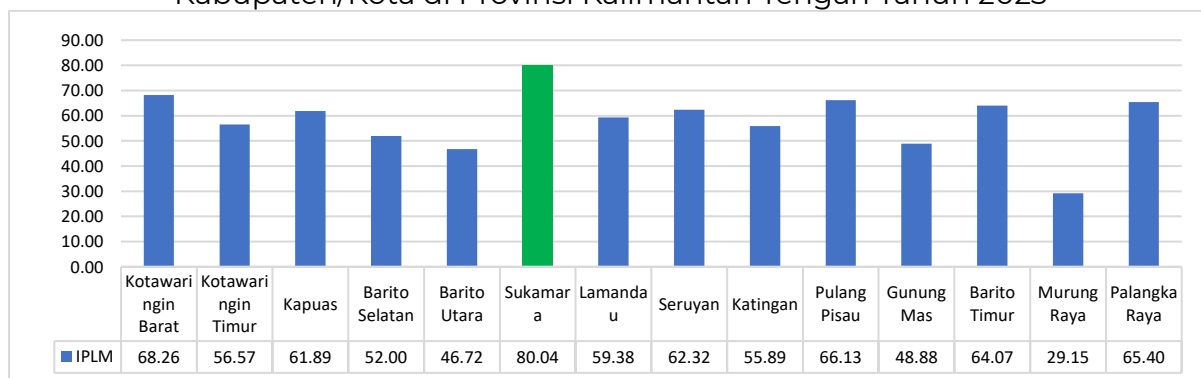
UPLM 5 : Perpustakaan ber-SNP

UPLM 6 : Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi dan Promosi

UPLM 7 : Anggota Perpustakaan

Apabila dibandingkan dengan nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Sukamara memiliki nilai IPLM tertinggi sebesar 80,04 pada tahun 2023. Dimana nilainya jauh lebih dari nilai IPLM Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 66,68. Di Provinsi Kalimantan Tengah hanya Kabupaten Sukamara yang nilai IPLM-nya masuk dalam kategori tinggi. Nilai IPLM kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Tengah berada di kategori rendah dan sedang. Dengan Kabupaten Murung Raya yang memiliki nilai IPLM paling rendah hanya sebesar 29,15.

Gambar 2. 36 Grafik Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023



Sumber: Perpustakaan Nasional, 2024

5. Indeks Literasi Digital

Indeks Literasi Digital merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur pengetahuan serta kecakapan masyarakat dalam menggunakan dan memanfaatkan media digital, seperti alat komunikasi, jaringan internet dan lainnya.

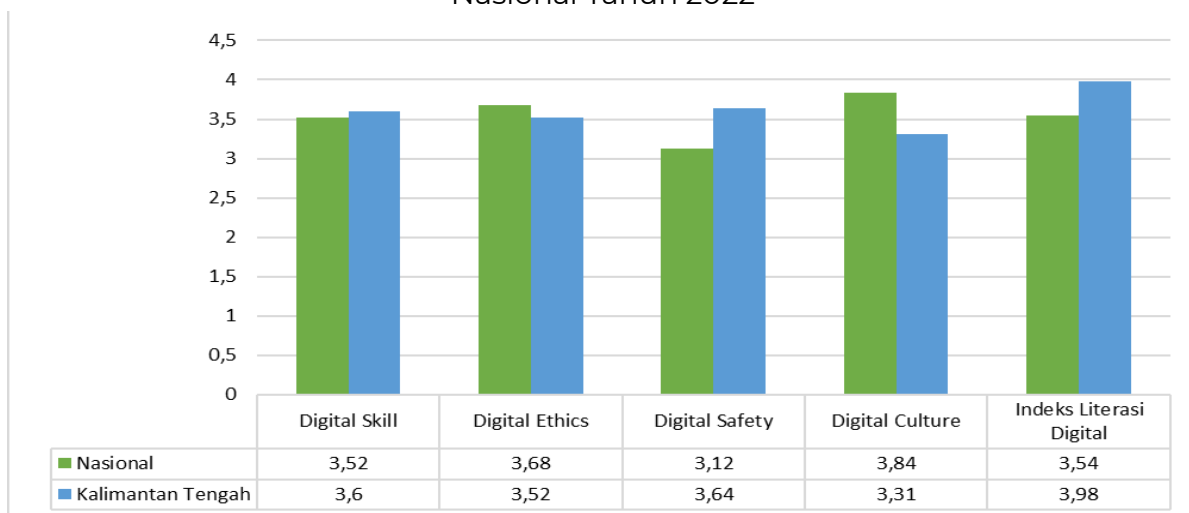




Indeks Literasi Digital dibentuk dari 4 pilar utama yaitu *Digital Skill*, *Digital Ethics*, *Digital Safety*, dan *Digital Culture*.

Indeks Literasi Digital Nasional tahun 2022 adalah sebesar 3,54 dengan Pilar *Digital Culture* menjadi pilar yang memiliki nilai tertinggi (3,84), dan Pilar *Digital Safety* merupakan pilar dengan nilai indeks terendah (3,12). Sedangkan nilai Indeks Literasi Digital Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 3,54 dimana Pilar *Digital Safety* menjadi pilar yang memiliki nilai tertinggi (3,64) dan Pilar *Digital Culture* merupakan pilar dengan nilai indeks terendah (3,31).

Gambar 2. 37 Nilai dan Pilar Indeks Literasi Digital Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2022



Sumber: <https://survei.literasidigital.id/>

Data Indeks Literasi Digital untuk Kabupaten Sukamara tidak tersedia karena perhitungan Indeks Literasi Digital hanya pada level Nasional dan Provinsi, untuk tetap dapat menggambarkan menggambarkan kemampuan penggunaan teknologi oleh masyarakat maka akan digunakan indeks pengganti yaitu Indeks Masyarakat Digital.

6. Indeks Masyarakat Digital

Indeks Masyarakat Digital merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaannya. Masyarakat digital sendiri diartikan sebagai sekumpulan individu yang menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-seharinya, di mana semua aktivitas yang dijalankan secara elektronik dan tanpa kertas (*paperless*) menjadi suatu hal yang biasa. Masyarakat ini diciptakan oleh digitalisasi dengan karakter esensialnya dibentuk melalui pengembangan teknologi digital, di mana semua ini kehidupannya sangat bergantung pada TIK, mulai dari penciptaan, distribusi, dan penggunaan seluruh kegiatan utamanya. Terdapat empat pilar utama pembentuk Indeks Masyarakat

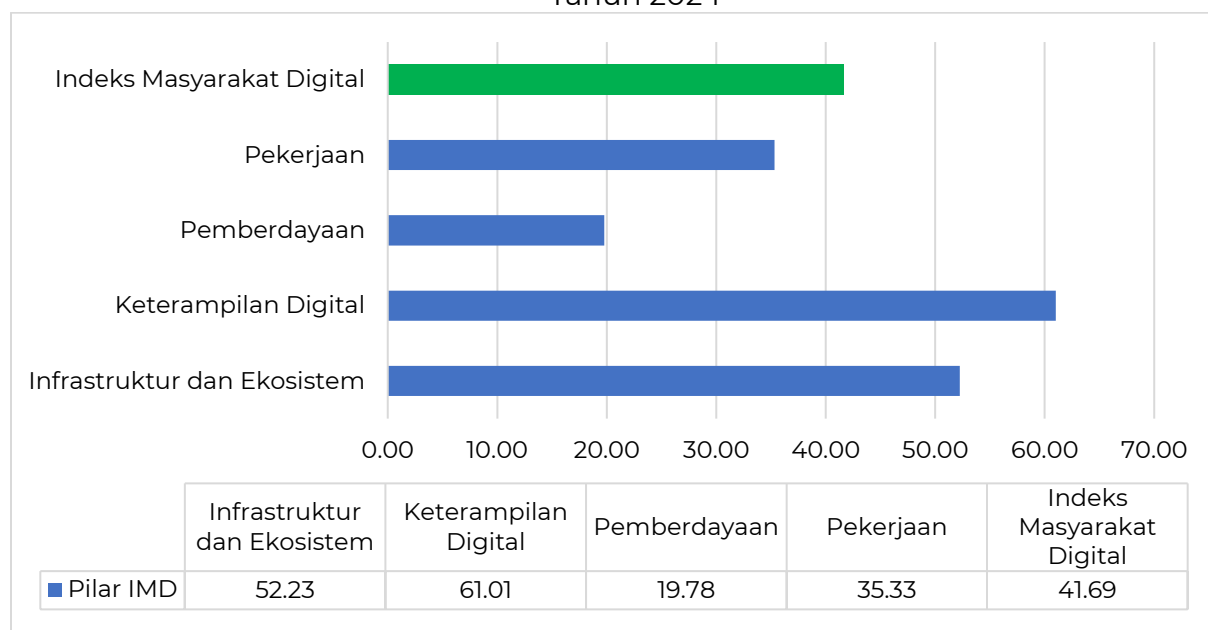




Digital Indonesia (IMDI) yaitu Infrastruktur dan Ekosistem, Keterampilan, Pemberdayaan, serta Pekerjaan.

Nilai Indeks Masyarakat Digital (IMD) Kabupaten Sukamara pada tahun 2024 sebesar 41,69 yang berasal dari rata-rata skor 4 pilar yaitu pilar infrastruktur dan ekosistem (52,23), pilar keterampilan digital (61,01), pilar pemberdayaan (19,78), dan pilar pekerjaan (35,33). Secara lebih rinci, pilar keterampilan digital memiliki poin paling tinggi yang artinya sebagian besar dari masyarakat Kabupaten Sukamara telah memiliki keterampilan digital atau memiliki penguasaan teknologi yang baik. Sedangkan nilai terendah ada pada pilar pemberdayaan, hal ini menunjukkan bahwa teknologi informasi belum sepenuhnya dimanfaatkan dengan baik dalam kegiatan masyarakat. Sehingga meskipun masyarakat Kabupaten Sukamara memiliki keterampilan digital yang baik, masyarakat belum memanfaatkannya untuk kegiatan sehari-hari.

Gambar 2. 38 Grafik Nilai Pilar Indeks Masyarakat Digital (IMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2024



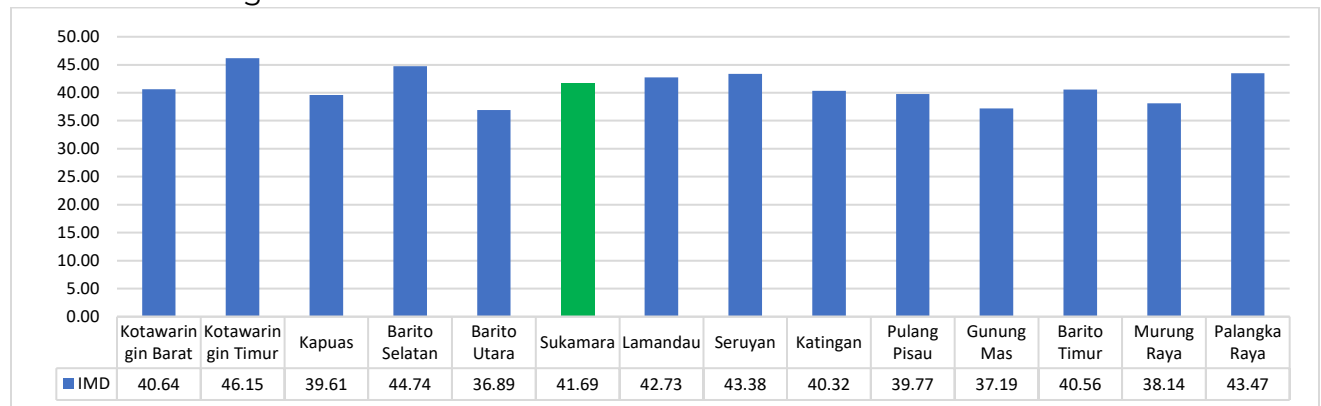
Sumber: <https://imdi.sdmdigital.id/>

Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Tengah, nilai Indeks Masyarakat Digital (IMD) Kabupaten Sukamara cenderung cukup tinggi. Nilai IMD Kabupaten Sukamara pada tahun 2024 sebesar 41,69 dan berada di peringkat 6. Kabupaten Kotawaringin Timur di peringkat pertama dengan nilai 46,15 dan Kabupaten Barito Utara di peringkat 14 atau terakhir dengan nilai 36,89.





Gambar 2. 39 Grafik Indeks Masyarakat Digital (IMD) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024



Sumber: <https://imdi.sdmdigital.id/>

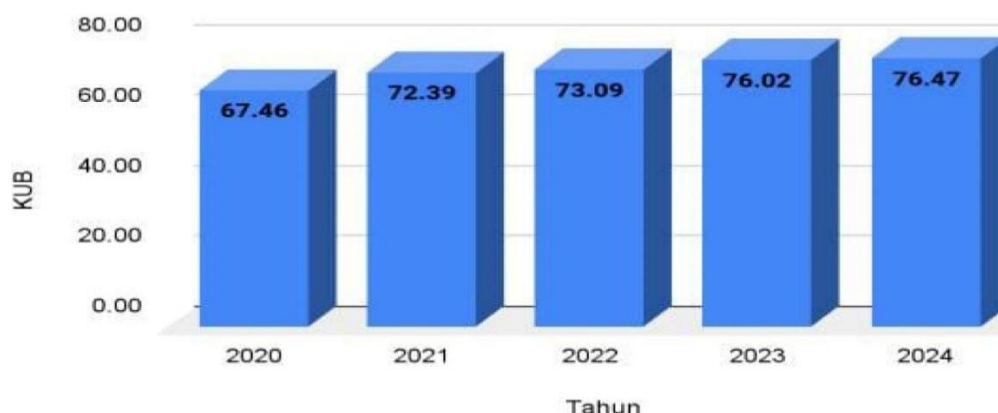
d. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

1. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) merupakan instrumen utama yang dijadikan sebagai alat pengukuran bagi capaian program-program kerukunan. IKUB diukur dengan mengacu pada tiga dimensi utama yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerja sama. Kriteria capaian IKUB adalah IKUB Sangat Rendah (0-20), IKUB Rendah (21-40), IKUB Sedang (41-60), IKUB Tinggi (61-80), IKUB Sangat Tinggi (80-100). Data IKUB untuk Kota Sukamara tidak tersedia, sehingga yang dianalisis adalah IKUB Provinsi Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional.

Nilai IKUB Nasional pada tahun 2020-2024 menunjukkan perubahan yang cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 nilai IKUB Nasional 67,46 kemudian terus meningkat hingga mencapai 76,47 pada tahun 2024. Secara keseluruhan nilai IKUB Nasional masuk dalam kategori IKUB Tinggi sedangkan untuk nilai IKUB Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2021 sebesar 76,12 dan masuk dalam IKUB Tinggi. Selain itu Provinsi Kalimantan Tengah berada pada peringkat 8 Nasional dengan nilai IKUB tertinggi menurut data tahun 2021.

Gambar 2. 40 Grafik Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: Kementerian Agama, 2020-202

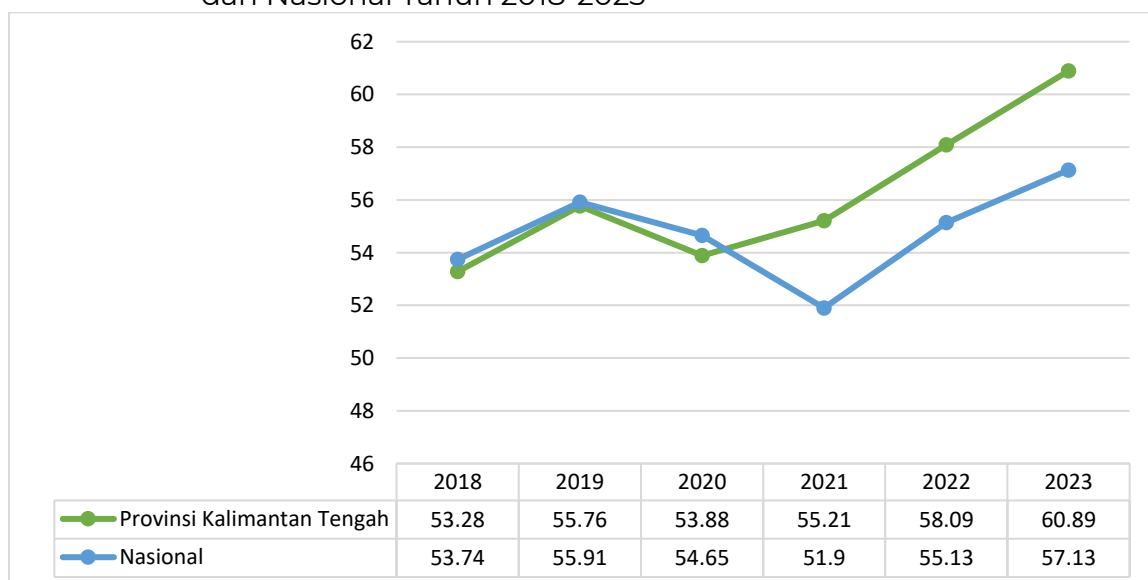


2. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan instrumen yang disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. IPK terdiri dari 31 indikator yang dikelompokkan ke dalam tujuh dimensi yang diadopsi secara global. Ketujuh dimensi tersebut mencakup dimensi ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, ekspresi budaya, budaya literasi dan gender. Kriteria capaian IPK adalah $IPK \leq 20$ (Kurang), $20 < IPK \leq 40$ (Sedang), $40 < IPK \leq 60$ (Cukup), $60 < IPK \leq 80$ (Baik), $80 < IPK \leq 100$ (Amat Baik). Data IPK untuk Kabupaten Sukamara tidak tersedia, sehingga yang dianalisis adalah IPK Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional.

Nilai IPK Provinsi Kalimantan Tengah pada periode tahun 2018-2023 mengalami perubahan yang fluktuatif. Pada tahun 2018 nilai IPK Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 53,28 dan masuk dalam kriteria cukup, pada tahun selanjutnya nilainya naik sebesar 2,48 poin menjadi 55,76. Namun karena pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 nilai IPK Provinsi Kalimantan tengah mengalami penurunan dan kembali pada kondisi yang sama di tahun 2018. Namun di tahun 2021 nilai IPK Provinsi Kalimantan Tengah mampu kembali meningkat menjadi 55,21 dan nilainya terus meningkat di tahun 2022 menjadi 58,09 dan tahun 2023 mencapai 60,89. Kondisi yang hampir serupa terjadi pada nilai IPK Nasional, dimana pada tahun 2018 nilai IPK Nasional sebesar 53,74 yang kemudian turun menjadi 51,9 pada tahun 2021. Pada tahun 2022, nilai IPK Nasional menunjukkan pertumbuhan yang positif menjadi 59,43 dan kembali meningkat di tahun 2023 mencapai 57,13.

Gambar 2. 41 Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2018-2023



Sumber: <https://ipk.kemdikbud.go.id/>



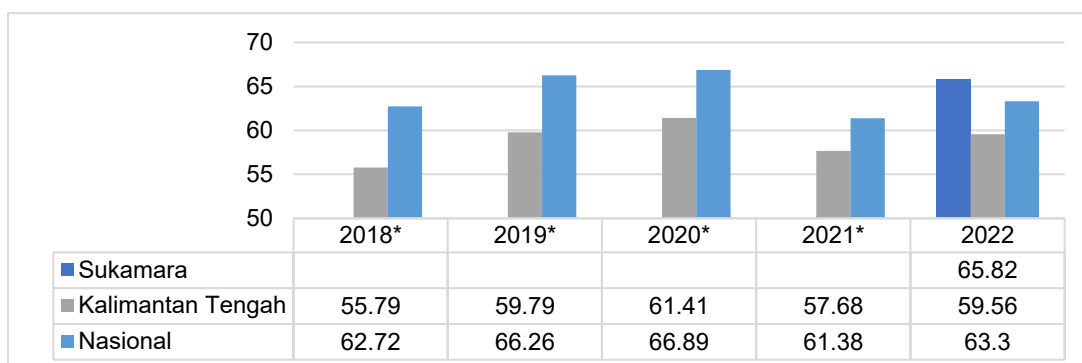
e. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif

1. Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan ukuran baku yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia. IPA dibentuk dari Indeks Perlindungan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) yang berdasarkan 5 (lima) klaster hak anak dalam Konvensi Hak Anak. Lima klaster yang menjadi dasar pembentukan IPA adalah Hak Sipil dan Kebebasan; Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya; serta Perlindungan Khusus. Data IPA Kabupaten Sukamara hanya tersedia tahun 2022, sehingga dapat didukung dengan analisis IPA Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional.

Nilai IPA Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018-2021 menunjukkan perubahan yang fluktuatif. Pada periode tahun 2018-2022 nilai IPA Provinsi Kalimantan Tengah mengalami perkembangan positif namun pada tahun 2021 terjadi penurunan IPA yang kemudian naik kembali di tahun 2022. Nilai IPA tertinggi Provinsi Kalimantan Tengah terjadi pada tahun 2020 yakni sebesar 61,41 yang kemudian turun menjadi 57,68 pada tahun 2021 dan naik menjadi 59,56 di tahun 2022. Nilai IPA Nasional mengalami tren kenaikan pada periode tahun 2018-2020 yakni sebesar 66,89 di tahun 2020 namun turun menjadi 61,38 di tahun 2021 dan kembali naik tahun 2022 menjadi 63,30. Penurunan nilai IPA Provinsi dan Nasional ini salah satunya dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020-2021 dan mulai bangkit kembali di tahun 2022. Kabupaten Sukamara mulai tahun 2022 menghitung IPA yang hasilnya lebih tinggi dari Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional yaitu sebesar 65,82.

Gambar 2. 42 Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber: Indeks Perlindungan Anak Indonesia, 2019-2023

Keterangan :

* : Data IPA Kabupaten Sukamara tidak tersedia



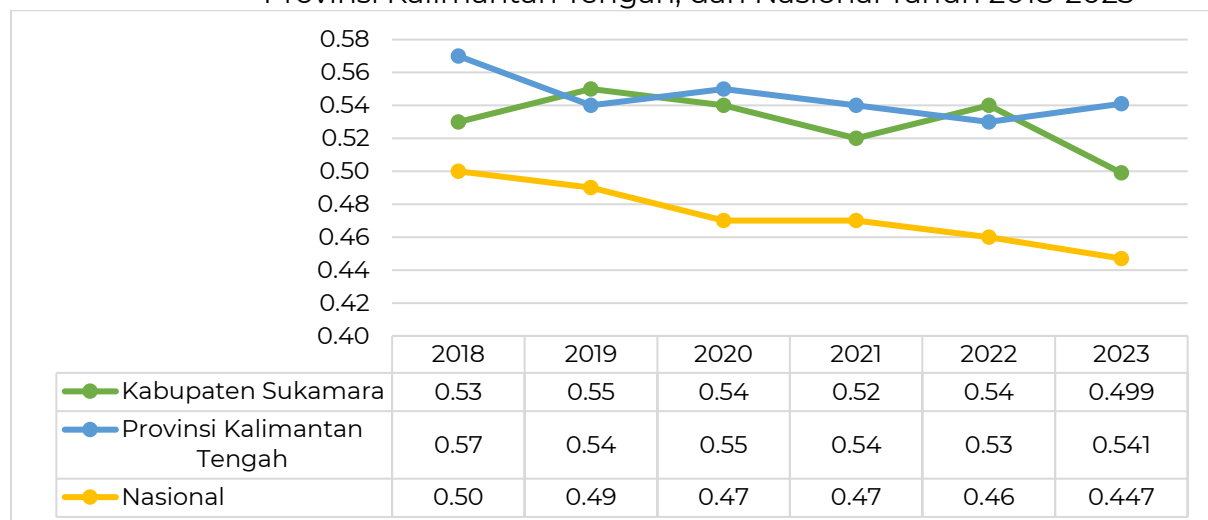


2. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menggambarkan kerugian atau kegagalan dari pencapaian pembangunan manusia akibat adanya ketidaksetaraan gender yang diukur dari aspek kesehatan, pemberdayaan, serta akses dalam pasar tenaga kerja. Pengukuran IKG dilakukan untuk membantu pemerintah dan pemangku kepentingan dalam mengevaluasi capaian pembangunan menurut gender dan memformulasikan kebijakan yang lebih tepat.

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Sukamara pada tahun 2018-2023 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Nilai IKG Kabupaten Sukamara berkisar antara 0,52 hingga 0,55. Pada tahun 2010 nilai IKG Kabupaten Sukamara sebesar 0,53. Nilainya fluktuatif mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahun, hingga pada tahun 2022 nilai IKG Kabupaten Sukamara sebesar 0,54 kemudian turun menjadi 0,499 di tahun 2023. Penurunan nilai IKG yang terjadi di Kabupaten Sukamara menunjukkan bahwa ketimpangan gender semakin kecil atau kesetaraan semakin membaik. Apabila dibandingkan dengan IKG Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional, IKG Kabupaten Sukamara berada diatas nilai IKG Nasional dan secara bergantian berada di atas atau di bawah IKG Provinsi.

Gambar 2. 43 Grafik Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Nasional Tahun 2018-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018-2023

3. Indeks Pembangunan Gender

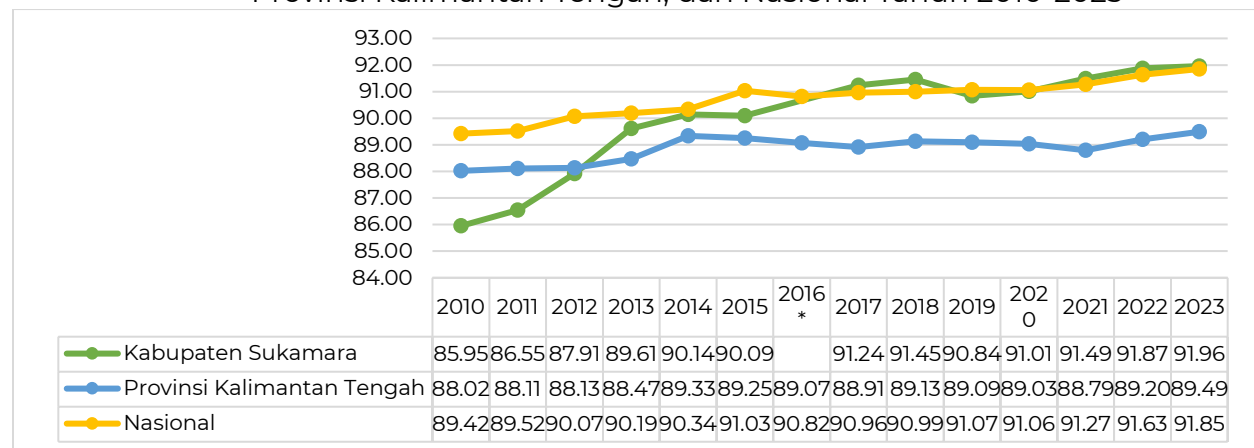
Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antara gender dalam pencapaian pembangunan manusia. Nilai IPG yaitu perbandingan (rasio) capaian antara IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Adapun hasil indeks ini diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap tahun. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 menjadi patokan untuk menginterpretasikan angka IPG, karena angka 100 merupakan nilai rasio paling



sempurna. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), IPG dapat diklasifikasikan menjadi 2 kategori, yaitu kategori rendah (IPG < 90,00) dan tinggi (IPG > 90,00).

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Sukamara menunjukkan perkembangan yang fluktuatif namun cenderung meningkat. Pada tahun 2010 nilai IPG Kabupaten Sukamara sebesar 85,96 dan masuk dalam kategori rendah. Nilai IPG Kabupaten Sukamara setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2014, nilai IPG Kabupaten Sukamara mencapai 90,14 dan masuk ke kategori tinggi. Sejak tahun 2014, nilai IPG Kabupaten Sukamara terus berada pada kategori tinggi hingga mencapai nilai 91,96 pada tahun 2023. Secara keseluruhan apabila dibandingkan dengan IPG Nasional dan Provinsi Kalimantan Tengah, IPG Kabupaten Sukamara mampu berkembang melebihi IPG Nasional dan Provinsi.

Gambar 2. 44 Grafik Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Nasional Tahun 2010-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010-2023

Keterangan :

* : Data tidak tersedia

2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

a. Daya Saing Sumber Daya Manusia

1. Angka Ketergantungan

Angka ketergantungan merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia non produktif dengan jumlah penduduk usia produktif. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) penduduk usia produktif yaitu penduduk yang memiliki usia 15-64 tahun. Usia tersebut merupakan usia angkatan kerja. Penduduk usia non produktif yaitu penduduk yang memiliki usia 0-14 tahun dan 65+ atau 65 tahun ke atas. Usia non produktif tersebut tergolong usia bukan angkatan kerja. Semakin rendah angka ketergantungan, semakin baik pula kondisi ekonomi suatu negara. Hal ini disebabkan oleh rendahnya masyarakat non produktif yang harus ditanggung secara ekonomi oleh masyarakat produktif. Tanggungan ini berbentuk jaminan sosial, bantuan



pensiun, serta fasilitas lainnya yang didapatkan oleh penduduk non produktif walaupun mereka tidak bekerja.

Tabel 2. 28 Rasio Ketergantungan Penduduk di Kabupaten Sukamara

Nama Daerah	Dependency Ratio (DR)
Jelai	24,07
Pantai Lunci	48,71
Sukamara	40,92
Balai Riam	40,07
Permata Kecubung	39,97
Kabupaten Sukamara	39,68

Sumber: BPS Kabupaten Sukamara, 2020 (diolah)

Angka Ketergantungan atau rasio ketergantungan Kabupaten Sukamara secara keseluruhan, yaitu 39,68. Artinya sebanyak sekitar 39-40 penduduk usia non produktif di Kabupaten Sukamara yang bergantung pada 100 penduduk usia produktif. Rasio ketergantungan paling besar berada pada Kecamatan Pantai Lunci, yaitu sebesar 48,71, sedangkan yang paling kecil berada pada Kecamatan Jelai, yakni sebesar 24,07. Kondisi ini menunjukkan bahwa di Kecamatan Pantai Lunci terdapat sekitar 48-49 dan di Kecamatan Jelai terdapat sekitar 24-25 penduduk tidak produktif yang bergantung pada 100 penduduk usia produktif. Angka ketergantungan yang semakin kecil menunjukkan bahwa kondisi ekonomi di suatu wilayah juga akan semakin baik.

b. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

1. Rasio Kewirausahaan

Rasio Kewirausahaan merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang melakukan kegiatan kewirausahaan dengan jumlah penduduk total. Pada level nasional, Rasio Kewirausahaan menjadi prasyarat Indonesia untuk menjadi negara maju pada 2045 dengan target yang harus dicapai minimal sebesar 4,00. Rasio Kewirausahaan Nasional tahun 2023 sebesar 3,47 yang artinya sebanyak 3,47 persen penduduk merupakan wirausahawan. Peningkatan rasio kewirausahaan perlu dilakukan sebagai upaya untuk memperkuat struktur ekonomi nasional. Secara lebih lengkap data Rasio Kewirausahaan untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota belum tersedia.

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

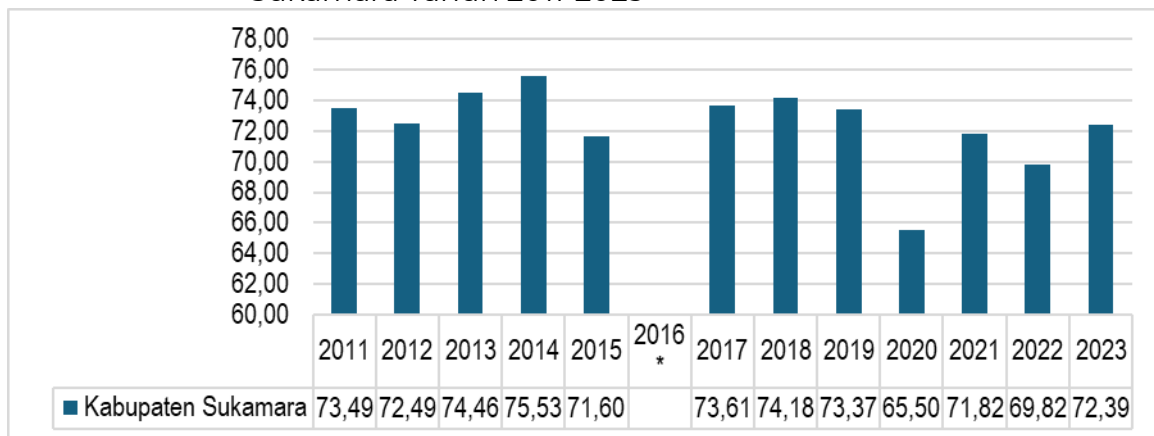
Ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan dibidang ketenagakerjaan yaitu antara lain adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPAK merupakan salah satu indikator untuk mengetahui keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi yaitu dengan membandingkan antara jumlah penduduk yang termasuk





Angkatan kerja dengan penduduk yang termasuk usia kerja (15 tahun ke atas). Tren TPAK Kabupaten Sukamara tahun 2011-2024 fluktuatif dimana tahun 2011 sebesar 73,49 dan di tahun 2023 turun menjadi 72,39.

Gambar 2. 45 Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Sukamara Tahun 2011-2023



Sumber: Kabupaten Sukamara Dalam Angka 2024

Keterangan:

* : Data Tidak Tersedia

3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah pada satu periode waktu tertentu. Nilai PDRB menggambarkan kemampuan suatu wilayah dalam menghasilkan nilai output dari seluruh sektor produksi. Perhitungan PDRB dilakukan dengan menggunakan dasar atas harga berlaku dan atas harga konstan.

PDRB yang dihitung atas dasar harga berlaku (ADHB) atau PDRB nominal disusun menggunakan harga pada tahun berjalan sehingga mampu menggambarkan nilai tambah barang dan jasa pada periode tersebut. Pada umumnya PDRB ADHB digunakan untuk melihat kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sedangkan PDRB yang dihitung atas dasar harga konstan (ADHK) atau PDRB riil disusun menggunakan harga yang berlaku pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB ADHK digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi.

Struktur perekonomian Kabupaten Sukamara ditinjau dari nilai tambah yang dihasilkan oleh setiap sektor produksi yang ada pada PDRB ADHB. Nilai distribusi tersebut dapat menunjukkan besaran kontribusi masing-masing sektor dalam pembentukan total PDRB Kabupaten Sukamara. Dengan melihat kontribusi masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB, maka dapat diketahui seberapa besar peran suatu sektor dalam menunjang perekonomian daerah.

PDRB ADHB Kabupaten Sukamara pada tahun 2020 hingga tahun 2024 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 nilai PDRB ADHB Kabupaten Sukamara sebesar 4.421,5038 miliar rupiah. Dalam waktu 5 tahun saja nilai PDRB ADHB





Kabupaten Sukamara bertambah lebih dari 1.000 miliar rupiah dari tahun 2020 menjadi sebesar 6.497,9 miliar rupiah pada tahun 2024. Peningkatan signifikan ini menunjukkan kondisi ekonomi daerah yang baik dan dapat menjadi potensi.

Tabel 2. 29 Nilai PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha / Industry		Nilai PDRB ADHB (Miliar Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1414,0766	1674,7717	1870,1147	2060,6	2278,1
B	Pertambangan dan Penggalian	36,7335	38,0135	40,0413	43,9	46,7
C	Industri Pengolahan	964,5343	1082,1577	1196,1909	1285,8	1354,7
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,5532	1,7	1,789	2	2,3
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,6533	0,6621	0,6617	0,8	0,8
F	Konstruksi	384,4907	423,2155	468,6056	502,8	567
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor	627,4102	693,2183	765,5013	830,1	885,2
H	Transportasi dan Pergudangan	118,0057	124,8547	134,6865	149,1	160
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	51,6171	53,7297	59,2154	65	74,6
J	Informasi dan Komunikasi	56,8716	61,7058	66,9394	70	73,9
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	81,4461	86,5715	92,1267	98,2	102,1
L	Real Estat	64,8896	67,3314	71,7205	78,3	87,2
M,N	Jasa Perusahaan	1,6889	1,7442	1,9204	2,1	2,2
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	284,2139	279,1564	304,8484	321,6	401,7
P	Jasa Pendidikan	219,1996	233,7527	255,4782	273,1	308,3
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	83,4217	89,075	95,8795	102,6	114,4
R,S,T,U	Jasa Lainnya	30,698	32,0085	34,2686	36	38,9
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB)		4421,5038	4943,6687	5459,9881	5922,1	6497,9

Sumber: Kabupaten Sukamara Dalam Angka, 2021-2025

Dilihat dari kontribusinya pada PDRB ADHB, 3 sektor utama yang memberikan kontribusi terbesar adalah Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Sektor Industri Pengolahan; serta Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Dengan nilai atau persentase kontribusi pada tahun 2024 di masing-masing sektor tersebut sebesar 35,06 persen untuk Sektor Pertanian, Kehutanan, dan





Perikanan; 20,85 persen untuk Sektor Industri Pengolahan; serta 13,62 persen untuk Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Sektor yang memberikan kontribusi paling kecil pada tahun 2024 adalah Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang dengan persentase secara berturut-turut sebesar kisaran 0,01 persen.

Tabel 2. 30 Distribusi Persentase PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha / Industry		Distribusi Nilai PDRB ADHB (Persen)				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	31,98	33,88	34,25	34,79	35,06
B	Pertambangan dan Penggalian	0,83	0,77	0,73	0,74	0,72
C	Industri Pengolahan	21,815	21,89	21,91	21,71	20,85
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,035	0,034	0,03	0,034	0,04
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,015	0,013	0,01	0,014	0,01
F	Konstruksi	8,69	8,56	8,58	8,49	8,73
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor	14,19	14,02	14,02	14,01	13,62
H	Transportasi dan Pergudangan	2,67	2,53	2,47	2,52	2,46
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,17	1,087	1,08	1,09	1,15
J	Informasi dan Komunikasi	1,29	1,25	1,23	1,18	1,14
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,84	1,75	1,69	1,66	1,57
L	Real Estat	1,47	1,36	1,31	1,32	1,34
M,N	Jasa Perusahaan	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	6,43	5,65	5,58	5,43	6,18
P	Jasa Pendidikan	4,96	4,73	4,68	4,61	4,74
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,89	1,8	1,76	1,73	1,76
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,69	0,65	0,63	0,61	0,6
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB)		100	100	100	100	100

Sumber: Kabupaten Sukamara Dalam Angka, 2021-2025

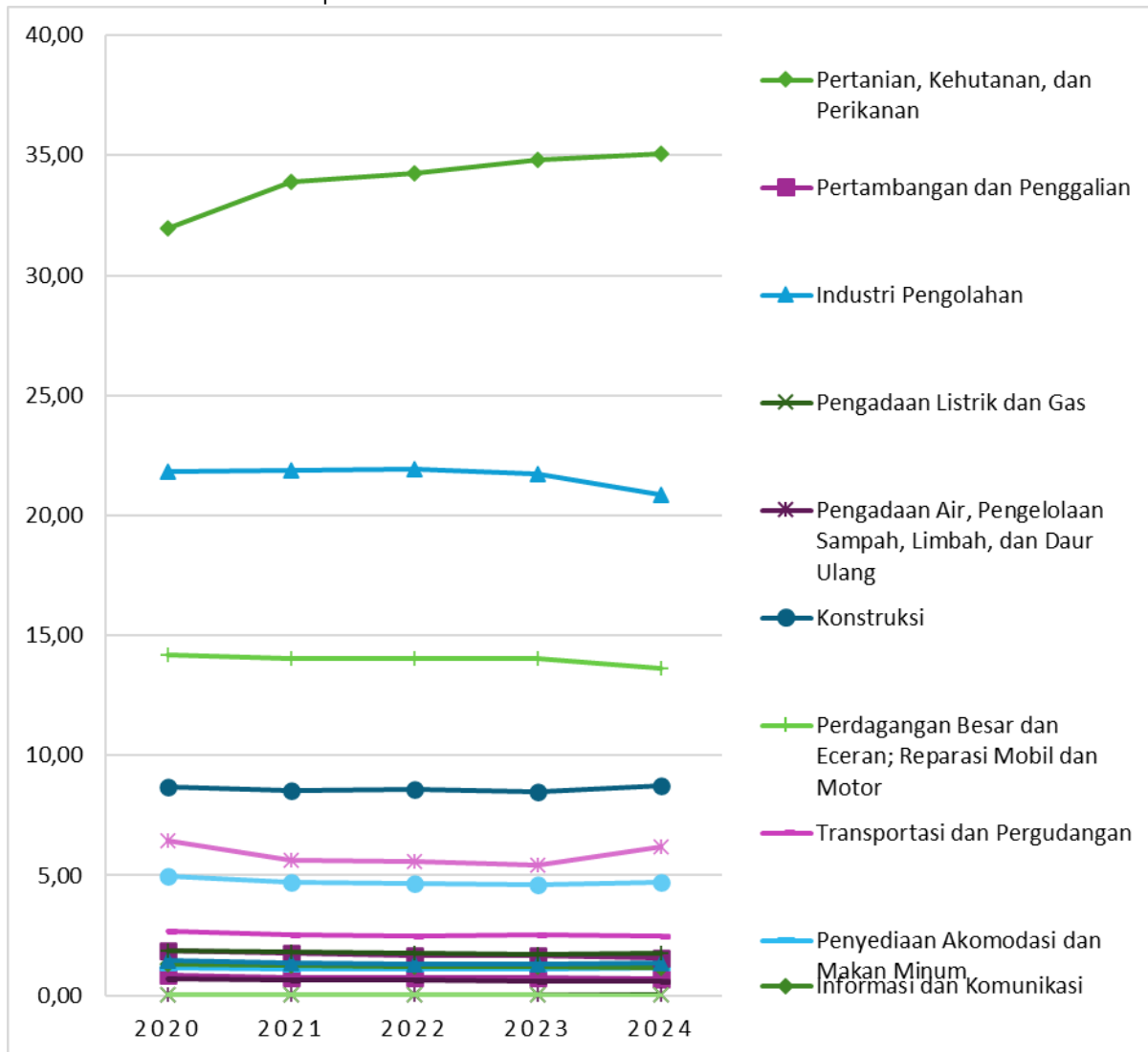
Nilai kontribusi di atas menunjukan bahwa perekonomian Kabupaten Sukamara masih bergantung pada sektor primer dan sekunder yaitu sektor pertanian, pengolahan dan perdagangan. Selama tahun 2020-2024, Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Sektor Industri Pengolahan; serta Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menjadi sektor utama yang





membentuk struktur perekonomian dan menjadi sektor unggulan di Kabupaten Sukamara. Tren transformasi struktur ekonomi dan sektor unggulan di Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024 disajikan sebagai berikut.

Gambar 2. 46 Grafik Transformasi Struktur Ekonomi dan Sektor Unggulan di Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024



Sumber: Kabupaten Sukamara Dalam Angka, 2021-2025 (diolah)

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator penting dalam perekonomian wilayah. Adanya pertumbuhan ekonomi menandakan bahwa kondisi perekonomian di suatu wilayah mengalami peningkatan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukamara dapat diketahui dengan menganalisis nilai tambah yang dihasilkan oleh setiap sektor produksi yang ada pada nilai PDRB ADHK. Nilai PDRB ADHK Kabupaten Sukamara terus mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020 nilai PDRB ADHK Kabupaten Sukamara sebesar 2.905,47 miliar rupiah yang kemudian nilainya terus meningkat hingga mencapai 3.527,90 miliar rupiah pada tahun 2024.





Tabel 2. 31 Nilai PDRB ADHK menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha / Industry		Nilai PDRB ADHK (Miliar Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	968,53	1.023,4	1.087,12	1.150,90	1.166,10
B	Pertambangan dan Penggalian	24,99	25,5	26,34	27,9	28,8
C	Industri Pengolahan	694,98	733,6	776,42	820	810
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,12	1,2	1,22	1,4	1,5
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,37	0,4	0,37	0,4	0,4
F	Konstruksi	241,34	254,3	270,49	288,3	318,5
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor	359,17	376,1	397,31	421,7	440,7
H	Transportasi dan Pergudangan	68,76	71,1	73,49	77,7	80,6
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	30,05	31,1	32,74	35	38,5
J	Informasi dan Komunikasi	41,21	43,3	44,84	45,8	48,2
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	53,96	56,7	57,90	61	64,4
L	Real Estat	38,60	39,7	40,92	42,3	46
M,N	Jasa Perusahaan	1,10	1,1	1,18	1,2	1,2
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	186,99	180,8	190,99	201,3	241,7
P	Jasa Pendidikan	124,92	132,2	137,58	142,7	156,8
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	50,42	53,2	55,30	57,5	62,4
R,S,T,U	Jasa Lainnya	18,96	19,4	20,01	20,6	21,9
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB)		2.905,47	3.043,1	3.214,21	3.395,60	3.527,9

Sumber: Kabupaten Sukamara Dalam Angka, 2021-2025

c. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

1. Indeks Ekonomi Hijau

Indeks Ekonomi Hijau atau *Green Economy Index* (GEI) merupakan satuan ukur yang digunakan untuk mengukur efektivitas transformasi ekonomi ke arah pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan. GEI terdiri dari 15 indikator yang mencakup 3 pilar utama, yaitu ekonomi (intensitas emisi, intensitas energi, pendapatan nasional bruto (PNB), sosial (tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, angka harapan hidup, dan rata-rata lama sekolah), dan lingkungan (tutupan lahan, lahan gambut terdegradasi, penurunan emisi, sampah terkelola, dan energi baru terbarukan) yang mencerminkan pembangunan ekonomi hijau. GEI bertujuan menjaga arah pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang dan mempercepat penerapan program pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim sebagai tulang punggung dalam transisi menuju ekonomi hijau. Data untuk GEI belum tersedia baik di tingkat Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota.



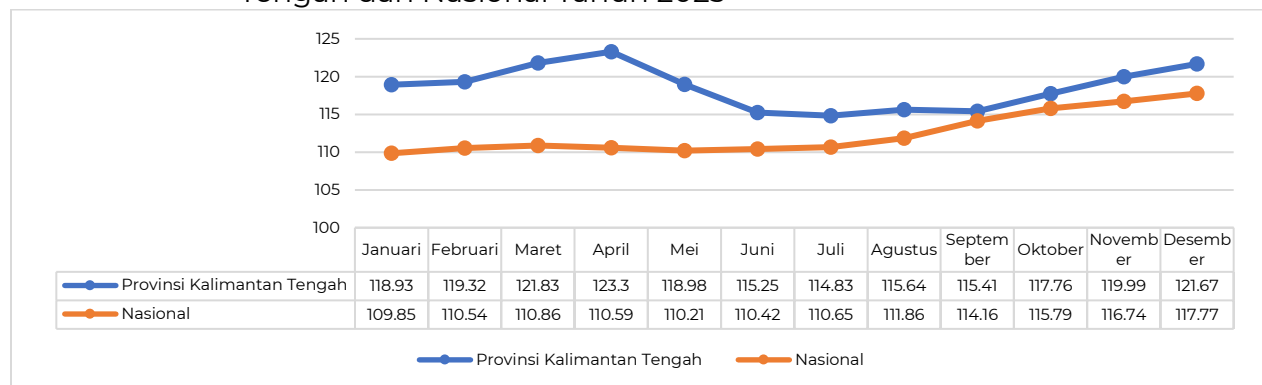


2. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) yang sering dikaitkan dengan kondisi ekonomi petani merupakan perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). NTP merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di pedesaan. Semakin tinggi NTP, maka semakin tinggi kemampuan atau daya beli petani di pedesaan. Kabupaten Sukamara belum memiliki data NTP sehingga data yang dianalisis adalah NTP Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional.

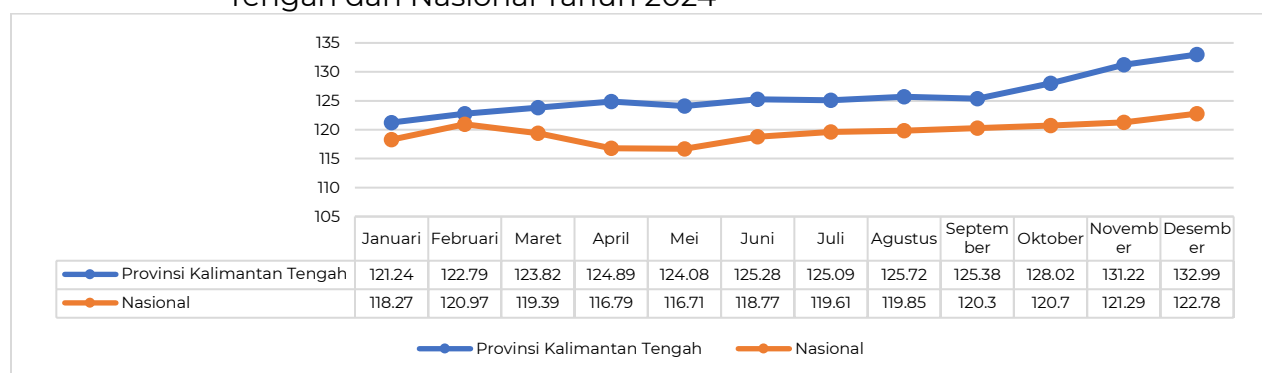
Pada tahun 2023, NTP Provinsi Kalimantan Tengah di bulan Januari adalah sebesar 118,93 dan pada akhir bulan Desember menjadi 121,67 yang menunjukkan terjadinya kenaikan NTP sebesar 2,74 persen. Namun, kondisi berbeda terjadi pada indeks NTP Nasional, pada bulan Januari 2023 NTP nasional adalah sebesar 109,85 kemudian mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 7,92 persen menjadi 117,77 pada bulan Desember 2023. Kondisi NTP pada tahun 2024 Provinsi Kalimantan Tengah pada bulan Januari sebesar 121,24 kemudian nilainya mengalami perubahan yang sangat fluktuatif dan berakhir pada indeks 132,99 pada bulan Desember 2024. Sedangkan untuk NTP Nasional pada tahun 2024 mengalami peningkatan nilai yang mana pada bulan Januari nilai indeks adalah sebesar 118,27 dan naik sebesar 4,51 persen menjadi 122,78 pada bulan Desember 2024.

Gambar 2. 47 Grafik Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2023



Sumber: Statistik Nilai Tukar Petani, 2024

Gambar 2. 48 Grafik Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025



d. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

1. Indeks Infrastruktur

Indeks Infrastruktur merupakan salah satu indikator yang membentuk Indeks Pembangunan Kota atau *City Development Index* (CDI) yang digunakan untuk mengukur kinerja kota berdasarkan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada fasilitas-fasilitas dasar. Fasilitas dasar yang menyusun Indeks Infrastruktur adalah akses air bersih, akses sanitasi, akses listrik, dan akses telepon. Indeks infrastruktur yang semakin tinggi menunjukkan bahwa tingkat pembangunan di suatu kota semakin baik. Secara lebih lengkap data Indeks Infrastruktur untuk Kabupaten Sukamara belum tersedia.

2. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur

Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur merupakan sarana bagi pemerintah daerah untuk menilai seberapa baik pembangunan infrastruktur yang sudah berjalan. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur berkaitan dengan kepuasan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Indeks ini disusun berdasarkan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur yang memberikan informasi perspektif masyarakat secara obyektif, komprehensif dan kredibel, baik dalam aspek pembangunan fisik maupun aspek manfaat. Secara lebih lengkap data Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur untuk Kabupaten Sukamara belum tersedia.

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

1. Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*e-Government Index*) adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam layanan pemerintahan suatu daerah. Indeks ini mencerminkan sejauh mana pemerintah suatu daerah telah bergerak menuju sistem pemerintahan berbasis elektronik yang efisien dan terbuka.

Indeks SPBE Kabupaten Sukamara mengalami perbaikan dari tahun ke tahun dimana tahun 2021 berada pada angka 1,51 dengan kategori Kurang. Kemudian pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 1,84 dengan kategori Cukup, dan pada tahun 2023 dengan kategori yang sama dengan tahun 2022 yaitu Cukup namun mengalami peningkatan nilai menjadi 2,48, dan pada tahun 2024 meningkat menjadi kategori Baik dengan nilai 2,75.

2. Indeks Pelayanan Publik

Berdasarkan PermenPAN RB No.17 Tahun 2017, Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan





Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.

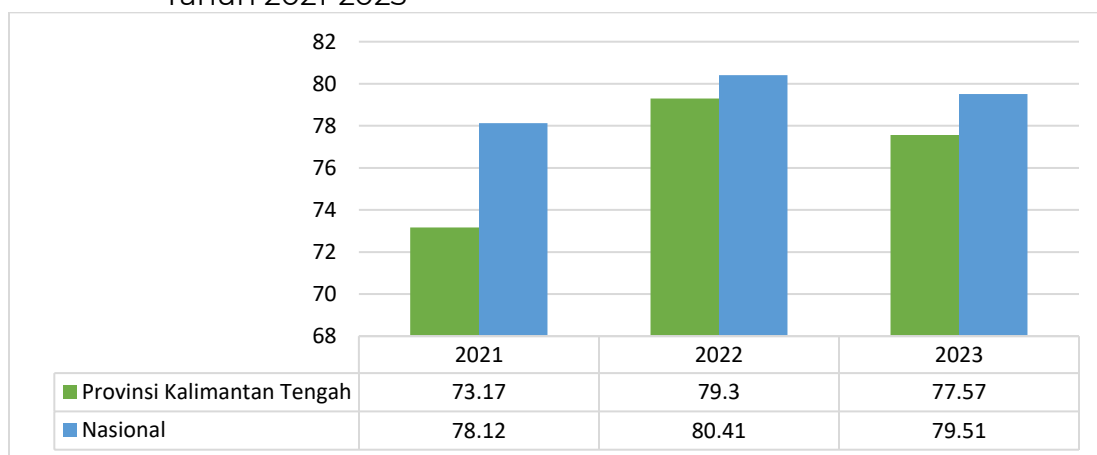
Penyusunan indikator IPP dihasilkan melalui persilangan antara 6 prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik (keadilan, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, berdaya guna, dan aksesibilitas) dengan 6 aspek penilaian kinerja instansi terhadap pelayanan publik (kebijakan pelayanan, sarana prasarana, konsultasi dan pengaduan, profesionalisme SDM, sistem informasi pelayanan publik, dan inovasi pelayanan. Data untuk IPP Kabupaten Sukamara belum tersedia.

3. Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi (IDI) merupakan alat ukur kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana perkembangan dan penerapan demokrasi di tingkat pusat maupun daerah. Tingkat capaian IDI diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi. Untuk saat ini pengukuran IDI baru dilaksanakan pada tingkat Nasional dan Provinsi, sehingga data Indeks Demokrasi untuk Kota Sukamara belum tersedia. Analisis yang dilakukan akan menggunakan data IDI Nasional dan Provinsi Kalimantan Tengah.

Indeks Demokrasi Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2021-2023 menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2021, IDI Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 73,17 kemudian mengalami peningkatan sebesar 6,13 poin menjadi 79,3 pada tahun 2022. Kemudian di tahun 2023 kembali menurun menjadi 77,57. Kondisi serupa juga terjadi pada IDI Nasional yang mana pada tahun 2021 IDI Nasional adalah sebesar 78,12 dan naik menjadi 80,41 pada tahun 2022 dan kemudian menurun menjadi 79,51 pada tahun 2023.

Gambar 2. 49 Grafik Indeks Demokrasi Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2021-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021-2023



4. Indeks Rasa Aman

Rasa aman merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia yang kemudian pemerintah wajib untuk memenuhi kebutuhan tersebut, karena rasa aman berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Rasa aman menjadi salah satu kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah maka diperlukan alat ukur yang dapat mencerminkan situasi keamanan yang dirasakan masyarakat. Oleh karena itu disusun suatu indeks mengenai keamanan manusia, yang kemudian disebut dengan Indeks Rasa Aman (IRA). Indeks Rasa Aman disusun dengan tujuan mampu menggambarkan kondisi keamanan di masyarakat yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Secara lebih lengkap data Indeks Rasa Aman untuk Kabupaten Sukamara belum tersedia.

5. Indeks Ketenteraman dan Ketertiban

Indeks Ketenteraman dan Ketertiban merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk mencerminkan stabilitas keamanan suatu daerah. Dimana stabilitas keamanan tersebut berkaitan dengan frekuensi terjadinya masalah ketertiban seperti demonstrasi yang kemudian berdampak pada masalah ketenteraman masyarakat. Indeks ini digunakan sebagai salah satu parameter yang digunakan oleh investor ketika akan melakukan penanaman modal di suatu daerah. Secara lebih lengkap Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Kabupaten Sukamara belum tersedia

a. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

1. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh suatu ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Kerangka pengukuran IDSD terdiri dari empat komponen pembentuk daya saing, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Keempat komponen tersebut ditopang oleh 12 pilar daya saing. Komponen lingkungan pendukung ditopang oleh pilar institusi, infrastruktur, adopsi TIK, dan kestabilan ekonomi makro. Komponen sumber daya manusia ditopang oleh pilar kesehatan dan keterampilan. Komponen pasar ditopang oleh pilar pasar produk, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, dan ukuran pasar. Komponen ekosistem inovasi ditopang oleh pilar dinamisme bisnis dan kapabilitas inovasi.

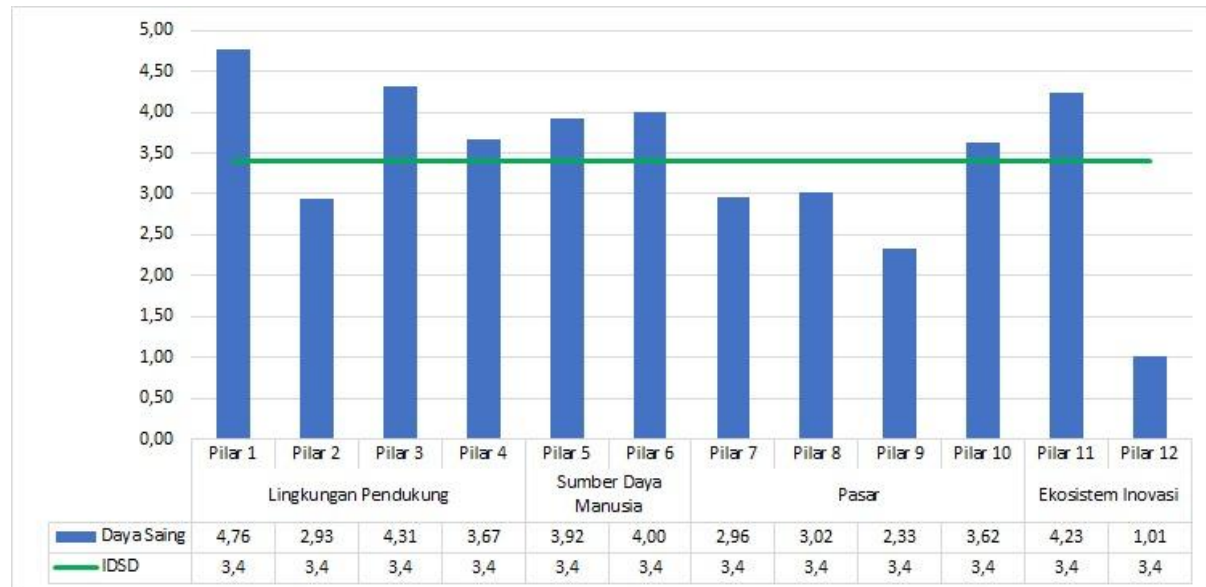
Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Sukamara tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 3,40 dari Indeks Daya Saing Daerah tahun 2023 yang sebesar 2,78.





Dengan rincian nilai pilar pada komponen lingkungan pendukung sebesar 4,76 pada pilar 1; 2,93 pada pilar 2; 4,31 pada pilar 3; dan 3,67 pada pilar 4. Nilai setiap pilar pada komponen sumber daya manusia sebesar 3,92 pada pilar 5 dan 4,00 pada pilar 6. Nilai setiap pilar pada komponen pasar sebesar 2,96 pada pilar 7; 3,02 pada pilar 8; 2,33 pada pilar 9; dan 3,62 pada pilar 10. Nilai setiap pilar pada komponen ekosistem inovasi sebesar 4,23 pada pilar 11 dan 1,01 pada pilar 12.

Gambar 2. 50 Grafik Nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dan Komponen Kabupaten Sukamara Tahun 2024



Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2023

Keterangan:

- Pilar 1 : Institusi
- Pilar 2 : Infrastruktur
- Pilar 3 : Adopsi TIK
- Pilar 4 : Stabilitas Ekonomi Makro
- Pilar 5 : Kesehatan
- Pilar 6 : Keterampilan
- Pilar 7 : Pasar Produk
- Pilar 8 : Pasar Tenaga Kerja
- Pilar 9 : Sistem Keuangan
- Pilar 10 : Ukuran Pasar
- Pilar 11 : Dinamisme Bisnis
- Pilar 12 : Kapabilitas Inovasi

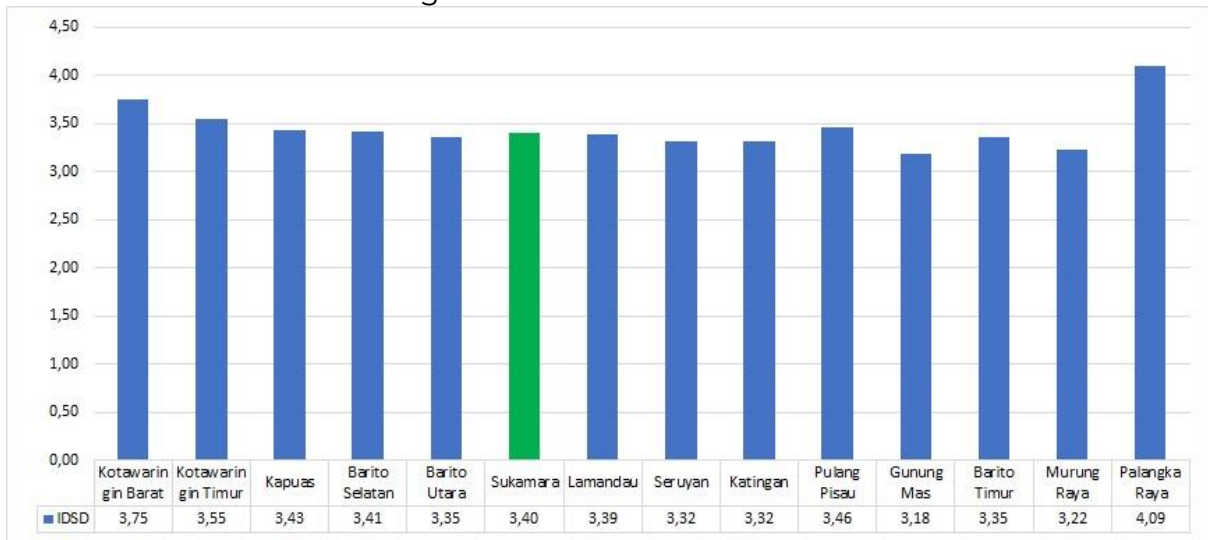
Apabila dibandingkan dengan nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah, nilai IDSD Kabupaten Sukamara cenderung rendah. Nilai IDSD Kabupaten Sukamara sebesar 3,40 dan berada di posisi 8 dari 14 kabupaten. Nilai IDSD tertinggi dimiliki oleh Kota Palangka Raya sebesar 4,09 dan disusul oleh Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Kotawaringin Timur





dengan nilai IDSD sebesar 3,72 dan 3,55. Provinsi Kalimantan Tengah memiliki nilai IDSD sebesar 3,46.

Gambar 2. 51 Grafik Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024



Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2023

b. Kinerja Urusan Pemerintah Daerah

Pemenuhan indikator kinerja pembangunan Kabupaten Sukamara salah satunya dilihat melalui aspek pelayanan umum. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai kinerja urusan pemerintah daerah yang berupa capaian indikator kinerja untuk 5 lima tahun terakhir.

Layanan Urusan Wajib Dasar

1. Urusan Pendidikan

Pendidikan menjadi salah satu faktor penting penentu kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Kunci keberhasilan pembangunan suatu daerah sangat ditunjang dari kualitas SDM yang dimiliki. Dalam pandangan ekonom kontemporer seperti Schultz (1961), Becker (1965) dan Uzawa (1965), pendidikan dan kesehatan merupakan aspek penting dalam pengembangan SDM. Lebih lanjut, SDM yang berkualitas akan membawa dampak pada kemajuan di bidang teknologi, kesehatan, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Sukamara tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 32 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Ket.	OPD Penanggung Jawab
		2020	2021	2022	2023	2024		
Angka Melek Huruf	%	97,64	98,07	98,54	98,13	98,52	Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,1291	12,13	12,15	12,16	12,17	Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,01	8,09	8,1	8,17	8,18	Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan





Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Ket.	OPD Penanggung Jawab
		2020	2021	2022	2023	2024		
Angka Partisipasi Kasar (APK) TK/RA	%	84,47	52,66	54,81	85,23	-	Belum Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (KB/SPS/TPA/TK/RA)	%	45,07	36,33	42,6	60,59	38,18	Belum Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Rasio Ketersediaan lembaga PAUD/Pendidikan usia PAUD (usia 0-6 tahun)	Rasio	1 : 73	1 : 89	1 : 89	1 : 100	-	Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Persentase TK yang Terakreditasi Minimal B	%	TAD	51,22	50	53,33	-	Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Angka Melek Huruf usia > 15 tahun	%	97,64	98,07	98,54	98,24	100	Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun dalam Pendidikan Kesetaraan	%	TAD	-	-	0,5387	-	Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
APS jenjang usia 7-12 tahun	%	91,96	86,63	99	95,55	99,78	Belum Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Angka Partisipasi Kasar SD/MI	%	93,88	94,96	99,7	99	106,51	Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Angka Partisipasi Murni SD/MI	%	86,64	85,78	89,9	90,27	97,98	Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI	Rasio	1 : 139	1 : 138	1 : 125	1 : 134	-	Belum Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0,13	0,09	0,37	0	-	Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Angka Kelulusan SD/MI	%	100	100	100	100	-	Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	%	89,13	89,24	89,05	92,79	90,14	Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Persentase Sekolah Dasar yang Terakreditasi Minimal B	%	TAD	52,94	52,94	53,06	-	Belum Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
APS jenjang usia 13-15 tahun	%	97,31	73,34	88,6	80,9	89,79	Belum Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	%	82,9	79,97	103,9	104,64	83,15	Belum Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	%	63,15	63,54	78,8	84,71	72,74	Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	0,13	0,74	TAD	0	-	Belum Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Angka Kelulusan SMP/MTs	%	100	100	100	100	-	Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	%	89,13	8,04	TAD	89,47	91,43	Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTs	Rasio	-	186	1 : 167	1 : 127	-	Belum Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Persentase Sekolah Menengah Pertama yang Terakreditasi B	%	TAD	52,63	52,39	56,25	-	Belum Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Guru TK/RA berkualifikasi SI/D4	%	54,27	58,49	50	49,07	-	Belum Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Guru PAUD (KB/SPS/TPA/TK/RA) berkualifikasi SI/D4	%	46,4	51,98	42,21	41,44	-	Belum Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Guru TK/RA bersertifikasi	%	9,15	51,98	42,21	22,64	-	Belum Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Guru PAUD (KB/SPS/TPA/TK/RA) bersertifikasi	%	5,4	9,43	15,25	11,43	-	Belum Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Rasio guru terhadap murid SD/MI	Rasio	1 ; 11	01.11	01.10	01.11	-	Belum Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan





Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Ket.	OPD Penanggung Jawab
		2020	2021	2022	2023	2024		
Persentase guru SD/MI berkualifikasi SI/D4	%	93,81	95,45	94,5	96,83	-	Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Persentase guru bersertifikasi	%	30,78	23,7	36,26	36,9	-	Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Rasio guru terhadap murid SMP/MTs	Rasio	01.11	01.10	1; 9	01.12	-	Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Prosesntase guru SMP/MTs berkualifikasi SI/D4	%	93,21	94,95	94,95	99,58	-	Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Persentase guru SMP/MTs bersertifikasi	%	22,01	28,5	35,35	40,74	-	Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Persentase sekolah yang menetapkan kurikulum Muatan Lokal	%	-	-	-	-	100	Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Guru Layak Mengajar Jenjang PAUD	%	-	-	-	-	59,19	Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Guru Layak Mengajar Jenjang SD	%	-	-	-	-	97,54	Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Guru Layak Mengajar Jenjang SMP	%	-	-	-	-	98,89	Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sumber: *Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2024*

2. **Urusan Kesehatan**

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat. Hal ini seperti yang tertuang dalam dokumen Sistem Kesehatan Nasional. Keberhasilan pembangunan kesehatan dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya jumlah fasilitas kesehatan, jumlah tenaga kesehatan, dan penolong kelahiran terakhir.

Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 33 Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Ket.	OPD Penanggung Jawab
		2020	2021	2022	2023	2024		
Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	73.85	78.87	73.91	74.12	74.37	Tercapai	
Persentase pemenuhan upaya kesehatan masyarakat	%	-	-	-	-	30	Tercapai	Dinas Kesehatan & RSUD
Persentase ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar	%	-	-	-	-	40	Tercapai	Dinas Kesehatan & RSUD
Persentase terlaksananya kegiatan penyediaan farmasi alat kesehatan dan makanan minuman	%	-	-	-	-	50	Tercapai	Dinas Kesehatan & RSUD
Persentase Penduduk yang mendapatkan pelayanan promosi kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	%	-	-	-	-	60	Tercapai	Dinas Kesehatan & RSUD



Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Ket.	OPD Penanggung Jawab
		2020	2021	2022	2023	2024		
Persentase penanganan COVID-19 di RS	%	-	24,31	90,72	100	-	Tercapai	RSUD
Standarisasi dan Akreditasi RS berkelanjutan	%	-	75	100	100	100	Tercapai	RSUD
Persentase penanganan penyakit menular TB/HIV di RS	%	-	4,5	51,56	47,75	-	Tercapai	RSUD
Angka kejadian infeksi nosokomial di RS	Skor	-	<1,85	0,29	0,01	0	Tercapai	RSUD
Persentase pemanfaatan sarana fasilitas kesehatan tingkat lanjut	%	-	16,67	21,47	24,87	23,67	Belum Tercapai	RSUD
Bed Occupancy Rate (BOR)	%	21,63	17,46	17,88	26,62	27,35	Belum Tercapai	RSUD
Average Length Rate (ALOS)	Hari	2,51	2,83	2,61	2,76	3,2	Tercapai	RSUD
Turn Over Internal (TOI)	Hari	12,82	18,09	1,42	10,3	11,26	Tercapai	RSUD
Bed Turn Over (BTO)	Hari	20,54	16,65	17,26	26,01	23,61	Belum Tercapai	RSUD
Net Death Rate (NDR)	%	12,05	14,58	7,24	10,72	8,55	Tercapai	RSUD
Gross Death Rate (GDR)	%	26,99	29,74	20,94	22,92	22,4	Tercapai	RSUD
Persentase penanggulangan krisis dan kegawatdaruratan maternal dan neonatal (PONEK)	%	80	97,04	98,04	95,49	-	Tercapai	RSUD
Persentase pelayanan kefarmasian di rumah sakit sesuai standar	%	-	60,38	90,91	90,91	87,8	Tercapai	RSUD
Persentase bahan persediaan kadaluarsa	%	-	69,44	34,53	25,59	17,83	Tercapai	RSUD
Persentase fasilitas air bersih RS memenuhi syarat higiene sanitasi	%	-	95	80	88,89	91,38	Belum Tercapai	RSUD
Standarisasi pengelolaan limbah medis dan non medis di rumah sakit	%	-	95	100	100	100	Tercapai	RSUD
Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai formularium di RS	%	96	72,72	72,72	93,8	74,52	Tercapai	RSUD
Persentase ketersediaan sarana dan prasarana RS sesuai standar	%	64	72,18	75,68	76,85	75,92	Tercapai	RSUD
Persentase ketersediaan alat kesehatan sesuai standar di RS	%	58	53,82	70	32,31	33,56	Belum Tercapai	RSUD
Persentase alat kesehatan yang terkalibrasi	%	85	58,5	58,29	61,13	50,9	Belum Tercapai	RSUD
Cakupan pemeliharaan sarana dan prasarana RS	%	94	13,4	30	86,46	58,03	Tercapai	RSUD
Cakupan pemeliharaan alat kesehatan RS	%	84	5,6	80	78,82	58,05	Belum Tercapai	RSUD
Persentase ketersediaan tenaga medis dan paramedis sesuai standar di RS	%	-	67,01	89,08	78,7	86,81	Tercapai	RSUD
Persentase SDM yang	%	-	25,34	56,75	30,6	19,11	Belum tercapai	RSUD





Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Ket.	OPD Penanggung Jawab
		2020	2021	2022	2023	2024		
mendapatkan pendidikan dan pelatihan sesuai profesi								
Cakupan Puskesmas	%	-	100	100	100	100	Tercapai	Dinas Kesehatan
Angka Kematian Ibu (AKI) (Per 100.000 KH)	Kasus	0,74	<88	<87	<87	90,33	Tercapai	Dinas Kesehatan
Cakupan Pelayanan Nifas	%	-	56,29	100	100	100	Tercapai	Dinas Kesehatan
Angka Kematian Bayi (AKB) (Per 1.000 KH)	Kasus	9,57	<8	<9	<8	10	Tercapai	Dinas Kesehatan
Cakupan Pelayanan Anak Balita	%	-	64,52	100	100	96	Tercapai	Dinas Kesehatan
Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan sederajat	%	-	30,95	100	100	97,3	Tercapai	Dinas Kesehatan
Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA (+)	Nilai	-	>15	>20	>25	77	Tercapai	Dinas Kesehatan
Prevalensi HIV/AIDS dari Total Populasi	Nilai	-	<1	<1	<1	0,45	Tercapai	Dinas Kesehatan
Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	%	-	100	100	100	100	Tercapai	Dinas Kesehatan
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan	%	-	100	100	100	100	Tercapai	Dinas Kesehatan
Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD	%	-	100	100	100	100	Tercapai	Dinas Kesehatan
Rasio Dokter per satuan penduduk (Per 1.000 Penduduk)	%	-	>0,41	>0,3	>0,3	>0,3	Tercapai	Dinas Kesehatan
Rasio puskesmas, poliklinik, pusku per satuan penduduk (Per 1.000 Penduduk)	%	-	>0,50	>0,50	>0,50	>0,50	Tercapai	Dinas Kesehatan
Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum	%	-	<5	<0,50	<5	-	Tercapai	Dinas Kesehatan
Rasio Posyandu per satuan balita	%	-	<0,7	<0,7	<0,7	1	Tercapai	Dinas Kesehatan

Sumber: *Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2024*

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Perencanaan dan pembangunan prasarana kota merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Salah satu prasarana yang paling dibutuhkan adalah jaringan jalan. Jaringan jalan yang baik memiliki keterkaitan yang kuat dengan pertumbuhan ekonomi dan sosial budaya masyarakat di suatu wilayah. Kemudahan akses jalan akan berdampak pada peningkatan laju distribusi barang dan jasa sehingga roda perekonomian masyarakat terus berputar. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan jaringan jalan yang baik dan memadai akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang semakin maju dan berkembang.





Konsep pengembangan wilayah Kabupaten Sukamara adalah Sub-wilayah Utara, merupakan wilayah yang memiliki potensi pengembangan dengan sektor utamanya adalah pertanian (tanaman tahunan, palawija dan perkebunan). Adapun wilayah yang termasuk sub wilayah ini adalah Kecamatan Permata Kecubung dan Kecamatan Balai Riam. Sub-wilayah Tengah, merupakan pusat pertumbuhan wilayah Kabupaten Sukamara dengan tingkat perkembangan wilayahnya lebih menonjol dibandingkan dengan perkembangan wilayah pada bagian lainnya. Perkembangan wilayah ini dicirikan dengan kegiatan utama bersifat perkotaan dan sebagai pusat pemerintahan dan menjadi orientasi semua kegiatan yang meliputi wilayah Kecamatan Sukamara. Sub-wilayah Selatan, merupakan kawasan yang umumnya adalah sebagai kawasan lindung. Wilayah ini berada di Kecamatan Pantai Lunci dan Kecamatan Jelai, juga merupakan wilayah dengan kegiatan perikanan dan pengembangan pariwisata.

Rencana struktur tata ruang wilayah Kabupaten Sukamara menggambarkan sistem pusat-pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Sukamara yang memberikan layanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan di sekitarnya yang berada dalam wilayah Kabupaten Sukamara yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang mengintegrasikan kesatuan wilayah kabupaten. Untuk itu ditetapkan pusat-pusat kegiatan kabupaten yang meliputi PKWp (Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan) Kota Sukamara, PKLp (Pusat-Pusat Kegiatan Lokal yang dipromosikan) Kota Kuala Jelai, PKLp (Pusat Pusat Kegiatan Lokal yang dipromosikan Kota Balai Riam, PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) Kota Ajang, PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan) Kota Sungai Cabang Barat.

Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukamara Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 34 Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Ket.	OPD Penanggung Jawab
		2020	2021	2022	2023	2024		
Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	67,20	46,63	76,31	46,12	67,06	Belum Tercapai	DPUPRPRKP
Rasio jaringan irigasi	%	65,87	37,11	63,77	42,11	-	Belum Tercapai	DPUPRPRKP
Persentase penduduk berakses air minum	%	18,38	15,70	18,55	19,32	21,82	Belum Tercapai	DPUPRPRKP
Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	9,19	18,84	22,79	23,25	25,81	Belum Tercapai	DPUPRPRKP
Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	%	0	0	0	25	-	Belum Tercapai	DPUPRPRKP
Persentase terbangunnya sarpras persampahan regional	%	-	-	-	-	0	Belum Tercapai	DPUPRPRKP
Persentase Rumah Tangga terlayani Sistem Air Limbah	%	-	-	-	-	18,82	Belum Tercapai	DPUPRPRKP
Persentase limbah yang ditangani dengan baik	%	80,40	81	83,36	86,88	-	Tercapai	DPUPRPRKP
Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	61,93	93,68	93,62	93,04	92,91	Belum Tercapai	DPUPRPRKP
Persentase kawasan permukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	%	0	0	0	5	--	Belum Tercapai	DPUPRPRKP
Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	Unit	129	126	27	16		Belum Tercapai	DPUPRPRKP



Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Ket.	OPD Penanggung Jawab
		2020	2021	2022	2023	2024		
Persentase bangunan ber-PBG	%	-	-	-	-	4,901	Belum Tercapai	DPUPRPRKP
Persentase Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk	%	-	-	-	-	45	Tercapai	
Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas wilayah ber-HPL/HGB	Ha	-	-	TAD	0,059	-	Belum Tercapai	DPUPRPRKP
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Km	33,84	33,56	34,78	35,55	39,92	Belum Tercapai	DPUPRPRKP
Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	M	115	108	111	109	114	Tercapai	DPUPRPRKP
Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 Km/Jam)	%	-	33,55	34,78	35,55	37,99	Tercapai	DPUPRPRKP
Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	%	-	0	88,36	15,01	-	Belum Tercapai	DPUPRPRKP
Persentase penyedia jasa konstruksi memenuhi standar kualifikasi	%	-	0	TAD	80	65,66	Belum Tercapai	DPUPRPRKP
Persentase Ketersediaan Dokumen Penataan Ruang	%	-	-	-	-	66,67	Belum Tercapai	DPUPRPRKP
Ketaatan terhadap RTRW	%	-	0	TAD	80	-	Tercapai	DPUPRPRKP
Ruang publik yang berubah peruntukannya	%	-	0	TAD	60	-	Belum Tercapai	DPUPRPRKP
Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survey foto udara terhadap luas daratan (luas = ha)	Ha	-	0	TAD	53,17	-	Tercapai	DPUPRPRKP
Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan (%)	%	-	0	TAD	0,44	-	Belum Tercapai	DPUPRPRKP

Sumber: *Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2024*

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Status kepemilikan rumah di kabupaten Sukamara berdasarkan hasil SUSENAS 2022 sebagian besar merupakan milik sendiri, yaitu sebesar 50,89 persen. Selain itu, terdapat juga rumah kontrak/sewa dengan persentase sebesar 32,16 persen, rumah dinas sebesar 8,85 persen, dan bebas sewa sebesar 8,10 persen. Rumah tangga yang tinggal di rumah dinas cukup besar, hal ini dikarenakan banyaknya pegawai perkebunan sawit yang tinggal di afdeling.

Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 35 Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Ket.	OPD Penanggung Jawab
		2020	2021	2022	2023	2024		
Rasio rumah layak huni	%	83,51	95,35	95,11	42	20,87	Tercapai	DPUPRPRKP
Persentase lingkungan permukiman kumuh	%	0,13	0,13	0,13	0,045	1,095	Tercapai	DPUPRPRKP
Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	%	0,12	0,12	0,12	12	0,517	Belum Tercapai	DPUPRPRKP
Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	0,08	0,08	0,08	5	96	Tercapai	DPUPRPRKP
Persentase korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	-	-	-	-	0	Belum Tercapai	DPUPRPRKP
persentase permukiman kumuh yang tertangani	%	-	-	-	-	100	Tercapai	DPUPRPRKP

Sumber: *Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2024*



5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban umum, dan Perlindungan Masyarakat

Terpenuhinya rasa aman, damai, dan tentram dalam kehidupan masyarakat dapat diwujudkan dengan melalui peningkatan penegakan Perda/Perkada dan adanya kepastian hukum. Langkah-langkah telah dilakukan dalam melaksanakan koordinasi dan komunikasi antar OPD yang menjalankan Perda/Perkada sehingga pengawasan/penindakan pelanggaran Perda/Perkada dapat dioptimalkan, dan memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Capaian kinerja urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat hingga tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 36 Capaian Kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Ket.	OPD Penanggung Jawab
		2020	2021	2022	2023	2024		
Persentase Laporan Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban yang ditindaklanjuti	%	-	55	100	100	-	Tercapai	Satpol PP; Damkar
Persentase Laporan Pelanggaran Perda yang Ditindaklanjuti	%	-	55	100	100	-	Tercapai	Satpol PP; Damkar
Persentase Peningkatan Kapasitas PPNS (IKD)	%	-	0	0	0	-	Belum Tercapai	Satpol PP; Damkar
Persentase daerah rawan bencana yang dibina	%	-	0	85	74,61	-	Belum Tercapai	BPBD
Cakupan penanggulangan bencana alam	%	-	100	-	100	-	Tercapai	BPBD
Cakupan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	%	-	100	-	0	-	Belum Tercapai	BPBD
Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran	%	-	100	100	100	-	Tercapai	Satpol PP; Damkar
Persentase Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	%	-	50	100	100	-	Tercapai	Satpol PP; Damkar
Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran (IKD)	%	-	0	-	100	-	Tercapai	Satpol PP; Damkar
Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	-	-	-	-	100	Tercapai	Satpol PP; Damkar
Persentase Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	%	-	-	-	-	100	Tercapai	BPBD
Persentase Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	%	-	-	-	-	100	Tercapai	Satpol PP; Damkar

Sumber: Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2024





6. Urusan Sosial

Masalah sosial selalu berkaitan dengan permasalahan penduduk dengan kondisi yang rawan permasalahan sosial seperti fakir miskin, anak terlantar, orang cacat, tuna susila, lansia terlantar dan korban bencana. Hal ini penting dalam kaitannya dengan perencanaan dalam rangka pemecahan masalah sebagai upaya pencegahan agar jumlahnya tidak bertambah dan penanganan subjeknya (preventif dan kuratif).

Capaian kinerja urusan sosial Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 37 Capaian Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Ket.	OPD Penanggung Jawab
		2020	2021	2022	2023	2024		
Persentase PPKS yang diberdayakan	%	-	100	100	100	100	Tercapai	Dinas Sosial PMD
Persentase warga migran korban tidak kerasan tertangani	%	-	-	-	-	100	Tercapai	Dinas Sosial PMD
Persentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial	%	-	-	-	-	100	Tercapai	Dinas Sosial PMD
Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%	-	-	-	-	68,18	Belum Tercapai	Dinas Sosial PMD
Persentase PPKS yang tertangani	%	-	100	100	86,99	68,18	Tercapai	Dinas Sosial PMD
Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial	%	-	28,21	50,3	81,92	68,18	Tercapai	Dinas Sosial PMD
Persentase cakupan korban bencana sosial dan alam yang ditangani	%	-	100	100	100	100	Tercapai	Dinas Sosial PMD
Cakupan TMP dalam kondisi baik	Unit	-	1	1	1	1	Tercapai	Dinas Sosial PMD

Sumber: *Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2024*

Layanan Urusan Wajib Non Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja

Sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor penting bagi pembangunan ekonomi nasional, khususnya dalam Upaya pemerintah untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran. Oleh karena itu upaya pembangunan diarahkan kepada perluasan lapangan pekerjaan sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan daerah.

Ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan di bidang ketenagakerjaan, antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan





Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPAK merupakan salah satu indikator untuk mengetahui keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi yaitu dengan membandingkan antara jumlah penduduk yang termasuk Angkatan kerja dengan penduduk yang termasuk usia kerja (15 tahun ke atas).

Sedangkan TPT merupakan persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang termasuk ke dalam kelompok pengangguran terbuka. Penduduk yang termasuk pengangguran terbuka ini adalah penduduk yang sedang mencari pekerjaan; sedang mempersiapkan usaha; mereka yang belum bekerja walau sudah mempunyai pekerjaan; mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.

Capaian kinerja urusan ketenagakerjaan tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 38 Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Ket.	OPD Penanggung Jawab
		2020	2021	2022	2023	2024		
Tingkat Cakupan Perencanaan Ketenagakerjaan	%	-	0	0	1	1	Tercapai	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	Orang	-	12,8	95	154	43	Belum Tercapai	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	-	55	55,45	45,05	61,57	Tercapai	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Persentase perusahaan yang harmonis/kondusif	%	100	100	100	100	100	Tercapai	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Cakupan kepesertaan Jaminan sosial tenaga kerja	orang	-	-	13.886	9.513	20.166	Tercapai	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sumber: *Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2024*

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Manifestasi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Sukamara mencakup peningkatan perlindungan, pemenuhan hak-hak anak dan pencapaian kesetaraan dan keadilan gender. Realisasi pelaksanaannya dapat dilihat dari besarnya upaya peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan, salah satunya pelibatan perempuan dalam lembaga pemerintah.

Capaian kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak hingga tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2. 39 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukamara Tahun 2020-20224

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Ket.	OPD Penanggung Jawab
		2020	2021	2022	2023	2024		
Cakupan PUG dan PPRG yang aktif	%	-	-	60	80	0	Tercapai	DP3APPKB
Persentase jumlah OPD yang telah menerapkan sistem PUG dan PPRG	%	-	-	25	35	0	Belum Tercapai	DP3APPKB
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	-	-	-	-	-	8,78	Belum Tercapai	DP3APPKB
Rasio KDRT (%)	%	-	0,001	0,02	0,02	0,03	Belum Tercapai	DP3APPKB
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	%	-	60	87,5	88,23	100	Tercapai	DP3APPKB
Tingkat Cakupan Ketersediaan Informasi/ Data Gender dan Anak	Nilai	-	0	0	40	TAD	Belum Tercapai	DP3APPKB
Capaian Nilai Evaluasi Kota Layak Anak	Nilai	0	524,60	556,3	623,85	628,5	Tercapai	DP3APPKB
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang Mendapat Layanan secara Komprehensif	%	-	50	75	96	79	Belum Tercapai	DP3APPKB
Total Fertility Rate	%	-	2,18	2,14	2,89	2,06	Tercapai	DP3APPKB
Ratio Akseptor KB	%	-	80,64	74,76	83,13	81,03	Belum Tercapai	DP3PPKB
Cakupan Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%	-	3,52	3,36	8,14	9,55	Tercapai	DP3PPKB

Sumber: *Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2024*

3. Urusan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama manusia yang harus dipenuhi setiap saat. setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tersebut dalam pasal 27 UUD 1945 maupun dalam Deklarasi Roma (1996). Pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa sehingga ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi, gejolak





sosial dan politik. Oleh karena itu ketahanan pangan suatu wilayah akan menjadi sangat penting untuk stabilitas ekonomi dan stabilitas Nasional.

Ketahanan pangan tidak lepas dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dalam peraturan tersebut dinyatakan Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Terdapat tiga komponen utama ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan. Ketersediaan pangan adalah kemampuan memiliki sejumlah pangan yang cukup untuk kebutuhan dasar. Akses pangan adalah kemampuan memiliki sumber daya, secara ekonomi maupun fisik, untuk mendapatkan bahan pangan bernutrisi. Sementara itu pemanfaatan pangan adalah kemampuan dalam memanfaatkan bahan pangan dengan benar dan tepat secara proporsional.

Capaian Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 40 Capaian Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Ket.	OPD Penanggung Jawab
		2020	2021	2022	2023	2024		
Ketersediaan pangan utama	%	103,61	102,45	104,21	105,16	108,30	Tercapai	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	84,7	86,7	87,2	93,1	90	Belum Tercapai	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Penguatan cadangan pangan	Ton	23,4	28,9	27	24,65	6,93	Belum Tercapai	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Jumlah laporan pengelola sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Laporan	1	1	1	1	1	Tercapai	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Persentase jumlah dan jenis pangan yang tersedia	%	40,18	41,74	42,43	43,54	44,44	Tercapai	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Jumlah Desa yang Rawan Pangan	Desa	-	1	1	1	0	Tercapai	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	32	31	60	33	33	Tercapai	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Sumber: *Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2024*

4. Urusan Pertanahan

Pertanahan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23





Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan kewenangan Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) dalam urusan bidang pertanahan adalah:

- Pemberian izin lokasi dalam satu daerah kabupaten/kota.
- Menyelesaikan sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten/kota.
- Penyelesaian masalah ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah.
- Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* dalam daerah kabupaten/kota.
- Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota.
- Penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah kabupaten/kota.
- Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah kabupaten/kota.
- Penerbitan izin membuka tanah.
- Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah kabupaten/kota.

Capaian kinerja urusan pertanahan Kabupaten Sukamara hingga tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 41 Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Ket.	OPD Penanggung Jawab
		2020	2021	2022	2023	2024		
Penyelesaian izin lokasi	%	38,46	53,85	53,85	93,55	92,68	Tercapai	DPUPRPRKP
Persentase penyelesaian kasus tanah negara	%	12,50	21,88	34,38	57,89	-	Tercapai	DPUPRPRKP
Jumlah Tanah yang Dilakukan Ganti Kerugian dan Santunan	Bidang	3	2	4	12	-	Tercapai	DPUPRPRKP
Tingkat Caikupan Redistribusi Tanah (IKD)	%	-	0	0	0	-	Tercapai	DPUPRPRKP
Persentase Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee (IKD)	%	-	0	0	0	-	Belum Tercapai	DPUPRPRKP
Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	-	-	-	-	79,29	Belum Tercapai	DPUPRPRKP
Terlaksananya Mediasi Penyelesaian kasus sengketa dan konflik tanah	%	-	-	-	-	50	Tercapai	DPUPRPRKP





Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Ket.	OPD Penanggung Jawab
		2020	2021	2022	2023	2024		
garapan dalam 1 daerah Kab/Kota								
Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum	%	-	-	-	-	25	Belum Tercapai	DPUPRPRKP
Persentase penyelesaian penataan akses dan aset Redistribusi Tanah	%	-	-	-	-	5	Belum Tercapai	DPUPRPRKP
Persentase Penetapan Tanah Ulayat	%	-	-	-	-	50	Belum Tercapai	DPUPRPRKP
Persentase kesesuaian penatagunaan tanah terhadap RTRW	%	-	-	-	-	30	Belum Tercapai	DPUPRPRKP

Sumber: *Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2024*

5. Urusan Lingkungan Hidup

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pembagian urusan pemerintah bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/ kota mencakup sub urusan perencanaan lingkungan hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup keanekaragaman Hayati (Kehati), Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup dan persampahan.

Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 42 Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Ket.	OPD Penanggung Jawab
		2020	2021	2022	2023	2024		
Presentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	%	-	100	100	100	100	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
Tersusunnya RPPLH Kabupaten/ Kota	%	-	0	50	100	100	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
Terintegrasinya RPPLH dalam Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota	Ada/ Tidak Ada	0	0	0	Ada	-	Tercapi	Dinas Lingkungan Hidup
Tersusunnya KLHS Kabupaten/Kota	Dokumen	-	0	1	1	1	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup



Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Ket.	OPD Penanggung Jawab
		2020	2021	2022	2023	2024		
Hasil Pengukuran Kualitas Air	Nilai	-	58,75	< 2,5	65,36	57,69	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	%	-	46,6	46,83	47,85	47,59	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
Cakupan penanganan limbah B3 yang ditangani	%	-	100	100	31,24	-	Belum Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
Persentase Tjumlah Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3	%	-	-	-	-	100	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	%	-	56,25	100	100	-	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
Terfasilitasinya pendampingan pengakuan MHA	%	-	25	25	100	100	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	Kali	-	6	6	6		Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada/ Tidak Ada	-	Ada	Ada	Ada	-	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PPU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten	%	-	100	100	100	100	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	%	-	100	50	83,33	100	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
Persentase pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan yang ditangani dengan baik	%	-	100	100	100	-	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
Persentase Izin PPLH yang dikeluarkan dan jumlah pengawasan yang dilakukan	%	-	-	-	-	100	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
Persentase Terkelolanya Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	%	-	-	-	-	100	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
Persentase Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang tertangani	%	-	-	-	-	100	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup





Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Ket.	OPD Penanggung Jawab
		2020	2021	2022	2023	2024		
Persentase Sosialisasi Kegiatan yang dilaksanakan	%	-	-	-	-	100	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
Persentase jumlah sampah yang ditangani	%	-	100	80	72	98,27	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup

Sumber: *Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2024*

6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sistem administrasi menyangkut seluruh masalah kependudukan, yang terdiri atas pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, serta pengelolaan data informasi kependudukan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merupakan dasar kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam mengelola sistem administrasi kependudukan, yang mencakup: (1) pelaksanaan pelayanan; (2) pengelolaan pengaduan masyarakat; (3) pengelolaan informasi; (4) pengawasan internal; (5) penyuluhan kepada masyarakat; (6) pelayanan konsultasi; serta (7) pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Capaian kinerja urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Sukamara hingga tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.56 berikut.

Tabel 2. 43 Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Ket.	OPD Penanggung Jawab
		2020	2021	2022	2023	2024		
Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (e-KTP)	%	93,76	97,30	94,45	98,03	97,14	Belum Tercapai	Disdukcapil
Cakupan penerbitan Akta Kelahiran	%	81,19	87,54	95,76	95,51	91,07	Belum Tercapai	Disdukcapil
Cakupan penerbitan akta pencatatan sipil	%	60	68,03	50,82	61	70,4	Belum Tercapai	Disdukcapil
Persentase Ketersediaan Dokumen Profil Kependudukan	%	100	100	100	100	100	Tercapai	Disdukcapil
Ketersediaan Database Kependudukan	%	-	100	100	100	100	Tercapai	Disdukcapil

Sumber: *Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2024*

7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya pembangunan untuk meningkatkan kapasitas dan peran serta masyarakat mewujudkan kemandirian dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan. Kemandirian dicerminkan dari meningkatnya kapasitas dan kualitas masyarakat dalam tata kelola pembangunan di tingkat kelurahan/desa, meningkatnya kualitas sumber daya manusia juga diimbangi dengan meningkatnya kapasitas dan kualitas kelembagaan-kelembagaan kemasyarakatan di tingkat kelurahan. Dengan meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM dan kelembagaan, maka dinamika pembangunan di tingkat kelurahan semakin



meningkat dan tingkat kesejahteraan masyarakat kelurahan dapat terwujud. Adapun Data IDM pada tahun 2020 sebesar 0,6493. Tahun 2021 sebesar 0,7263. Tahun 2022 sebesar 0,7528. Tahun 2023 sebesar 0,7482, dan Tahun 2024 sebesar 0,7540.

Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 44 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Ket.	OPD Penanggung Jawab
		2020	2021	2022	2023	2024		
Persentase peningkatan kinerja pengelolaan administrasi pemerintah desa	%	-	62,06	84,48	93,1	-	Belum Tercapai	Dinas Sosial PMD
Persentase peningkatan keberdayaan ekonomi dan masyarakat desa	%	-	95,05	60	89,96	-	Belum Tercapai	Dinas Sosial PMD
Persentase Desa yang terfasilitasi dalam penataan Desa	%	-	-	-	-	100	Tercapai	Dinas Sosial PMD
Persentase Tertibnya Administrasi Pemerintahan Desa	%	-	-	-	-	100	Tercapai	Dinas Sosial PMD
Persentase Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan masyarakat Hukum Adat yang diberdayakan	%	-	-	-	-	100	Tercapai	Dinas Sosial PMD
Persentase Desa Mandiri	%	0	27,59	31,03	34,48	37,93		

Sumber: *Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2024*

8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan pengendalian penduduk tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tiga sub-urusan/bidang terkait pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Seruyan adalah Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 45 Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Ket.	OPD Penanggung Jawab
		2020	2021	2022	2023	2024		
Laju Pertumbuhan Penduduk	%	-	3,12	2,93	1,8	1,78	Belum Tercapai	DP3PPKB
Total Fertility Rate	%	-	2,18	2,14	2,89	2,89	Belum Tercapai	DP3APPKB
Ratio Akseptor KB	%	-	80,64	74,76	82,07	66,67	Tercapai	DP3APPKB
Cakupan Keluarga Pra Sejahtera dan	%	-	3,52	3,36	8,14	0	Belum Tercapai	DP3APPKB



Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Ket.	OPD Penanggung Jawab
		2020	2021	2022	2023	2024		
Keluarga Sejahtera I								
Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA)	%	-	0	50,54	65,65	66,67	Tercapai	DP3APPKB

Sumber: *Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2024*

9. Urusan Perhubungan

Sarana angkutan umum darat di Kabupaten Sukamara dilayani dengan trayek Sukamara – Palangka Raya dan Sukamara - Pontianak. Untuk angkutan umum non trayek (swasta/perorangan), rute angkutan menggunakan jalur Sukamara – Kotawaringin Lama – Pangkalan Bun, Sukamara – Balai Riam, Sukamara – Ajang – Nanga Bulik – Pangkalan Bun dan Sukamara – Pantai Lunci. Masyarakat perkotaan sebagian besar tidak menggunakan transportasi umum melainkan menggunakan kendaraan bermotor berupa motor roda dua. Hal ini dikarenakan angkutan dalam kota belum tersedia secara reguler.

Selain moda transportasi darat, masyarakat Kabupaten Sukamara juga masih menggunakan moda transportasi air yang digunakan sebagai sarana transportasi baik orang maupun barang. Untuk angkutan orang, rute yang masih menggunakan sarana *speedboat* antara lain adalah Sukamara – Pulau Nibung – Kuala Jelai, Sukamara – Pangkalan Bun via Kotawaringin Lama atau Pantai Lunci, dan Sukamara - Manis Mata. Untuk angkutan barang baik antar pulau maupun dalam Pulau Kalimantan, sarana yang digunakan adalah jenis kapal kayu. Sebagai tambahan selain sarana angkutan tersebut, Kabupaten Sukamara juga telah mengoperasikan Kapal Perintis yang bisa mengangkut orang maupun barang dengan rute ke Pulau Jawa pulang pergi (PP). Moda transportasi air didukung dengan dibangunnya beberapa pelabuhan yang ada di Kabupaten Sukamara yaitu Pelabuhan Pengumpan Lokal Pelabuhan Perintis Kuala Jelai dan Pelabuhan Pengumpan Lokal Pelabuhan PELINDO III Mendawai Sukamara.

Capaian kinerja urusan perhubungan Kabupaten Sukamara hingga tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 46 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Ket.	OPD Penanggung Jawab
		2020	2021	2022	2023	2024		
Persentase layanan angkutan darat	%	1	10,32	4,4	0,25	-	Belum Tercapai	Dinas Perhubungan
Jumlah Uji KIR Angkutan	Unit	-	380	1.026	975	-	Tercapai	Dinas Perhubungan
Pemasangan rambu-rambu	%	-	0	198	50	-	Tercapai	Dinas Perhubungan
Jumlah arus penumpang angkutan umum	Penumpang	-	23.461	25.321	30.459	-	Belum Tercapai	Dinas Perhubungan
Tersedianya dermaga penyeberangan	Unit	-	0	0	0	1	Tercapai	Dinas Perhubungan



Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Ket.	OPD Penanggung Jawab
		2020	2021	2022	2023	2024		
persentase perlengkapan jalan yang tersedia	%	-	-	-	-	100	Tercapai	Dinas Perhubungan

Sumber: *Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2024*

10. Urusan Komunikasi dan Informatika

Perkembangan suatu daerah antara lain dapat dilihat dari sarana dan prasarana telekomunikasi yang tersedia. Salah satu indikator untuk melihat perkembangan teknologi komunikasi adalah dengan melihat seberapa banyak penduduk suatu daerah telah memiliki perangkat komunikasi berupa *handphone* (HP) dan telepon rumah (*landline*). Informasi mengenai penduduk berumur 5 tahun keatas yang menggunakan telepon disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 47 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Gawai dan Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir di Kabupaten Sukamara Tahun 2023*

Karakteristik	Laki-laki	Perempuan	Total
Menggunakan Telepon Seluler (HP)/Nirkabel	85,73	79,43	82,76
Menguasai/memiliki Telepon Seluler (HP)/Nirkabel	81,47	70,80	76,43
Menggunakan Komputer	11,85	14,27	12,99
Mengakses Internet	78,45	76,08	77,33

Sumber: *Kabupaten Sukamara Dalam Angka, 2024*

Berdasarkan tabel di atas, tidak ada ketimpangan yang signifikan antara penduduk laki-laki dan Perempuan dalam kemudahan menggunakan telepon seluler, menguasai telepon, menggunakan komputer, dan mengakses internet. Persentase penduduk laki-laki jauh lebih banyak dibandingkan perempuan pada penggunaan telepon, penguasaan telepon, dan internet. Pada aspek penggunaan komputer, persentase penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki.

Selanjutnya media informasi yang efektif yang sudah ada sejak lama adalah surat kabar. Walaupun belum ada surat kabar terbitan lokal Kabupaten Sukamara, surat kabar terbitan lain sudah banyak masuk di Kabupaten Sukamara antara lain KOMPAS, Palangka Pos, Borneo News, Kalteng Pos dan Radar Sampit. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Sukamara juga telah bekerjasama dengan beberapa media tersebut sebagai media promosi dan informasi baik masalah pembangunan maupun masalah-masalah lainnya yang terjadi di Kabupaten Sukamara.

Selain itu, sebagai media informasi baru, salah satu hal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara adalah membangun Website yang nantinya akan dijadikan sebagai portal depan Pemerintah Kabupaten Sukamara dalam hal informasi dan transparansi pengelolaan pemerintahan. Nantinya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan pemerintahan akan dimuat dalam Website





tersebut untuk mempermudah masyarakat mengetahui perkembangan pembangunan dan potensi-potensi investasi yang ada di Kabupaten Sukamara.

Namun demikian, media penyampaian informasi mengenai potensi daerah tidak hanya dilakukan melalui media massa sebagaimana tersebut di atas, namun juga masih dilakukan secara konvensional yaitu dengan melakukan pameran/expo. Pameran tingkat kabupaten dilakukan setiap tahun pada saat Sukamara Expo. Demikian juga untuk tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Kabupaten Sukamara selalu memanfaatkan event tersebut untuk melakukan promosi produk-produk lokal maupun potensi investasi yang ada. Capaian kinerja urusan komunikasi dan informatika Kabupaten Sukamara hingga tahun 2024 dapat dilihat dapat pada tabel berikut.

Tabel 2. 48 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Ket.	OPD Penanggung Jawab
		2020	2021	2022	2023	2024		
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	%	-	18	19	38	-	Belum Tercapai	Dinas Komunikasi dan Informatika
Cakupan layanan telekomunikasi	%	-	94	91	94	-	Belum Tercapai	Dinas Komunikasi dan Informatika
Persentase pelayanan publik yang sudah terintegrasi	%	-	20	80	10	-	Belum Tercapai	Dinas Komunikasi dan Informatika
Jumlah sarana informasi sentral	Unit	-	1	1	1	-	Tercapai	Dinas Komunikasi dan Informatika
Persentase kegiatan pemerintah daerah yang dipublikasikan	%	-	-	-	-	95	Belum Tercapai	Dinas Komunikasi dan Informatika
Persentase aplikasi layanan perangkat daerah yang telah terintegrasi ke dalam E-government	%	-	-	-	-	60	Tercapai	Dinas Komunikasi dan Informatika

Sumber: *Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2024*

11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Koperasi adalah salah satu bentuk lembaga profit sosial yang bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya melalui berbagai bentuk usaha. Selain itu koperasi merupakan salah satu usaha pemberdayaan ekonomi rakyat, menurunkan kemiskinan dan memperluas lapangan usaha. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi Aktif adalah koperasi yang dalam 2 (dua) tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha. Semakin banyak koperasi yang aktif menunjukkan akan semakin berdayanya ekonomi berbasis kerakyatan, menurunnya





kemiskinan dan menurunnya jumlah pengangguran dan semakin besar pelayanan penunjang yang dimiliki daerah dalam menggerakkan perekonomian melalui koperasi.

Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 49 Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Ket.	OPD Penanggung Jawab
		2020	2021	2022	2023	2024		
Cakupan pelayanan izin usaha simpan pinjam yang disetujui	%	-	0	0	0	0	Belum Tercapai	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
Persentase koperasi aktif	%	-	39	37,5	57,14	51,14	Tercapai	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
Persentase KSP/USP koperasi sehat	%	-	24	0	13,1	25	Belum Tercapai	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
Persentase koperasi yang sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	-	64	88,2	27	30	Belum Tercapai	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
Persentase UMKM aktif	%	-	100	40	100	100	Tercapai	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil	%	-	0	0	0	0	Belum Tercapai	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan

Sumber: *Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2024*

12. Urusan Penanaman Modal

Penanaman modal di Kabupaten Sukamara mempunyai fungsi yang sangat penting terutama dalam pembangunan ekonomi. Kebijakan yang telah dilaksanakan antara lain adalah peningkatan kualitas pelayanan investasi melalui penyederhanaan prosedur layanan, pelaksanaan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan terkait dengan pengembangan kegiatan penanaman modal. Untuk urusan peningkatan penanaman modal, dalam hal meningkatkan arus investasi modal, Pemerintah Kabupaten Sukamara telah melakukan perbaikan dalam hal pelayanan izin usaha melalui pelayanan perizinan satu pintu sehingga yang dibutuhkan lebih efisien. Jumlah investor yang masuk di Kabupaten Sukamara semuanya merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), yang potensial untuk menyerap tenaga kerja yang cukup besar di Kabupaten Sukamara.

Capaian kinerja urusan penanaman modal Kabupaten Sukamara hingga tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.





Tabel 2. 50 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Sukamara
Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Ket.	OPD Penanggung Jawab
		2020	2021	2022	2023	2024		
Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA) (Unit)	Inves tor	-	1	1	1	1	Tercapai	DPMPTSP
Presentase Terselenggara nya Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/K ota	%	-	-	-	-	100	Tercapai	DPMPTSP
Jumlah kegiatan promosi yang terlaksana	Kegia tan	0	0	1	1	Indikat or ini sudah tidak di pakai pada tahun 2025	Tercapai	DPMPTSP
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	-	92,96	93,75	94,98	94,95	Tercapai	DPMPTSP
Jumlah Nilai Realisasi Investasi berskala Nasional (Juta Rupiah)	Rupia h	-	231. 285. 529. 966	88.203.88 7.513	315.335.15 5.512	Indikato r ini sudah tidak di pakai pada tahun 2025	Belum Tercapai	DPMPTSP
Jumlah Data Penanaman Modal	Juml ah	-	1	1	1	Indikat or ini sudah tidak di pakai pada tahun 2025	Tercapai	DPMPTSP
Jumlah Sistem yang Dikembangk an	Juml ah	-	1	1	1	Indikat or ini sudah tidak di pakai pada tahun 2025	Tercapai	DPMPTSP
Presentase Kegiatan Pengendalia n Pelaksanaan Penanaman Modal yang dilakukan	%	100	100	100	100	100	Tercapai	DPMPTSP
Presentase pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	%	100	100	100	100	100	Tercapai	DPMPTSP

Sumber: *Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2024*

13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Banyaknya jumlah organisasi pemuda menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Semakin banyaknya jumlah organisasi pemuda,





menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah dalam memberdayakan pemuda sebagai salah satu aset bangsa.

Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 51 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Ket.	OPD Penanggung Jawab
		2020	2021	2022	2023	2024		
Persentase Organisasi Pemuda mendapatkan pelatihan Wirausaha	%	-	0	9,92	0	75	Tercapai	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
Cakupan pembinaan cabang olahraga	%	-	100	100	100	100	Tercapai	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
Cakupan pembinaan Kepramukaan	%	-	-	100	100	100	Tercapai	Disporapar

Sumber: *Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2024*

14. Urusan Statistik

Sebagai bahan dasar dalam perencanaan pembangunan daerah, keberadaan data baik kualitas maupun kuantitasnya sangat diperlukan agar dihasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas. Oleh karena itu, setiap tahun Pemerintah Kabupaten Sukamara bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukamara, menerbitkan buku-buku statistik diantaranya Sukamara Dalam Angka, PDRB Kabupaten Sukamara, Distribusi Pendapatan Penduduk Kabupaten Sukamara, Penduduk Kabupaten Sukamara, Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sukamara serta Potensi Desa Kabupaten Sukamara.

Untuk menghasilkan kualitas data perencanaan pembangunan maka diperlukan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi di kabupaten untuk pengumpulan, pengolahan, analisis untuk menghasilkan kualitas mutu data statistik sektoral. Secara umum capaian kinerja hingga tahun 2024 untuk urusan statistik disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 52 Capaian Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Ket.	OPD Penanggung Jawab
		2020	2021	2022	2023	2024		
Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Data	-	Tersedia	Tersedia	Belum Tersedia	-	Belum Tercapai	Dinas Komunikasi dan Informatika
Buku "kabupaten dalam angka"	Buku	-	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tercapai	Dinas Komunikasi dan Informatika
Persentase pemenuhan data statistik Sektoral	%	-	-	-	-	80	Tercapai	Dinas Komunikasi dan Informatika

Sumber: *Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2024*



15. Urusan Persandian

Urusan persandian dalam penyediaan layanan informasi pemerintah daerah yang berbasis elektronik untuk mengelola keamanan informasi dan jaringan komunikasi sandi. Secara umum capaian kinerja hingga tahun 2024 untuk urusan persandian disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 53 Capaian Kinerja Urusan Persandian Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Ket.	OPD Penanggung Jawab
		2020	2021	2022	2023	2024		
Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	-	100	100	100	-	Tercapai	Dinas Komunikasi dan Informatika
Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan persandian	%	-	-	-	-	100	Tercapai	Dinas Komunikasi dan Informatika

Sumber: *Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2024*

16. Urusan Kebudayaan

Pembangunan bidang seni budaya sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat, yaitu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab. Selanjutnya masyarakat Sukamara adalah masyarakat yang sangat menghargai seni budaya, ini dibuktikan dengan terdapatnya keragaman budaya yang dimiliki. Hal ini ditambah dengan heterogenitas masyarakat baik dari segi etnis maupun agama sehingga dapat memperkaya khasanah budaya setempat. Selain itu Kabupaten Sukamara yang terbagi menjadi 5 Kecamatan dan terdiri dari 29 Desa dan 3 Kelurahan memiliki adat istiadat serta berbagai kesenian yang beragam yang menggambarkan dinamika yang ada dalam masyarakat, sekaligus sebagai potensi yang dimiliki masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai wadah dalam melestarikan budaya yang dimiliki oleh masyarakatnya, secara rutin setiap tahun dilaksanakan festival baik festival seni Islami seperti Hadrah dan lainnya, juga yang cakupannya umum adalah Festival Gawi Barinjam. Selain itu, festival ini juga merupakan ajang adu kreasi yang akan memilih para pelaku seni dan budaya untuk bertanding pada festival serupa di tingkat Provinsi yaitu Festival Isen Mulang yang pelaksanaannya diikuti oleh seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah.

Sebagai informasi tambahan, jumlah grup kesenian sebagai wadah pelestarian dan pembinaan seni dan budaya yang ada di Kabupaten Sukamara ada 9 (sembilan) group yang mayoritas masih berada di pusat Kota Sukamara yaitu di Kelurahan Padang dan Kelurahan Mendawai, walaupun ada juga grup kesenian yang lokasinya di kecamatan-kecamatan lain di luar Kecamatan Sukamara. Capaian kinerja pembangunan urusan kebudayaan dapat dilihat pada tabel berikut.





Tabel 2. 54 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Ket.	OPD Penanggung Jawab
		2020	2021	2022	2023	2024		
Jumlah sanggar seni budaya yang didirikan	Grup	-	0	10	10	-	Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Jumlah sanggar seni budaya yang terdaftar dan aktif	Grup	-	0	10	10	-	Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Jumlah sanggar seni budaya yang difasilitasi	Grup	14	0	0	4	-	Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Jumlah gedung seni budaya yang didirikan	Unit	-	0	1	1	-	Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyelenggaraan festival/ pagelaran seni budaya	Even	-	0	4	4	4	Belum Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Jumlah cagar budaya yang dilestarikan (didaftar/ registrasi)	Cagar Budaya	-	0	0	11	-	Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Jumlah cagar budaya yang dilestarikan (ditetapkan)	Cagar Budaya	-	0	0	0	-	Belum Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Jumlah cagar budaya yang direvitalisasi	Cagar Budaya	0	0	0	15	-	Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembebasan lahan situs cagar budaya milik masyarakat	Lokasi	-	0	0	0	-	Belum Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Jumlah museum yang didirikan	Unit	-	0	0	0	-	Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penyelenggaraan pameran cagar budaya	Even	-	0	0	0	-	Belum Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pengembangan kesenian tradisional	Kegiatan	-	-	-	-	0	Belum Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Potensi cagar budaya yang ditetapkan	Cagar Budaya	-	-	-	-	0	Belum Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sumber: *Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2024*

17. Urusan Perpustakaan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sukamara merupakan OPD yang bertanggungjawab terhadap Urusan Perpustakaan di Kabupaten Sukamara. Salah satu tugasnya adalah dalam rangka pengembangan perpustakaan dalam hal mutu layanan, koleksi dan pelaksanaan pembangunan perpustakaan daerah, yang merupakan perpustakaan masyarakat umum dimana saat ini baru ada 1 (satu) buah. Dalam pengelolaan perpustakaan umum daerah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah selalu menjalin kerja sama dan kemitraan dengan berbagai *stakeholder* terkait dan komponen penggiat perpustakaan serta kelompok literasi.

Tidak hanya menjalankan tugas sebagaimana tersebut di atas, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah juga menjalankan tugasnya melakukan pembinaan secara berkala dan berkelanjutan terhadap perpustakaan desa, perpustakaan sekolah dan perpustakaan khusus di wilayah Kabupaten Sukamara. Bentuk pembinaan saat ini berupa kegiatan supervisi dan monitoring kepada pengelola perpustakaan melalui kunjungan langsung. Saat ini seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Sukamara sebanyak 32 desa/kelurahan sudah memiliki perpustakaan desa.

Capaian kinerja urusan perpustakaan Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.





Tabel 2. 55 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Ket.	OPD Penanggung Jawab
		2020	2021	2022	2023	2024		
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	9.610	18.254	6.396	8.244	7.453	Tercapai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	Rasio	32	32	32	32	32	Tercapai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Buku	9.026	9.026	9.026	9.368	13.334	Tercapai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Persentase keterpenuhan administrasi perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	Tercapai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Persentase peningkatan jumlah pengunjung	%	-	-	-	-	14,28	Tercapai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Sumber: *Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2024*

18. Urusan Kearsipan

Pada bidang kearsipan, secara khusus Pemerintah Kabupaten Sukamara telah membentuk OPD pengelola arsip yaitu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah. Dengan dibentuknya OPD tersebut, ke depan diharapkan semua OPD dapat melakukan pengelolaan kearsipan secara baku sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini sudah dilakukan secara bertahap terutama dengan telah dilaksanakannya Bimtek Manajemen Kearsipan kepada seluruh OPD dilanjutkan dengan studi banding kearsipan ke daerah lain yang telah melaksanakan pengelolaan kearsipan. Capaian kinerja urusan kearsipan Kabupaten Sukamara tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 56 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Ket.	OPD Penanggung Jawab
		2020	2021	2022	2023	2024		
Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	%	0	23	33	100	100	Tercapai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	%	-	0	0	0	-	Belum Tercapai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Cakupan Data dan Informasi Penggunaan Arsip	%	-	0	0	0	-	Belum Tercapai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Persentase Pembinaan Pengelola Arsip di Kabupaten	%	-	-	-	-	30	Tercapai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Persentase Jumlah Arsip yang Dilindungi	%	-	-	-	-	100	Tercapai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Sumber: *Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2024*

Layanan Urusan Pilihan

1. Urusan Pariwisata

Urusan pariwisata diatur dalam Undang Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam pasal 11, dinyatakan bahwa pemerintahan memiliki kewenangan dalam urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Sebagaimana tercantum dalam pasal 12, urusan pariwisata masuk dalam urusan



pemerintahan pilihan. Dari payung hukum ini, penyelenggaraan Urusan Pariwisata mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata. Sesuai dengan pasal 5 Undang Undang Nomor 9 Tahun 2009, kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip yang menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal. Masih mengacu pada pasal yag sama, pelaksanaan Urusan Pariwisata ditujukan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dimana masyarakat ikut terlibat aktif dalam pembangunan pariwisata dengan terus menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup. Pelaksanaan Urusan Pariwisata mengedepankan keselarasan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah.

Berdasarkan Keputusan Bupati Sukamara Nomor 188.45/95/2024 tentang Penetapan Desa Wisata Kabupaten Sukamara terdapat 11 desa wisata di kabupaten Sukamara antara lain 1). Desa Sungai Pasir; 2). Desa Sungai Cabang Barat; 3). Desa Sungai Tabuk; 4). Desa Sungai Raja; 5). Desa Sungai Bundung; 6). Kelurahan Jelai; 7) Desa Jihing; 8) Desa Air Dua; 9). Pangkalan Muntai; 10). Desa Natai Sedawak; 11). Desa Sungai Raja.

Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 57 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Ket.	OPD Penanggung Jawab
		2020	2021	2022	2023	2024		
PAD Sektor Pariwisata	Rp Juta	-	1,83	19,56	4,51	4,04	Belum Tercapai	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
Lama kunjungan Wisata	Hari	1	1	1	1,5	1,5	Tercapai	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
Jumlah Pelaku Usaha Berbasis Ekonomi Kreatif Unggulan	Orang	-	0	30	40	47	Tercapai	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	48.316	21.110	37.473	26.277	62.574	Tercapai	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
Persentase DPK (Deskstinasi Pariwisata Kabupaten) yang dipasarkan	%	40	55	100	100	100	Tercapai	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
Persentase SDM Pariwisata dan Pelaku Ekonomi Kreatif yang ditingkatkan kapasitasnya	%	65	100	100	100	100	Tercapai	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata

Sumber: Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2024





2. Urusan Pertanian

Struktur perekonomian di Kabupaten Sukamara pada tahun 2024 masih didominasi oleh sektor pertanian, walaupun cenderung berfluktuatif dari tahun ke tahun. Capaian kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Sukamara pada periode tahun 2020-2024 menunjukkan kinerja yang cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan tercapainya seluruh target indikator kinerja yang telah ditetapkan. Capaian kinerja urusan pertanian Kabupaten Sukamara tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 58 Capaian Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Ket.	OPD Penanggung Jawab
		2020	2021	2022	2023	2024		
Kontribusi pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	25,58	32,26	29,51	30,64	30,99	Tercapai	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Produksi sektor pertanian	Ton	6.818	2.548,78	7.555,11	7.928,22	5.292,54	Tercapai	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Jumlah kasus kesehatan hewan	Ekor	1.188	1.377	1.171	1.674	1.159	Tercapai	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Tingkat cakupan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Ha	58,9	58,5	14,9	10	13	Tercapai	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Cakupan bina kelompok petani	%	7,8	7,6	18,48	25,70	28,27	Tercapai	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Pemenuhan jumlah sarana pertanian	%	0,60	0,56	0,55	0,98	1,03	Belum Tercapai	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Penyediaan jumlah prasarana pertanian	%	0,70	0,65	0,64	1,13	1,19	Belum Tercapai	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Berkurangnya jumlah hewan yang terjangkit penyakit	%	5	5	5	10	10	Tercapai	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Peningkatan pembinaan kelompok tani	kelompok	56	52	51	90	95	Tercapai	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Sumber: *Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2024*

3. Urusan Perdagangan

Pelayanan di bidang perdagangan dilakukan melalui kegiatan pembinaan dan pelatihan kepada para pelaku bisnis terutama pengusaha mikro, kecil dan menengah. Selain itu, juga telah dilakukan pembangunan fasilitas-fasilitas perdagangan seperti pembangunan lokasi binaan dan penataan pasar tradisional. Jumlah pasar di Kabupaten Sukamara pada tahun 2021 adalah sebanyak 12 unit.

Capaian kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024 menunjukan kinerja yang cukup baik. Lebih jelasnya, capaian kinerja urusan





perdagangan Kabupaten Sukamara tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 59 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Ket.	OPD Penanggung Jawab
		2020	2021	2022	2023	2024		
Persentase sarana distribusi perdagangan yang aktif	%	-	73	82	100	100	Tercapai	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
Tingkat Inflasi	%	-	86	6,32	3,69	1,19	Belum Tercapai	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
Persentase koefisien variasi harga antar waktu	%	-	2,5	7,9	5,02	4,54	Tercapai	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
Persentase ketertarikan terhadap produk unggulan daerah	%	-	TAD	3	-	4	Belum Tercapai	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
Persentase alat ukur, takar timbangan dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah	%	-	TAD	2	0,2	12,17	Tercapai	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
Cakupan bina kelompok perdagangan informal	%	-	12	32	40	-	Tercapai	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
Persentase pasar yang memenuhi standar	%	0	0	0	0	0	Belum Tercapai	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
Persentase promosi dagang produk unggulan daerah	%	100	100	100	100	100	Tercapai	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan

Sumber: *Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2024*

4. Urusan Perindustrian

Pembagian urusan pemerintahan bidang perindustrian pada pemerintah daerah kabupaten berfungsi untuk mempersiapkan penyusunan rencana kegiatan usaha industri, produksi industri, prasarana dan informasi industri untuk menyiapkan dokumen Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten (RIPIK) dengan mengacu Rencana Induk Provinsi Kalimantan Tengah. Capaian kinerja urusan perdagangan Kabupaten Sukamara tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 60 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Ket.	OPD Penanggung Jawab
		2020	2021	2022	2023	2024		
Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan industri	Dokumen	-	-	-	-	1	Belum Tercapai	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	-	0	0	0	0	Belum Tercapai	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Data	-	0	Ada	Ada	1	Tercapai	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan

Sumber: *Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2024*



5. Urusan Transmigrasi

Kepadatan penduduk di Kabupaten Sukamara tidak terlalu besar yaitu sekitar 16 jiwa per km², sehingga jelas membutuhkan banyak penduduk untuk memaksimalkan pengelolaan dan kinerja wilayahnya. Salah satu program yang ditempuh adalah transmigrasi dengan harapan terdapat transmigran dari daerah lain untuk masuk dan menetap di Kabupaten Sukamara, sehingga dapat mengelola wilayahnya yang luas dan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki. Program transmigrasi diharapkan mampu dilaksanakan agar dapat meningkatkan jumlah penduduk sehingga mampu mempercepat kemajuan pembangunan di Kabupaten Sukamara serta memicu terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Pemerintah Kabupaten Sukamara perlu menciptakan koordinasi penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman serta pengembangan kawasan transmigrasi, pembinaan transmigrasi, seperti pengembangan usaha ekonomi dan sosial budaya transmigran.

Capaian kinerja Urusan Transmigrasi Kabupaten Sukamara pada tahun 2020-2024 menunjukkan kinerja yang kurang baik. Seluruh indikator kinerja yang digunakan tidak mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja dari setiap indikator dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 61 Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Ket.	OPD Penanggung Jawab
		2020	2021	2022	2023	2024		
Persentase ketersediaan kawasan transmigrasi	%	-	50	33,33	66,67	66,67	Belum Tercapai	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jumlah transmigran yang ditempatkan	Orang	-	0	0	0	0	Belum Tercapai	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jumlah transmigran yang menetap	Orang	-	54	53	53	53	Belum Tercapai	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Persentase kawasan permukiman yang di kembangkan	%	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	Belum Tercapai	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Tersedianya kawasan transmigrasi yang sudah HPL	kawasa n	1	1	1	1	1	Tercapai	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Tersedianya kawasan transmigrasi yang siap ditempati	kawasa n	1	1	1	1	1	Tercapai	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sumber: *Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2024*

6. Urusan Kelautan dan Perikanan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dinyatakan untuk kewenangan urusan kelautan dan perikanan oleh pemerintah daerah mencakup sub urusan (1) Perikanan Tangkap meliputi: a) Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota; b) Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI); dan sub urusan Perikanan Budidaya meliputi: a) Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota; b) Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan; dan c) Pengelolaan pembudidayaan ikan.



Capaian kinerja urusan kelautan dan perikanan Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 62 Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Ket.	OPD Penanggung Jawab
		2020	2021	2022	2023	2024		
Produksi Perikanan Tangkap	Ton	-	3,75 3,21	4,698, 13	4,814, 23	4,886 ,672	Tercapai	Dinas Perikanan
Produksi perikanan budidaya	Ton	-	2,112, 98	2,149, 34	1,946, 03	2,006, 63	Tercapai	Dinas Perikanan
Peningkatan produksi benih	Ekor	-	92,1 00	2,149, 34	223,0 00	212,0 00	Tercapai	Dinas Perikanan
Cakupan pengawasan sumber daya sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air	%	-	0	0	0	0	Belum Tercapai	Dinas Perikanan
Kontribusi sektor perikanan dalam PDRB	Rp (Juta)/ Tahun	78,28 6,75	146. 904, 60	162,57 7,40	170,7 46,50	181,9	Tercapai	Dinas Perikanan
Persentase keterpenuhan administrasi perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	Tercapai	Dinas Perikanan
Produksi perikanan tangkap	%	16,88	-5,06	25,17	-9,46	3,3	Tercapai	Dinas Perikanan
Peningkatan produksi perikanan budidaya	%	64,45	-1,71	1,72	2,48	13,06	Tercapai	Dinas Perikanan
Peningkatan jumlah pengolahan hasil perikanan	%	2,48	-41	23,46	5,84	24	Belum Tercapai	Dinas Perikanan

Sumber: *Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2024*

Penunjang Urusan

1. Urusan Perencanaan

Perencanaan pembangunan memiliki fungsi strategis. Dalam menyelesaikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah mengacu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015. Berdasarkan Undang-Undang tersebut terdapat pengaturan baru tentang pengelompokkan urusan kewenangan wajib dan urusan kewenangan pilihan bagi Pemerintah Daerah. Kebijakan tersebut terkait erat dengan keterpaduan perencanaan pembangunan secara nasional. Perencanaan pembangunan daerah bersifat komprehensif dan mencakup seluruh urusan kewenangan daerah dan penugasan lain dari Pemerintah Pusat.

Selain itu, perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sukamara harus sinergis dengan rencana pembangunan provinsi dan nasional agar keterpaduan pembangunan daerah dapat dicapai. Keterpaduan perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dilakukan melalui konsultasi perencanaan pembangunan Kabupaten Sukamara baik ditingkat provinsi maupun nasional agar rencana pembangunan daerah Kabupaten Sukamara sejalan dengan arahan pembangunan nasional dan kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah.

Capaian kinerja urusan perencanaan Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.





Tabel 2. 63 Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Ket.	OPD Penanggung Jawab
		2020	2021	2022	2023	2024		
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dokumen	-	0	0	1	1	Tercapai	Bappeda
Tersedianya Dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/ PERKADA	Dokumen	-	Tersedia	Terse dia	Terse dia	Tersed ia	Tercapai	Bappeda
Tersedianya Dokumen RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Dokumen	-	Tersedia	Terse dia	Terse dia	Tersed ia	Tercapai	Bappeda
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPd	%	100	100	100	100	100	Tercapai	Bappeda
Penjabaran konsistensi program RKPd kedalam APBD	%	100	100	100	100	100	Tercapai	Bappeda
Cakupan konsistensi perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan lainnya	%	100	100	100	100	100	Tercapai	Bappeda
Persentase keterpenuhan administrasi perangkat daerah	%	100	-	-	-	100	Tercapai	Bappeda
Persentase tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah	%	-	-	-	-	100	Tercapai	Bappeda
Persentase konsistensi perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan lainnya	%	-	-	-	-	85	Tercapai	Bappeda

Sumber: *Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2024*

2. Urusan Keuangan

Pengelolaan keuangan di Kabupaten Sukamara sudah berjalan transparan dan akuntabel yang mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan berbasis akuntansi, nilai-nilai historis, realistis, periodisasi, konsisten, pengungkapan lengkap dan penyajian secara wajar.

Kinerja pengelola keuangan Kabupaten Sukamara antara lain tergambar dari besarnya belanja daerah terhadap anggaran belanja. Untuk mengukur kinerja urusan keuangan, ditetapkan 4 indikator kinerja yaitu Capaian peningkatan pengelolaan keuangan daerah; capaian peningkatan dan pengembangan pengelolaan aset/barang darat; capaian peningkatan pendapatan asli daerah; serta persentase keterpenuhan administrasi perangkat daerah. Capaian kinerja urusan keuangan Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2. 64 Capaian Kinerja Urusan Keuangan Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Ket.	OPD Penanggung Jawab
		2020	2021	2022	2023	2024		
Capaian Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah	%	100	97,37	92,47	80,54	99,53	Tercapai	BPKAD
Capaian Peningkatan	%	100	86,81	57,44	94	97,08	Belum Tercapai	





Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Ket.	OPD Penanggung Jawab
		2020	2021	2022	2023	2024		
dan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah								BPKAD
Capaian Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	%	100	72,01	81,99	83,26	96,41	Tercapai	BPKAD
Persentase keterpenuhan administrasi perangkat daerah	%	-	-	-	-	98,4		BPKAD
Persentase terpenuhinya penatausahaan keuangan daerah	%	-	-	-	-	99,53		BPKAD
Persentase terpenuhinya administrasi penatausahaan Aset/Barang Milik Daerah	%	-	-	-	-	97,08		BPKAD
Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah	%	-	-	-	-	96,41		BPKAD
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,0014	0,0013	0,0013	0,0017	0,0022		

Sumber: Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2024

3. Urusan Kepegawaian

Kinerja urusan kepegawaian di pemerintahan Kabupaten Sukamara dilihat dari jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi, ASN yang mengikuti tugas belajar sesuai dengan kebutuhan formasi, penanganan terhadap kasus pelanggaran disiplin ASN, pengelolaan data kepegawaian, serta ASN yang terpenuhi hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Capaian kinerja urusan kepegawaian Kabupaten Sukamara tahun 2020-2024 lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 65 Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Ket.	OPD Penanggung Jawab
		2020	2021	2022	2023	2024		
Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi	%	75,5	99,61	85,44	90,86	93,43	Belum Tercapai	BKPSDM
Persentase ASN yang mengikuti tugas belajar sesuai dengan kebutuhan formasi	%	-	100	100	100	100	Tercapai	BKPSDM
Persentase penanganan terhadap kasus pelanggaran disiplin ASN	%	74,57	100	91,65	100	85,71	Tercapai	BKPSDM
Persentase ASN yang terpenuhi hak-hak	%	98,01	78,7	63,91	95,26	97,82	Tercapai	BKPSDM



Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Ket.	OPD Penanggung Jawab
		2020	2021	2022	2023	2024		
kepegawaiaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku								
Persentase pengelolaan data kepegawaian	%	100	98,72	100	100	100	Tercapai	BKPSDM
Persentase keterpenuhan administrasi perangkat daerah	%	94,53	91,21	99,88	93,67	98,23	Belum Tercapai	BKPSDM
Persentase profesionalisme ASN	%	-	50,22	61,08	79,29	79,26	Belum Tercapai	BKPSDM

Sumber: Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2024

4. Urusan Pendidikan dan Pelatihan

Urusan pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Sukamara dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPPSDM) dengan tujuan meningkatkan kompetensi dan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintahan Kabupaten Sukamara. Kinerja urusan pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Sukamara diukur menggunakan indikator persentase pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi. Secara lebih detail capaian kinerja urusan pendidikan dan pelatihan Kabupaten Sukamara tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 66 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Ket.	OPD Penanggung Jawab
		2020	2021	2022	2023	2024		
Persentase Pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi	%	-	100	82,08	100	100	Tercapai	BKPSDM

Sumber: Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2024

5. Urusan Penelitian dan Pengembangan

Kegiatan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Sukamara dilakukan dalam rangka pemecahan masalah dan peningkatan kualitas produk, baik dalam bentuk produk hukum, kebijakan, maupun perencanaan pembangunan. Pemerintah Kabupaten Sukamara berupaya mendorong implementasi rencana kelitbangan, kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah, dan perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah. Penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitas atau efisiensi dalam kegiatan ekonomi, baik produksi, distribusi dan konsumsi di Kabupaten Sukamara di masa yang akan datang.

Capaian kinerja urusan penelitian dan pengembangan Kabupaten Sukamara dapat dilihat pada tabel berikut.





Tabel 2. 67 Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Ket.	OPD Penanggung Jawab
		2020	2021	2022	2023	2024		
Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	-	100	100	100	100	Tercapai	Bappeda
Persentase implementasi rencana dan pemanfaatan riset dan inovasi daerah	%	-	-	-	80	100	Tercapai	Bappeda
Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	-	100	100	100	100	Tercapai	Bappeda
Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	-	32,26	38,71	38,03	38,6	Tercapai	Bappeda
Indeks Inovasi Daerah		-	44,64	49,86	38,02	38,60		

Sumber: *Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2024*

Pendukung Urusan

1. Urusan Sekretariat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Sukamara Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sukamara, Sekretariat Daerah Kabupaten Sukamara melaksanakan tugas pokok untuk membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekertariat Daerah melaksanakan fungsi pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada instansi daerah, dan pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.

Capaian kinerja urusan sekretariat daerah Kabupaten Sukamara tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 68 Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Ket.	OPD Penanggung Jawab
		2020	2021	2022	2023	2024		
Meningkatnya Pelaksanaan Penataan Organisasi SKPD di Kabupaten Sukamara	%	0	40	66	90,17	-	Belum Tercapai	Sekretariat Daerah
Meningkatnya Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan	%	0	93	94,11	98,22	-	Belum Tercapai	Sekretariat Daerah
Meningkatnya Penyelesaian Masalah di Sektor Perekonomian, Pembangunan, dan Sumber Daya Alam	%	0	95	91,64	92,57	-	Belum Tercapai	Sekretariat Daerah
Persentase keterpenuhan administrasi perangkat daerah	%	-	-	-	-	110	Tercapai	Sekretariat Daerah
Persentase terpenuhinya administrasi bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	%	-	-	-	-	118	Tercapai	Sekretariat Daerah
Persentase terpenuhinya administrasi bidang perekonomian dan pembangunan	%	-	-	-	-	96	Belum Tercapai	Sekretariat Daerah

Sumber: *Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2024*



2. Urusan Sekretariat Dewan

Sekretariat Dewan mempunyai tugas untuk menyelenggarakan segala urusan yang berkaitan dengan kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli apabila dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan badan fungsi Pemerintah Daerah. Indikator yang digunakan untuk mengukur ketercapaian kinerja Sekretariat Dewan antara lain Persentase peningkatan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPRD serta tersusunnya dan terintegrasinya Program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJMD) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD).

Capaian kinerja urusan sekretariat daerah Kabupaten Sukamara tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 69 Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Dewan Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Ket.	OPD Penanggung Jawab
		2020	2021	2022	2023	2024		
Persentase peningkatan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPRD	%	81,97	98,69	97,93	98,49	-	Tercapai	Sekretariat Dewan
Tersusunnya dan terintegrasinya Program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJMD) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD)	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tercapai	Sekretariat Dewan
Persentase keterpenuhan administrasi perangkat daerah	%	-	-	-	-	95,34	Tercapai	Sekretariat Dewan
Persentase terlaksananya program kerja DPRD	%	-	-	-	-	85,77	Tercapai	Sekretariat Dewan

Sumber: Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2024

Urusan Pelaksanaan Pengawasan

Pengawasan adalah upaya penting dalam menjalankan kegiatan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan daerah yang diturunkan ke dalam program dan kegiatan. Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH di Kabupaten Sukamara ditunjukkan dengan sejumlah laporan hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh inspektorat daerah. Capaian kinerja Urusan Pengawasan diukur menggunakan 5 indikator kinerja yaitu persentase kualitas pengawasan; persentase perumusan kebijakan, pendampingan, dan asistensi yang dilaksanakan; persentase keterpenuhan administrasi perangkat daerah; persentase penyelenggaraan pengawasan berdasarkan PKPT; serta





persentase perangkat daerah yang menerapkan SPIP. Capaian kinerja urusan pengawasan Kabupaten Sukamara tahun 2020-2024 secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 70 Capaian Kinerja Urusan Pelaksanaan Pengawasan Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Ket.	OPD Penanggung Jawab
		2020	2021	2022	2023	2024		
Persentase Kualitas Pengawasan	%	-	90	128,29	86,94	-	Tercapai	Inspektorat Daerah
Persentase perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan	%	-	100	88,89	100	-	Tercapai	Inspektorat Daerah
Persentase keterpenuhan administrasi perangkat daerah	%	-	-	-	-	100	Tercapai	Inspektorat Daerah
Persentase penyelenggaraan pengawasan berdasarkan PKPT dan non PKPT	%	-	-	-	-	95	Belum Tercapai	Inspektorat Daerah
Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPIP	%	-	-	-	-	100	Tercapai	Inspektorat Daerah

Sumber: *Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2024*

Urusan Pelaksanaan Unsur Kewilayahan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kecamatan dipimpin oleh Camat dengan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, mengoordinasikan penetapan dan penegakan Perda dan Perkada, mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa/kelurahan. Selain itu kecamatan masih memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan.

Urusan kewilayahan di Kabupaten Sukamara dilaksanakan oleh 5 kecamatan yaitu Kecamatan Sukamara, Kecamatan Balai Riam, Kecamatan Jelai, Kecamatan Permata Kecubung, dan Kecamatan Pantai Lunci. Capaian kinerja urusan kewilayah secara lebih rinci dijabarkan berdasarkan setiap kecamatan dibawah ini.





1. Kecamatan Sukamara

Capaian kinerja urusan kewilayahan Kecamatan Sukamara di Kabupaten Sukamara tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 71 Capaian Kinerja Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Ket.	OPD Penanggung Jawab
		2020	2021	2022	2023	2024		
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Lingkup Kecamatan	%	0	0	95,22	0	100	Tercapai	Kecamatan Sukamara
Jumlah Desa dan Kelurahan Mandiri	%	0	0	0	0	62,5	Belum Tercapai	Kecamatan Sukamara
Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	%	0	0	0	0	90	Tercapai	Kecamatan Sukamara
Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	0	0	58	0	94	Belum Tercapai	Kecamatan Sukamara
Persentase Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	0	0	0	0	93	Belum Tercapai	Kecamatan Sukamara
Persentase keterpenuhan administrasi perangkat daerah	%	-	-	-	-	100	Tercapai	Kecamatan Sukamara

Sumber: *Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2024*

2. Kecamatan Balai Riam

Capaian kinerja urusan kewilayahan Kecamatan Balai Riam di Kabupaten Sukamara tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 72 Capaian Kinerja Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Ket.	OPD Penanggung Jawab
		2020	2022	2022	2023	2024		
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Lingkup Kecamatan	%	0	0	0	0	100	Tercapai	Kecamatan Balai Riam
Jumlah Desa dan Kelurahan Mandiri	%	100	89,66	97	95,98	100	Tercapai	Kecamatan Balai Riam
Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	%	0	0	0	0	100	Tercapai	Kecamatan Balai Riam
Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	0	0	99,92	99,84	100	Tercapai	Kecamatan Balai Riam
Persentase Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	0	0	0	0	100	Tercapai	Kecamatan Balai Riam
Persentase keterpenuhan administrasi perangkat daerah	%	-	-	-	-	TAD	Tercapai	Kecamatan Balai Riam

Sumber: *Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2024*

3. Kecamatan Jelai

Capaian kinerja urusan kewilayahan Kecamatan Jelai di Kabupaten Sukamara tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 73 Capaian Kinerja Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Ket.	OPD Penanggung Jawab
		2020	2021	2022	2023	2024		
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Lingkup Kecamatan	%	0	80,2	80,32	81	83	Belum Tercapai	Kecamatan Jelai
Jumlah Desa dan Kelurahan Mandiri	%	0	60	60	75	78,68	Belum Tercapai	Kecamatan Jelai
Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	%	0	0	75	85	86	Belum Tercapai	Kecamatan Jelai
Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	0	0	90	91	100	Tercapai	Kecamatan Jelai
Persentase Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	0	0	95	95	95	Belum Tercapai	Kecamatan Jelai





Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Ket.	OPD Penanggung Jawab
		2020	2021	2022	2023	2024		
Persentase keterpenuhan administrasi perangkat daerah	%	-	-	-	-	TAD		Kecamatan Jelai

Sumber: *Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2024*

4. Kecamatan Permata Kecubung

Capaian kinerja urusan kewilayahan Kecamatan Permata Kecubung di Kabupaten Sukamara tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 74 Capaian Kinerja Kecamatan Permata Kecubung Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Ket.	OPD Penanggung Jawab
		2020	2021	2022	2023	2024		
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Lingkup Kecamatan	%	0	100	100	98,72	83,4	Belum Tercapai	Kecamatan Permata Kecubung
Jumlah Desa dan Kelurahan Mandiri	%	99,22	0	86	89,99	80	Belum Tercapai	Kecamatan Permata Kecubung
Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	%	0	0	100	16,04	96,53	Belum Tercapai	Kecamatan Permata Kecubung
Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	0	100	82	95,45	91,36	Belum Tercapai	Kecamatan Permata Kecubung
Persentase Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	0	0	100	49,15	90,59	Belum Tercapai	Kecamatan Permata Kecubung
Persentase keterpenuhan administrasi perangkat daerah	%	-	-	-	-	TAD		Kecamatan Permata Kecubung

Sumber: *Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2024*

5. Kecamatan Pantai Lunci

Capaian kinerja urusan kewilayahan Kecamatan Pantai Lunci di Kabupaten Sukamara tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 75 Capaian Kinerja Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Ket.	OPD Penanggung Jawab
		2020	2021	2022	2023	2024		
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Lingkup Kecamatan	%	100	100	100	100	94,25	Belum Tercapai	Kecamatan Pantai Lunci
Jumlah Desa dan Kelurahan Mandiri	%	97	0	100	100	93	Belum Tercapai	Kecamatan Pantai Lunci
Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	%	100	0	0	TAD	93,57	Belum Tercapai	Kecamatan Pantai Lunci
Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	100	100	100	100	99,98	Belum Tercapai	Kecamatan Pantai Lunci
Persentase Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	0	0	TAD	90,65	Belum Tercapai	Kecamatan Pantai Lunci
Persentase keterpenuhan administrasi perangkat daerah	%	-	-	-	-	99,95	Belum Tercapai	Kecamatan Pantai Lunci

Sumber: *Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2024*



Urusan Pelaksanaan Unsur Pemerintahan Umum

Unsur pemerintahan umum mencakup urusan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Urusan kesatuan bangsa dan politik merupakan faktor penentu keberlangsungan dan keberlanjutan pemerintahan. Di dalamnya tercakup aspek ideologi bernegara (Pancasila), karakter dan wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan bangsa, organisasi masyarakat, ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, serta kerukunan umat beragama. Semua aspek ini bertintegrasikan mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik dan bersatu padu berdasarkan ideologi Pancasila.

Capaian kinerja urusan pelaksanaan unsur pemerintah umum Kabupaten Sukamara tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 76 Capaian Kinerja Urusan Pelaksana Unsur Pemerintah Umum Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian					Ket.	OPD Penanggung Jawab
		2020	2021	2022	2023	2024		
Prosentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Karakter Kebangsaan	%	-	100	100	100	100	Tercapai	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Prosentase Cakupan Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	%	-	100	100	100	99,25	Belum Tercapai	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Persentase Cakupan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	%	-	0	100	30	-	Belum Tercapai	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Terlaksananya Pembinaan terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Peningkatan Toleransi Kerukunan Beragama di Masyarakat dan Ekonomi	%	-	100	100	100	100	Tercapai	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Terpeliharanya Stabilitas Daerah serta Deteksi Dini terhadap Ancaman, Gangguan Hambatan dan Tantangan terhadap Jalannya Roda Pemerintahan	%	-	100	100	100	-	Tercapai	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Persentase keterpenuhan administrasi perangkat daerah	%	-	-	-	-	99	Belum Tercapai	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Persentase fasilitas penanganan konflik sosial	%	-	-	-	-	46,6	Belum Tercapai	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sumber: Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2024





Capaian Standar Pelayanan Minimal

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) antara lain mencakup bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum, bidang perumahan rakyat, bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta bidang sosial. Adapun capaian SPM Kabupaten Sukamara tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 77 Capaian SPM Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian SPM				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Pendidikan						
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	71,74	96,17	92,28	98,49	95,1
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	0,06	0,27	95,8`	80,7	99,65
3.	Pendidikan Anak Usia dini	Jumlah warga negara usia usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	83,93	68.67	77,51	98,46	98,55
	Kesehatan						
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	86	92,29	98,15	95,51	91,63
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	78	86,29	92,6	92,54	88,61
3.	Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	91	96,82	98,16	98,3	90,26
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	67	64,52	74,32	93,05	95.99
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia Pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	45	30,95	79,71	96	97,55
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	37	25,66	42,57	68,08	63,03
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	83	64,33	48,77	51,06	63,03





No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian SPM				
			2020	2021	2022	2023	2024
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	48	11,53	36,64	41,98	72,06
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warga Negara penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	58	31,39	79,33	118,54	44,51
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	90	82,65	90,46	100	163,13
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	60	98,92	67,66	92,09	101,96
12	Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human Immunodeficiency Virus) mendapatkan layanan kesehatan.	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan.	32	28,33	50,19	96,68	77,53
Pekerjaan Umum dan Penata Ruang							
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari Hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	74,9	52	27,89	31,87	34,16
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok layanan pengolahan Air Limbah Domestik Regional Limbah Kabupaten/Kota	75,16	11,43	28,84	16,07	18,81
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman							
1.	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	52,5	-	20	0	100
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi	-	-	0	0	100





No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian SPM				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Program Pemerintah Daerah Kabupaten	penyediaan rumah yang layak huni					
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	-	100	97,97	97.2	89,46
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	80	80	92.75	99,8
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	87,69	80	97.64	99,04
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	-	100	100	100	93,73
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	50	56,36	100	100	93,31
Sosial							
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	42,58	100	46,01	23,98	88,97
2.	Rehabilitas sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	-	-	94,67	98,33	100
3.	Rehabilitas sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	8,37	100	96	100	100
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	-	100	96,89	98,33	100





No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Capaian SPM				
			2020	2021	2022	2023	2024
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Kabupaten	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100	100	96,12	100	100

Sumber: Laporan SPM

Untuk SPM Bidang Pendidikan, selain 3 indikator diatas terdapat 12 Indikator lain dengan capaian sebagai berikut :

A.1 Skor Kemampuan Literasi SD

Terjadi penurunan 1,26 poin dari 56,63 ke 55,37 di tahun 2023 dan 2024 secara berurutan. Menurunnya skor ini mengindikasikan menurunnya kemampuan membaca dan memahami teks di tingkat SD. Perlu perhatian agar fondasi literasi tidak melemah.

A.1 Skor Kemampuan Literasi - SMP

Sama dengan skor kemampuan literasi SD, skor kemampuan literasi pada level smp juga mengalami penurunan sebesar 1,56 poin. Skor Kemampuan Literasi Pada Tahun 2023 adalah sebesar 71,22 sedangkan di 2024 sebesar 69,66

A.2 Skor Kemampuan Numerasi – SD

Di tahun 2024, Kemampuan numerasi Naik signifikan 5,69 poin menjadi 47,50 dari 41,81 di tahun 2023, yang menunjukkan peningkatan kuat pada kemampuan matematika dasar siswa SD.

A.2 Skor Kemampuan Numerasi – SMP

Berbeda dengan level SD, kemampuan numerasi di SMP Turun 1,21 poin, dari tahun 2023 dengan skor sebesar 61,94 menjadi 60,73 di tahun 2024. Perlu penguatan kembali pada pembelajaran matematika.

B.10 Angka Partisipasi Sekolah (5–6) – PAUD

Naik tipis 0,15 poin dari Tahun 2023 (79,37) ke tahun 2024 (79,52), menunjukkan partisipasi PAUD usia 5–6 tahun relatif stabil dengan sedikit peningkatan.

B.13 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7–15 – SD/SMP

Capaian yang tinggi untuk APS SD/SMP menandakan tingkat partisipasi sekolah sudah sangat tinggi. Namun angka ini mengalami penurunan sangat kecil sebesar 0,07 poin, dari 96,79 di tahun 2023 menjadi 96,72 di tahun 2024.

B.15 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7–18 Kesetaraan



Pada tahun 2023 APS kesetaraan sebesar 5,63, sedangkan di tahun 2024 sebesar 13,42, angka ini naik sebesar 7,79 poin. menunjukkan semakin banyak remaja yang mengikuti pendidikan kesetaraan.

B.8 Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B

Proporsi PAUD terakreditasi minimal B Turun dari 51,85 di tahun 2023 menjadi 51,11 di tahun 2024. Menunjukkan sedikit penurunan jumlah PAUD dengan akreditasi minimal B sebesar 0,74 poin.

C.1 Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4

Naik sebesar 0,01 poin, dari berarti proporsi guru berkualifikasi tetap stabil.

D.10 Iklim Inklusivitas – SD (53,52 → 53,72)

Naik 0,20 poin dari tahun 2023 ke 2024 sebesar 59,19 dan 59,20 secara berurutan. menunjukkan perbaikan kecil dalam penerimaan keberagaman dan kebutuhan khusus di SD.

D.10 Iklim Inklusivitas – SMP

Sama dengan iklim inklusivitas di Level SD, iklim inklusivitas di level SMP juga mengalami peningkatan dari 54,86 ke 55,3 di tahun 2023 dan 2024 secara berurutan. Peningkatan pada indikator ini adalah sebesar 10,45 poin.

D.4 Iklim Keamanan – SD

Iklim keamanan SD Turun 0,12 poin dari 69,23 di tahun 2023 ke 69,11 di tahun 2024.

D.4 Iklim Keamanan – SMP

Iklim keamanan di tingkat SMP Turun dari 69,17 di tahun 2023 menjadi 68,63 di tahun 2024, penurunan terjadi sebesar 0,54 poin.

D.8 Iklim Kebinekaan – SD

Pada tahun 2023 indikator ini turun dari 72,02 (2023) ke 68,80 (2024) tingkat penurunan adalah sebesar 3,22 poin.

D.8 Iklim Kebinekaan – SMP

Iklim kebinaan pada tingkat SMP Turun 5,02 poin. Pada tahun 2023 capaian indikator iklim kebinekaan adalah sebesar 73,77 6 sedangkan di tahun 2024 adalah sebesar 8,75.





2.2. Gambaran Keuangan Daerah

Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, surplus/defisit, dan pembiayaan daerah menjadi satu faktor penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Berbagai literatur dan *best practice* mengemukakan bahwa manajemen pembelanjaan pemerintah daerah adalah *instrumen kunci* dari kebijakan pemerintah daerah, karena itu disarankan kepada otoritas penganggaran untuk mencermati adanya hubungan integral dan keseimbangan antara “*revenue* dan *expenditure*”. Hal ini penting untuk menjaga terciptanya keberlanjutan fiskal (*fiscal sustainability*) daerah serta perspektif pembangunan yang berorientasi jangka menengah dan panjang.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mempunyai fungsi sebagai berikut.

1. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Selanjutnya, beberapa prinsip yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam penyusunan anggaran daerah yaitu:

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.





2. Penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak dapat dicukupi dalam APBD/Perubahan APBD.

Semua penerimaan dan pengeluaran daerah pada tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dibukukan dalam rekening kas umum daerah.

2.2.1. Kinerja Keuangan Daerah Masa Lalu

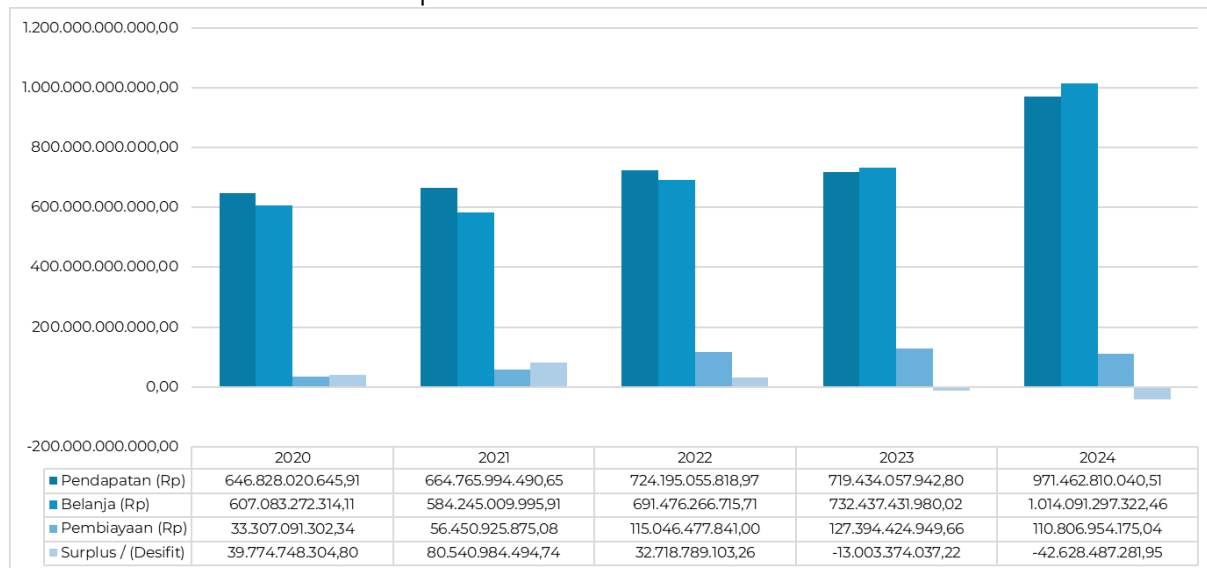
Analisis kinerja keuangan daerah dilakukan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah, dengan memastikan bahwa daerah memiliki sumber penerimaan yang cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sumber penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah serta penerimaan pembiayaan yang menjadi bagian integral dalam pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai struktur dan peruntukan pendapatan, belanja, serta pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi hal yang krusial dalam mengevaluasi kinerja keuangan daerah. Dalam rangka memahami kinerja keuangan Kabupaten Sukamara, maka dilakukanlah analisis kinerja keuangan daerah masa lalu Kabupaten Sukamara pada periode tahun 2020-2024.

a. Kinerja Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Sukamara meliputi pencapaian kinerja pendapatan daerah, perkembangan belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah mencakup semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sedangkan pembiayaan adalah setiap penerimaan yang harus dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran tersebut maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara umum, perkembangan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Kabupaten Sukamara dari tahun ke tahun menunjukkan kondisi yang cukup fluktuatif namun cenderung meningkat.



Gambar 2. 52 Perkembangan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024



Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Sukamara menunjukkan besaran yang fluktuatif selama periode tahun 2020-2024 dengan kecenderungan meningkat dengan tingkat rata-rata pertumbuhan sebesar 8,65 persen. Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Sukamara sebesar Rp971.462.810.040,51 pada tahun 2024. Realisasi belanja Kabupaten Sukamara pada periode yang sama menunjukkan rata-rata pertumbuhan sebesar 79,60 persen dengan pengeluaran belanja terbesar pada tahun 2024 yang mencapai Rp1.014.091.297.322,46. Sedangkan untuk pembiayaan pada periode tahun 2020-2024 mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 24,41 persen dengan realisasi terbesar pada tahun 2023 yang mencapai Rp127.394.424.949,66. Selama periode tahun 2020-2024, diketahui pula bahwa terjadi defisit pada tahun 2023-2024 sebesar Rp13.003.374.037,22 pada tahun 2023 dan Rp42.628.487.281,95 pada tahun 2024. Sedangkan surplus anggaran terjadi pada tahun 2020-2022.

1. Kinerja Pelaksanaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berjalan. Pendapatan daerah dikelompokkan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sesuai dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka kategorisasi pendapatan daerah dikelompokkan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



Tabel 2. 78 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi (Tahun)					Pertumbuhan Rata-Rata (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
I	PENDAPATAN	646.828.020.645,91	664.765.994.490,65	724.195.055.818,97	719.434.057.942,80	971.462.810.040,51	8,65
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH	40.995.658.488,90	55.778.912.815,43	50.277.707.790,87	43.223.538.134,80	48.991.944.688,51	7,03
	Pendapatan Pajak Daerah	6.003.105.860,38	6.304.446.258,08	7.346.804.569,57	10.298.674.394,28	14.190.369.792,11	18,76
	Pendapatan Retribusi Daerah	1.850.448.463,00	1.599.092.731,00	2.001.601.520,30	2.139.050.258,40	20.344.140.380,70	176,75
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.665.385.665,90	11.715.805.235,14	11.658.854.450,87	1.176.220.919,96	3.564.342.878,50	26,29
	Lain-lain PAD Yang Sah	23.476.718.509,62	36.159.548.691,21	29.270.447.250,13	20.609.592.562,16	10.893.091.637,20	-4,27
B	PENDAPATAN TRANSFER	596.227.932.208,20	599.038.565.945,22	671.892.772.559,10	681.490.471.136,00	927.824.700.078,00	9,31
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	577.764.641.563,00	576.144.311.556,00	636.915.658.798,00	636.878.027.120,00	889.518.470.031,00	9,36
	Dana Perimbangan	502.878.710.346,00	515.778.612.009,00	609.536.435.798,00	600.386.416.120,00	844.585.219.717,00	10,63
	Dana Insentif Daerah (DID)	37.445.607.000,00	20.617.442.000,00	2.399.568.000,00	10.019.416.000,00	13.424.211.000,00	58,22
	Dana Desa	37.440.324.217,00	39.748.257.457,00	24.979.655.000,00	26.472.195.000,00	26.854.892.000,00	-3,55
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	18.463.290.645,20	22.894.254.389,22	35.977.113.761,10	44.612.444.016,00	37.461.255.535,00	14,24
	Pendapatan Bagi Hasil	18.313.290.645,20	22.894.254.389,22	34.977.113.761,10	44.612.444.016,00	37.461.255.535,00	14,14
	Bantuan Keuangan	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	9.604.429.948,81	9.948.515.730,00	2.024.575.469,00	3.720.048.672,00	145.287.100,00	-17,38
	Pendapatan Hibah	9.578.630.000,00	431.225.000,00	192.675.000,00	0,00	0,00	-48,51
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan	25.799.948,81	9.517.290.730,00	1.831.900.469,00	3.720.048.672,00	145.287.100,00	7.323,84

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sukamara 2020-2024





Tabel di atas menunjukkan perkembangan realisasi APBD Kabupaten Sukamara tahun 2020-2024. Selama periode tersebut realisasi total pendapatan daerah mengalami kondisi yang fluktuatif namun cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,65 persen per tahun. Pada tahun 2024 realisasi pendapatan mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari Rp719.434.057.942,80 pada tahun 2023 menjadi Rp971.462.810.040,51 di tahun 2024. Hal ini terjadi karena Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat naik lebih dari Rp250 milyar. Secara keseluruhan pada periode 2020-2024, kontribusi sumber pendapatan terbesar di Kabupaten Sukamara masih berasal dari pendapatan transfer, khususnya dana alokasi umum. Hal ini menunjukkan ketergantungan fiskal terhadap dana transfer masih cukup tinggi.

Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan indikator kemandirian dan keberlanjutan fiskal daerah, selama periode 2020-2024 PAD Kabupaten Sukamara menunjukkan tren peningkatan dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 7,03 persen. Namun peningkatan PAD terjadi hingga tahun 2021 dan kemudian mengalami penurunan pada dua tahun berikutnya yang disebabkan penurunan signifikan pada komponen Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Kemudian pada tahun 2024 terjadi peningkatan nilai PAD sebesar 8,34 persen dari Rp43.223.538.134,80 di tahun 2023 menjadi Rp48.991.944.688,51 di tahun 2024. Salah satu komponen PAD yang mengalami peningkatan sangat signifikan adalah Pendapatan Retribusi Daerah, dimana pada tahun 2024 Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Sukamara mencapai Rp20.344.140.380,70 atau naik sebesar 848,54 persen dari tahun sebelumnya.

Peningkatan PAD khususnya pada potensi penerimaan melalui pajak dan retribusi tetap perlu diupayakan diantaranya melalui pemetaan potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta peningkatan efisiensi dan efektivitas penerimaan melalui digitalisasi sehingga kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah turut bertambah pada total komponen PAD. Selain itu, peningkatan PAD dapat dilakukan melalui peningkatan inovasi sumber penerimaan salah satunya Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagai salah satu komponen PAD yang belum dioptimalkan kinerjanya diantaranya melalui bagi hasil pembiayaan dan BUMD

Selanjutnya, kebijakan transfer ke daerah dilakukan melalui kebijakan transfer pemerintah pusat, yang terdiri dari dana perimbangan dan transfer pemerintah pusat lainnya, serta transfer pemerintah daerah lainnya. Di tahun 2020, besaran pendapatan transfer pemerintah pusat (dana perimbangan) tercatat sebesar Rp502.878.710.346,00 dan meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 10,63 persen per tahun hingga menjadi Rp844.585.219.717,00 di tahun 2024. Adapun transfer pemerintah pusat lainnya, yakni penerimaan dana insentif daerah (DID), dana

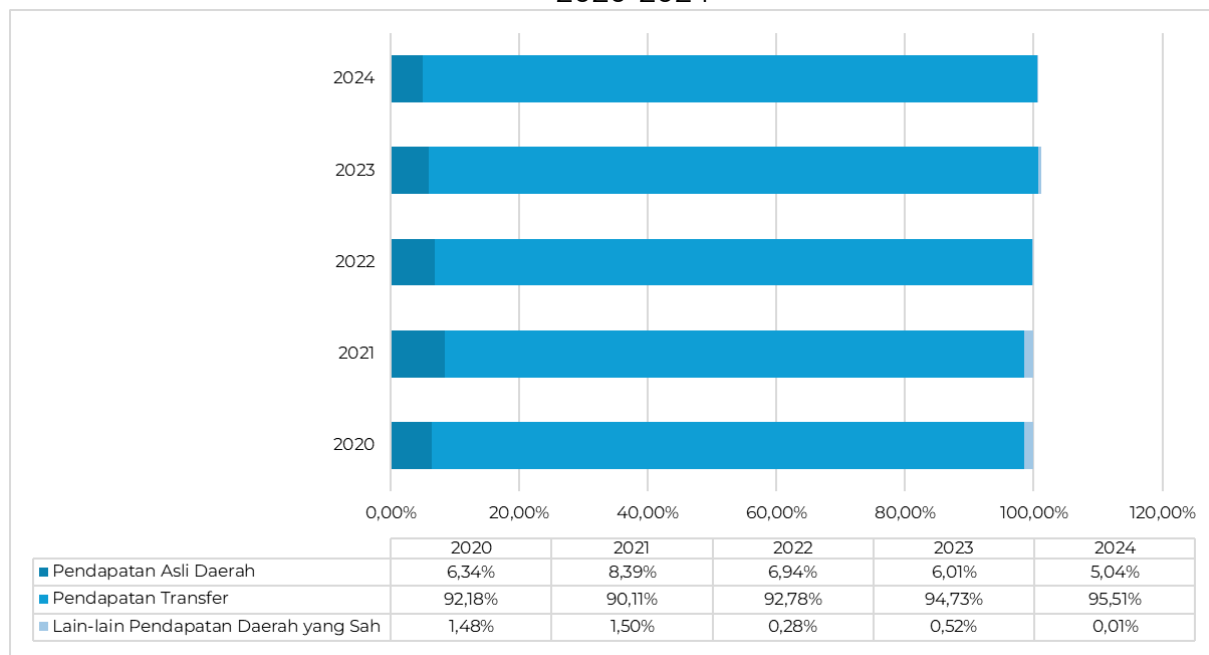




desa, dan insentif fiskal pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp74.885.831.217,00 dan berfluktuasi hingga tahun 2024 menjadi Rp40.279.103.000,00. Fluktuasi pada pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya cenderung menurun dengan rata-rata penurunan sebesar 7,59 persen per tahun. Komponen pendapatan transfer selanjutnya adalah pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya yang terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Dalam kurun waktu 2020-2024, besaran transfer pemerintah daerah lainnya berfluktuatif dengan kecenderungan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 14,24 persen per tahun. Pada tahun 2020, pemerintah menerima Rp18.463.290.645,20 dari pemerintah daerah dan berfluktuatif sampai dengan tahun 2024 menjadi senilai Rp37.461.255.535,00. Komponen pendapatan daerah yang terakhir yaitu Lain-lain Pendapatan yang Sah menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun, yang ditandai dengan rata-rata penurunan sebesar 17,30 persen per tahun.

Di sisi lain, dalam perspektif distribusi, struktur pendapatan daerah Kabupaten Sukamara dapat dikatakan masih sangat didominasi oleh besarnya kontribusi pendapatan transfer pemerintah pusat khususnya dana alokasi umum. Lain-lain pendapatan yang sah dan PAD masih menjadi sumber yang memiliki kontribusi paling sedikit dibandingkan pendapatan transfer seperti ditunjukkan pada grafik di bawah ini.

Gambar 2. 53 Grafik Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Sukamara 2020-2024 (diolah)

Grafik di atas menunjukkan perkembangan struktur pendapatan daerah Kabupaten Sukamara sepanjang 2020-2024. Pada periode tersebut terlihat bahwa pendapatan transfer memiliki kontribusi terbesar terhadap total pendapatan daerah



dengan rata-rata kontribusi sebesar 93,06 persen. Selanjutnya, PAD merupakan kontributor terbesar kedua terhadap total pendapatan daerah dengan rata-rata kontribusi sebesar 6,54 persen. Adapun lain-lain pendapatan yang sah memberikan kontribusi rata-rata sebesar 0,76 persen. Berdasarkan pola perkembangan capaian selama periode tersebut, kontribusi pendapatan transfer fluktuatif dengan tren peningkatan pada tiga tahun terakhir, sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami tren penurunan dan PAD meningkat pada 2020-2021 namun menurun pada 2022-2024 yang didorong oleh penurunan signifikan pada komponen Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Selama periode tahun 2020-2024, realisasi target pendapatan daerah sudah cukup baik. Pada 2020-2023 capaian realisasi pendapatan terhadap anggaran telah mencapai di atas 100 persen. Realisasi pendapatan tertinggi terjadi pada tahun 2022 yang mencapai 108,77 persen. Pada tahun 2024, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Sukamara sebesar 99,64 persen.

Tabel 2. 79 Kinerja Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Selisih (Rp)
2020	620.432.912.587,32	646.828.020.645,91	104,25%	26.395.108.058,59
2021	617.024.450.902,00	664.765.994.490,65	107,73%	47.741.543.588,65
2022	665.774.748.072,00	724.195.055.818,97	108,77%	58.420.307.746,97
2023	667.679.210.825,00	719.343.057.942,80	107,73%	51.663.847.117,80
2024	974.864.479.986,00	971.462.810.040,51	99,65%	-3.401.669.945,49

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Sukamara 2020-2024 (diolah)

2. Kinerja Pelaksanaan Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi belanja operasi, modal, dan belanja tak terduga. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Sedangkan, Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah. Sedangkan transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh





peraturan perundang-undangan. Transfer daerah meliputi transfer bagi hasil pendapatan dan transfer bantuan keuangan.

Tabel berikut menunjukkan jumlah nominal dan rata-rata pertumbuhan realisasi total belanja daerah dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Jumlah realisasi belanja daerah Kabupaten Sukamara pada tahun 2020 sebesar Rp607.083.272.314,11 yang kemudian meningkat hingga menjadi Rp1.014.091.297.322,46 pada 2024 dengan rata-rata peningkatan sebesar 9,60 persen per tahun. Adapun transfer daerah berfluktuasi dengan tren peningkatan yaitu mengalami rata-rata peningkatan sebesar 2,97 persen per tahun. Realisasi capaian transfer mencapai Rp82.141.606.719,20 pada 2020 meningkat hingga Rp95.751.669.942,00 pada 2024. Uraian secara lengkap per jenis belanja dalam realisasi belanja APBD Kabupaten Sukamara dapat dilihat pada tabel berikut.





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



Tabel 2. 80 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi (Tahun)					Pertumbuhan Rata-Rata (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
	BELANJA	607.083.272.314,11	584.245.009.995,91	691.476.266.715,71	732.437.431.980,02	1.014.091.297.322,46	9,60
A	BELANJA OPERASIONAL	381.701.598.449,49	388.463.026.874,60	473.883.575.279,38	520.947.987.767,52	580.812.432.414,07	7,53
	Belanja Pegawai	248.976.001.682,70	209.920.192.278,70	230.013.973.692,23	234.370.048.269,50	272.932.569.707,00	3,69
	Belanja Barang dan Jasa	117.767.321.766,79	161.670.573.678,90	198.018.127.482,15	216.857.601.524,02	233.313.159.703,85	11,49
	Belanja Subsidi	800.000.000,00	800.000.000,00	1.072.038.600,00	3.286.849.500,00	3.277.087.986,00	50,92
	Belanja Hibah	13.879.675.000,00	13.182.000.917,00	41.649.535.505,00	64.576.479.974,00	68.597.632.517,22	43,35
	Belanja Bantuan Sosial	278.600.000,00	2.890.260.000,00	3.129.900.000,00	1.857.008.500,00	2.691.982.500,00	179,87
B	BELANJA MODAL	130.315.452.884,42	112.571.073.047,00	145.318.899.300,33	132.027.782.948,50	337.527.194.966,39	26,60
	Belanja Modal Tanah	2.482.320.506,00	1.103.186.000,00	2.552.142.089,00	21.606.879,00	14.161.455,00	71,47
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.753.772.832,00	21.331.414.239,00	33.371.307.445,00	27.648.654.147,00	44.404.185.233,00	12,68
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	44.131.318.587,42	31.219.472.679,00	37.713.665.266,33	35.089.973.008,65	106.407.146.676,39	31,48
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	53.859.958.407,00	58.801.862.929,00	71.301.547.020,00	68.439.941.664,85	185.110.102.402,00	32,09
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	838.804.552,00	115.137.200,00	380.237.480,00	802.743.249,00	1.516.892.300,00	55,54
	Belanja Aset Lainnya	249.278.000,00	0,00	0,00	24.864.000,00	74.706.900,00	38,08
C	BELANJA TIDAK TERDUGA	12.924.614.288,00	0,00	346.070.750,00	0,00	0,00	1.996,74
	Belanja Tidak Terduga	12.924.614.288,00	0,00	346.070.750,00	0,00	0,00	1.996,74
D	BELANJA TRANSFER	82.141.606.719,20	82.210.910.074,31	71.927.721.386,00	79.461.661.264,00	95.751.669.942,00	2,97
	Belanja Bagi Hasil	911.376.826,20	810.595.117,39	960.637.486,00	1.030.427.412,00	1.424.000.000,00	8,78
	Belanja Bantuan Keuangan	81.230.229.893,00	82.400.314.956,92	70.967.083.900,00	78.431.233.852,00	94.327.669.942,00	2,94

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sukamara 2020-2024





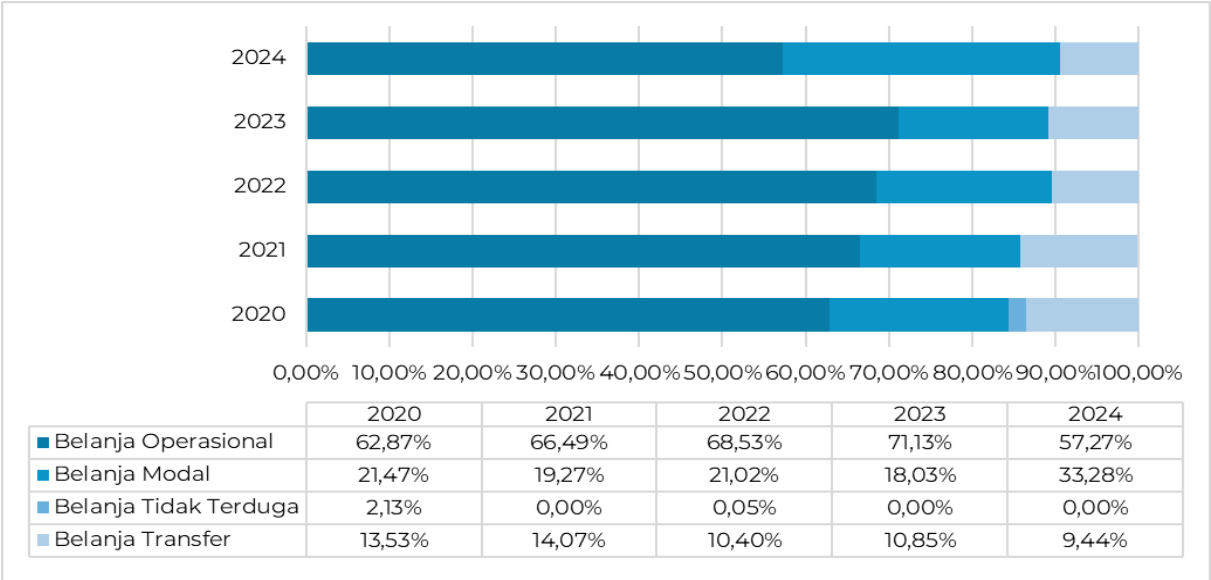
Berdasarkan tabel di atas, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, komponen belanja operasional dalam struktur belanja daerah menunjukkan kecenderungan meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 7,53 persen per tahun, di mana pada tahun 2020 besaran komponen belanja tersebut tercatat sebesar Rp381.701.598.449,49 dan berfluktuasi sampai dengan tahun 2024 yang mengalami peningkatan sangat signifikan menjadi Rp580.812.432.414,07. Komponen belanja modal menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2020, komponen belanja modal tercatat sebesar Rp130.315.452.884,42 dan berfluktuasi sampai dengan tahun 2024 yang juga meningkat sangat signifikan menjadi Rp337.527.194.966,39 dengan rata-rata pertumbuhan 26,60 persen per tahun. Adapun belanja tak terduga tidak banyak mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir karena hanya terjadi pada tahun 2020 dan 2022 dengan nilai realisasi Rp12.924.614.288,00 dan 346.070.750,00. Belanja tak terduga di tahun 2020 dapat diidentifikasi sebagai dampak terjadinya bencana sosial yang tidak terduga, yaitu pandemi Covid-19. Selanjutnya, komponen belanja yang terakhir yakni belanja transfer yang meliputi transfer bagi hasil dan transfer bantuan keuangan. Pada tahun 2020 besaran transfer tercatat sebesar Rp82.141.606.719,20 dan berfluktuasi menjadi Rp95.751.669.942,00 di tahun 2024, atau dengan rata-rata peningkatan 2,97 persen per tahun.

Selanjutnya jika ditelaah struktur belanja daerah berdasarkan kelompok belanja dan transfer maka terlihat kontribusi terbesar belanja daerah dialokasikan pada belanja operasional. Selama periode 2020-2024, rata-rata kontribusi dari Belanja Operasional sebesar 65,26 persen dengan tren meningkat meskipun mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2024, dengan pos belanja operasional didominasi oleh belanja pegawai dan belanja barang dan jasa sebesar 46,99 persen dan 40,162 persen di tahun 2024. Sementara itu, proporsi belanja modal merupakan terbesar kedua dengan rata-rata kontribusi sebesar 22,61 persen dengan alokasi terbesar pada belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan sebesar 54,83 persen di tahun 2024. Adapun transfer memberikan kontribusi terbesar ketiga dengan rata-rata capaian sebesar 11,66 persen. Di sisi lain, belanja tak terduga fluktuatif namun dengan kontribusi rendah. Capaian kontribusi belanja tak terduga sebesar 0,44 persen.





Gambar 2. 54 Grafik Struktur Belanja Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Sukamara 2020-2024 (diolah)

Dalam rangka menganalisis kinerja keuangan daerah, perubahan struktur belanja menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan. Analisis ini bertujuan untuk melihat pergeseran pola alokasi anggaran serta efektivitas penggunaannya dalam mendukung prioritas pembangunan daerah. Berdasarkan grafik struktur belanja Kabupaten Sukamara di atas, diketahui bawah mulai terjadi pergeseran proporsi antara belanja operasional dan belanja modal, dimana belanja operasional mengalami penurunan diikut dengan peningkatan belanja modal. Hal ini menunjukkan adanya upaya penguatan pembangunan jangka panjang melalui penyediaan infrastruktur dan aset strategis.

Target dan Realisasi Belanja

Selama periode tahun 2020-2024, target belanja yang ditetapkan pada saat penyusunan APBD secara umum belum terpenuhi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari data realisasi belanja yang tidak mencapai 100 persen selama periode waktu tersebut. Bahkan pada tahun 2022, capaian belanja daerah cukup jauh dari anggaran dengan capaian hanya 88,46 persen. Selama periode 2020-2024 capaian realisasi berkisar pada 88,46 persen-93,52 persen dari anggaran.

Gambar 2. 55 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Selisih (Rp)
2020	571.764.734.517,25	524.941.665.621,91	91,81	-46.823.068.895,34
2021	642.823.192.517,00	584.245.009.995,91	90,89	-58.578.182.521,09
2022	781.639.158.442,00	691.476.266.715,71	88,46	-90.162.891.726,29
2023	805.778.195.369,00	732.437.431.980,02	90,90	-73.340.763.388,98
2024	1.084.316.973.298,00	1.014.091.297.322,46	93,52	-70.220.359.599,54

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Sukamara 2020-2024 (diolah)





3. Kinerja Pelaksanaan Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan sumbernya, pembiayaan dibagi menjadi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang berjalan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang berjalan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan sumber penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Namun ketika APBD diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

Tabel berikut menunjukkan gambaran pembiayaan daerah Kabupaten Sukamara tahun 2020-2024. Selama periode tersebut, terlihat penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Sukamara bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya dan pencarian dana cadangan. Adapun pengeluaran pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal mengalami tren peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan 17,24 persen per tahun.





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



Tabel 2. 80 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi (Tahun)					Pertumbuhan Rata-Rata (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
	PEMBIAYAAN	33.307.091.302,34	56.450.925.875,08	115.046.477.841,00	127.394.424.949,66	110.806.954.175,04	24,41
A	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	49.134.974.490,34	73.051.831.987,08	136.903.909.809,00	155.039.662.266,26	132.516.954.175,04	19,92
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	49.134.974.490,34	73.051.831.987,08	136.903.909.809,00	147.766.606.944,26	114.391.050.912,00	17,24
	Pencairan Dana Cadangann	0,00	0,00	0,00	7.273.055.322,00	18.125.903.262,60	49,84
B	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	15.827.883.188,00	16.600.906.112,00	21.857.431.968,00	27.645.237.316,60	21.710.000.000,00	18,15
	Pembentukan Dana Cadangan	6.220.383.188,00	6.493.406.112,00	6.749.931.968,00	5.935.237.316,60	0,00	-0,75
	Penyertaan Modal Daerah	9.607.500.000,00	10.107.500.000,00	15.107.500.000,00	21.710.000.000,00	21.710.000.000,00	17,79
	PEMBIAYAAN NETTO	33.307.091.302,34	56.450.925.875,08	115.046.477.841,00	127.394.424.949,66	110.806.954.175,04	24,41
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	73.051.839.607,14	136.971.910.369,82	147.765.266.944,26	114.391.050.912,44	68.178.466.893,09	16,21

Sumber: LRA Kabupaten Sukamara 2020-2024 (diolah)



Dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024, total pembiayaan daerah tercatat menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat yang ditandai dengan rata-rata peningkatan pembiayaan netto sebesar 24,41 persen per tahun. Pada tahun 2020, komponen pembiayaan netto tercatat sebesar Rp33.307.091.302,34 dan berfluktuasi menjadi Rp110.806.954.175,04 di tahun 2024. Di samping itu, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) juga menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun dengan rata-rata penurunan sebesar 16,21 persen per tahun. Di tahun 2020, SILPA tercatat sebesar Rp73.051.839.607,14 dan berfluktuasi hingga di tahun 2024 menjadi Rp68.178.466.893,09. Besaran SILPA positif yang terus meningkat dapat diartikan bahwa secara anggaran masih terdapat dana dari penerimaan pembiayaan yang belum dimanfaatkan untuk pembiayaan belanja daerah dan/atau pengeluaran pembiayaan daerah. Oleh karena itu, besaran SILPA yang tersisa pada akhir tahun dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan pada tahun berikutnya untuk mendanai belanja daerah, khususnya dialokasikan untuk belanja modal.

b. Analisis Neraca Daerah

Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, neraca daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh setiap pemerintah daerah. Laporan keuangan dimaksud sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Neraca daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah daerah.

Neraca daerah menyajikan data dan informasi tentang gambaran berbagai hal tentang aset (aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya), kewajiban (jangka pendek), dan ekuitas suatu pemerintah daerah. Penyusunan neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas, rasio aktivitas, serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Dengan demikian neraca daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan.

Gambaran umum perkembangan neraca daerah Kabupaten Sukamara pada periode tahun 2023 menunjukkan bahwa jumlah nilai total aset daerah mencapai Rp 2,63 triliun atau meningkat rata-rata 5,71 persen dari total aset pada 2019 yang sebesar





Rp 2,12 triliun. Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (1) aset lancar, (2) investasi jangka panjang, (3) aset tetap, (4) dana cadangan, dan (5) aset lainnya.

Kewajiban daerah terdiri dari kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Pada tahun 2019, jumlah kewajiban daerah Kabupaten Sukamara mencapai nilai sebesar Rp 2,37 miliar kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2023 hingga mencapai Rp 6,81 miliar atau meningkat rata-rata sebesar 169,36 persen per tahun.

Ekuitas adalah nilai kekayaan bersih yang dimiliki oleh pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Selama periode 2019-2023, nilai ekuitas pemerintah Kabupaten Sukamara mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 nilai ekuitas daerah Kabupaten Sukamara mencapai nilai sebesar Rp 2,12 triliun kemudian mengalami peningkatan hingga mencapai Rp 2,62 triliun pada tahun 2023. Rincian komponen neraca dan tingkat pertumbuhan ditunjukkan oleh tabel di bawah.





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



Tabel 2. 81 Perkembangan Neraca Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun (Rp)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
I	ASET	2.120.510.846.835,31	2.488.705.141.144,98	2.509.265.338.759,74	2.625.220.127.794,24	2.742.057.266.012,83	5,71
A	ASET LANCAR	97.695.219.816,09	166.992.850.742,04	161.933.810.089,87	134.474.936.295,11	79.987.381.922,46	24,25
	Kas di Kas Daerah	65.896.672.784,14	85.480.057.241,06	136.660.888.915,42	109.486.343.742,88	65.778.645.347,90	29,52
	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	1.399.900,00	0,00	41.360,00	172.586.980,00	25,00
	Kas di bendahara Pengeluaran	38.971.456,00	2.001.004,00	0,00	0,00	9.381.760,00	4.871.358,28
	Kas di Badan Layanan Umum Daerah	1.084.060.248,55	15.163.288.507,49	10.940.307.365,67	4.078.454.361,39	3.864.944.425,59	288,87
	Kas Dana Bos	523.569.305,94	887.783.258,68	102.501.754,21	75.684.621,21	75.684.449,21	-24,15
	Kas Dana Kapitasi dan FKTP	1.558.051.990,60	1.463.045.583,96	81.043.984,60	129.509.822,60	13.442.537,40	-6,88
	Kas Lainnya	10.339.500,00	1.483.700,00	5.726.700,00	621.504.139,00	621.504.139,00	2.763,27
	Setara Kas	4.000.000.000,00	34.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	187,50
	Piutang Pajak Daerah	1.957.548.390,00	2.261.130.253,00	2.404.614.000,00	2.791.186.241,00	2.791.186.241,00	17,42
	Piutang Retribusi Daerah	2.497.891.899,04	2.511.862.749,04	2.549.822.676,04	2.590.405.549,04	2.590.405.549,04	3,92
	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	2.338.887.417,22	8.965.648.192,80	1.973.899.751,03	1.956.867.162,11	1.956.867.162,11	48,88
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	282.750.000,00	0,00	3.509,00	3.509,00	25,00
	Piutang Transfer Antar Daerah	8.707.359.828,03	10.128.814.907,88	0,00	6.267.935.260,00	3.509,00	8,22
	Penyisihan Piutang	-3.720.847.978,26	-6.606.475.904,01	-4.441.651.393,88	-4.881.942.677,79	-4.881.942.677,79	18,28
	Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00	3.055.833,00	3.084.000,00	0,00	25,23
	Persediaan	12.802.714.974,83	12.450.061.438,14	11.653.600.503,78	11.355.859.204,67	17.447.500,00	17,02
B	INVESTASI JANGKA PANJANG	101.667.415.366,54	110.713.526.971,40	122.995.302.453,58	139.282.592.165,05	160.992.592.165,05	10,42
	Investasi Jangka Panjang Permanen	101.667.415.366,54	110.713.526.971,40	122.995.302.453,58	139.282.592.165,05	160.992.592.165,05	10,42
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	101.667.415.366,54	110.713.526.971,40	122.995.302.453,58	139.282.592.165,05	160.992.592.165,05	10,42
	Investasi Pemanen Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	ASET TETAP	1.846.812.563.137,58	2.130.299.370.057,11	2.127.964.463.388,52	2.092.847.844.102,96	2.425.843.195.076,35	2,81
	Tanah	76.582.250.344,70	130.085.838.994,70	132.871.868.793,70	133.926.817.747,70	133.940.979.202,70	25,39
	Peralatan dan Mesin	313.405.413.536,35	327.474.181.365,20	360.212.801.704,12	377.611.577.265,44	414.956.728.035,44	7,29
	Gedung dan Bangunan	763.980.046.625,97	788.517.671.726,97	826.182.712.576,66	934.220.575.951,51	1.041.300.716.673,90	6,69
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.027.536.897.640,21	2.087.597.242.054,21	2.167.201.686.068,21	2.232.835.449.632,06	2.418.128.189.634,06	3,12
	Aset Tetap Lainnya	44.348.956.025,58	44.596.253.125,58	45.591.700.425,58	46.441.198.675,58	47.284.050.728,58	1,69
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	80.203.072.464,45	85.186.827.464,45	85.425.101.964,45	4.534.611.540,93	4.623.711.540,93	-21,00
	Akumulasi Penyusutan	-1.459.244.073.499,68	-1.333.228.644.674,00	-1.489.521.408.144,20	-1.636.722.386.710,26	-1.634.391.784.686,26	8,22
D	DANA CADANGAN	6.220.383.188,00	12.713.789.300,00	19.463.721.268,00	18.125.903.262,60	0,00	62,65
	Dana Cadangan	6.220.383.188,00	12.713.789.300,00	19.463.721.268,00	18.125.903.262,60	0,00	62,65





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



No	Uraian	Tahun (Rp)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
E	ASET LAINNYA	68.115.265.327,10	68.055.604.074,43	76.908.041.559,77	240.488.851.968,52	75.234.096.848,52	56,44
	Tagihan Jangka Panjang	5.431.810.073,00	5.431.810.073,00	5.431.810.073,00	5.431.810.073,00	5.431.810.073,00	0,00
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	12.274.040.000,00	12.274.040.000,00	12.274.040.000,00	12.274.040.000,00	12.274.040.000,00	0,00
	Aset Yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	-	-	-	-	-25,00
	Aset Tidak Berwujud	8.282.193.448,00	8.294.673.448,00	8.430.374.948,00	8.941.568.167,00	9.016.275.067,00	2,53
	Aset Lain-lain	96.935.496.774,23	98.853.111.294,23	99.559.962.600,23	103.802.788.126,23	102.412.815.719,23	1,11
	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-8.084.986.707,89	-8.157.127.960,56	-8.232.151.920,22	-8.393.542.998,24	-8.393.542.998,47	1,51
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-46.723.288.260,24	-48.640.902.780,24	-48.683.823.599,24	-53.342.025.399,24	-49.792.091.012,24	2,11
	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	0,00	8.127.829.458,00	171.774.214.000,00	4.284.790.000,00	528,35
II	KEWAJIBAN	1.608.136.188,45	13.825.909.329,53	6.749.683.739,89	6.808.913.741,07	5.012.332.467,07	169,36
A	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1.608.136.188,45	13.825.909.329,53	6.749.683.739,89	6.808.913.741,07	5.012.332.467,07	169,36
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	59.825.678,09	27.148.825,37	25.201.775,64	487.134,64	1.182.170,64	-14,58
	Pendapatan Diterima Dimuka	1.160.325,00	3.018.075,00	3.108.075,00	1.743.125,00	1.743.125,00	7,95
	Utang Beban/Belanja	1.196.451.299,36	5.681.912.894,16	2.918.055.452,25	2.203.666.329,43	416.290.019,43	65,21
	Utang Jangka Pendek Lainnya	350.698.886,00	8.113.829.525,00	3.803.318.437,00	4.603.017.152,00	4.593.117.152,00	549,46
III	EKUITAS	2.118.902.710.646,86	2.474.879.231.815,45	2.502.515.655.019,85	2.618.411.214.053,17	2.737.044.933.545,31	5,65
	Ekuitas	2.118.902.710.646,86	2.474.879.231.815,45	2.502.515.655.019,85	2.618.411.214.053,17	2.737.044.933.545,31	5,65
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		2.120.510.846.835,31	2.488.705.141.144,98	2.509.265.338.759,74	2.625.220.127.794,24	2.742.057.266.012,38	5,71

Sumber: Neraca Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024





Selanjutnya, tingkat kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat diketahui berdasarkan analisis rasio atau perbandingan antara kelompok/elemen laporan keuangan yang satu dengan kelompok yang lain. Oleh karena itu selain analisis di atas, analisis neraca daerah yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan melalui perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah Kabupaten Sukamara dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan antara lain rasio lancar (*current ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*). Rasio lancar digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang dimilikinya, rumusnya yaitu aktiva lancar dibagi kewajiban jangka pendek. Rasio cepat merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid, rumusnya yaitu aset lancar dikurangi persediaan, hasilnya dibagi kewajiban jangka pendek.

Tabel 2. 82 Analisis Rasio Neraca Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019-2023
(Rp Juta)

Rasio	Rumus	2019	2020	2021	2022	2023
Rasio Likuiditas	Aset Lancar	66.895,60	97.695,22	166.992,85	161.933,81	134.474,94
	Kewajiban Jangka Pendek	2.365,27	1.608,14	13.825,91	6.749,68	6.808,91
	Rasio Lancar	28,28	60,75	12,08	23,99	19,75
	Aset Lancar Persediaan	7.120,51	12.802,71	12.450,06	11.653,60	11.355,86
	Kewajiban Jangka Pendek	2.365,27	1.608,14	13.825,91	6.749,68	6.808,91
	Quick Ratio	3,01	7,96	0,90	1,73	1,67
Rasio Solvabilitas	Total Hutang	2.365,27	1.608,14	13.825,91	6.749,68	6.808,91
	Total Aset	2.119.923,50	2.120.510,85	2.488.705,14	2.509.265,34	2.625.220,13
	Rasio Total Hutang (%)	0,11	0,08	0,56	0,27	0,26
	Total Hutang	2.365,27	1.608,14	13.825,91	6.749,68	6.808,91
	Total Ekuitas	2.117.558,23	2.118.902,71	2.474.879,23	2.502.515,66	2.618.411,21
	Rasio Hutang/Modal (%)	0,11	0,08	0,56	0,27	0,26

Sumber: Neraca Kabupaten Sukamara Tahun 2019-2023 (diolah)

Nilai rasio lancar neraca keuangan pemerintah Kabupaten Sukamara mengindikasikan bahwa pemerintah dapat dengan mudah mencairkan aset lancarnya untuk membayar seluruh hutang atau kewajiban jangka pendeknya. Hasil analisis rasio menunjukkan bahwa rasio lancar selama kurun waktu tahun 2019-2023 relatif tinggi, yang berarti bahwa pemerintah Kabupaten Sukamara dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Rasio lancar pada tahun 2023 mencapai 19,75 yang berarti bahwa aset lancar pemerintah Kabupaten Sukamara adalah 19,75 kali lipat bila





dibandingkan dengan kewajiban yang jatuh tempo. Persediaan masuk dalam kategori aset lancar, namun memerlukan tahap untuk menjadi kas. Apalagi persediaan di pemerintah daerah bukan merupakan barang dagangan, sehingga sebagai faktor pengurang dalam aset lancar. Namun apabila diperhatikan nilai rasio lancar menunjukkan angka yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi kewajibannya juga mengalami perubahan dari tahun ke tahun.

Quick Ratio lebih akurat dibandingkan rasio lancar (*current ratio*) karena *Quick ratio* telah mempertimbangkan persediaan dalam perhitungannya. Angka rasio di atas 1 berarti menunjukkan kemampuan yang kuat dalam melunasi kewajiban-kewajibannya yang jatuh tempo. Berdasarkan perhitungan, diperoleh nilai *quick ratio* neraca keuangan Pemerintah Kabupaten Sukamara yang fluktuatif. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan aset lancar daerah setelah dikurangi persediaan, mengalami perubahan dari tahun ke tahun dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Selama periode 2019-2023 rasio cepat di Kabupaten Sukamara menunjukkan nilai >1 pada tahun 2019-2020 dan 2022-2023. Adapun capaian rasio cepat pada 2021 masih <1 . Peningkatan *quick ratio* perlu terus diupayakan khususnya melalui peningkatan aset lancar persediaan.

Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Dari perspektif kemampuan membayar kewajiban jangka panjang, semakin rendah rasio akan semakin baik kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka panjang. Jenis rasio solvabilitas yang digunakan pemerintah daerah antara lain rasio total hutang terhadap total aset (*total debt to total asset ratio*) dan rasio hutang terhadap ekuitas (*total debt to equity ratio*). Rasio total hutang terhadap total aset, mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menjamin hutangnya dengan aktiva/aset yang dimilikinya, rumusnya total hutang dibagi total aset. Sedangkan rasio hutang terhadap ekuitas mengukur seberapa jauh aset pemerintah daerah dibelanjai pihak kreditur dan modal sendiri (ekuitas), rumusnya total hutang dibagi total ekuitas. Semakin kecil rasio ini berarti semakin kecil dana yang diambil dari luar dan sebaliknya. Dari tabel di atas, rasio total hutang terhadap total aset pemerintah Kabupaten Sukamara tahun 2023 sebesar 0,26 persen artinya sebesar Rp0,26 dari setiap Rp1,00 total aktiva merupakan pendanaan dari hutang, atau aktiva pemerintah Kabupaten Sukamara yang didanai oleh hutang adalah sebesar 0,26 persen, sisanya dari modal sendiri (ekuitas). Sedangkan dari tahun 2019-2023, rasio hutang terhadap modal, memiliki rasio yang hampir sama dengan rasio total hutang terhadap total aset pemerintah Kabupaten Sukamara





2.2.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Berdasarkan analisis kinerja pelaksanaan APBD serta perkembangan neraca daerah dalam lima tahun terakhir, dapat diperoleh gambaran mengenai realisasi kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa mendatang guna meningkatkan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Analisis belanja yang dilakukan mencakup evaluasi proporsi belanja untuk kebutuhan aparatur serta analisis pembiayaan.

a. Proporsi Penggunaan Anggaran

Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Selanjutnya, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta mendekati *value of money* dimana prinsip ekonomis, efektivitas dan efisiensi diacu dalam penyusunan anggaran program dan kegiatan. Proporsi belanja langsung terhadap jumlah belanja dan pengeluaran pembiayaan di Kabupaten Sukamara dalam kurun waktu 2020-2024 ditunjukkan oleh tabel berikut.

Tabel 2. 83 Proporsi Belanja untuk Pemenuhan Aparatur terhadap Total Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024

Tahun	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Persentase (a)/(b) x 100%
2020	248.976.001.682,70	622.911.155.529,11	39,97%
2021	209.920.192.278,70	600.845.916.107,91	34,94%
2022	230.013.973.692,23	713.333.698.683,71	32,24%
2023	234.370.048.269,50	760.082.669.296,62	30,83%
2024	272.932.569.707,00	1.124.898.251.497,50	24,26%
Rata-rata	239.242.557.126,03	764.414.338.222,97	32,45%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Sukamara, 2020-2024 (diolah)

Belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur di Kabupaten Sukamara mengalami fluktuasi selama periode 2020-2024, baik dari segi nominal maupun proporsinya terhadap total pengeluaran. Pada tahun 2020, total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur mencapai Rp248.976.001.682,70, kemudian





menurun pada tahun 2021 menjadi Rp209.920.192.278,70. Pada tahun 2022, terjadi peningkatan nilai menjadi Rp230.013.973.692,23. Belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur kembali meningkat pada tahun 2023 dan 2024 hingga mencapai Rp234.370.048.269,50 dan Rp272.932.569.707,00. Sementara itu, proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran pemerintah Kabupaten Sukamara juga berfluktuasi. Selama periode 2020-2021 proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran pemerintah berkisar antara 24,26 persen hingga 39,97 persen, dengan rata-rata proporsi selama periode tersebut sebesar 32,45 persen. Berdasarkan data tersebut, proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran pemerintah kurang dari 50 persen sehingga biaya pemenuhan kebutuhan aparatur bukan merupakan porsi besar dalam beban total realisasi belanja, namun perlu dioptimalkan kembali sehingga belanja yang memiliki manfaat langsung kepada masyarakat meningkat serta untuk memenuhi target yang ditetapkan pemerintah pusat bahwa pemenuhan belanja aparatur kurang dari 30 persen dari total pengeluaran. Pada tahun 2024, proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur mampu ditekan menjadi 24,27 persen.

b. Analisis Belanja Wajib dan Mengikat

Analisis terhadap belanja wajib dan mengikat serta prioritas utama bertujuan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahu anggaran.

Belanja periodik wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemda seperti gaji dan tunjangan pegawai, bunga, belanja jasa kantor, atau belanja sejenisnya lainnya serta belanja yang terikat penggunaannya. Adapun belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024 sebagai berikut.

Tabel 2. 84 Analisis Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi (Rp)				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Belanja Mengikat	325.185.884.797,01	285.239.319.763,09	316.647.461.816,42	325.911.114.807,50	399.298.973.024,42
1	Belanja Pegawai	248.976.001.682,70	209.920.192.278,70	230.013.973.692,23	234.370.048.269,50	272.932.569.707,00
2	Belanja Bunga	0	0	0	0	0,00
3	Belanja Bagi Hasil	911.376.826,20	810.595.117,39	960.637.486,00	1.030.427.412,00	1.424.000.000,00
4	Belanja Adum (5%*belanja)	30.354.163.615,71	29.212.250.499,80	34.573.813.335,79	36.621.871.599,00	50.704.564.866,12
5	ADD (10% DAU + DBH)	44.944.342.672,40	45.296.281.867,20	51.099.037.302,40	53.888.767.527,00	74.237.838.451,30
B	Belanja Wajib	204.598.114.939,42	207.772.516.315,16	233.841.928.037,79	248.805.302.316,16	325.231.412.594,14
1	Belanja Pendidikan (20% Belanja-Gaji)	71.621.454.126,28	74.864.963.543,44	92.292.458.604,70	99.613.476.742,10	148.231.745.523,09



No	Uraian	Realisasi (Rp)				
		2020	2021	2022	2023	2024
2	Belanja Kesehatan (10% Belanja-Gaji)	35.810.727.063,14	37.432.481.771,72	46.146.229.302,35	49.806.738.371,05	74.115.872.761,55
3	Belanja Infrastruktur (25% DAU)	97.165.933.750,00	95.475.071.000,00	95.403.240.130,75	99.385.087.203,00	102.883.794.309,50
C	Pegeluaran Pembiayaan	15.827.883.188,00	16.600.906.112,00	21.857.431.968,00	27.645.237.316,60	21.710.000.000,00
1	Pembentukan Dana Cadangan	6.220.383.188,00	6.493.406.112,00	6.749.931.968,00	5.935.237.316,60	0,00
2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	9.607.500.000,00	10.107.500.000,00	15.107.500.000,00	21.710.000.000,00	21.710.000.000,00
	Jumlah	545.611.882.924,43	509.612.742.190,25	572.346.821.822,21	602.361.654.440,26	746.240.385.618,56

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Sukamara, 2020-2024 (diolah)

c. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Surplus/defisit riil adalah realisasi pendapatan daerah dikurangi realisasi belanja daerah ditambah dengan pengeluaran pembiayaan daerah. Surplus/defisit riil APBD Kabupaten Sukamara selama kurun waktu tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. 85 Realisasi Pembiayaan Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun (Rp)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendapatan Daerah	646.828.020.645,91	664.765.994.490,65	724.195.055.818,97	719.434.057.942,80	971.462.810.040,51
2	Belanja Daerah	607.083.272.314,11	584.245.009.995,91	691.476.266.715,71	732.437.431.980,02	1.014.091.297.322,46
	Surplus/Defisit	39.774.748.304,80	80.540.984.494,74	32.718.789.103,26	-13.003.374.037,22	-42.628.487.281,95
3	Pembiayaan Daerah					
	Penerimaan Pembiayaan Daerah	49.134.974.490,34	73.051.831.987,08	136.903.909.809,00	155.039.662.266,26	132.516.954.175,04
	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	15.827.883.188,00	16.600.906.112,00	21.857.431.968,00	27.645.237.316,60	21.710.000.000,00
	Pembiayaan Netto	33.307.091.302,34	56.450.925.875,08	115.046.477.841,00	127.394.424.949,66	110.806.954.175,04
	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan	73.051.839.607,14	136.971.910.369,82	147.765.266.944,26	114.391.050.912,44	68.178.466.893,09

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Sukamara, 2020-2024 (diolah)

Dari tabel di atas, terlihat bahwa dari kurun waktu tahun 2020-2024 terjadi pola fluktuasi pembiayaan *netto* setiap tahunnya. Adapun pembiayaan *netto* bersumber dari penerimaan pembiayaan dengan tidak ada pengeluaran pembiayaan daerah. Pada tahun 2020, pembiayaan *netto* Kabupaten Sukamara sebesar





Rp33.307.091.302,34. Pada tahun 2021-2023, pembiayaan *netto* mengalami peningkatan yang cukup signifikan sehingga nilai pembiayaan *netto* mencapai Rp127.394.424.949,66. Peningkatan signifikan tersebut disebabkan karena meningkatnya SILPA akibat terjadinya surplus anggaran pada 2020-2022. Kemudian pada tahun 2024, pembiayaan *netto* mengalami penurunan nilai menjadi Rp110.806.954.175,04.

Tabel 2. 86 Surplus/Defisit Riil APBD Kabupaten Sukamara Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun (Rp)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Realisasi Pendapatan Daerah	646.828.020.645,91	664.765.994.490,65	724.195.055.818,97	719.434.057.942,80	971.462.810.040,51
	Dikurangi					
2	Realisasi Belanja Daerah	607.083.272.314,11	584.245.009.995,91	691.476.266.715,71	732.437.431.980,02	1.014.091.297.322,46
	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah	15.827.883.188,00	16.600.906.112,00	21.857.431.968,00	27.645.237.316,60	21.710.000.000,00
	Surplus/Defisit	23.916.865.143,80	63.920.078.382,74	10.861.357.135,26	-40.648.611.353,82	-42.628.487.281,95

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Sukamara, 2020-2024 (diolah)

Tabel 2. 87 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Sukamara

No	Uraian	Tahun (Rp)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	49.134.974.490,34	73.051.831.987,08	136.903.909.809,00	147.766.606.944,26	68.178.466.893,09
2	Pencairan Dana Cadangann	0,00	0,00	0,00	7.273.055.322,00	18.125.903.262,60

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Sukamara, 2020-2024 (diolah)

Dalam lima tahun terakhir, defisit anggaran di Kabupaten Sukamara hanya terjadi di tahun 2023 dan 2024, dengan besaran -Rp40.648.611.353,82 di tahun 2023 dan -Rp42.628.487.281,95 di tahun 2024. Dalam kurun waktu tersebut, penutup defisit riil anggaran bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Defisit anggaran yang terjadi di Kabupaten Sukamara dapat ditutup oleh realisasi penerimaan pembiayaan daerah. Dari penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) untuk menutup defisit riil anggarannya, masih terdapat sisa penerimaan pembiayaan yang dapat dialokasikan untuk membiayai kegiatan lainnya.

2.2.3. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan memberikan gambaran tentang proyeksi pendapatan dan belanja daerah, belanja wajib dan mengikat, serta penghitungan kerangka pendanaan. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program





pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya.

a. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Proyeksi pendapatan Kabupaten Sukamara dilakukan berdasarkan analisis tren pendapatan dan belanja daerah selama tahun 2020-2024 dan perkiraan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukamara dalam periode lima tahun yang akan datang, dengan kondisi awal APBD Kabupaten Sukamara tahun 2024. Hal ini juga diperkuat dengan justifikasi kualitatif angka pertumbuhan masing-masing pos pendapatan dan belanja dari para *stakeholders* pengelolanya. Pada tahun 2023-2024 diasumsikan dengan telah terbentuknya penyesuaian masyarakat terhadap masa pemulihan ekonomi di Indonesia maka akan mendorong kembali mobilitas dan aktivitas masyarakat sehingga dapat memasuki momentum pasca pemulihan ekonomi.

Metode proyeksi menggunakan data tren realisasi APBD selama lima tahun terakhir. Selain itu, turut mempertimbangkan rencana kebijakan makro ekonomi daerah pada lima tahun mendatang. Selanjutnya, potensi pajak dan retribusi menjadi tolak ukur tambahan khususnya pada proyeksi Pendapatan Asli Daerah.





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



Tabel 2. 88 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029

No	Uraian	Baseline (Rp)	Proyeksi (Tahun)					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	PENDAPATAN		710.639.710.573,00	791.593.769.997,40	809.191.951.713,63	827.230.412.380,00	845.722.373.341,30	864.681.541.157,51
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH	48.991.944.688,51	56.297.925.425,00	58.876.877.209,40	61.820.721.069,87	64.911.757.123,36	68.157.344.979,53	71.565.212.228,51
	Pendapatan Pajak Daerah	14.190.369.792,11	26.166.843.660,00	27.475.185.843,00	28.848.945.135,15	30.291.392.391,91	31.805.962.011,50	33.396.260.112,08
	Pendapatan Retribusi Daerah	20.344.140.380,70	22.999.539.608,00	24.149.516.588,40	25.356.992.417,82	26.624.842.038,71	27.956.084.140,65	29.353.888.347,68
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.564.342.878,50	3.510.712.492,00	3.791.652.811,00	3.981.235.451,55	4.180.297.224,13	4.389.312.085,33	4.608.777.689,60
	Lain-lain PAD Yang Sah	10.8934.091.637,20	3.620.829.665,00	3.460.521.967,00	3.633.548.065,35	3.815.225.468,62	4.005.986.742,05	4.206.286.079,15
B	PENDAPATAN TRANSFER	922.325.578.252,00	654.341.785.148,00	732.716.892.788,00	747.371.230.643,76	762.318.655.256,64	777.565.028.361,77	793.116.328.929,00
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	884.864.322.717,00	624.653.818.000,00	703.028.925.640,00	717.089.504.152,80	731.431.294.235,86	746.059.920.120,57	760.981.118.522,99
	Dana Perimbangan	884.585.219.717,00	601.405.200.612,20	676.863.311.929,21	690.400.578.167,79	704.208.589.731,15	718.292.761.525,77	728.845.908.116,97
	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	330.843.207.275,00	142.716.719.131,77	160.623.338.609,08	163.835.805.381,27	167.112.521.488,89	170.454.771.918,67	172.959.090.897,75
	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	411.535.177.238,00	385.193.593.010,17	433.523.705.537,25	442.194.179.648,00	451.038.063.240,96	460.058.824.505,78	438.642.888.650,32
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	63.882.801.706,00	26.579.463.979,19	29.914.380.520,73	30.512.668.131,14	31.122.921.493,76	31.745.379.923,64	32.211.782.574,30
	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	40.436.085.363,00	46.915.424.491,07	52.801.887.262,15	53.857.925.007,39	54.935.083.507,54	56.033.785.177,69	56.857.032.717,85
	Dana Insentif Daerah (DID)	13.424.211.000,00	0,00	0	0	0	0	0
	Dana Desa	26.854.892.000,00	23.248.617.387,80	26.165.613.710,79	26.688.925.985,01	27.222.704.504,71	27.767.158.594,80	28.175.113.276,75
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	37.461.255.535,00	29.687.967.148,00	29.687.967.148,00	30.281.726.490,96	30.887.361.020,78	31.505.108.241,19	32.135.210.406,02
	Pendapatan Bagi Hasil	37.461.255.535,00	28.945.467.148,00	28.945.467.148,00	29.524.376.490,96	30.114.864.020,78	30.717.161.301,19	31.331.504.527,21
	Bantuan Keuangan	0,00	742.500.000,00	742.500.000,00	757.350.000,00	772.497.000,00	787.946.940,00	803.705.878,80
C	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	145.287.100,00	0,00	0	0	0	0	0
	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan	145.287.100,00	0,00	0	0	0	0	0
II	BELANJA		766.131.423.874,09	832.843.769.997,40	847.441.951.713,63	876.280.412.380,00	896.922.373.341,30	889.681.541.157,51
A	BELANJA OPERASI	580.812.432.414,07	554.375.270.875,44	602.648.548.540,82	613.211.841.849,30	634.079.448.822,93	649.016.041.087,29	643.776.550.605,41





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



No	Uraian	Baseline (Rp)	Proyeksi (Tahun)					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Belanja Pegawai	272.932.569.707,00	277.586.790.289,46	301.758.186.287,56	307.047.438.601,71	317.496.266.940,83	324.975.317.544,91	322.351.799.826,82
	Belanja Barang dan Jasa	233.313.159.703,85	242.783.659.386,32	263.924.506.783,19	268.550.605.996,73	277.689.386.620,35	284.230.732.743,13	281.936.145.052,55
	Belanja Subsidi	3.277.087.986,00	2.464.635.574,56	2.679.248.389,53	2.726.210.564,51	2.818.983.545,56	2.885.388.485,67	2.862.094.815,63
	Belanja Hibah	68.597.632.517,22	28.855.090.258,50	31.367.701.944,64	31.917.518.644,37	33.003.672.220,00	33.781.118.005,53	33.508.403.873,59
	Belanja Bantuan Sosial	2.691.982.500,00	2.685.095.366,60	2.918.905.135,90	2.970.068.041,98	3.071.139.496,18	3.143.484.308,06	3.118.107.036,82
B	BELANJA MODAL	337.527.194.966,39	125.029.848.505,71	135.917.059.588,99	138.299.429.495,20	143.005.760.884,17	146.374.453.475,84	145.192.776.125,48
	Belanja Modal Tanah	14.161.455,00	177.639.771,60	0	0	0	0	206.286.833,88
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.648.654.147,00	14.473.650.235,13	15.927.078.859,17	16.206.250.535,51	16.757.749.452,54	17.152.500.727,49	16.807.742.178,56
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	35.089.973.008,65	45.693.398.291,82	49.672.237.571,09	50.542.898.283,74	52.262.873.771,35	53.493.995.892,62	53.062.140.184,02
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	68.439.941.664,85	63.304.042.110,84	68.816.361.585,93	70.022.582.713,68	72.405.452.116,43	74.111.059.699,18	73.512.762.943,30
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	802.743.249,00	1.103.962.850,57	1.200.092.508,61	1.221.127.868,60	1.262.682.865,89	1.292.427.055,14	1.281.993.323,42
	Belanja Aset Lainnya	27.648.654.147,00	277.155.245,74	301.289.064,18	306.570.093,67	317.002.677,95	324.470.101,41	321.850.662,29
C	BELANJA TIDAK TERDUGA	0	6.319.332.250,01	6.869.600.085,52	6.990.011.228,62	7.227.881.401,87	7.398.143.847,11	7.338.418.814,42
	Belanja Tidak Terduga	0	6.319.332.250,01	6.869.600.085,52	6.990.011.228,62	7.227.881.401,87	7.398.143.847,11	7.338.418.814,42
D	BELANJA TRANSFER	95.751.669.942,00	80.406.972.242,93	87.408.561.782,07	88.940.669.140,51	91.967.321.271,04	94.133.734.931,06	93.373.795.612,20
	Belanja Bagi Hasil	1.424.000.000,00	2.784.573.173,67	3.027.045.161,61	3.080.103.558,54	3.184.919.522,80	3.259.944.575,88	3.233.627.123,78
	Belanja Bantuan Keuangan	94.327.669.942,00	77.622.399.069,26	84.381.516.620,46	85.860.565.581,97	88.782.401.748,24	90.873.790.355,18	90.140.168.488,42
	SURPLUS / (DEFISIT)	-42.628.487.281,95	-55.491.713.301,09	-41.250.000.000,00	38.250.000.000,00	49.050.000.000,00	51.200.000.000,00	25.000.000.000,00
III	PEMBIAYAAN	110.806.954.175,64	55.491.713.301,09	41.250.000.000,00	38.250.000.000,00	49.050.000.000,00	51.200.000.000,00	25.000.000.000,00
A	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	132.516.954.175,04	67.985.135.301,09	50.000.000.000,00	45.000.000.000,00	55.800.000.000,00	56.200.000.000,00	35.000.000.000,00
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	114.391.050.912,44	67.985.135.301,09	50.000.000.000,00	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00	40.000.000.000,00	35.000.000.000,00
	Pencairan Dana Cadangan	18.125.903.262,60	0,00	0	0	10.800.000.000,00	16.200.000.000,00	-
B	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	21.710.000.000,00	12.493.422.000,00	8.750.000.000,00	6.750.000.000,00	6.750.000.000,00	5.000.000.000,00	10.000.000.000,00
	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	6.750.000.000,00	6.750.000.000,00	6.750.000.000,00	6.750.000.000,00	0	7.500.000.000,00
	Penyertaan Modal Daerah	21.710.000.000,00	5.743.422.000,00	2.000.000.000,00	0	0	5.000.000.000,00	2.500.000.000,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	68.178.466.893,09	0,00	0	0	0	0	0

Sumber: Tim Penyusun Rancangan Akhir RPJMD





b. Proyeksi Belanja Wajib dan Mengikat

Berdasarkan hasil proyeksi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sukamara tahun 2026-2030, maka disusunlah analisis belanja wajib dan mengikat untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang harus dibayarkan selama periode tahun 2026-2030. Belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat Kabupaten Sukamara Tahun 2026-2030 sebagai berikut.

Tabel 2. 89 Proyeksi Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029

No	Uraian	Baseline (Rp)	Proyeksi (Rp)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
A	Belanja Mengikat	371.468.965.871,03	405.842.124.363,67	413.102.638.248,86	426.310.265.555,62	436.132.740.430,30	431.229.701.963,28
1	Belanja Pegawai	277.586.790.289,46	301.758.186.287,56	307.047.438.601,71	317.496.266.940,83	324.975.317.544,91	322.351.799.826,82
2	Belanja Bunga	0	0	0	0	0	0
3	Belanja Bagi Hasil	2.784.573.173,67	3.027.045.161,61	3.080.103.558,54	3.184.919.522,80	3.259.944.575,88	3.233.627.123,78
4	Belanja Adum (5%*belanja)	38.306.571.193,70	41.642.188.499,87	42.372.097.585,68	43.814.020.619,00	44.846.118.667,07	44.484.077.057,88
5	ADD (10% DAU + DBH)	52.791.031.214,19	59.414.704.414,63	60.602.998.502,93	61.815.058.472,99	63.051.359.642,44	61.160.197.954,81
B	Belanja Wajib	242.861.788.327,93	267.706.601.497,27	272.666.898.845,58	280.394.759.441,99	286.598.822.865,36	279.859.644.561,79
1	Belanja Pendidikan (20% Belanja-Gaji)	97.708.926.716,93	106.217.116.741,97	108.078.902.622,38	111.756.829.087,83	114.389.411.159,28	113.465.948.266,14
2	Belanja Kesehatan (10% Belanja-Gaji)	48.854.463.358,46	53.108.558.370,98	54.039.451.311,19	55.878.414.543,92	57.194.705.579,64	56.732.974.133,07
3	Belanja Infrastruktur (25% DAU)	96.298.398.252,54	108.380.926.384,31	110.548.544.912,00	112.759.515.810,24	115.014.706.126,44	109.660.722.162,58
C	Pegeluaran Pembiayaan	12.493.422.000,00	8.750.000.000,00	6.750.000.000,00	6.750.000.000,00	5.000.000.000,00	10.000.000.000,00
1	Pembentukan Dana Cadangan	6.750.000.000,00	6.750.000.000,00	6.750.000.000,00	6.750.000.000,00	0,00	7.500.000.000,00
2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.743.422.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00	2.500.000.000,00
	Jumlah	626.824.176.198,96	682.298.725.860,94	692.519.537.094,44	713.455.024.997,61	727.731.563.295,66	721.089.346.525,07

Sumber: Hasil Analisis, 2025

c. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Perhitungan kerangka pendanaan ini bertujuan untuk menghitung kapasitas riil kemampuan keuangan daerah. Kapasitas Riil kemampuan keuangan daerah dihitung dari selisih penerimaan daerah dikurangi belanja wajib dan mengikat serta pengeluaran pembiayaan. Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk pembangunan daerah Kabupaten Sukamara tahun 2025-2029 sebagai berikut.





Tabel 2. 90 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai
Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara

No	Uraian	Baseline (Rp)	Proyeksi (Rp)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Pendapatan	710.639.710.573,00	791.593.769.997,40	809.191.951.713,63	827.230.412.380,00	845.722.373.341,30	864.681.541.157,51
2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	10.800.000.000,00	16.200.000.000,00	0,00
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	67.985.135.301,09	50.000.000.000,00	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00	40.000.000.000,00	35.000.000.000,00
	Total Penerimaan	778.624.845.874,09	841.593.769.997,40	854.191.951.713,63	883.030.412.380,00	901.922.373.341,30	899.681.541.157,51
	Dikurangi						
4	Belanja Wajib dan Megikat	614.330.754.198,96	673.548.725.860,94	685.769.537.094,44	706.705.024.997,61	722.731.563.295,66	711.089.346.525,07
5	Pengeluaran Pembiayaan	12.493.422.000,00	8.750.000.000,00	6.750.000.000,00	6.750.000.000,00	5.000.000.000,00	10.000.000.000,00
	Kapasital Riil Kemampuan Keuangan Daerah	151.800.669.675,13	159.295.044.136,47	161.672.414.619,20	169.575.387.382,40	174.190.810.045,64	178.592.194.632,44

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sukamara tahun 2026-2030 menunjukkan angka yang stabil dengan rata-rata kenaikan sebesar 2,90 persen per tahun. Selama periode tersebut kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sukamara berkisar antara Rp159.295.044.136,47 hingga Rp178.592.194.632,44.. Dengan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang terbatas diharapkan agar fokus belanja diarahkan pada 3 (tiga) prioritas yaitu:

1. Prioritas I adalah dialokasikan untuk pengeluaran program-program pelayanan dasar;
2. Prioritas II adalah dialokasikan untuk program-program terkait dengan pelaksanaan visi dan misi Kepala Daerah di luar program prioritas untuk pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar;
3. Prioritas III adalah untuk program-program urusan pemerintahan lainnya serta penunjang tugas dan fungsi Perangkat Dearah.

2.3. Permasalahan dan Isu Strategis

Analisis dan telaah permasalahan serta isu strategis pembangunan daerah sangat penting dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2045. Perumusan masalah dan isu strategis menjadi salah satu dasar dalam penentuan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang nantinya akan dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Isu strategis pembangunan daerah mencakup berbagai macam tantangan dan peluang yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena memiliki dampak yang besar di masa yang akan datang. Pada lain sisi, permasalahan pembangunan mencerminkan bagaimana kondisi pembangunan di masyarakat yang masih belum ideal. Selain itu, telaah potensi daerah juga menjadi aspek krusial dalam analisis pembangunan. Potensi daerah





mencakup berbagai sumber daya alam, sumber daya manusia, serta kapasitas ekonomi dan sosial yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Identifikasi dan pemanfaatan potensi yang dimiliki secara optimal dapat menjadikan pembangunan lebih terarah dan berkelanjutan, sehingga dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah.

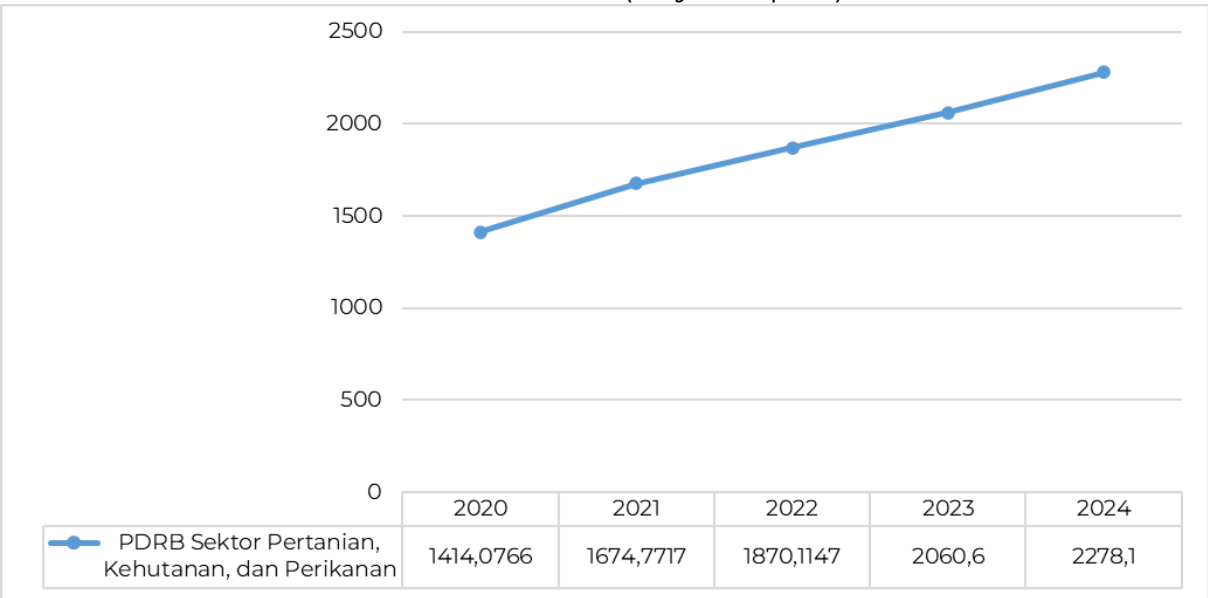
2.3.1. Potensi Daerah

Potensi daerah merupakan potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Beberapa potensi daerah di Kabupaten Sukamara antara lain:

a. PDRB Sektor Pertanian, Perikanan, dan Perhutanan

Kabupaten Sukamara memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Dengan kekayaan sumbet daya alam yang melimpah, sektor-sektor ini terus berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Nilai PDRB sektor ini meningkat dari Rp1.414,08 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp2.278,1 miliar pada tahun 2024, mencerminkan pertumbuhan yang konsisten setiap tahunnya. Pertumbuhan ini menandakan potensi besar yang dimiliki oleh Kabupaten Sukamara, khususnya pada sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan yang menjadi sektor utama.

Gambar 2. 56 Perkembangan PDRB Sektor Pertanian, Perikanan, Kehutanan Tahun 2020-2024 (Milyar Rupiah)



Sumber: Kabupaten Sukamara Dalam Angka, 2020-2024





Sektor pertanian berpotensi berkembang melalui peningkatan produksi komoditas unggulan seperti kelapa sawit dan hortikultura, yang didukung oleh perbaikan infrastruktur dan akses pasar. Sementara sektor kehutanan dapat berkontribusi melalui pemanfaatan hasil hutan lestari, baik dari kayu maupun non-kayu seperti rotan, madu hutan, dan ekowisata. Adapun sektor perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya, menunjukkan pertumbuhan yang menjajikan dengan semakin meningkatnya produksi dan dukungan terhadap nelayan serta petani tambak. Dengan peningkatan PDRB yang terus berlanjut, sektor-sektor ini dapat menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tepat dari pemerintah daerah untuk mendukung investasi serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, guna memastikan perkembangan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Sukamara tetap optimal di masa depan.

b. Kawasan Industri dan Investasi di Kecamatan Jelai dan Pantai Lunci

Kawasan Industri Shrimp Estate di Desa Sei Raja, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah, menawarkan potensi besar sebagai sumber ekonomi baru bagi wilayah pesisir. Dengan luas area 40,17 hektare yang terbagi menjadi 4 klaster tambak udang dan 72 kolam, proyek ini dirancang untuk menjadi model budidaya udang vaname yang berkelanjutan. Proyeksi produksi dalam satu siklus (105 hari) mencapai 368 ton, setara dengan Rp 29,4 miliar, menunjukkan potensi ekonomi yang signifikan. Selain itu, program ini diharapkan dapat memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menyerap tenaga kerja lokal, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Lokasi Sukamara dipilih sebagai tempat pembangunan Shrimp Estate tahap pertama karena memiliki garis pantai sepanjang kurang lebih 75 km dan eksisting tambak seluas 832 hektare. Potensi pengembangan Shrimp Estate di Sukamara bahkan mencapai 1.999 hektare, menjadikannya lokasi yang strategis untuk pengembangan budidaya udang skala besar. Selain itu, kualitas air di daerah ini telah memenuhi syarat budidaya udang vaname, dengan hasil uji mikrobiologi yang menunjukkan tidak adanya virus atau penyakit udang. Hal ini menjamin kualitas produksi yang tinggi dan berkelanjutan.

Dukungan teknologi modern juga menjadi faktor kunci dalam keberhasilan Shrimp Estate. Konsep budidaya terintegrasi yang diterapkan mencakup pendekatan hulu-hilir, korporasi perikanan berbasis kawasan, dan prinsip zero waste yang ramah lingkungan. Selain itu, akuakultur modern 4.0 dan pengelolaan





kawasan secara terintegrasi melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dan swasta. Kolaborasi ini diharapkan dapat memastikan keberhasilan manajemen pengelolaan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat pembudidaya, khususnya di wilayah pesisir Kalimantan Tengah.

Hasil panen yang telah dicapai sejauh ini juga menunjukkan potensi yang menjanjikan. Setelah 17 kali panen parsial, total produksi mencapai 118,9 ton udang vaname dengan nilai Rp 8,677 miliar. Kualitas udang yang dihasilkan juga terus meningkat, dengan ukuran udang mencapai 26 per kilogram dari ukuran awal 77-85 per kilogram. Hal ini menunjukkan bahwa Shrimp Estate tidak hanya memiliki potensi ekonomi yang besar, tetapi juga mampu menghasilkan produk berkualitas tinggi yang dapat bersaing di pasar nasional maupun internasional. Dengan dukungan penuh dari pemerintah dan masyarakat, Shrimp Estate di Jelai, Sukamara, memiliki masa depan yang cerah sebagai salah satu komoditas ekspor andalan Indonesia.

Selain potensi udang vaname, Kabupaten Sukamara juga memiliki potensi investasi besar di Pantai Lunci. Kecamatan Pantai Lunci di Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah, memiliki potensi investasi yang menjanjikan, terutama di sektor pariwisata. Dengan garis pantai sepanjang kurang lebih 75 km, kawasan ini menawarkan beberapa destinasi wisata alam yang menarik, seperti Pantai Anugerah, dan Pantai Citra. Keindahan alam yang asri, ditambah dengan fasilitas yang terus dikembangkan, membuat kawasan ini menjadi tujuan wisata favorit bagi masyarakat lokal maupun luar daerah. Potensi ini dapat dimanfaatkan oleh investor untuk mengembangkan berbagai fasilitas pendukung pariwisata, seperti penginapan, restoran, atau kegiatan rekreasi lainnya.

Pantai Anugerah, yang terletak di Desa Sungai Tabuk, merupakan salah satu destinasi utama di Kecamatan Pantai Lunci. Pantai ini sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti lahan parkir, musholla, warung makan, dan tempat istirahat, yang membuatnya nyaman dikunjungi. Dengan jarak tempuh sekitar 66 Km dari Kota Sukamara, pantai ini menjadi favorit warga terutama pada musim liburan sekolah. Potensi investasi di sini dapat berupa pengembangan resort atau villa dengan pemandangan pantai yang menawan, serta kegiatan wisata berbasis alam seperti hiking atau bersepeda di sekitar area pantai yang ditumbuhi pepohonan pinus.

Sementara itu, Pantai Citra yang berlokasi di Desa Sungai Cabang Barat menawarkan keunikan tersendiri. Dengan luas sekitar 34 Hektar, pantai ini dikelilingi oleh pemukiman penduduk dan pepohonan hijau, serta memiliki jembatan panjang yang menjorok ke laut sepanjang 300 meter. Fasilitas seperti





lahan parkir, musholla, warung makan, dan gazebo sudah tersedia, namun masih ada peluang untuk pengembangan lebih lanjut, seperti pembangunan restoran seafood yang memanfaatkan hasil laut nelayan setempat. Selain itu, kegiatan wisata seperti perahu keliling pantai atau pengalaman menyaksikan tradisi syukuran laut nelayan dapat menjadi daya tarik tambahan yang menarik bagi wisatawan.

Dengan kondisi infrastruktur yang semakin membaik, seperti jalan beraspal yang menghubungkan Sukamara dengan Pantai Lunci, aksesibilitas ke kawasan ini semakin mudah. Hal ini membuka peluang besar bagi investor untuk mengembangkan bisnis pariwisata yang berkelanjutan. Selain itu, dengan meningkatnya minat masyarakat lokal dan luar daerah untuk menghabiskan waktu libur di Pantai Lunci, investasi di sektor pariwisata di kawasan ini diprediksi akan memberikan keuntungan yang signifikan dalam jangka panjang.

Selain potensi sebagaimana dijelaskan diatas, di wilayah pesisir Kabupaten Sukamara juga ada potensi pengembangan pertanian dan pertambangan pasir silika. Oleh karena itu didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ditetapkan proyek strategis nasional (PSN) yang berlokasi di Kabupaten Sukamara yaitu Kawasan Industri Sungai Tabuk di Kecamatan Pantai Lunci.

c. Potensi Kawasan Perkebunan Sawit

Kabupaten Sukamara memiliki sektor perkebunan sebagai salah satu penyokong utama perekonomiannya, dengan kelapa sawit sebagai komoditas unggulan. Kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan utama di wilayah ini, yang didominasi oleh delapan perusahaan besar, terdiri dari tujuh perusahaan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) dan satu perusahaan PMA (Penanaman Modal Asing). Nilai investasi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sukamara mencapai Rp. 2.065.622.620.963,-, menunjukkan besarnya kontribusi sektor ini terhadap perekonomian daerah.

Luas areal perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sukamara menempati urutan pertama dengan persentase 82,56% atau seluas 12.507 hektar. Kecamatan Sukamara dan Kecamatan Balai Riam merupakan wilayah yang paling dominan dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit. Potensi pengembangan budidaya dan industri kelapa sawit masih cukup besar, terutama dengan adanya peluang untuk membangun pabrik pengolahan kelapa sawit. Hal ini diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan, seperti pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya beli masyarakat, dan pengembangan pusat-pusat ekonomi baru.





Pada tahun 2023, produksi kelapa sawit di Kabupaten Sukamara mencapai 213.030 ton dengan jumlah yang relatif bertambah tiap tahunnya. Namun, perluasan kawasan perkebunan sawit juga berdampak pada penurunan produksi karet, karena terjadi alih fungsi lahan dari perkebunan karet menjadi perkebunan sawit. Untuk menjaga keberlanjutan dan kualitas produk sawit, pemerintah mewajibkan sertifikasi bagi petani dan pengelola perkebunan. Aturan ini juga mengikat pengelola pabrik, yang dilarang melayani petani yang tidak memiliki sertifikat.

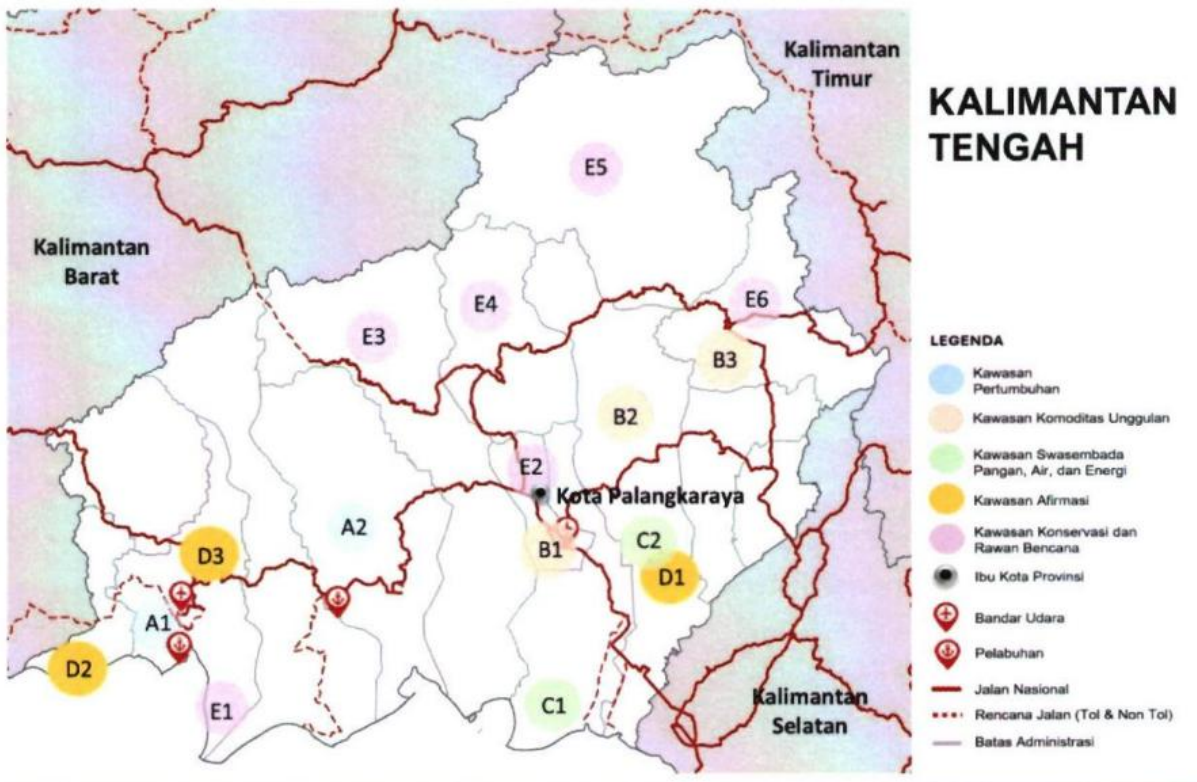
Minat masyarakat untuk mengelola kebun sawit di Kabupaten Sukamara cukup tinggi, terbukti dengan banyaknya warga yang mengubah lahan pribadi mereka menjadi kebun sawit. Namun, dengan adanya aturan sertifikasi, menjadi petani sawit tidak lagi bisa dilakukan secara sembarangan. Selain itu, beberapa kebun sawit milik masyarakat telah memasuki masa re-planting karena pohon sawit yang telah melewati masa produktifnya mulai menunjukkan penurunan hasil. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sukamara gencar melakukan sosialisasi Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) untuk memastikan hasil perkebunan tetap optimal di masa depan.

d. Kawasan Afirmasi

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, arah pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah dibagi menjadi lima kawasan, yaitu (1) kawasan pertumbuhan; (2) kawasan komoditas unggulan; (3) kawasan swasembada pangan, air, energi; (4) kawasan afirmasi; serta (5) kawasan konservasi. Arah pembangunan Kabupaten Sukamara dalam konstelasi kewilayahan Provinsi Kalimantan Tengah yaitu sebagai Kawasan Afirmasi yang diarahkan menjadi Kawasan Transmigrasi (KT) Jelai yang berlokasi di Desa Pulau Nibung, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara.



Gambar 2. 57 Arah Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah



Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029

Program transmigrasi di Kawasan Transmigrasi Jelai telah berjalan dengan penempatan awal sebanyak 55 kepala keluarga (KK), yang terdiri dari sekitar 168 jiwa. Pemerintah berencana menambah penempatan transmigran di Desa Pulau Nibung dengan sisa daya tampung sekitar 90KK. Lahan seluar 190 hektar telah disiapkan untuk tujuan ini, dan berbagai fasilitas pendukung seperti jalan, listrik, dan air bersih telah dibangun untuk mendukung program tersebut.

Selain itu pemerintah daerah juga telah menyiapkan lahan seluas 520 ha untuk pembangunan kawasan transmigrasi, yang mencakup area untuk pertanian tanaman pangan dan budidaya perikanan air payau. Komitmen ini ditunjukkan melalui penyerahan sertifikat kawasan transmigrasi kepada Direktorat Jendral Pembangunan Kawasan Transmigrasi pada tahun 2024.

Upaya ini diharapkan dapat menjadikan kawasan transmigrasi di Kecamatan Jelai sebagai lumbung pangan bagi Kabupaten Sukamara, serta mendukung program ketahanan pangan baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional.

2.3.2. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah menjadi hal yang krusial karena menggambarkan kesenjangan kondisi masyarakat yang diharapkan dengan kondisi eksisting yang terjadi pada saat pelaksanaan pembangunan. Perumusan permasalahan pembangunan harus dilakukan secara tepat karena akan menjadi



pertimbangan perumusan visi dan misi kepala daerah terpilih dalam melaksanakan perencanaan pembangunan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara tahun 2025-2029 menjadi turunan tahapan pembangunan periode pertama dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2045. Hasil analisis dan telaah permasalahan pembangunan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari arah kebijakan pembangunan pada tahap pertama (2025-2029) RPJPD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2045. Penjabaran umum arah kebijakan beserta masalah utama tersebut, tersaji pada gambar berikut.



Sumber: Hasil Analisis, 2025





a. Memperkuat Fondasi Pembangunan Manusia sebagai Modal Pembangunan

Dalam rangka perwujudan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2045 tahapan yang pertama (2025-2029), "Memperkuat Fondasi Pembangunan Manusia Sebagai Modal Pembangunan" perlu ditelaah dan dianalisis permasalahan pembangunan sehingga diharapkan permasalahan tersebut dapat diselesaikan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Pada Arah kebijakan ini, terdapat 2 (dua) masalah utama, yaitu 1) kurangnya cakupan dan kualitas pelayanan penunjang pengembangan sumber daya manusia dan 2) ketidaksesuaian kebutuhan lapangan kerja dan ketersediaan tenaga kerja.

1. Kurangnya Cakupan dan Kualitas Pelayanan Penunjang Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan suatu daerah karena menjadi aktor utama pembangunan. Sumber Daya Manusia yang berkualitas menjadi modal yang besar untuk memajukan suatu daerah. Kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang kurang optimal menjadi sebuah hambatan bagi daerah untuk berkembang. Tabel berikut ini menunjukkan masalah daerah dan akar masalah di Kabupaten Sukamara berkaitan dengan masalah utama "Cakupan dan Kualitas Pelayanan Penunjang Pengembangan Sumber Daya Manusia".

Tabel 2. 90 Permasalahan Kurangnya Cakupan dan Kualitas Pelayanan Penunjang Pengembangan Sumber Daya Manusia

Masalah	Akar Masalah	Urusan
Belum tercapainya target APK dan APM Jenjang PAUD dan Dikdas	Masih banyaknya anak usia dini yang belum terlayani di satuan PAUD	Urusan Pendidikan
Masih rendahnya tenaga pendidik yang memenuhi standar kualifikasi sebagai pendidik (sertifikasi profesi)	Masih banyaknya tenaga pendidik yang belum bersertifikasi pendidik dan adanya tenaga pendidik belum berkualifikasi S1 / D4	
Masih ada anak putus sekolah SD / MI dan SMP / MTs	Masih adanya siswa yang tidak tamat / berhenti sekolah	
Masih adanya kasus kematian Ibu dan Bayi	Belum optimalnya pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan sesuai standar	Urusan Kesehatan
Masih tingginya angka kesakitan penyakit menular maupun penyakit tidak menular	Peningkatan kasus penyakit menular dan tidak menular	
	tingginya un-detected cases di kelompok beresiko, dan ketidakpatuhan berobat	
Masih ditemukannya kasus gizi buruk dan Balita Gizi Kurang	Masih terdapatnya Balita Gizi Buruk dan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)	
Kuantitas dan Kualitas SDM kesehatan berdasarkan spesifikasi profesi masih kurang	Fasilitas pelayanan kesehatan belum memadai	





Masalah	Akar Masalah	Urusan
Pemberdayaan perpustakaan dalam rangka peningkatan kualitas SDM Daerah belum optimal	Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang menangani perpustakaan belum memadai	Urusan Perpustakaan
Distribusi Pendidik yang belum merata	Belum efektifnya pemetaan guru dalam penataan tenaga pendidik	Urusan Pendidikan
Kuantitas dan Kualitas SDM kesehatan berdasarkan spesifikasi profesi masih kurang	Jumlah tenaga kesehatan yang masih belum merata serta sesuai kebutuhan di lapangan	Urusan Kesehatan
	Cakupan, kualitas program, dan fungsi puskesmas sebagai pelaksana PHC belum terkoordinasi maksimal	

Sumber: Hasil Analisis, 2025

2. Ketidaksesuaian Kebutuhan dan Ketersediaan Tenaga Kerja

Masalah tenaga kerja menjadi permasalahan umum yang dijumpai di setiap daerah di Indonesia. Permasalahan tenaga kerja di Kabupaten Sukamara menunjukkan bahwa terjadi ketidaksesuaian antara kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja atau terjadi situasi dimana keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja tidak sesuai dengan keterampilan yang diharapkan pada pasar kerja. Kondisi tersebut juga berkaitan erat dengan kualitas dan kapasitas dari tenaga kerja. Permasalahan ketenagakerjaan menjadi permasalahan yang kompleks karena juga berkaitan dengan bidang lainnya seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, dan berbagai bidang kehidupan lainnya. Tabel berikut ini menunjukkan masalah daerah dan akar masalah di Kabupaten Sukamara berkaitan dengan masalah utama “ketidaksesuaian kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja”.

Tabel 2. 91 Permasalahan Ketidaksesuaian Kebutuhan dan Ketersediaan Tenaga Kerja

Masalah	Akar Masalah	Urusan
Angka pengangguran relatif masih tinggi	Pemanfaatan peluang usaha belum optimal	Urusan Tenaga Kerja
	Angkatan kerja terdidik terampil masih terbatas	

Sumber: Hasil Analisis, 2025

b. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Daerah dengan Mengoptimalkan Potensi Lokal

Dalam rangka perwujudan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Kota Sukamara Tahun 2025-2045 tahapan yang pertama (2025-2029), “Memperkuat Pembangunan Ekonomi Daerah Dengan Mengoptimalkan Potensi Lokal” perlu ditelaah dan dianalisis permasalahan pembangunan sehingga diharapkan permasalahan tersebut dapat diselesaikan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Pada Arah kebijakan ini, terdapat 2 (dua) masalah





utama, yaitu 1) kurangnya nilai tambah dan cakupan pemasaran UMKM lokal dan 2) sistem pelayanan investasi belum optimal.

1. Kurangnya Nilai Tambah dan cakupan Pemasaran UMKM Lokal

Pembangunan ekonomi daerah menjadi modal utama dalam pembangunan. Pembangunan ekonomi dengan memanfaatkan potensi lokal menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Pembangunan ekonomi daerah dengan memanfaatkan potensi lokal berfokus pada pengembangan kekuatan dan potensi lokal yang dimiliki oleh suatu daerah. Pengembangan potensi lokal untuk mendorong perekonomian wilayah salah satunya dapat ditempuh dengan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pengembangan potensi lokal daerah dapat menjadi cara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam proses pengembangan dan pemanfaatan potensi lokal untuk memajukan perekonomian daerah sering mengalami berbagai macam tantangan dan hambatan. Tabel berikut ini menunjukkan masalah daerah dan akar masalah di Kabupaten Sukamara berkaitan dengan masalah utama “kurangnya nilai tambah dan cakupan pemasaran UMKM Lokal”.

Tabel 2. 92 Permasalahan Kurangnya Nilai Tambah dan Cakupan Pemasaran UMKM Lokal

Masalah	Akar Masalah	Urusan
Kinerja urusan perdagangan belum efisien dan efektif untuk mendukung perekonomian daerah	Tidak optimalnya pemantauan dan pengawasan harga dan stok bahan kebutuhan dan barang strategis serta barang dalam pengawasan lainnya.	Urusan Pedagangan
Pengembangan usaha bidang pertanian belum optimal	Keterbatasan SDM pendamping dalam program usaha pertanian	Urusan Pangan
	Semakin menurunnya minat generasi muda untuk mengembangkan usaha di bidang pertanian	
	Terbatasnya kemampuan akses petani terhadap teknologi, informasi, pasar dan permodalan serta perlindungan usaha tani	
	Kelembagaan dalam bidang pangan masih belum optimal	
Minimnya Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	Pemberdayaan ekonomi keluarga, khususnya melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) belum optimal	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Daya saing produk industri kecil kabupaten Sukamara di pasar Nasional maupun global masih perlu ditingkatkan	Rendahnya produksi dan usaha pemasaran bagi pelaku UMKM	Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah





Masalah	Akar Masalah	Urusan
Rendahnya Kunjungan wisatawan dan pelaku usaha ekonomi kreatif penunjang pariwisata	Keterbatasan SDM pariwisata serta kesiapan dan peran serta masyarakat di sekitar destinasi pariwisata	Urusan Pariwisata
Kurangnya pengetahuan pelaku usaha ekonomi kreatif	Belum terwujudnya ekonomi kreatif yang bernilai tambah, berdaya saing dan berkelanjutan	
Diversifikasi dan inovasi hasil olahan perikanan berkelanjutan masih perlu ditingkatkan	Potensi budidaya perikanan berkelanjutan yang perlu dikembangkan	Urusan Kelautan dan Perikanan
Kinerja urusan pertanian belum efisien dan efektif untuk mendukung perekonomian daerah dan ketahanan pangan	Rendahnya nilai tambah dan daya saing pengolahan hasil produk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.	Urusan Pertanian

Sumber: Hasil Analisis, 2025

2. Sistem Pelayanan Investasi Belum Optimal

Investasi menjadi salah satu modal untuk menggerakkan perekonomian suatu daerah karena memainkan peran yang sangat strategis dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah. Investasi menjadi modal dalam pembangunan karena akan mampu mewujudkan adanya peningkatan produksi. Selain itu, akan menawarkan berbagai manfaat bagi masyarakat dan wilayah karena akan semakin banyak sektor-sektor ekonomi baru yang akan berkembang dan memunculkan lapangan pekerjaan sehingga terjadi peningkatan pendapatan masyarakat. Namun, untuk mewujudkan investasi daerah yang optimal masih terdapat berbagai tantangan dan permasalahan yang harus diselesaikan. Tabel berikut ini menunjukkan masalah daerah dan akar masalah di Kabupaten Sukamara berkaitan dengan masalah utama “sistem pelayanan investasi belum optimal”.

Tabel 2. 93 Permasalahan Sistem Pelayanan Investasi Belum Optimal

Masalah	Akar Masalah	Urusan
Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan Permodalan Yang Belum Maksimal	Belum optimalnya sarana sistem pelayanan perizinan yang terintegrasi secara online	Urusan Penanaman Modal
Pelaksanaan Penanaman Modal yang belum optimal	Realisasi investasi yang relatif rendah	

Sumber: Hasil Analisis, 2025

c. Menguatkan Inisiasi-inisiasi Reformasi Tata Kelola Pemerintah untuk Menciptakan Fondasi Pengembangan yang Akuntabel dan Efektif

Dalam rangka perwujudan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Kota Sukamara Tahun 2025-2045 tahapan yang pertama (2025-2029), “Menguatkan Inisiasi-Inisiasi Reformasi Tata Kelola Pemerintah Untuk Menciptakan Fondasi Pengembangan Yang Akuntabel dan Efektif” perlu ditelaah dan dianalisis





permasalahan pembangunan sehingga diharapkan permasalahan tersebut dapat diselesaikan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Pada Arah kebijakan ini, terdapat 1 (satu) masalah utama, yaitu kurang efektifnya mekanisme tata kelola pemerintahan di bidang pelayanan publik.

1. Kurang Efektifnya Mekanisme Tata Kelola Pemerintahan di Bidang Pelayanan Publik

Tata Kelola Pemerintahan memiliki peran yang penting dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sukamara karena memegang peran kunci untuk memastikan modal pembangunan dan kebijakan pemerintah digunakan secara efektif dan efisien untuk meraih cita-cita pembangunan daerah. Tabel berikut ini menunjukkan masalah daerah dan akar masalah di Kabupaten Sukamara berkaitan dengan masalah utama “kurang efektifnya mekanisme tata kelola pemerintahan di bidang pelayanan publik”.

Tabel 2. 94 Permasalahan Kurang Efektifnya Mekanisme Tata Kelola Pemerintahan di Bidang Pelayanan Publik

Masalah	Akar Masalah	Urusan
Sumber Daya Manusia, Anggaran, dan Partisipasi masyarakat dalam Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Masih Kurang	Jumlah penduduk yang cukup besar dengan penyebaran yang sangat luas, belum tertata serta konektivitas antar wilayah yang rendah.	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Pemahaman substansi dan materi administrasi kependudukan.	
	Manajemen Pelayanan Administrasi Kependudukan.	
	Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan	
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Belum optimalnya pembinaan dalam rangka meningkatkan kualitas kelembagaan dan penataan organisasi	Urusan Sekretariat Daerah
	Penataan kelembagaan Perangkat Daerah belum sepenuhnya tepat fungsi dan tepat ukuran	
	Belum optimalnya pembinaan dalam rangka meningkatkan kualitas kelembagaan dan penataan organisasi	
	Penataan kelembagaan Perangkat Daerah belum sepenuhnya tepat fungsi dan tepat ukuran	
	Belum optimalnya penerapan analisis jabatan dan analisis beban kerja pada perangkat daerah	





Masalah	Akar Masalah	Urusan
	Belum adanya penggunaan teknologi berbasis elektronik dalam rangka penataan kelembagaan	
	Penerapan organisasi berbasis kinerja masih memerlukan perbaikan berkelanjutan, khususnya pada aspek struktur, tugas, fungsi, analisis jabatan dan beban kerja	
	Belum optimalnya pembinaan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik	
	Belum adanya penggunaan teknologi berbasis elektronik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik	
	Belum terpolanya proses bisnis (sistem ketatalaksanaan)	
	Masih kurangnya rumusan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam rangka penatalaksanaan dan pelayanan publik	
	Belum optimalnya pembinaan untuk peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi	
	Belum adanya rumusan kebijakan untuk percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi pada level organisasi perangkat daerah	
	Nilai Sakip pemerintah daerah belum optimal	
	Kapasitas sarana dan prasarana perkantoran belum memadai	
	Kurang memadainya tata ruang kerja yang belum sepenuhnya dapat memberikan kenyamanan dalam menunjang peningkatan kinerja aparatur	
	Pelayanan keprotokolan pimpinan, tamu daerah dan layanan informasi kegiatan pemerintah daerah yang dilaksanakan belum optimal	
	Belum optimalnya fungsi perencanaan yang menjadi dasar penyusunan anggaran dan sebagai instrumen dalam evaluasi kinerja perangkat daerah	





Masalah	Akar Masalah	Urusan
Penyelenggaraan kebijakan dan pengoordinasian bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, perekonomian, dan pembangunan	Belum optimalnya pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah	
	Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat belum terlaksana dengan baik	
	Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya alam belum terlaksana dengan baik	
	Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian belum terlaksana dengan baik	
	Proses pembinaan BUMD belum terlaksana dengan baik	
	Belum optimalnya penyusunan, pengendalian, dan pelaporan program pembangunan	
	Masih rendahnya pengetahuan dan kemampuan aparatur dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa	
	Belum optimalnya kapasitas layanan pengadaan secara elektronik	
	Belum optimalnya fasilitasi dan koordinasi hukum	
	Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana terhadap lembaga kemasyarakatan dan keagamaan	
	Belum optimalnya pembinaan mental dan spiritual, pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat	
	Belum optimalnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan	
	Belum optimalnya fasilitasi kerja sama pemerintah daerah	
	Belum optimalnya rumusan kebijakan dalam rangka penataan kewilayahan	
Masih rendahnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Pemenuhan variabel pada domain kebijakan internal masih belum optimal	Urusan Komunikasi dan Informatika





Masalah	Akar Masalah	Urusan
	Tata kelola dan ekosistem e-Government masih perlu ditingkatkan	
	Belum tersedianya peraturan perundang-undangan daerah yang mengatur SPBE	
Kurangnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Belum tersedianya infrastruktur/Media untuk diseminasi informasi	
	Banyaknya Laporan atau pengaduan Masyarakat (pengawasan masyarakat)	
	Masih tinggi/banyaknya temuan hasil pemeriksaan	
Adanya Program dan Kegiatan yang tidak berkontribusi terhadap Capaian RPJMD	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sukamara masih relatif rendah	
Pengelolaan Keuangan Daerah harus berdasarkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)	Mempertahankan Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK RI	
Pemberian sanksi/punishment yang tidak menyelesaikan temuan pemeriksaan	Rendahnya kesadaran obyek pemeriksaan (obrik) dalam menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) terutama kerugian negara/daerah	Urusan Pengawasan
Banyaknya obyek pemeriksaan (obrik) yang belum dilakukan pengawasan dan pemeriksaan	Rendahnya Capaian Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	
Pemenuhan kebutuhan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan dukungan anggaran yang memadai	Terbatasnya alokasi anggaran dan terbatasnya jumlah SDM APIP berdampak pada tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Sukamara masih rendah	
Keterbatasan alokasi anggaran untuk APIP	Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pengawasan berupa peralatan kerja di kantor dan Gedung Aula Pertemuan untuk melaksanakan rapat, monitoring dan evaluasi tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	
Masih rendahnya pemanfaatan dan	Kurangnya dokumen data statistik sektoral daerah yang	
		Urusan Statistik





Masalah	Akar Masalah	Urusan
pengamanan data statistik sektoral	terintegrasi dengan SIM Single data statistik (SDS)	Urusan Persandian
	Kurangnya pemahaman OPD terhadap pentingnya data statistik sektoral dalam perencanaan	
	Pemenuhan variabel pada domain kebijakan internal masih belum optimal	
	Kurangnya kesadaran untuk mengamankan informasi	
Kurangnya kompetensi SDM Kepegawaian Daerah	Belum optimalnya kapasitas, kompetensi, dan profesionalitas SDM aparatur daerah	Urusan Kepegawaian
	Pemahaman akan fungsi pegawai rendah	
	Pembagian pekerjaan yang tidak sesuai dengan bidang	
	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di daerah belum dapat dilaksanakan secara mandiri	Urusan Pendidikan dan Pelatihan
	Belum adanya standardisasi pola diklat	
Riset dan inovasi daerah belum optimal	Sarana, prasarana, dan SDM riset dan inovasi daerah belum tersedia secara mencukupi	Urusan Penelitian dan Pengembangan

Sumber: Hasil Analisis, 2025

d. Memperkuat Inisiasi-inisiasi Supremasi Hukum untuk mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat

Dalam rangka perwujudan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Kota Sukamara Tahun 2025-2045 tahapan yang pertama (2025-2029), "memperkuat inisiasi-inisiasi supremasi hukum untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat" perlu ditelaah dan dianalisis permasalahan pembangunan sehingga diharapkan permasalahan tersebut dapat diselesaikan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Pada Arah kebijakan ini, terdapat 3 (tiga) masalah utama, yaitu 1) kurangnya peraturan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah, 2) lunturnya penerapan ideologi Pancasila dan rawannya konflik horizontal, dan 3) kurangnya pemahaman akan aturan-aturan pemanfaatan lahan.

1. Kurangnya Peraturan Tata Cara Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Supremasi hukum diharapkan akan menjadi jaminan bagi masyarakat yang menyatakan bahwa hukum berada posisi tertinggi dalam suatu daerah agar mampu melindungi segenap komponen dan aspek pembangunan di Kabupaten Sukamara. Namun, dalam menempatkan hukum dalam posisi tertinggi sering





mengalami berbagai macam tantangan dan hambatan. Kurangnya peraturan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah dapat menyebabkan adanya berbagai masalah dalam pengelolaan dan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan. Tabel 4.6 menunjukkan masalah daerah dan akar masalah di Kabupaten Sukamara berkaitan dengan masalah utama “kurangnya peraturan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah”.

Tabel 2. 95 Permasalahan Kurangnya Peraturan Tata Cara Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Masalah	Akar Masalah	Urusan
Belum optimalnya produk hukum dan kelengkapan kinerja daerah	Belum optimalnya jumlah produk hukum yang disebabkan karena terbatasnya tenaga ahli yang sesuai dengan kompetensinya	Urusan Sekretariat Dewan
	Belum adanya Rencana Kerja Alat-Alat Kelengkapan DPRD	
	Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Sukamara	
	Kurangnya Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur	
	Belum sinkronnya jadwal/kegiatan DPRD	
Keuangan Daerah dan Kesadaran Pajak Masyarakat	Pencatatan aset daerah masih belum maksimal	Keuangan
	Kurangnya sosialisasi untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar pajak	Keuangan
	Belum optimalnya kinerja Badan Usaha Milik Daerah	Keuangan

Sumber: Hasil Analisis, 2025

2. Lunturnya Penerapan Ideologi Pancasila dan Rawannya Konflik Horizontal

Ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila yang menjadi pandangan dan pedoman hidup bangsa. Namun adanya pengaruh global yang masuk ke dalam kehidupan bangsa Indonesia menyebabkan adanya penurunan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat. Lunturnya pengamalan Pancasila dapat menyebabkan krisis moral yang terjadi dalam masyarakat karena menggerus karakter bangsa Indonesia. Berbagai permasalahan dapat terjadi di masyarakat seperti terjadinya konflik horizontal yang mengganggu keamanan dan ketertiban sosial. Tabel berikut ini menunjukkan masalah daerah dan akar masalah di Kabupaten Sukamara berkaitan dengan masalah utama “lunturnya penerapan ideologi Pancasila dan rawannya konflik horizontal”.

Tabel 2. 96 Permasalahan Lunturnya Penerapan Ideologi Pancasila dan Rawannya Konflik Horizontal

Masalah	Akar Masalah	Urusan
Penurunan Ketahanan ideologi Negara	Menurunnya kebanggaan terhadap nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional	





Masalah	Akar Masalah	Urusan
	Adanya kontroversi terhadap penyebutan Pancasila sebagai salah satu pilar, padahal Pancasila merupakan dasar/filosofi bangsa (Philosophische Grondslag)	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
Merosotnya Wawasan Kebangsaan negara	Merosotnya rasa, paham, dan semangat kebangsaan di kalangan masyarakat	
Merosotnya rasa Bela Negara	Merosotnya semangat persatuan dan kesatuan kebangsaan di kalangan masyarakat	
Penurunan Nilai-nilai sejarah kebangsaan	Terjadinya pergeseran nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat dikarenakan melupakan sejarah perjalanan perjuangan bangsa	
Adanya isu-isu pembangunan bernuansa SARA	Masih terdapatnya isu-isu yang bernuansa SARA dan tindakan diskriminatif terhadap warga negara yang bertentangan dengan hak-hak sipil sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945	
Kurangnya penanganan konflik dan kewaspadaan nasional	Rawan terjadinya konflik antar suku karena banyaknya warga pendatang dari berbagai daerah	
	Rawan terjadinya konflik antara warga lokal dengan perusahaan perkebunan dan perusahaan-perusahaan akibat adanya pembukaan lahan yang mencaplok dan merusak lahan warga dan tanah adat	
	Masih tingginya tindak kriminalitas dilingkungan masyarakat dan lingkungan keluarga	
	Rendahnya kepekaan, kesiagaan dan antisipasi serta peran serta masyarakat dalam urusan keamanan, ketenteraman dan ketertiban	
Keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat belum optimal	Personil LINMAS belum terbina dan terlatih	Urusan Pelaksanaan Unsur Kewilayahan
	Belum optimalnya peran lembaga masyarakat desa/ kelurahan dalam fasilitasi terciptanya Toleransi dan kerukunan	Urusan Pelaksanaan Unsur Kewilayahan
	Belum optimalnya koordinasi keamanan, ketertiban umum	Urusan Pelaksanaan Unsur Kewilayahan
	Rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap peraturan daerah	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
	Tingginya angka kenakalan remaja	Urusan Kepemudaan dan Olahraga
	Kurangnya Pengawasan Terhadap Pergaulan Pemuda	
Politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan	Kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam bidang politik	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik





Masalah	Akar Masalah	Urusan
	Berkurangnya pemahaman masyarakat akan hak dan kewajiban dalam proses demokratisasi	
	Kerawanan/konflik dalam proses penyelenggaraan Pilkada serentak	
	Kurangnya pemahaman terhadap organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Sukamara	
Ketahanan ekonomi, sosial budaya, dan organisasi kemasyarakatan	Kerawanan ketahanan ekonomi masyarakat dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)	
	Bergesernya norma-norma sosial dan terkikisnya kebudayaan daerah di kalangan masyarakat	
	Kerawanan terjadinya konflik antar umat beragama/ SARA di wilayah Kabupaten Sukamara	
	Kerawanan penanganan masalah ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam di wilayah Kabupaten Sukamara	
	Kerawanan penyakit masyarakat, yang berdampak pada Stabilitas Ketahanan Nasional di Kabupaten Sukamara	
Kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk mematuhi peraturan daerah masih belum optimal	Rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap peraturan daerah	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Tingginya angka kenakalan remaja	Kurangnya Pengawasan Terhadap Pergaulan Pemuda	Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Sumber: Hasil Analisis, 2025

3. Kurangnya Pemahaman akan Aturan-Aturan Pemanfaatan Lahan

Pemanfaatan lahan menjadi hal yang sangat krusial bagi suatu daerah karena berkaitan erat dengan rencana tata ruang yang ada pada suatu wilayah. Kurangnya pemahaman *stakeholders* akan aturan-aturan pemanfaatan lahan dapat menyebabkan ketidaksesuaian pemanfaatan lahan yang bisa memberikan dampak buruk terhadap lingkungan. Selain itu, adanya produk hukum tentang pemanfaatan lahan yang kurang optimal juga akan menyebabkan kurangnya pemahaman bagi pemerintah dan masyarakat itu sendiri untuk mengimplementasikan kebijakan yang ada di dalamnya. Tabel berikut ini menunjukkan masalah daerah dan akar masalah di Kabupaten Sukamara berkaitan dengan masalah utama “kurangnya pemahaman akan aturan-aturan pemanfaatan lahan”.





Tabel 2. 97 Permasalahan Kurangnya Pemahaman akan Aturan-Aturan Pemanfaatan Lahan

Masalah	Akar Masalah	Urusan
Belum semua tanah bersertifikat dan belum semua tanah sertifikat sesuai dengan peruntukannya dan/atau penggunaannya	Sulitnya pengendalian penggunaan lahan, antara lain disebabkan karena persepsi masyarakat bahwa dengan kepemilikan lahan yang dimiliki oleh masyarakat sendiri, masyarakat berhak mengelola/menggunakannya sesuai dengan keinginannya sendiri	Urusan Pertanahan
Kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk mematuhi peraturan daerah masih belum optimal	Rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap peraturan daerah	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Tingginya angka kenakalan remaja	Kurangnya Pengawasan Terhadap Pergaulan Pemuda	Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Sumber: Hasil Analisis, 2025

e. Meningkatkan Pemberdayaan Sosial, Budaya, dan Ekologi Masyarakat

Perwujudan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2045 tahapan yang pertama (2025-2029), "Meningkatkan Pemberdayaan Sosial, Budaya, dan Ekologi Masyarakat" perlu ditelaah dan dianalisis sebagai permasalahan pembangunan sehingga diharapkan permasalahan tersebut dapat diselesaikan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Pada Arah kebijakan ini, terdapat 4 (empat) masalah utama, yaitu 1) belum optimalnya kerja sama lintas sektor dalam pemberdayaan masyarakat, 2) kurangnya inventarisasi dan insentif pengembangan produk budaya lokal, 3) kurangnya partisipasi dan perlindungan bagi perempuan dan anak dalam pelaksanaan pembangunan, dan 4) kurangnya kesadaran masyarakat dan aktivitas pelestarian lingkungan hidup.

1. Belum Optimalnya Kerja Sama Lintas Sektor dalam Pemberdayaan Masyarakat

Kerja sama lintas sektor dalam pemberdayaan masyarakat menjadi hal yang penting dalam pemberdayaan masyarakat mengingat terjadi kolaborasi antar berbagai pihak yang memiliki peran, kepentingan, dan keahlian berbeda dalam menciptakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi lintas sektor menjadikan proses pemberdayaan masyarakat yang diharapkan dapat tercipta dengan lebih efisien dan memberikan dampak yang luas bagi daerah. Namun, perwujudan kerja sama lintas sektor ini masih menjadi tantangan bagi daerah karena sulit untuk menciptakan kolaborasi yang ideal dari berbagai pihak. Tabel berikut ini menunjukkan masalah daerah dan akar masalah di





Kabupaten Sukamara berkaitan dengan masalah utama “belum optimalnya kerja sama lintas sektor dalam pemberdayaan masyarakat”.

Tabel 2. 98 Permasalahan Belum Optimalnya Kerja Sama Lintas Sektor dalam Pemberdayaan Masyarakat

Masalah	Akar Masalah	Urusan
Peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan masih kurang	Kerja sama lintas sektor, lintas program yang belum optimal	Urusan Kesehatan
Rendahnya tingkat partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah	Kurangnya kreativitas, inovasi maupun keterampilan bagi pemuda	Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Rendahnya prestasi Olahraga yang dicapai	Belum optimalnya Upaya Pembudayaan Berolahraga di Masyarakat	

Sumber: Hasil Analisis, 2025

2. Kurangnya Inventarisasi dan Insentif Pengembangan Produk Budaya Lokal

Pelestarian Seni Budaya memiliki peran yang penting dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sukamara karena memegang peran kunci untuk memastikan modal seni budaya masyarakat terjaga secara lestari dalam upaya pembangunan daerah. Kurangnya inventarisasi dan insentif untuk pengembangan produk budaya lokal dapat menjadi penghambat dalam proses pelestarian dan pengembangan produk budaya lokal yang dapat menjadi potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkaya identitas budaya daerah. Tabel berikut ini menunjukkan masalah daerah dan akar masalah di Kabupaten Sukamara berkaitan dengan masalah utama “kurangnya inventarisasi dan insentif pengembangan produk budaya lokal”.

Tabel 2. 100 Permasalahan Kurangnya Inventarisasi dan Insentif Pengembangan Produk Budaya Lokal

Masalah Daerah	Akar Masalah	Urusan
Belum optimalnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya	Belum terdata, ditetapkan dan dikembangkan cagar budaya daerah	Urusan Pendidikan
Belum optimalnya pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan seni budaya daerah	Belum terdata dan difasilitasi komunitas kesenian di sekolah dan di masyarakat	Urusan Pendidikan
Belum optimalnya pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan seni budaya daerah	Belum terdaya dan difasilitasi komunitas kesenian di sekolah dan di masyarakat	Urusan Kebudayaan

Sumber: Hasil Analisis, 2025

3. Kurangnya Partisipasi dan Perlindungan bagi Perempuan dan Anak dalam Pelaksanaan Pembangunan

Permasalahan berkaitan dengan gender dan anak menjadi perhatian masyarakat terutama berkaitan dengan diskriminasi dan perlindungan





perempuan dan anak. Kesetaraan gender adalah hak yang seharusnya diperoleh oleh semua individu, sehingga baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak dan kesempatan yang setara dalam setiap aspek kehidupan. Selain itu, anak juga harus mendapatkan sebagaimana mestinya karena kelak akan menjadi agen pembangunan bangsa. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas terjaminnya dan terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak karena perempuan dan anak merupakan warga Indonesia yang memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya. Tabel berikut ini menunjukkan masalah daerah dan akar masalah di Kabupaten Sukamara berkaitan dengan masalah utama “kurangnya partisipasi dan perlindungan bagi perempuan dan anak dalam pembangunan”.

Tabel 2. 99 Permasalahan Kurangnya Partisipasi dan Perlindungan bagi Perempuan dan Anak dalam Pelaksanaan Pembangunan

Masalah	Akar Masalah	Urusan
Masih rendahnya penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak masih lemah, hal ini ditandai dengan masih adanya pekerja anak di bawah umur	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Belum maksimalnya penanganan/ pelayanan terhadap korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	Rendahnya bantuan dan advokasi hukum pada Anak Korban Kekerasan dan Anak Berhadapan dengan Hukum	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Menurunnya Indeks Pembangunan Gender	Partisipasi perempuan dalam pembangunan masih kurang	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Menurunnya Indeks Pembangunan Gender	Partisipasi perempuan dalam pembangunan masih kurang	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sumber: Hasil Analisis, 2025

4. Kurangnya Kesadaran Masyarakat dan Aktivitas Pelestarian Lingkungan Hidup

Pelestarian Lingkungan Hidup memiliki peran yang penting dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sukamara karena memegang peran kunci untuk memastikan modal lingkungan lestari dalam rangka perwujudan pembangunan daerah. Namun, banyak masyarakat yang saat ini justru melakukan berbagai kegiatan yang merusak lingkungan tanpa memikirkan keberlanjutannya di masa yang akan datang. Salah satu hal yang menyebabkan hal tersebut adalah karena kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan masih kurang. Tabel berikut ini menunjukkan masalah daerah dan akar masalah di Kabupaten Sukamara berkaitan dengan masalah utama “kurangnya kesadaran masyarakat akan aktivitas pelestarian lingkungan hidup”.





Tabel 2. 100 Permasalahan Kurangnya Kesadaran Masyarakat akan Aktivitas Pelestarian Lingkungan Hidup

Masalah	Akar Masalah	Urusan
Pengelolaan Sampah yang belum optimal	Belum terpenuhinya target pengurangan sampah dari sumbernya	Urusan Lingkungan Hidup
Kerusakan ekosistem Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Jelai	Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola limbahnya yang masuk ke daerah aliran sungai	
Potensi kebakaran hutan dan lahan masih tinggi	Aktivitas masyarakat yang menggunakan cara tradisional untuk membuka lahan	
Partisipasi masyarakat dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup dan bencana yang masih perlu ditingkatkan	Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dan swasta	
	Kelembagaan lingkungan dan kebencanaan yang masih harus ditingkatkan	
Berkurangnya garis pantai akibat kerusakan alam dan tingginya abrasi karena kurangnya tanaman penahan abrasi seperti mangrove dan kayu api	Banyaknya aktivitas masyarakat yang memanfaatkan daerah sepadan	Urusan Pelaksanaan Unsur Kewilayahan
Potensi tingkat karhutla tinggi	Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan	

Sumber: Hasil Analisis, 2025

f. Meningkatkan Inisiasi-Inisiasi Pemerataan Pembangunan Wilayah yang Berkeadilan

Dalam rangka perwujudan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2045 tahapan yang pertama (2025-2029), "meningkatkan insiasi-inisiasi pemerataan pembangunan wilayah yang berkeadilan" perlu ditelaah dan dianalisis permasalahan pembangunan sehingga diharapkan permasalahan tersebut dapat diselesaikan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Pada Arah kebijakan ini, terdapat 1 (satu) masalah utama, yaitu belum meratanya cakupan pelayanan permukiman dan ekonomi wilayah.

1. Belum Meratanya Cakupan Pelayanan Permukiman dan Ekonomi Wilayah

Pemerataan Pembangunan memiliki peran yang penting dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sukamara karena memegang peran kunci untuk memastikan modal pembangunan daerah tersalurkan secara merata. Tidak meratanya hasil pembangunan daerah akan menyebabkan adanya perbedaan tingkat pembangunan yang akan menciptakan kondisi ketimpangan wilayah. Tabel berikut ini menunjukkan masalah daerah dan





akar masalah di Kabupaten Sukamara berkaitan dengan masalah utama “belum meratanya cakupan pelayanan permukiman dan ekonomi wilayah”.

Tabel 2. 101 Permasalahan Belum Meratanya Cakupan Pelayanan Permukiman dan Ekonomi Wilayah

Masalah	Akar Masalah	Urusan
Banyak daerah yang belum terjangkau aliran air irigasi	Tingkat kerusakan sarana dan prasarana irigasi masih cukup tinggi	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pelayanan sanitasi belum menjangkau seluruh masyarakat	Belum optimalnya kinerja prasarana dan sarana air bersih, sanitasi, dan persampahan	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Belum optimalnya kinerja kecamatan	Kurang meratanya pendistribusian aparatur sipil negara	Urusan Pelaksanaan Unsur Kewilayahan
Perencanaan, pengembangan dan penempatan transmigrasi masih belum optimal	Tingkat kesiapan lokasi transmigrasi	Urusan Tenaga Kerja
	Terhambat dengan adanya masalah status Kawasan APL menjadi HP	

Sumber: Hasil Analisis, 2025

g. Meningkatkan dan Mengembangkan Infrastruktur Perhubungan serta Infrastruktur Pelayanan Publik Dasar

Perwujudan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2045 tahapan yang pertama (2025-2029), "meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perhubungan serta infrastruktur pelayanan publik daerah" perlu ditelaah dan dianalisis permasalahan pembangunan sehingga diharapkan permasalahan tersebut dapat diselesaikan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Pada Arah kebijakan ini, terdapat 4 (empat) masalah utama, yaitu 1) kurangnya sarana dan prasarana penunjang konektivitas wilayah, 2) kurangnya fasilitas dan pengawasan aktivitas perhubungan, 3) penyediaan sarana dan prasarana pendidikan masih belum optimal dan 4) kurangnya penerapan teknologi digital dalam menunjang pelayanan publik.

1. Kurangnya Sarana dan Prasarana Penunjang Konektivitas Wilayah

Konektivitas wilayah menjadi salah satu variabel penting dalam perkembangan suatu wilayah. Konektivitas wilayah yang baik akan mendukung tercapainya interaksi wilayah dalam mendukung bergerakaknya sektor-sektor perekonomian. Aksesibilitas wilayah yang baik akan mendorong terbukanya interaksi dari berbagai wilayah yang dapat mendukung pembangunan ekonomi yang lebih luas sehingga berdampak terhadap peningkatan output pembangunan daerah. Namun, untuk mewujudkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah yang baik perlu didukung dengan adanya sarana dan prasarana penunjang yang memadai. Tabel berikut ini menunjukkan masalah daerah dan





akar masalah di Kabupaten Sukamara berkaitan dengan masalah utama “kurangnya sarana dan prasarana penunjang konektivitas wilayah”.

Tabel 2. 102 Permasalahan Kurangnya Sarana dan Prasarana Penunjang Konektivitas Wilayah

Masalah	Akar Masalah	Urusan
Sarana dan prasarana terminal belum tersedia	Masih tahapan penentuan titik lokasi rencana pembelian tanah	Perhubungan
Sarana dan prasarana pelabuhan penyeberangan belum tersedia;	Belum adanya kajian DLKr dan DLKp guna mengoperasionalkan sebagai operator di Pelabuhan Penyeberangan	Perhubungan
	Belum terbenahnya muara laut sebagai sarana jalur lalu lintas laut dan angkutan	Perhubungan
Masih tingginya tingkat kerusakan Jalan dan Jembatan	Laju kerusakan jalan dan jembatan kabupaten lebih cepat dari laju pembangunan	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Infrastruktur dan Sarana Prasarana Ruang Publik yang Memadai dan Berkualitas	Kurangnya kelengkapan fasilitas keselamatan transportasi;	Urusan Perhubungan
	Sarana dan prasarana terminal belum ada;	
	Sarana dan Prasarana Pelabuhan Penyeberangan Belum Tersedia;	

Sumber: Hasil Analisis, 2025

2. Kurangnya Fasilitas dan Pengawasan Aktivitas Perhubungan

Dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat sarana dan prasarana perhubungan yang ada dalam suatu daerah perlu didukung dengan adanya pengawasan yang optimal dalam proses operasionalnya. Kurangnya fasilitas dan pengawasan aktivitas perhubungan dapat menyebabkan kurangnya keamanan, efisiensi, dan kenyamanan dari sarana dan prasarana perhubungan. Tabel berikut ini menunjukkan masalah daerah dan akar masalah di Kabupaten Sukamara berkaitan dengan masalah utama “kurangnya fasilitas dan pengawasan aktivitas perhubungan”.

Tabel 2. 103 Permasalahan Kurangnya Fasilitas dan Pengawasan Aktivitas Perhubungan

Masalah	Akar Masalah	Urusan
Transportasi perhubungan daerah yang belum efisien	Alokasi pendanaan pemenuhan perlengkapan jalan yang belum sesuai dengan jumlah kebutuhan perlengkapan jalan	Perhubungan
	Penanganan terhadap perlengkapan jalan yang hilang dan atau rusak masih belum maksimal	Perhubungan
	Penyediaan sarpras pendukung layanan pengujian kendaraan bermotor perlu adanya penambahan untuk meningkatkan kualitas layanan	Perhubungan
	Jumlah penguji kendaraan bermotor yang kurang berimbang dengan jumlah peralatan uji	Perhubungan
	Kendaraan ODOL (<i>Over Dimensi Overload</i>) masih banyak beroperasi di jalan	Perhubungan





Belum optimalnya Pelayanan Perparkiran	Masih terbatasnya SDM di bidang pengujian	Perhubungan
	Kurangnya sarana dan prasarana parkir	Perhubungan
	Alokasi anggaran kegiatan masih belum mencukupi untuk penyelenggaraan pelayanan parkir secara maksimal	Perhubungan
	Kualitas SDM jukir masih perlu ditingkatkan untuk peningkatan kualitas pelayanan	Perhubungan

Sumber: Hasil Analisis, 2025

3. Kurangnya Penerapan Teknologi Digital dalam Menunjang Pelayanan Publik

Pelayanan publik menjadi aspek yang sangat penting dalam kegiatan pelaksanaan pemerintahan karena berkaitan erat dengan bagaimana kepuasan masyarakat dalam menerima layanan yang disediakan oleh pemerintah. Untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik dapat dilakukan dengan menerapkan teknologi digital untuk mempermudah akses masyarakat dalam menjangkau layanan dari pemerintah. Penerapan teknologi digital memerlukan dukungan infrastruktur digital yang memadai sehingga pelayanan publik dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Namun, untuk mewujudkan hal tersebut masih banyak tantangan dan hambatan yang harus diselesaikan. Tabel berikut ini menunjukkan masalah daerah dan akar masalah di Kabupaten Sukamara berkaitan dengan masalah utama “kurangnya penerapan teknologi digital dalam menunjang pelayanan publik”.

Tabel 2. 104 Permasalahan Kurangnya Penerapan Teknologi Digital dalam Menunjang Pelayanan Publik

Masalah	Akar Masalah	Urusan
Masih terbatasnya digitalisasi pelayanan publik	Kapasitas sarana dan prasarana TIK belum memadai	Sekretariat Daerah
	Belum tersusunnya SOP pelayanan publik digital dengan baik	Sekretariat Daerah
	Belum memadainya SDM terampil di bidang pelayanan publik digital	Sekretariat Daerah

Sumber: Hasil Analisis, 2025

h. Meningkatkan Kestinambungan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan

Perwujudan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2045 tahapan yang pertama (2025-2029), “meningkatkan kestinambungan pembangunan daerah yang berkelanjutan” perlu ditelaah dan dianalisis permasalahan pembangunan sehingga diharapkan permasalahan tersebut dapat diselesaikan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Pada Arah kebijakan ini, terdapat 1 (satu) masalah utama, yaitu belum optimalnya pengendalian dan evaluasi penerapan dokumen perencanaan.





1. Belum Optimalnya Pengendalian dan Evaluasi Penerapan Dokumen Perencanaan

Kesinambungan pembangunan daerah yang berkelanjutan menjadi aspek yang perlu diperhatikan dalam pembangunan agar tercipta integrasi pembangunan pada tingkat horizontal atau vertikal. Kesinambungan pembangunan daerah menjadi sebuah konsep yang menekankan akan pentingnya pembangunan yang berkelanjutan, terencana, dan terintegrasi dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan. Namun tentunya, untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan perlu dilakukan dengan adanya pengendalian dan evaluasi penerapan dokumen perencanaan. Tidak optimalnya pengendalian dan evaluasi penerapan dokumen perencanaan dapat menyebabkan kurang harmonisnya perencanaan pembangunan daerah.

Tabel 2. 105 Permasalahan Belum Optimalnya Pengendalian dan Evaluasi Penerapan Dokumen Perencanaan

Masalah	Akar Masalah	Urusan
Paradigma capaian kinerja pembangunan	Program dan Kegiatan SKPD berorientasi Output (Keluaran) bukan Outcome (hasil)	Pengawasan
Penyimpangan administrasi pembangunan	Masih ditemukannya penyimpangan baik bersifat materiil maupun administrasi	Pengawasan
	Menurunnya tingkat kepatuhan Aparatur terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pengawasan
Kinerja pembangunan daerah belum dapat diwujudkan secara efektif dan efisien	Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Urusan Perencanaan
	Masih rendahnya kualitas kebijakan perencanaan pembangunan daerah	
	Belum optimalnya pembinaan terhadap OPD	
	Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi pembangunan secara sistematis, terintegrasi, dan akurat	
	Manajemen Arsip belum dilaksanakan secara menyeluruh	Urusan Kearsipan
	Sarana, prasarana, dan teknologi pengelolaan arsip belum optimal	

Sumber: Hasil Analisis, 2025

2.3.3. Isu Strategis

Perencanaan pembangunan daerah menuntut berbagai macam intervensi dan penanganan yang termanifestasi dalam program dan penganggaran. Intervensi dan penanganan tersebut ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di daerah tersebut dan isu-isu strategis di daerah. Berbeda dengan permasalahan, isu strategis mencakup potensi dampak yang dapat ditimbulkan serta signifikansi dari dampak tersebut terhadap pembangunan dan





operasional daerah tersebut. Signifikansi dampak dan potensinya dinilai berdasarkan urgensi, luasan, intensitas dan jumlah masyarakat atau penduduk yang dapat terdampak dari isu tersebut. Selain itu, isu strategis juga memiliki cakupan lebih umum dan dapat terkait antara satu isu dengan isu yang lain baik secara longitudinal (horizontal) maupun hirarkhikal (vertikal).

Perumusan isu strategis menjadi sangat krusial dalam perencanaan daerah sebagai landasan dalam memperkirakan tren dan tantangan atau permasalahan yang dapat muncul di masa atau tahun-tahun berikutnya. Karena dampaknya, isu strategis juga terkait dengan proyeksi dan tujuan serta mitigasi suatu daerah di masa mendatang. Isu strategis dirumuskan berdasarkan permasalahan yang terkait dengan program pembangunan daerah (prioritas utama), yang disinergikan dengan isu internasional, nasional, regional, dan lokal sesuai dinamika yang berkembang saat ini.

Isu strategis Kabupaten Sukamara dalam dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan hasil sintesis dari berbagai masalah dan potensi yang bisa menjadi peluang di masa mendatang. Dokumen ini mencakup isu-isu yang relevan dari tingkat internasional hingga level provinsi, termasuk evaluasi hasil pembangunan dari RPJMD sebelumnya serta masalah yang muncul dari berbagai bidang urusan. Tujuannya adalah merumuskan fokus perencanaan pembangunan untuk jangka waktu yang akan datang dengan mempertimbangkan kondisi saat ini dan berbagai dokumen yang relevan.





Tabel 2. 106 Telaah Isu Strategis Kabupaten Sukamara

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Penetapan Kawasan Transmigrasi Jelai menjadi Kawasan Afirmasi dan Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN	Ketidaksesuaian kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja	Kemiskinan dan pengangguran	Involuntary Migration	Aging Population Negara Maju	Masih Rendahnya Kualitas dan Daya Saing SDM karena Terbatasnya Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kesehatan	Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat
	Kurangnya cakupan dan kualitas pelayanan penunjang pengembangan sumber daya manusia					Polarisasi Sosial
	Kurangnya partisipasi dan perlindungan bagi perempuan dan anak dalam pelaksanaan pembangunan					
	Lunturnya penerapan ideologi Pancasila dan rawannya konflik horizontal					
	Kurangnya fasilitas dan pengawasan aktivitas perhubungan	Akses pendidikan yang masih terbatas	Cyber Insecurity	Transisi Energi untuk Mendorong Pemerataan	Masih Terbatasnya Kapasitas dan Kualitas Konektivitas Antarwilayah dan Infrastruktur Dasar	Aksesibilitas wilayah dan infrastruktur pelayanan dasar
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Masih Belum Optimal	Sarana-prasarana pembangunan daerah belum optimal				
	Kurangnya sarana dan prasarana penunjang konektivitas wilayah					
	Belum meratanya cakupan pelayanan permukiman, pendidikan, dan kesehatan	Keterbatasan akses terhadap air bersih				





Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Perikanan, dan Perkebunan	Kurangnya nilai tambah dan cakupan pemasaran UMKM lokal		Krisis Sumber Daya Alam	Dampak Hilirisasi Mulai Terlihat Posistif bagi Perekonomian Indonesia	Minimnya Hilirisasi Industri dan Diversifikasi Produk Turunan Berbasis SDA	Daya saing produk ekonomi lokal
Berkembangnya Kawasan Industri dan Investasi di Kecamatan Jelai dan Pantau Lunci	Belum optimalnya kerja sama lintas sektor dalam pemberdayaan masyarakat		Dampak Buruk Teknologi AI			Kolaborasi lintas sektor ekonomi dan investasi
Berkembangnya Kawasan Perkebunan Sawit	Sistem pelayanan investasi belum optimal					
	Kurangnya penerapan teknologi digital dalam menunjang pelayanan publik		Misinformasi dan Disinformasi	Sinkronisasi Kebijakan Makro dan Sektoral	Belum Optimalnya Pembangunan Daerah Perbatasan, Pedalaman, Tertinggal, dan Terluar	Efektivitas birokrasi dan penerapan teknologi
	Kurang efektifnya mekanisme tata kelola pemerintahan di bidang pelayanan publik				Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintah Daerah	
	Kurangnya peraturan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah				Pembentukan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara	
	Kurangnya pemahaman akan aturan-aturan pemanfaatan lahan					
	Belum optimalnya pengendalian dan	Bencana (Karhutla, Banjir, Kekeringan, Erosi, Abrasi)	Cuaca Ekstrem	Penerapan Standar Sustainability	Degradasi Lingkungan karena Aktivitas	Kelestarian budaya dan lingkungan





Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
	evaluasi penerapan dokumen perencanaan			yang Tinggi di Level Global	Pertambahan dan Perkebunan Kelapa Sawit	
	Kurangnya inventarisasi dan insentif pengembangan produk budaya lokal	Alih fungsi lahan	Perubahan Kritisikal Terhadap Ekosistem		Masih Rentannya Ketahanan Air, Energi, dan Pangan	
	Kurangnya kesadaran masyarakat akan aktivitas pelestarian lingkungan hidup	Pencemaran dan kerusakan lingkungan	Biodiversity Loss dan Gangguan Ekosistem			

Sumber: Hasil Analisis, 2025





Berdasarkan penelaahan potensi, permasalahan daerah, isu strategis KLHS, isu lingkungan dinamis yang mencakup isu global, nasional, dan regional didapatkan isu strategis Kabupaten Sukamara dalam Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029 melalui pertimbangan diantaranya memiliki pengaruh besar terhadap tercapainya sasaran Pembangunan nasional, tanggung jawab kinerja, dan luasnya dampak yang ditimbulkan. Isu strategis Kabupaten Sukamara adalah sebagai berikut.

a. Daya Saing Produk Ekonomi Lokal

Daya saing ekonomi lokal menunjukkan bagaimana kemampuan suatu daerah untuk menghasilkan produk dan jasa ekonomi lokal yang dapat bersaing di pasar nasional ataupun internasional yang diharapkan mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Kabupaten Sukamara memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan daya saing produk ekonomi lokal. Daya saing produk ekonomi lokal terbentuk apabila terdapat kerja sama antar berbagai pihak untuk menciptakan suatu sistem pengembangan ekonomi lokal yang kondusif sehingga hambatan-hambatan yang terjadi dapat teratasi.

Harapan dalam pembangunan ekonomi lokal adalah bagaimana ekonomi kerakyatan dapat berkembang dengan mendorong berkembangnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sukamara dengan kolaborasi antar pemangku kepentingan sebagai pondasinya. Namun, dalam pengembangan UMKM dan industri kecil di Kabupaten Sukamara masih mengalami berbagai tantangan dan hambatan. Sumber Daya Manusia (SDM) selaku aktor utama dalam pengembangan produk ekonomi masih memiliki kualitas yang belum sesuai dengan yang diharapkan sehingga UMKM dan industri kecil berkembang dengan stagnan. Data persentase usaha mikro menjadi usaha kecil di Kabupaten Sukamara pada tahun 2023 menunjukkan data sebesar 0% sehingga masih harus dilakukan perbaikan dan pengembangan. Begitu pun dengan persentase koperasi aktif yang masih berada pada nilai 57,14% sehingga masih perlu untuk ditingkatkan.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan produk ekonomi lokal salah satunya adalah berkaitan dengan potensi lokal bidang pertanian. Salah satu komoditas lokal yang berkembang di Kabupaten Sukamara adalah Kelapa Sawit yang mana komoditas ini sangat penting untuk dikembangkan agar dapat mendukung pengembangan ekonomi lokal. Namun, permasalahan yang terjadi khususnya di Kabupaten Sukamara para petani memiliki keterbatasan terhadap teknologi, informasi, pasar, dan permodalan termasuk dalam perlindungan usaha tani. Hal ini juga memberikan dampak terhadap rendahnya nilai tambah dan daya saing produk olahan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.





Selain itu, para generasi muda selaku penerus pembangunan juga memiliki minat yang kurang terhadap bidang pertanian.

Pengembangan produk ekonomi lokal juga berkaitan erat dengan pengembangan sektor ekonomi kreatif. Perlu adanya kreativitas dan inovasi dalam mengembangkan sektor ekonomi kreatif. Kabupaten Sukamara masih memiliki tantangan dalam perwujudan sektor ekonomi kreatif yang baik khususnya pada sektor pariwisata karena masih rendahnya kunjungan wisatawan pada destinasi wisata daerah. Kondisi tersebut diperparah dengan kurangnya SDM sektor ekonomi kreatif yang masih memiliki kemampuan dan kapasitas yang rendah dalam pengembangan potensi ekonomi lokal.

Kabupaten Sukamara juga memiliki berbagai macam produk unggulan yang dapat menjadi salah satu nilai tambah ekonomi melalui penguatan ekosistem riset dan inovasi di daerah. Ekosistem riset dan inovasi di daerah adalah keterhubungan elemen sistem yang mendukung rantai nilai riset dan inovasi di daerah. Produk Unggulan Daerah tersebut telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/210/2022 tentang Produk Unggulan Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2022 berdasarkan hasil kajian. **Isu strategis terkait produk unggulan** daerah Kabupaten Sukamara yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan ekosistem riset dan inovasi daerah untuk produk unggulan kelapa sawit.
2. Pengembangan ekosistem riset dan inovasi daerah untuk produk unggulan hasil perikanan dan kelautan (ikan, udang, ebi, rajungan).
3. Pengembangan ekosistem riset dan inovasi daerah untuk produk unggulan hasil olahan produk perikanan (kerupuk/keripik, amplang, kerupuk ikan dan kerupuk basah).
4. Pengembangan ekosistem riset dan inovasi daerah untuk produk unggulan udang vaname.
5. Pengembangan ekosistem riset dan inovasi daerah untuk produk unggulan wisata kuliner produk perikanan dan kelautan.

b. Kolaborasi Lintas Sektor Ekonomi dan Investasi

Pembangunan adalah alat yang bisa digunakan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi sangat krusial untuk mencapai tujuan nasional karena mampu memperbaiki kondisi masyarakat dan wilayah terutama mengingat kondisi wilayah Kabupaten Sukamara yang sangat beragam. Sektor ekonomi dan investasi menjadi sektor utama yang menjadi modal dalam pembangunan di Kabupaten Sukamara.





Semenjak pandemi Covid-19 yang menyebabkan drastisnya penurunan laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sukamara, Pemerintah daerah Kabupaten Sukamara telah berupaya untuk melakukan berbagai upaya untuk mendorong bergerakaknya sektor perekonomian. Pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sukamara turun ke angka 1,98% setelah sebelumnya berada di angka 6,06% pada tahun 2019. Pada tahun 2021-2023, laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sukamara terus bergerak naik ke angka 5,64% (2023) meskipun belum membaik seperti saat sebelum terjadi pandemi Covid-19. Pada lain sisi, jumlah nilai realisasi investasi berskala nasional di Kabupaten Sukamara pada tahun 2021-2023 menunjukkan tren yang fluktuatif, nilai tertinggi adalah pada tahun 2023 yang mencapai Rp315.335.155.512. Modal investasi tersebut dapat menjadi modal yang besar untuk pembangunan daerah Kabupaten Sukamara dan perlu dimanfaatkan secara optimal.

Kolaborasi lintas sektor menjadi aspek yang penting untuk dikembangkan dalam mendukung pengoptimalan pembangunan ekonomi dan pemanfaatan modal investasi. Pada bidang penanaman modal, hal yang perlu menjadi perhatian di Kabupaten Sukamara adalah bagaimana sistem pelayanan investasi belum optimal terutama diakibatkan oleh belum optimalnya sarana pelayanan sistem perizinan investasi yang belum terintegrasi secara online. Selain itu, realisasi investasi juga perlu untuk ditingkatkan agar menjadi modal pembangunan yang besar bagi daerah Kabupaten Sukamara.

Kolaborasi antar berbagai pihak dalam pembangunan ekonomi juga perlu dilakukan untuk meningkatkan output produksi perekonomian daerah. Kontribusi lapangan usaha terhadap PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) di Kabupaten Sukamara menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan serta industri memiliki kontribusi yang terbesar terhadap PDRB di Kabupaten Sukamara. Pada tahun 2023, distribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB di Kabupaten Sukamara adalah sebesar 34,8% sedangkan untuk sektor industri pengolahan adalah sebesar 21,71%. Kedua sektor tersebut dapat dikatakan menjadi sektor basis yang harus dikembangkan agar dapat menggerakkan roda perekonomian daerah. Investasi perlu digalakkan agar dapat menjadi pendorong agar pembangunan perekonomian semakin maju dan berkembang.

c. Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat

Pembangunan sumber daya manusia salah satu yang utama berfokus pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Aspek sosial dan kultural yang memengaruhi kemampuan individu dan komunitas untuk berkembang perlu diperhatikan untuk mencapai peningkatan kapasitas masyarakat. Pembangunan sumber daya manusia yang merupakan pendekatan holistik





mengakui pentingnya peningkatan kualitas hidup, pengurangan kemiskinan, kesetaraan, produktivitas, stabilitas sosial, dan pemberdayaan ekonomi sehingga masyarakat dapat berkembang secara lebih adil dan berkelanjutan.

Isu pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat di Kabupaten Sukamara menjadi penting mengingat tantangan yang dihadapi daerah dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Kabupaten Sukamara, seperti banyak daerah lain di Indonesia, menghadapi masalah seperti kemiskinan, akses terbatas ke pendidikan dan layanan kesehatan, serta ketimpangan ekonomi. Selain itu, kerja sama lintas sektor dalam pemberdayaan masyarakat masih belum optimal, inventarisasi dan insentif pengembangan produk budaya lokal juga masih kurang optimal, serta kesadaran masyarakat akan aktivitas pelestarian lingkungan hidup juga masih perlu ditingkatkan.

Partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan masih kurang optimal. Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Sukamara tahun 2023 usia 13-15 tahun atau setingkat SMP/MTs yang masih perlu dioptimalkan karena belum mencapai target 97,5% dimana realisasinya masih 80,9%. Selain itu, masih rendahnya tenaga pendidik khususnya PAUD yang memenuhi standar kualifikasi sebagai pendidik (sertifikasi profesi) juga menjadi isu dalam upaya perwujudan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat.

Kapasitas masyarakat masih perlu ditingkatkan mengingat masih tingginya angka pengangguran relatif di Kabupaten Sukamara. Tingginya pengangguran berakar dari permasalahan belum optimalnya pemanfaatan peluang usaha dan masih terbatasnya angkatan kerja yang terdidik dan terampil. Persentase sumber daya manusia bidang kesehatan yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan sesuai profesi masih belum optimal dimana baru terpenuhi 30,60% dari target pemenuhan 70% di tahun 2023. Hal ini menjadi gambaran isu kurangnya tenaga profesional yang tersedia sehingga perlu adanya pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat.

Belum optimalnya kerja sama lintas sektor dalam pemberdayaan masyarakat juga masih menjadi isu yang penting untuk diperhatikan. Peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan masih kurang yang disebabkan oleh belum optimalnya kerja sama lintas sektor dan lintas program. Rendahnya tingkat partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah disebabkan oleh kurangnya kreativitas, inovasi maupun keterampilan bagi pemuda, serta belum optimalnya upaya pembudayaan pemuda di masyarakat. Berbagai sektor perlu bekerja sama untuk meningkatkan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat.





d. Perlindungan Perempuan, Anak, dan Konflik Horizontal Masyarakat

Perempuan dan anak yang masuk dalam kategori kaum rentan perlu memperoleh perhatian lebih terutama dalam konteks konflik yang mungkin dapat dialami. Potensi konflik horizontal dalam masyarakat rawan terjadi dikarenakan karakteristik wilayah dengan kemajemukan budaya etnis dan agama. Ketika terjadi konflik horizontal di masyarakat, perempuan dan anak menjadi kaum paling rentan menjadi korban sehingga perlu diberikan perlindungan.

Berbagai kasus seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak boleh terabaikan, perlu penanganan secara lebih serius. Kurangnya partisipasi dan perlindungan bagi perempuan dan anak dalam pelaksanaan pembangunan masih terjadi di Kabupaten Sukamara. Masih rendahnya penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disebabkan oleh kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak yang masih lemah.

Belum maksimalnya penanganan dan pelayanan terhadap korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditandai oleh masih rendahnya bantuan dan advokasi hukum pada anak korban kekerasan dan anak berhadapan dengan hukum. Selain itu, di Kabupaten Sukamara masih ada pekerja anak di bawah umur. Padahal, perlindungan anak diperlukan untuk menjaga keberlanjutan generasi yang berkualitas sehingga sangat perlu untuk ditingkatkan perlindungan anak dalam konflik horizontal masyarakat.

Partisipasi perempuan dalam pembangunan masih kurang yang ditandai dari menurunnya Indeks Pembangunan Gender. Pada tahun 2010 nilai IPG Kabupaten Sukamara sebesar 85,96 dan masuk dalam kategori rendah. Sejak tahun 2014, nilai IPG Kabupaten Sukamara terus berada pada kategori tinggi dengan nilai 91,87 pada tahun 2022. Meskipun telah cukup tinggi angka IPG di Kabupaten Sukamara, namun isu kesetaraan gender masih perlu ditingkatkan dalam masyarakat untuk melindungi perempuan dari ketidakadilan. Lunturnya penerapan ideologi Pancasila dan rawannya konflik horizontal yang terjadi di Kabupaten Sukamara menimbulkan potensi kejahatan terhadap perempuan dan anak sebagai kaum rentan yang paling memerlukan perlindungan.

e. Efektivitas Birokrasi dan Penerapan Teknologi

Isu berkaitan dengan pemerintahan mencakup aspek birokrasi dan digitalisasi proses dalam instansi pemerintah. Birokrasi merupakan sistem penyelenggaraan pemerintah yang didukung oleh teknologi dan sumber daya manusia kompeten. Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, hal-hal yang dipertimbangkan antara lain kualitas pelayanan publik, aksesibilitas data dan informasi publik, partisipasi publik, serta penerapan teknologi dalam sistem pemerintahan. Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Pengembangan Manusia mengeluarkan Indeks Reformasi





Birokrasi sebagai indikator keterukuran kualitas birokrasi atau sistem penyelenggaraan pemerintahan. Reformasi Birokrasi bertujuan untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem pemerintahan sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government*). Pemerintahan yang memiliki tata kelola baik dinilai dari aspek profesional, bersih, efisien, efektif, dan produktif.

Kabupaten Sukamara memiliki kualitas birokrasi baik (B) dengan rentang >60-70 yang menunjukkan birokrasinya telah memadai namun perlu untuk ditingkatkan. Pemerintah Kabupaten Sukamara perlu meningkatkan kinerja pemerintah yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta kualitas pelayanan publik yang memadai. Kinerja pemerintah diukur menggunakan Indeks SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) yang menunjukkan integrasi sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja. Indeks SAKIP Kabupaten Sukamara tahun 2022 termasuk dalam kategori B. Aspek pelayanan publik didasari dengan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 yang terdiri atas 12 asas, yaitu (1) kepentingan umum, (2) kepastian hukum, (3) kesamaan hak, (4) keseimbangan hak dan kewajiban, (5) keprofesionalan, (6) partisipatif, (7) persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, (8) keterbukaan, (9) akuntabilitas, (10) fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, (11) ketepatan waktu, serta (12) kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Sukamara tahun 2021 termasuk kategori B- atau baik (3,01-3,50).

Tata kelola pemerintahan yang baik ditandai dengan adaptasi pemanfaatan teknologi. Adaptasi teknologi mendukung integrasi sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga mempercepat perwujudan efektivitas dan efisiensi kinerja. Kualitas pelayanan publik juga ditingkatkan melalui langkah pemanfaatan teknologi dengan digitalisasi prosedur dan pelayanan. Langkah ini membantu pemerataan layanan secara inklusif. Pemanfaatan teknologi dalam sistem pemerintahan diukur dengan Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Kabupaten Sukamara memiliki indeks SPBE sebesar 1,838 pada tahun 2022.

f. Kelestarian Budaya dan Lingkungan

Budaya dan lingkungan menjadi salah satu aspek kehidupan masyarakat. Perkembangan budaya menunjukkan kehidupan sosial masyarakat yang mencakup adat dan tradisi. Salah satu budaya di Kabupaten Sukamara adalah Betawakan dan syukuran laut. Betawakan merupakan budaya perang air yang biasa diadakan di Sungai Jelai. Pemerintah Kabupaten Sukamara menyatakan bahwa budaya ini perlu dilestarikan dan dikembangkan sebagai potensi pariwisata. Budaya syukuran laut biasa diadakan di Kecamatan Jelai dan Pantai Lunci. Kabupaten Sukamara sendiri memiliki ikon daerah berupa permata batu kecubung dengan *tagline* "Kabupaten





Sukamara, Kota Permata”. Upaya pemerintah dalam melestarikan budaya perlu didukung oleh publik baik secara individu maupun komunitas.

Lingkungan hidup menjadi ruang hidup dan sumber daya penyokong kehidupan masyarakat. Urgensi tersebut menjadi alasan upaya perlindungan dan pengendalian pemanfaatan lingkungan hidup menjadi penting dilakukan oleh pemerintah, publik, dan swasta. Upaya tersebut bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan kualitas lingkungan hidup beserta sumber daya alam bagi generasi saat ini dan masa yang akan datang. Kualitas lingkungan hidup diukur menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang terdiri atas Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Merujuk pada Profil IKLH Nasional tahun 2022, nilai IKLH Kabupaten Sukamara sebesar 70 sehingga termasuk dalam kategori Baik dengan peringkat 155 dari 514 kabupaten/kota se-Indonesia dan 12 dari 14 kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah. Komponen IKU memiliki nilai tertinggi sebesar 92,06 (Baik), diikuti nilai IKA sebesar 59,41 (Sedang). Indeks Kualitas Lahan (IKL) memiliki nilai paling rendah yaitu 47,39 serta termasuk dalam kategori Kurang. Pemerintah Kabupaten Sukamara perlu meningkatkan upaya penambahan luas dan kualitas tutupan hutan dan RTH melalui inovasi bersama publik dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, jenis tanah Kabupaten Sukamara yang berupa gambut perlu dilakukan identifikasi kegiatan pemulihan ekosistem gambut yang rusak melalui Desa Mandiri Peduli Gambut.

g. Aksesibilitas Wilayah dan Infrastruktur Pelayanan Dasar

Pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar menjadi bagian dari hak dasar yang harus diterima masyarakat. Kabupaten Sukamara terdiri dari 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Jelai, Pantai Lunci, Sukamara, Balai Riam, dan Permata Kecubung. Antar wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Sukamara memiliki potensi dan tantangan masing-masing wilayah sehingga dalam memenuhi hak pelayanan dasar masyarakat perlu koneksi. Aksesibilitas wilayah menjadi kebutuhan utama untuk masyarakat menjangkau infrastruktur pelayanan dasar tersebut.

Aksesibilitas wilayah di Kabupaten Sukamara masih perlu ditingkatkan terutama di bidang pendidikan yang masih terbatas oleh karena kurangnya fasilitas dan pengawasan aktivitas perhubungan. Akses perhubungan antar wilayah kecamatan masih mengalami tantangan berupa jarak yang jauh, jalan yang belum standar, dan kurangnya ketersediaan transportasi umum.

Peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan dan daya beli masyarakat akan berpengaruh terhadap meningkatnya kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan gizi. Kemudahan akses jalan akan berdampak pada peningkatan laju distribusi barang dan jasa sehingga roda perekonomian masyarakat terus berputar. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan jaringan jalan yang baik dan memadai akan





berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang semakin maju dan berkembang. Isu aksesibilitas wilayah dan infrastruktur pelayanan dasar sangat dibutuhkan untuk pembangunan Kabupaten Sukamara.

Setelah terkoneksi antar wilayah kecamatan di Kabupaten Sukamara, diperlukan peningkatan jumlah fasilitas dasar di setiap wilayahnya. Sarana prasarana pembangunan daerah belum optimal karena kurangnya sarana dan prasarana penunjang konektivitas wilayah. Kabupaten Sukamara tahun 2023 tidak memiliki rumah sakit umum untuk memenuhi kebutuhan penduduk dalam sektor kesehatan. Jumlah puskesmas di Kabupaten Sukamara tahun 2023 hanya 1 unit dan terletak di Kecamatan Kecubung. Puskesmas ini memiliki beberapa puskesmas pembantu di beberapa kecamatan diantaranya 1 unit di Kecamatan Pantai Lunci, 1 unit di Kecamatan Sukamara, 2 unit di Kecamatan Balai Riam, dan 1 unit di Kecamatan Permata Kecubung. Total keseluruhan jumlah puskesmas pembantu saat ini mencapai 5 unit dengan kapasitas standar sebanyak 30.000 jiwa. Kebutuhan akan pelayanan kesehatan lainnya adalah kebutuhan RB/RSA/RSB, Posyandu, dan apotek.

Fasilitas pendidikan berupa sekolah di Kabupaten Sukamara tahun 2021 per jenjang pendidikan yaitu Taman Kanak-kanak (TK) berjumlah 40, Sekolah Dasar (SD) berjumlah 50, Sekolah Menengah Pertama (SMP) berjumlah 14, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) berjumlah 5 dengan total 104 sekolah. Belum meratanya cakupan pelayanan permukiman, pendidikan, dan kesehatan di Kabupaten Sukamara perlu memperoleh penanganan. Kebutuhan dasar seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat harus bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat tanpa terkecuali.

Aksesibilitas pelayanan dasar juga mencakup akses terhadap air bersih, hal ini karena di Kabupaten Sukamara masih mengalami keterbatasan akses terhadap air bersih. Ketersediaan air di Kabupaten Sukamara terbilang melimpah namun air yang tersedia belum bisa masuk dalam kategori bersih secara karakteristik warna, bau, dan rasa. Persentase penduduk berakses air minum di Kabupaten Sukamara tahun 2023 sebesar 33,32% dimana belum memenuhi target yaitu 35%. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Sukamara tahun 2023 sebesar 41,28% juga belum memenuhi target yaitu 55%. Rendahnya aksesibilitas air minum masyarakat semakin mendukung perlunya peningkatan aksesibilitas air bersih.





BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM, PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

3.1.1. Visi dan Misi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, sementara misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, kemudian dirumuskan tujuan atau strategi utama (*goals*) serta sasaran-sasaran yang ingin dicapai beserta indikator pengukurnya. Proses perumusan ini dilakukan dengan pendekatan perencanaan strategis, yang melibatkan analisis faktor internal dan eksternal serta mempertimbangkan program-program yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukamara terpilih untuk periode 2025-2029.

Visi

Visi adalah gambaran tentang kondisi atau tujuan ideal yang ingin dicapai di masa depan, yang berfungsi sebagai arah dan panduan dalam perencanaan serta pengambilan keputusan di pemerintahan. Berdasarkan perkembangan dan kondisi pembangunan yang dihadapi oleh Kabupaten Sukamara 5 (lima) tahun yang akan datang, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasi permasalahan yang terjadi.

Visi yang ditetapkan mencerminkan cita-cita jangka panjang yang ingin diwujudkan oleh kepala daerah selama masa kepemimpinannya. Penetapan visi diperlukan untuk memadukan gerak langkah setiap unsur organisasi dan masyarakat untuk mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya yang ada dalam menciptakan Kabupaten Sukamara sebagaimana yang dicita-citakan. Rumusan visi Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

“SUKAMARA MENJADI RUMAH BERSAMA YANG MAJU, SEJAHTERA, BERKEADILAN DAN BERDAYA SAING”

Visi pembangunan Kabupaten Sukamara tahun 2025-2029 menuju pada kondisi masyarakat yang sejahtera, memiliki keterkaitan dengan visi RPJMN dalam rangka terwujudnya masyarakat yang maju serta berdaulat, dan dalam RPJMD Kalimantan Tengah berkaitan dengan terwujudnya masyarakat yang maju, modern, bermartabat, dan berkah yang mengedepankan nilai kearifan lokal. Visi ini juga mengacu pada pentahapan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Sukamara tahap I dengan tema pembangunan “Penguatan Fondasi Pembangunan dan Ekonomi”. Pencapaian visi RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029 membutuhkan





fondasi yang menjadi dasar dan pijakan dalam pembangunan di masa yang akan datang. Jika disandingkan dengan visi pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 1 Persandingan Visi Kabupaten Sukamara dengan Visi Nasional dan Provinsi Kalimantan Tengah

Nasional		Provinsi Kalimantan Tengah		Kabupaten Sukamara	
RPJPN 2025-2045	RPJMN 2025-2029	RPJPD 2025-2045	RPJMD 2025-2029	RPJPD 2025-2045	RPJMD 2025- 2029
Indonesia Emas 2045: Negara Nusantara yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan	Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	Kalimantan Tengah Tangguh 2045: Bermartabat, Berkah, Maju, dan Berkelanjutan	Mengangkat Harkat dan Martabat Masyarakat Dayak Khususnya dan Umumnya Masyarakat Kalimantan Tengah (Manggatang Utus) dengan Spirit Kearifan Lokal dalam Bingkai NKRI menuju Kalteng Maju, Modern, Bermartabat, Dan Berkah serta Mendukung Indonesia Emas 2045	"Sukamara Kota PERMATA BERKILAU" Sukamara Kota Permai yang Sejahtera, Berkelanjutan, Berintegritas, Inklusif, dan Maju	Sukamara Menjadi Rumah Bersama yang Maju, Sejahtera, Berkeadilan dan Berdaya Saing

Agar lebih memperjelas makna dari Kalimat Visi Kabupaten Sukamara Tahun 2025 – 2029, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

Rumah Bersama : Kata Rumah Bersama ini lebih merujuk kepada Falsafah **Huma Betang**, yaitu falsafah Suku Dayak di Kalimantan Tengah, yang secara ringkas merupakan Simbol yang mengacu pada nilai-nilai toleransi, kebersamaan, gotong royong, serta menjadi tempat untuk berkumpul dan bertemunya seluruh masyarakat. Berkenaan dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati Sukamara tahun 2025-2029, filosofi Rumah Bersama ini memberikan harapan bahwa Kabupaten Sukamara ini nantinya merupakan Rumah bagi masyarakat, yang masing – masing memiliki kemauan untuk memberikan kontribusi dalam turut menjaga, membangun dan mensejahterakan seisi rumah dengan sikap dan nilai-nilai toleransi, kebersamaan, gotong royong. Dan pada akhirnya akan menarik banyak pihak dari luar untuk berkumpul





dan menjadi bagian dari Masyarakat Kabupaten Sukamara, dengan prinsip – prinsip inklusivitas dan berkelanjutan.

- Maju** : Mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung Sumber Daya Manusia yang unggul, profesional, berperadaban tinggi, berakhlak mulia serta berwawasan ke depan.
- Sejahtera** : Mengandung makna dalam lima tahun ke depan akan terjadi semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat, yang diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan per kapita penduduk yang berdampak pula pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
- Berkeadilan** : Memberikan makna bahwa pembangunan di Kabupaten Sukamara memberikan proporsi yang seimbang baik antar wilayah, antar kecamatan, desa maupun antar kelompok masyarakat dengan objektif.
- Berdaya Saing** : Berarti bahwa baik sumber daya manusia, produk barang maupun jasa yang dihasilkan oleh Kabupaten Sukamara dapat bersaing secara efektif dan berkelanjutan, baik di lingkungan lokal, regional, nasional maupun internasional.

Misi

Misi merupakan komitmen untuk melaksanakan agenda-agenda utama yang menjadi penentu keberhasilan pencapaian visi pembangunan. Rumusan menjadi kerangka bagian tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh guna mencapai visi pembangunan Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029. Untuk mewujudkan visi “**Sukamara menjadi Rumah Bersama yang Maju, Sejahtera, Berkeadilan dan Berdaya Saing**” ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut.

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan adaptif.
2. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berakhlak baik, dan produktif.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.
4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang tangguh dan berwawasan lingkungan.
5. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial, budaya, dan keagamaan.





Keterkaitan antara unsur Visi RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029 ke dalam masing-masing misi adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 2 Keterkaitan Visi RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029 pada masing-masing Misi

Unsur Visi Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029	Misi RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029
RUMAH BERSAMA	
Maju	Misi 2 : Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Berkarakter Baik, dan Produktif
	Misi 3 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Masyarakat yang Inklusif dan Berkelanjutan
	Misi 4 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Tangguh dan Berwawasan Lingkungan
	Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya dan Keagamaan
Sejahtera	Misi 2 : Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Berkarakter Baik, dan Produktif
	Misi 3 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Masyarakat yang Inklusif dan Berkelanjutan
	Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya dan Keagamaan
Berkeadilan	Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Adaptif
	Misi 3 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Masyarakat yang Inklusif dan Berkelanjutan
	Misi 4 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Tangguh dan Berwawasan Lingkungan
	Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya dan Keagamaan
Berdaya Saing	Misi 2 : Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Berkarakter Baik, dan Produktif
	Misi 3 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Masyarakat yang Inklusif dan Berkelanjutan

Jika dikaitkan dengan misi RPJPD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2045, maka misi RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029 dapat dijelaskan dalam tabel berikut.





Tabel 3. 3 Keselarasan Antara Misi RPJPD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2045 dengan Misi RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029

Misi RPJPD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2045	Misi RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029
Misi 1: Memperkuat Pembangunan Manusia	Misi 2 : Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Berkarakter Baik, dan Produktif
Misi 2: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Misi 3 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Masyarakat yang Inklusif dan Berkelanjutan
Misi 3: Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Efektif	Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Adaptif Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya dan Keagamaan
Misi 4: Mewujudkan Supremasi Hukum Menuju Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat	
Misi 5: Memperkuat Pemberdayaan Sosial Budaya dan Ekologi Berbasis Kearifan Lokal	Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya dan Keagamaan
Misi 6: Meningkatkan Pemerataan Pembangunan ke Seluruh Wilayah	Misi 4 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Tangguh dan Berwawasan Lingkungan
Misi 7: Meningkatkan Infrastruktur Perhubungan dan Pelayanan Publik	
Misi 8: Kesinambungan Pembangunan Daerah	

Sementara itu keterkaitan antara misi RPJMN Tahun 2025-2045 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2025-2029 dengan RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029 dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 3. 4 Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029 dengan Misi RPJMN Tahun 2025-2029

Misi RPJMN Tahun 2025-2029 (Asta Cita)	Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029	Misi RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029
Asta Cita 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM)		Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya dan Keagamaan
Asta Cita 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru		Misi 3 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Masyarakat yang Inklusif dan Berkelanjutan Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya dan Keagamaan





Misi RPJMN Tahun 2025-2029 (Asta Cita)	Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029	Misi RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029
Asta Cita 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Misi 3: Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan untuk meningkatkan konektivitas serta mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis lingkungan	Misi 4 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Tangguh dan Berwawasan Lingkungan
Asta Cita 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Misi 2: Peningkatan pendidikan untuk sumber daya manusia yang beretika melalui pendidikan inklusif sesuai dengan kaidah belum bahadat Misi 4: Menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai keadilan sosial	Misi 2 : Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Berkarakter Baik, dan Produktif Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya dan Keagamaan
Asta Cita 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Misi 1: Meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan pemanfaatan sumber daya alam lokal	Misi 3 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Masyarakat yang Inklusif dan Berkelanjutan
Asta Cita 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan		Misi 3 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Masyarakat yang Inklusif dan Berkelanjutan
Asta Cita 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan		Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Adaptif
Asta Cita 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Misi 5: Pemberdayaan kearifan lokal dalam kebijakan dan program pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045	Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya dan Keagamaan



3.1.2. Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi untuk periode tahun 2025-2029. Tujuan yang ditetapkan berdasarkan misi pembangunan lima tahun ke depan di Kabupaten Sukamara adalah sebagai berikut.

1. Tata kelola pemerintah yang baik dan adaptif;
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas;
3. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah;
4. Inklusivitas ekonomi;
5. Peningkatan pembangunan infrastruktur;
6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati; dan
7. Peningkatan ketahanan sosial daerah.

Sementara itu yang dimaksud dengan sasaran adalah kondisi yang menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran yang ingin dicapai berdasarkan pada tujuan yang sudah ditetapkan adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
2. Meningkatkan pelayanan publik yang responsif dan terintegrasi;
3. Meningkatkan kemandirian desa;
4. Meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan dan budaya literasi masyarakat;
5. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
6. Meningkatkan produktivitas perekonomian daerah;
7. Meningkatkan daya saing ekonomi;
8. Pemerataan akses masyarakat terhadap lapangan pekerjaan;
9. Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah serta kualitas infrastruktur dasar permukiman;
10. Menurunkan tingkat pencemaran lingkungan;
11. Menurunkan risiko bencana;
12. Meningkatkan harmonisasi dan inklusivitas sosial;
13. Meningkatkan ketahanan pangan;
14. Meningkatkan pelestarian budaya lokal.

Selanjutnya pada tabel di bawah ini dimuat atau digambarkan secara jelas keterkaitan visi, misi, tujuan, dan sasaran serta indikator-indikator sebagai ukuran kinerja pencapaian dari masing-masing sasaran dan tujuan pembangunan daerah.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



Tabel 3. 5 Tabel Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Visi: Sukamara menjadi Rumah Bersama yang Maju Sejahtera, Berkeadilan dan Berdaya Saing											
Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Adaptif	TI Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Adaptif		TI Indeks Reformasi Birokrasi	69,33	70	70	73	75	80	80	
		SI.1 Meningkatkan Profesionalisme dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	SI.1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	61,10	60	70	70	74,94	76,25	77,56	
		SI.2 Meningkatkan Pelayanan Publik yang Responsif dan Terintegrasi	SI.2 Indeks Pelayanan Publik	3,01	3,05	3,15	3,2	3,3	3,51	3,51	
		SI.3 Meningkatkan Kemandirian Desa	SI.4 Persentase Desa Mandiri	37,93	41,38	44,83	48,28	51,72	55,17	58,62	
Misi 2: Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Berkarakter Baik, dan Produktif	TI Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas		TI Indeks Pembangunan Manusia	70,83	72,9	73,47	74,04	74,61	75,18	75,75	
		SI.1 Meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan dan budaya literasi masyarakat	SI.1 Indeks Pendidikan	0,61	0,62	0,62	0,62	0,63	0,63	0,63	
		SI.2 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	SI.2 Usia Harapan Hidup	74,37	74,37	74,68	74,98	75,29	75,59	75,90	
Misi 3 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Masyarakat yang Inklusif dan Berkelanjutan	TI Peningkatan Pertumbuhan Perekonomian Daerah		TI Laju Pertumbuhan Ekonomi	3,89	5,4	5,67	5,73	5,8	5,86	5,93	
			TI Tingkat inflasi	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	
		SI.1 Meningkatkan produktivitas perekonomian daerah	SI.1 PDRB per Kapita	95,83	95,83	98,36	104,00	110,03	116,48	123,38	
		SI.2 Meningkatkan Daya Saing Ekonomi	SI.2 Indeks Daya Saing	3,40	3,40	3,47	3,54	3,61	3,68	4,00	
			SI.2 Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Kabupaten (antar kecamatan)	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Visi: Sukamara menjadi Rumah Bersama yang Maju Sejahtera, Berkeadilan dan Berdaya Saing											
	T2 Inklusifitas Ekonomi		T2 Rasio Gini	0,289	0,289	0,289	0,289	0,289	0,289	0,289	
			T2 Tingkat kemiskinan	4,14	3,67	3,46	3,25	3,04	2,83	2,62	
		S2.1 Pemerataan akses masyarakat terhadap lapangan pekerjaan	S2.1 Tingkat Pengangguran Terbuka	4,95	4,95	4,42	3,89	3,36	3,36	3,36	
Misi 4 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Tangguh dan Berwawasan Lingkungan	T1 Peningkatan Pembangunan Infrastruktur		T1 Indeks infrastruktur	81	82	82,5	83	84	84,5	85	
		S1.1 Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah serta kualitas infrastruktur dasar permukiman	S1.1 Indeks pelayanan kualitas infrastruktur	50	52	54	57	60	62	64	
	T2 Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati		T2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,16	74,54	74,75	74,96	75,17	75,38	75,59	
			T2 Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	-	0,557	0,567	0,58	0,59	0,60	0,61	
		S2.1 Menurunkan tingkat pencemaran lingkungan	S2.1 Tingkat pencemaran lingkungan	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	
		S2.2 Menurunkan risiko bencana	S2.2 Indeks Risiko Bencana	122,61	130,09	128,25	126,42	124,58	122,74	120,90	
Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya dan Keagamaan	T1 Peningkatan Ketahanan Sosial Daerah		T1 Indeks Kesejahteraan Sosial Daerah	-	60	60,3	60,5	60,8	61	61,3	
		S1.1 Meningkatkan Harmonisasi dan Partisipasi Masyarakat	S1.1 Indeks Kerukunan Umat Beragama	-	80,4	80,88	81,36	81,83	82,31	82,79	
		S1.2 Meningkatkan ketahanan pangan	S1.2 Indeks Ketahanan Pangan	-	61,78	63,52	65,26	67,00	68,74	70,48	
		S1.3. Meningkatkan Pelestarian Budaya Lokal	S1.3 Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas yang Pernah Terlibat	1	5	8	10	12	15	18	



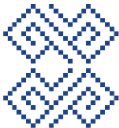


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Visi: Sukamara menjadi Rumah Bersama yang Maju Sejahtera, Berkeadilan dan Berdaya Saing											
			sebagai Pelaku/Pendukung Pertunjukan Seni								

Sumber: Hasil Analisis, 2025





3.2. Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas

3.2.1. Strategi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukamara

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi ***“Sukamara menjadi Rumah Bersama yang Maju, Sejahtera, Berkeadilan, dan Berdaya Saing”*** maka diperlukan penguraian visi-misi Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029 ke dalam strategi dan arah kebijakan.

Strategi merujuk pada rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berikut merupakan penjabaran strategi RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029.

a. Strategi Misi 1

Dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintah Kabupaten Sukamara yang baik dan adaptif, maka disusunlah beberapa strategi berikut agar tujuan dan sasaran dari misi mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan adaptif dapat tercapai.

Tabel 3. 6 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Misi 1 RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029

TUJUAN (1)	SASARAN (2)	STRATEGI (3)
Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Adaptif		
TI Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Adaptif	S1.1 Meningkatkan Profesionalisme dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Upaya meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan dilakukan melalui: 1. Menyusun dan memperkuat regulasi, prosedur, dan mekanisme layanan agar lebih terstandarisasi, efisien, dan konsisten di seluruh bidang urusan. 2. Meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan responsivitas aparatur melalui pelatihan, pembinaan, dan pengembangan karier yang berkelanjutan. 3. Memastikan informasi layanan dan kebijakan mudah diakses, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 4. Memperkuat mekanisme partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pengawasan, dan evaluasi layanan publik. 5. Menyediakan program yang berbasis kebutuhan lokal, mendorong kolaborasi antara masyarakat, komunitas, dan pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan. 6. Memperkuat kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, LSM, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk





TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
(1)	(2)	(3)
Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Adaptif		
		mendukung inovasi, integrasi, dan peningkatan layanan publik.
	S1.2 Meningkatkan Pelayanan Publik yang Responsif dan Terintegrasi	Upaya meningkatkan pelayanan publik yang responsif dan terintegrasi akan dilakukan melalui: 1. Mengembangkan sistem layanan digital terpadu dan mengintegrasikan data antar bidang urusan agar pelayanan lebih mudah diakses, efisien, dan konsisten. 2. Melatih aparatur agar mampu memberikan layanan cepat, tepat, berkualitas, serta membangun budaya pelayanan proaktif dan ramah. 3. Membangun mekanisme pengaduan yang mudah diakses, cepat ditanggapi, terdokumentasi, dan menjadi dasar perbaikan layanan berkelanjutan. 4. Memperkuat koordinasi antar bidang urusan dan melibatkan pihak eksternal untuk mendukung inovasi dan peningkatan kualitas layanan. 5. Melakukan evaluasi berkala melalui indikator kinerja dan survei kepuasan masyarakat, serta menindaklanjuti hasilnya dengan perbaikan prosedur dan inovasi layanan.
	S1.3 Meningkatkan Kemandirian Desa	Upaya peningkatan kemandirian desa akan dilakukan melalui: 1. Mengoptimalkan pengelolaan dana desa secara transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. 2. Mendorong pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan berbasis potensi desa. 3. Memperkuat kapasitas aparatur dan lembaga desa untuk perencanaan serta pengelola pembangunan. 4. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah. 5. Mendorong partisipasi masyarakat dan lembaga adat dalam pengambilan keputusan pembangunan. 6. Memanfaatkan teknologi digital untuk layanan administrasi dan promosi potensi desa. 7. Membangun kemitraan strategis dengan pihak swasta, perguruan tinggi, dan lembaga lainnya.

Sumber: Hasil Analisis, 2025





b. Strategi Misi 2

Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Kabupaten Sukamara yang berkualitas, maka disusunlah beberapa strategi berikut agar tujuan dan sasaran dari misi mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berkarakter baik, dan produktif dapat tercapai.

Tabel 3. 7 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Misi 2 RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029

TUJUAN (1)	SASARAN (2)	STRATEGI (3)
Misi 2 : Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Berkarakter Baik, dan Produktif		
T1 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	S1.1 Meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan dan budaya literasi masyarakat	Upaya peningkatan pemerataan kualitas pendidikan dan budaya literasi masyarakat akan dilakukan melalui: - Memperluas akses pendidikan melalui pembangunan sarana dan prasarana - Mengembangkan kurikulum adaptif sesuai IPTEK, dunia kerja, dan penguatan karakter - Meningkatkan kompetensi, pemerataan, dan kesejahteraan pendidik secara berkelanjutan - Memodernisasi layanan perpustakaan melalui digitalisasi, peningkatan kapasitas pustakawan, dan pengembangan ruang baca publik
	S1.2 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat akan dilakukan melalui: - Meningkatkan jumlah, mutu, dan pemerataan tenaga kesehatan hinggake wilayah terpencil. - Mengembangkan sarana dan prasarana layanan kesehatan yang layak dan mudah diakses. - Memperkuat sistem logistik dan pengawasan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, serta produk pangan. - Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan kesehatan yang lebih cepat dan tepat. - Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam program kesehatan melalui edukasi dan pendampingan. - Memperluas kemudahan akses pembiayaan kesehatan, termasuk melalui pemanfaatan BPJS Kesehatan.

Sumber: Hasil Analisis, 2025





c. Strategi Misi 3

Dalam rangka mewujudkan perekonomian Kabupaten Sukamara yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakatnya, maka disusunlah beberapa strategi berikut agar tujuan dan sasaran dari misi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan dapat tercapai.

Tabel 3. 8 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Misi 3 RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029

TUJUAN (1)	SASARAN (2)	STRATEGI (3)
Misi 3 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Masyarakat yang Inklusif dan Berkelanjutan		
T1 Peningkatan Pertumbuhan Perekonomian Daerah		Upaya meningkatkan produktivitas perekonomian daerah akan dilakukan melalui: 1. Optimalisasi potensi kawasan transmigrasi melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM transmigran, dan pengembangan usaha produktif berbasis potensi lokal. 2. Penguatan sektor kelautan dan perikanan melalui penerapan teknologi budidaya modern, peningkatan armada dan sarana tangkap ramah lingkungan, serta pengolahan hasil perikanan yang bernilai tambah. 3. Pengembangan rantai nilai ekonomi daerah dengan menghubungkan sektor transmigrasi, perikanan, dan pariwisata ke pasar lokal, nasional, dan ekspor. 4. Peningkatan promosi dan daya saing pariwisata melalui inovasi destinasi, event kreatif, dan pemanfaatan platform digital untuk pemasaran. 5. Pemberdayaan ekonomi kreatif masyarakat yang mendukung sektor pariwisata dan perikanan, termasuk kerajinan, kuliner, dan produk lokal. 6. Penguatan kemitraan multipihak dengan swasta, perguruan tinggi, dan lembaga keuangan untuk investasi dan pendampingan usaha. 7. Penerapan prinsip keberlanjutan dalam seluruh sektor, termasuk perlindungan lingkungan laut, konservasi kawasan wisata, dan kelola kawasan transmigrasi yang ramah lingkungan.
	S1.1 Meningkatkan produktivitas perekonomian daerah	
	S1.2 Meningkatkan Daya Saing Ekonomi	Upaya meningkatkan daya saing ekonomi daerah akan dilakukan melalui: 1. Penguatan iklim usaha dan investasi melalui penyederhanaan perizinan,





TUJUAN (1)	SASARAN (2)	STRATEGI (3)
Misi 3 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Masyarakat yang Inklusif dan Berkelanjutan		
		peningkatan layanan berbasis digital, dan jaminan kapasitas hukum bagi pelaku usaha. 2. Pengembangan kapasitas pelaku ekonomi (UMKM, Koperasi, Petani, Pelaku Industri, serta Pemuda) melalui pelatihan, pendampingan usaha, dan fasilitas sertifikasi. 3. Peningkatan daya saing produk daerah dengan mendorong standarisasi, sertifikasi mutu, penggunaan teknologi tepat guna, serta promosi dan pemasaran produk secara lebih luas. 4. Pengembangan infrastruktur dan sarana pendukung ekonomi meliputi perdagangan, distribusi, logistik, industri, dan pertanian untuk mendorong kelancaran produksi dan pemasaran. 5. Penguatan kemitraan dan jejaring usaha antara pelaku ekonomi dengan investor, lembaga keuangan, perusahaan besar, serta antar daerah untuk memperluas pasar dan meningkatkan nilai tambah produk. 6. Diversifikasi dan hilirisasi komoditas unggulan daerah untuk meningkatkan nilai tambah, memperluas pasar ekspor, dan mengurangi ketergantungan pada produk mentah. 7. Stabilitas harga dan perlindungan konsumen melalui penguatan sistem distribusi, pemantauan pasokan, dan penegakan aturan perlindungan konsumen. 8. Peningkatan kualitas data dan informasi ekonomi daerah sebagai dasar perencanaan, promosi investasi, dan pengambilan keputusan berbasis bukti.
T2 Inklusifitas Ekonomi	S2.1 Pemerataan akses masyarakat terhadap lapangan pekerjaan	Upaya pemerataan akses masyarakat terhadap lapangan pekerjaan akan dilakukan melalui: 1. Penguatan sistem informasi ketengakerjaan yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. 2. Peningkatan kualitas dan relevansi pelatihan kerja sesuai kebutuhan pasar kerja. 3. Perluasan jaringan kerja sama antara pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan untuk penempatan tenaga kerja.





TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
(1)	(2)	(3)
Misi 3 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Masyarakat yang Inklusif dan Berkelanjutan		
		4. Penciptaan iklim hubungan industri yang harmonis, adil, dan melindungi pekerja. 5. Pemberdayaan kelompok rentan melalui pelatihan dan pendampingan kerja yang inklusif.

Sumber: Hasil Analisis, 2025

d. Strategi Misi 4

Dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sukamara, maka disusunlah beberapa strategi berikut agar tujuan dan sasaran dari misi mewujudkan pembangunan infrastruktur yang tangguh dan berwawasan lingkungan dapat tercapai.

Tabel 3. 9 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Misi 4 RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
(1)	(2)	(3)
Misi 4 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Tangguh dan Berwawasan Lingkungan		
T1 Peningkatan Pembangunan Infrastruktur	S1.1 Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah serta kualitas infrastruktur dasar permukiman	Upaya peningkatan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur wilayah serta kualitas infrastruktur dasar permukiman akan dilakukan melalui: 1. Penguatan perencanaan pembangunan infrastruktur yang terpadu dan berbasis data kebutuhan wilayah. 2. Peningkatan konektivitas antarwilayah melalui pembangunan dan pemeliharaan jaringan transportasi darat, air, dan/atau penyeberangan. 3. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar permukiman seperti air bersih, sanitasi, drainase, dan perumahan layak huni. 4. Pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur secara berkala untuk menjamin keberlanjutan fungsi dan layanan. 5. Penggunaan teknologi dan inovasi dalam pengelolaan infrastruktur untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik. 6. Penguatan koordinasi antarinstansi dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur wilayah.
T2 Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan	S2.1 Menurunkan tingkat pencemaran lingkungan	Upaya penurunan tingkat pencemaran lingkungan akan dilakukan melalui: 1. Penguatan regulasi dan pengawasan terhadap kegiatan





TUJUAN (1)	SASARAN (2)	STRATEGI (3)
Misi 4 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Tangguh dan Berwawasan Lingkungan		
Keanekaragaman Hayati		yang berpotensi menimbulkan pencemaran, termasuk penegakan hukum yang konsisten dan berkelanjutan. 2. Peningkatan kapasitas dan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pengendalian pencemaran, melalui pelatihan, sosialisasi, dan pertukaran informasi. 3. Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan untuk meminimalkan pembuangan limbah dan emisi dari kegiatan industri, transportasi, dan rumah tangga. 4. Peningkatan kualitas tata kelola sampah dan limbah melalui pengurangan, pemilahan, pemanfaatan kembali, dan daur ulang. 5. Pengembangan dan pelestarian ruang terbuka hijau serta vegetasi di kawasan publik untuk membantu penyerapan polutan dan perbaikan kualitas udara. 6. Pelibatan masyarakat secara aktif dalam upaya pengendalian pencemaran melalui edukasi, kampanye kesadaran lingkungan, dan partisipasi komunitas. 7. Pemantauan dan evaluasi kualitas lingkungan secara berkala sebagai dasar pengambilan keputusan dan penentuan langkah perbaikan yang tepat.
	S2.2 Menurunkan risiko bencana	Upaya menurunkan risiko bencana akan dilakukan melalui: 1. Penguatan regulasi, kebijakan, dan tata kelola pengurangan risiko bencana secara terpadu di tingkat daerah. 2. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan rehabilitasi bencana. 3. Pengembangan sistem informasi dan peringatan dini yang mudah diakses masyarakat. 4. Penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana yang memadai dan merata di wilayah rawan bencana.





TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
(1)	(2)	(3)
Misi 4 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Tangguh dan Berwawasan Lingkungan		
		5. Integrasi materi kebencanaan dalam pendidikan dan pelatihan untuk membangun kesadaran dan budaya siaga bencana. 6. Pelaksanaan kegiatan simulasi, penyuluhan, dan sosialisasi secara berkala untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. 7. Penguatan koordinasi dan kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, dalam upaya penanggulangan bencana.

Sumber: Hasil Analisis, 2025

e. Strategi Misi 5

Dalam rangka mewujudkan ketahanan sosial masyarakat serta pembangunan kebudayaan di Kabupaten Sukamara, maka disusunlah beberapa strategi berikut agar tujuan dan sasaran dari misi meningkatkan kualitas kehidupan sosial, budaya dan keagamaan dapat tercapai.

Tabel 3. 10 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Misi 5 RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
(1)	(2)	(3)
Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya dan Keagamaan		
TI Meningkatnya ketahanan sosial dan pembangunan kebudayaan	S1.1 Meningkatkan Harmonisasi Sosial dan Partisipasi Masyarakat	Upaya peningkatan harmonisasi sosial dan partisipasi masyarakat akan dilakukan melalui: 1. Meningkatkan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat melalui penegakan peraturan, penguatan kapasitas aparat, dan edukasi publik. 2. Memperkuat layanan sosial, perlindungan, dan bantuan bagi kelompok rentan, serta korban kekerasan dan eksploitasi. 3. Mendorong peran perempuan dan pemenuhan hak anak melalui pengarusutamaan gender, perlindungan anak, dan sistem data responsif. 4. Mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui program keluarga berencana yang inklusif dan peningkatan kualitas keluarga. 5. Menumbuhkan kesadaran Pancasila, etika, dan budaya politik melalui pendidikan politik dan pembinaan ormas. 6. Meningkatkan pencegahan dan penanganan potensi gangguan ketertiban serta konflik sosial di masyarakat secara damai.





TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
(1)	(2)	(3)
Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya dan Keagamaan		
		7. Mendorong partisipasi generasi muda melalui pembinaan olahraga, pembudayaan olahraga, dan kepramukaan.
	S1.2 Meningkatkan ketahanan pangan	Upaya peningkatan ketahanan pangan akan dilakukan melalui: 1. Penguatan tata kelola dan pemanfaatan sumber daya pangan secara berkelanjutan untuk mendukung kedaulatan dan kemandirian pangan daerah. 2. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, dan keberagaman pangan guna mendorong diversifikasi konsumsi masyarakat. 3. Penguatan sistem distribusi dan cadangan pangan daerah untuk menjamin pasokan pada situasi normal maupun darurat. 4. Peningkatan kapasitas masyarakat dan pelaku usaha pangan melalui pendampingan, pelatihan, dan kemitraan usaha. 5. Penguatan sistem deteksi dini dan penanganan kerawanan pangan berbasis data yang akurat dan terkini. 6. Peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan dari hulu hingga hilir untuk melindungi kesehatan masyarakat. 7. Pengembangan kerja sama antarwilayah dan kemitraan lintas sektor dalam pengelolaan, penyediaan, dan distribusi pangan.
	S1.4 Meningkatkan Pelestarian Budaya Lokal	Upaya peningkatan pelestarian budaya lokal akan dilakukan melalui: 1. Penguatan peran masyarakat dan komunitas budaya dalam pengembangan, pelestarian, dan promosi kebudayaan daerah. 2. Integrasi nilai, tradisi, dan warisan budaya lokal dalam pendidikan, kegiatan sosial, dan kebijakan pembangunan daerah. 3. Pengembangan ruang kreatif dan sarana pertunjukan untuk mendorong keberlanjutan kesenian tradisional. 4. Peningkatan dokumentasi dan inventarisasi kekayaan budaya daerah sebagai dasar pelestarian dan pemanfaatan. 5. Penguatan kerja sama dengan berbagai pihak (antar daerah,





TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
(1)	(2)	(3)
Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya dan Keagamaan		
		lembaga akademik, dan mitra internasional) dalam pelestarian dan pengelolaan warisan budaya. 6. Peningkatan promosi dan pemanfaatan budaya lokal sebagai bagian dari identitas daerah dan daya tarik wisata. 7. Penguatan perlindungan cagar budaya dan situs bersejarah melalui regulasi, pengawasan, dan partisipasi masyarakat.

Sumber: Hasil Analisis, 2025

3.2.2. Arah Kebijakan Daerah Kabupaten Sukamara

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara tahun 2025-2029 merupakan tahapan pertama dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-20245. RPJMD ini bertujuan membangun pondasi pembangunan daerah menuju visi jangka panjang RPJPD, yaitu **“Sukamara Kota Permai yang Sejahtera, Berkelanjutan, Berintegritas, Inklusif, dan Maju”**.

Berdasarkan pada RPJPD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-20245, “Penguatan Fondasi Pembangunan dan Ekonomi” menjadi tema pada pembangunan tahap I yang dilaksanakan pada tahun 2025-2030. Fondasi pembangunan menjadi elemen kunci yang mendasari upaya-upaya untuk membangun Kabupaten Sukamara secara berkelanjutan. Fondasi ini mencakup berbagai aspek fundamental, seperti infrastruktur dasar, tata kelola pemerintahan yang baik, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan ekonomi lokal yang berbasis potensi daerah. Dalam tahap ini, fokus utama adalah memastikan bahwa setiap elemen dasar telah diperkuat sehingga dapat mendukung tahapan pembangunan selanjutnya. Dengan demikian pembangunan tidak hanya bersifat parsial atau temporer, tetapi juga memiliki kesinambungan yang kuat dan mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Pondasi yang kokoh menjadi titik awal bagi RPJMD, di mana visi dan misi pembangunan ditetapkan sebagai gambaran kondisi ideal yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan.

Dalam RPJMD, visi dan misi berperan sebagai pedoman utama dalam menyusun kebijakan yang terarah dan sistematis. Visi dan misi tersebut kemudian diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran yang lebih operasional, serta diterjemahkan ke dalam arah kebijakan yang menjadi panduan dalam pengelolaan pembangunan. Dengan arah kebijakan yang jelas, tahapan pembangunan dapat dirancang secara bertahap dan terstruktur, sehingga setiap langkah yang diambil memiliki





kesinambungan dengan strategi yang telah ditetapkan. Berikut merupakan tahap pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029.

Tabel 3. 11 Pentahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2030

2025	2026	2027	2028	2029	2030
Penguatan Fondasi Pembangunan Dasar	Perencanaan dan Penataan Fondasi Inovasi	Percepatan Implementasi Fondasi Transformasi	Pemantapan Fondasi Transformasi Berkelanjutan	Konsolidasi Capaian Fondasi Transformasi	Integrasi dan Penyiapan Akselerasi Pembangunan

1. Tahap I (2025) : Penguatan Fondasi Pembangunan Dasar

Pada tahun pertama RPJMD, fokus pembangunan diarahkan pada penguatan fondasi dasar pemerintahan dan pembangunan, sebagai pijakan awal transformasi daerah. Pemerintah Kabupaten Sukamara akan memprioritaskan peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan, pemenuhan layanan dasar pendidikan dan kesehatan, serta sektor-sektor ekonomi unggulan daerah. Pembangunan infrastruktur dasar serta penguatan nilai sosial, budaya, dan keagamaan juga akan menjadi perhatian penting dalam upaya menciptakan masyarakat yang lebih tangguh dan inklusif.

2. Tahap II (2026) : Perencanaan dan Penataan Fondasi Inovasi

Tahun kedua merupakan masa untuk melakukan penataan dan perencanaan inovatif, guna memperkuat arah transformasi pembangunan. Pemerintah daerah akan memperkuat perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, serta menyusun skema inovatif dalam pengembangan SDM, ekonomi, dan infrastruktur. Penyusunan sistem pelayanan publik yang terintegrasi dan berbasis teknologi juga menjadi fokus utama, di samping pelestarian budaya lokal dan penataan ruang yang adaptif terhadap perkembangan wilayah.

3. Tahap III (2027) : Percepatan Implementasi Fondasi Transformasi

Tahun ketiga menjadi momentum penting untuk mempercepat implementasi berbagai program transformasi yang telah dirancang. Pemerintah akan mendorong digitalisasi layanan publik, pelaksanaan program unggulan bidang pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan sektor ekonomi kreatif dan hilirisasi komoditas lokal. Konektivitas wilayah akan dipercepat melalui pembangunan infrastruktur strategis, diiringi dengan penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sosial dan budaya.

4. Tahap IV (2028) : Pemantapan Fondasi Transformasi Berkelanjutan

Tahun keempat diarahkan pada pemantapan hasil implentasi transformasi yang telah berjalan, agar pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Fokus utama diarahkan pada peningkatan akuntabilitas





birokrasi, penguatan ekosistem SDM produktif, dan pembangunan ekonomi hijau. Infrastruktur akan diarahkan agar tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim, serta mendukung integrasi sosial dan budaya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

5. Tahap V (2029) : Konsolidasi Capaian Fondasi Transformasi

Tahun kelima dalah fase konsolidasi capaian, untuk memastikan keberlanjutan dan kesinambungan arah transformasi pembangunan. Pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap capaian kinerja daerah, memperkuat kelembagaan dan sinergi antar sektor, serta menyempurnakan kebijakan yang mendukung keberlanjutan pembangunan. Keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kualitas SDM, dan pelestarian lingkungan menjadi kunci utama tahun ini.

6. Tahap VI (2030) : Integrasi dan Penyiapan Akselerasi Pembangunan

Tahun terakhir RPJMD merupakan masa untuk mengintegrasikan seluruh hasil pembangunan dan mempersiapkan akselerasi menuju visi jangka panjang daerah. Pemerintah Kabupaten Sukamara akan mengintegrasikan sistem pemerintahan berbasis data dan teknologi (*Smart Governance*), mengonsolidasikan pelayanan publik berkualitas, dan memperkuat keunggulan kompetitif daerah. Pembangunan berwawasan lingkungan, sosial, dan budaya akan diarahkan pada transformasi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan menuju masa depan Sukamara yang lebih maju.

Tabel 3. 12 Arah Kebijakan Jangka Menengah Kabupaten Sukamara

Visi (1)	Misi (2)	Arah Kebijakan (3)
Sukamara menjadi Rumah Bersama yang Maju Sejahtera, Berkeadilan dan Berdaya Saing	Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Adaptif	1. peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik melalui digitalisasi dan kolaborasi 2. Pewujudan proses pembangunan yang transparan, akuntabel dan partisipatif
	Misi 2 : Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Berkarakter Baik, dan Produktif	1. Peningkatan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang berkualitas 2. Peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga kesehatan dan pendidik
	Misi 3 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Masyarakat yang Inklusif dan Berkelanjutan	1. Peningkatan nilai produk unggulan pertanian melalui industrialisasi dan manajemen rantai produksi 2. Penciptaan lapangan kerja yang inklusif
	Misi 4 : Mewujudkan Pembangunan	1. Pengawasan ketat terhadap pencemaran lingkungan dan pelanggaran pemanfaatan ruang





Visi (1)	Misi (2)	Arah Kebijakan (3)
	Infrastruktur yang Tangguh dan Berwawasan Lingkungan	2. Penyediaan sarana dan prasarana mitigasi bencana struktural dan non-struktural
	Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya dan Keagamaan	1. Pemanfaatan teknologi digital dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan pelestarian nilai dan produk budaya lokal 2. Pengendalian harga dan rantai pasok pangan 3. Pembangunan ruang publik yang inklusif

Sumber: Hasil Analisis, 2025

3.2.3. Program-Program Prioritas Daerah

Untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukamara, selain menetapkan arah kebijakan, diperlukan penyusunan program prioritas daerah. Program prioritas merujuk pada program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD. Berikut ini program prioritas dalam lima tahun ke depan.





Tabel 3. 13 Misi, Tujuan, Sasaran, Program Prioritas, Outcome, Indikator, Perangkat Daerah dan Bidang Urusan Kabupaten Sukamara 2025-2029

VISI/MISI	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	INDIKATOR	BIDANG URUSAN
VISI : SUKAMARA MENJADI RUMAH BERSAMA YANG MAJU, SEJAHTERA, BERKEADILAN DAN BERDAYA SAING					
MISI 1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Adaptif	T1 Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Adaptif			Indeks Reformasi Birokrasi	
	S1.1 Meningkatkan Profesionalisme dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERITAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Pelayanan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	Pendidikan
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERITAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik (Dinas Kesehatan)	Kesehatan
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERITAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik (DPUPRPRKP)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



VISI/MISI	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	INDIKATOR	BIDANG URUSAN
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERITAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik (SatpolPP dan Damkar)	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERITAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik (BPBD)	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERITAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik (Dinas Sosial dan PMD)	Sosial
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERITAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	Tenaga Kerja
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERITAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik (DP3AP2KB)	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



VISI/MISI	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	INDIKATOR	BIDANG URUSAN
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERITAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik (Dinas Lingkungan Hidup)	Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERITAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERITAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik (Dinas Perhubungan)	Perhubungan
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERITAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik (Dinas Komunikasi Informatika dan Persandan)	Informasi dan Komunikasi
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERITAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik (Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan)	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERITAHAN		Indeks Kematangan Organisasi (Sekretariat Daerah)	Sekretariat Daerah





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



VISI/MISI	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	INDIKATOR	BIDANG URUSAN
		DAERAH KABUPATEN/KOTA			
				Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik (Sekretariat Daerah)	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik)	Kesatuan Bangsa dan Politik
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik (Kecamatan)	Kecamatan
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik (Inspektorat)	Inspektorat
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik (BKPSDM)	Kepegawaian





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



VISI/MISI	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	INDIKATOR	BIDANG URUSAN
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik (BPKAD)	Keuangan
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik (BAPPERIDA)	Perencanaan
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik (Sekretariat DPRD)	Sekretariat DPRD
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik (Dinas Perikanan)	Kelautan dan Perikanan
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik (Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian)	Pangan





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



VISI/MISI	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	INDIKATOR	BIDANG URUSAN
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan)	Perpustakaan
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik (Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata)	Kepemudaan dan Olahraga
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik (DPMPTSP)	Penanaman Modal
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan KTP Elektronik	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Persentase Identitas Kependudukan Digital (IKD) dari jumlah penduduk yang ber-KTP Elektronik	
				Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



VISI/MISI	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	INDIKATOR	BIDANG URUSAN
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Cakupan Akta Kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Persentase Cakupan Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	
				Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian pada semua individu yang Perceraianya dilaporkan	
				Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pada anak usia 0-4 tahun	
				Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



VISI/MISI	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	INDIKATOR	BIDANG URUSAN
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan pengelolaan profil kependudukan	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)	Informasi dan Komunikasi
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Informasi dan Komunikasi
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Statistik
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Meningkatnya keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat keamanan informasi Pemerintah Daerah	Persandian
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Inspektorat Daerah





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



VISI/MISI	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	INDIKATOR	BIDANG URUSAN
			anggaran ataupun proses dan kewenangan		
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Cakupan perangkat daerah yang melakukan pengendalian intern	Inspektorat Daerah
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan formasi	Kepegawaian
			Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	
			Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	
			Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial, fungsional dan teknis	Pendidikan dan Pelatihan
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yg Di alokasikan melalui TKD	Keuangan





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



VISI/MISI	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	INDIKATOR	BIDANG URUSAN
				Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	
			Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	
				Persentase Penurunan SILPA	
			Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan Keuangan tepat Waktu	
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Keuangan
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Keuangan
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	Keuangan
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	Keuangan





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



VISI/MISI	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	INDIKATOR	BIDANG URUSAN
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Perencanaan
				Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Perencanaan
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Perencanaan
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	Perencanaan





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



VISI/MISI	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	INDIKATOR	BIDANG URUSAN
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan
		PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	Penelitian dan Pengembangan
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Sekretariat DPRD
				Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	
			Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Sekretariat DPRD
	S1.2 Meningkatkan Pelayanan Publik yang Responsif dan Terintegrasi			Indeks Pelayanan Publik	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	Terlaksananya penyelenggaraan urusan	Cakupan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik	Kecamatan





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



VISI/MISI	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	INDIKATOR	BIDANG URUSAN
		DAN PELAYANAN PUBLIK	pemerintahan dan pelayanan publik		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya desa mandiri di wilayah Kecamatan	Persentase Desa Mandiri di wilayah Kecamatan	Kecamatan
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Menurunnya gangguan Kamtibmas	Persentase penurunan gangguan Kamtibmas	Kecamatan
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kecamatan
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Persentase cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Kecamatan
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Efektivitas Kerjasama Daerah	Sekretariat Daerah
				Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	
				Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



VISI/MISI	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	INDIKATOR	BIDANG URUSAN
				Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
				Tingkat Kematangan UKPBJ	
				Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip	Kearsipan
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Kearsipan
		PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Kearsipan
	S1.3 Meningkatkan Kemandirian Desa			Persentase Desa Mandiri	
		PROGRAM PENATAAN DESA	Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase fasilitas penataan desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



VISI/MISI	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	INDIKATOR	BIDANG URUSAN
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase aparatur desa dan anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya	Pemberdayaan Masyarakat Desa
				Persentase fasilitas tata kelola desa	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	Persentase fasilitas pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa (LKD)	Pemberdayaan Masyarakat Desa
				Persentase fasilitas pemberdayaan lembaga adat desa dan lembaga masyarakat hukum adat	
MISI 2 Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Berkarakter Baik, dan Produktif	T2 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas			Indeks Pembangunan Manusia	





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



VISI/MISI	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	INDIKATOR	BIDANG URUSAN
	S2.1 Meningkatkan Pemerataan Kualitas Pendidikan dan Budaya Literasi Masyarakat			Indeks Pendidikan	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah	Angka Partisipasi Sekolah 5-6	Pendidikan
				Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15	
				Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Kesetaraan	
				Angka Partisipasi Murni Jenjang SD/MI/Paket A	
				Angka Partisipasi Murni Jenjang SMP/MTs/Paket B	
				Angka Putus Sekolah Jenjang SD/MI	
				Angka Putus Sekolah Jenjang SMP/MTs	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	Pendidikan





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



VISI/MISI	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	INDIKATOR	BIDANG URUSAN
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidik	Indeks Pemerataan (Distribusi) Guru Jenjang PAUD	Pendidikan
				Indeks Pemerataan (Distribusi) Guru Jenjang SD/MI	
				Indeks Pemerataan (Distribusi) Guru SMP/MTs	
				Presentase Guru PAUD yang bersertifikat pendidik	
				Presentase Guru SD/MI yang bersertifikat pendidik	
				Presentase Guru SMP/MTs yang bersertifikat pendidik	
				Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi S1 / D4	
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Perpustakaan
		PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	Perpustakaan





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



VISI/MISI	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	INDIKATOR	BIDANG URUSAN
	S2.2 Meningkatkan Derajat Kesejatan Masyarakat			Usia Harapan Hidup	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	Kesehatan
				Prevelensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek)	
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	Kesehatan
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Kesehatan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Kesehatan





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



VISI/MISI	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	INDIKATOR	BIDANG URUSAN
MISI 3 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Masyarakat yang Inklusif dan Berkelanjutan	T3 Peningkatan Pertumbuhan Perekonomian Daerah			Laju Pertumbuhan Ekonomi	
				Tingkat Inflasi	
	S3.1 Meningkatkan Produktivitas Perekonomian Daerah			PDRB Per Kapita	
		PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Meningkatnya pelaksanaan transmigrasi	Persentase program transmigrasi yang dilaksanakan	Transmigrasi
		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi	Persentase luas kawasan transmigrasi yang berkembang	Transmigrasi
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigrasi dalam pengembangan kawasan transmigrasi	Persentase transmigrasi yang dibina dan diberdayakan	Transmigrasi





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



VISI/MISI	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	INDIKATOR	BIDANG URUSAN
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Kelautan dan Perikanan
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Kelautan dan Perikanan
				Peningkatan produksi benih	
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Persentase jumlah pelaku usaha perikanan yang patuh terhadap peraturan	Kelautan dan Perikanan
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan	Kelautan dan Perikanan
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Pariwisata
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	Pariwisata
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	Pariwisata





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



VISI/MISI	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	INDIKATOR	BIDANG URUSAN
	S3.2 Meningkatkan Daya Saing Ekonomi			Indeks Daya Saing Daerah	
				Koefisien Variansi Harga Antarwilayah Tingkat Kabupaten (antar Kecamatan)	
		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Pertumbuhan volume usaha koperasi simpan pinjam	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase koperasi aktif	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



VISI/MISI	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	INDIKATOR	BIDANG URUSAN
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Pertumbuhan wirausaha	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalinkan Kemitraan dan Ekspor	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
				Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas pelatihan	
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi	Perdagangan
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	Perdagangan
		PROGRAM STABILITAS HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Perdagangan
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Persentase Pelaku Usaha yang	Perdagangan





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



VISI/MISI	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	INDIKATOR	BIDANG URUSAN
				Berorientasi Ekspor yang difasilitasi	
		PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase alat-alatukur, takar, timbangan dan perlengkapan (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam setahun berjalan	Perdagangan
				Persentase penanganan pengaduan konsumen	
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi/dilaksanakan	Perdagangan
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	Perindustrian
				Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten	
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase verifikasi pemenuhan persyaratan izin usaha industri	Perindustrian
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini	Perindustrian





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



VISI/MISI	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	INDIKATOR	BIDANG URUSAN
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Ketersediaan Sarana Pertanian yang Berkualitas	Pertanian
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian Yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Pertanian
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan Yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	Pertanian
				Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	Pertanian
				Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	Pertanian





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



VISI/MISI	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	INDIKATOR	BIDANG URUSAN
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian Yang Ditingkatkan	Pertanian
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	Kepemudaan dan Olahraga
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Penanaman Modal
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Penanaman Modal
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	Penanaman Modal
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Penanaman Modal
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi penanaman modal	Penanaman Modal





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



VISI/MISI	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	INDIKATOR	BIDANG URUSAN
	T4 Inklusifitas Ekonomi			Rasio Gini	
				Tingkat Kemiskinan	
	S4.1 Pemerataan Akses Masyarakat terhadap Lapangan Pekerjaan			Tingkat Pengangguran Terbuka	
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Terkelolanya informasi tenaga kerja	Tingkat cakupan perencanaan ketenagakerjaan	Tenaga Kerja
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	Tenaga Kerja
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	Tenaga Kerja
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Tenaga Kerja
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial	Sosial





VISI/MISI	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	INDIKATOR	BIDANG URUSAN
				Persentase pekerja sosial/ tenaga kesejahteraan sosial dan/ atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana Kabupaten pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	
				Persentase pekerja sosial/tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti rehabilitasi sosial	
				Persentase pekerja sosial/ tenaga kesejahteraan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti rehabilitasi sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	
				Persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



VISI/MISI	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	INDIKATOR	BIDANG URUSAN
MISI 4 Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Tangguh dan Berwawasan Lingkungan	T5 Peningkatan Pembangunan Infrastruktur			Indeks Infrastruktur	
	S5.1 Meningkatkan Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur Wilayah serta Kualitas Infrastruktur Dasar Permukiman			Indeks Kualitas Pelayanan Infrastruktur	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Irigasi dalam Kondisi Baik	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



VISI/MISI	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	INDIKATOR	BIDANG URUSAN
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase Prasarana Persampahan yang Terbangun dan Tingkatkan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM PENATAAN GEDUNG	Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase Kondisi Mantap Jalan Kabupaten/Kota	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI	Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi analis/teknis operator terlatih dan tersertifikat	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



VISI/MISI	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	INDIKATOR	BIDANG URUSAN
		PROGRAM PENYELENGGARAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni dan warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas oenyediaan rumah layak huni	Perumahan dan Kawasan Permukiman
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani	Perumahan dan Kawasan Permukiman
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Menurunnya jumlah RTLH diluar kawasan permukiman kumuh	Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni)	Perumahan dan Kawasan Permukiman
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	Perumahan dan Kawasan Permukiman





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



VISI/MISI	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	INDIKATOR	BIDANG URUSAN
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan Objek Reforma Agraria (TORA)	Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertipikat yang dilakukan mediasi	Pertanahan
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan untuk pembangunan	Pertanahan
		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Meningkatnya akses masyarakat terhadap tanah	Persentase luas lahan bersertifikat	Pertanahan
		PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Meningkatnya tata kelola tanah ulayat	Persentase tanag ulayat yang ditetapkan	Pertanahan
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase luas lokasi konsolidasi tanah	Pertanahan
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas Darat	Perhubungan





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



VISI/MISI	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	INDIKATOR	BIDANG URUSAN
				Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	
		PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Konektivitas sungai danau dan penyebrangan	Perhubungan
	T6 Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	
				Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
	S6.1 Menurunkan Tingkat Pencemaran			Tingkat Pencemaran Lingkungan	
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Hasil pengukuran indeks kualitas air	Lingkungan Hidup
				Hasil pengukuran indeks kualitas udara	





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



VISI/MISI	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	INDIKATOR	BIDANG URUSAN
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH	Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	Lingkungan Hidup
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Meningkatnya kepatuhannya dan/ atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota	Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lingkungan Hidup





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



VISI/MISI	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	INDIKATOR	BIDANG URUSAN
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Lingkungan Hidup
	S6.2 Menurunkan Risiko Bencana			Indeks Risiko Bencana	
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



VISI/MISI	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	INDIKATOR	BIDANG URUSAN
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase penanganan tanggap bencana darurat	
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase penanganan pasca bencana	
MISI 5 Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial, Budaya, dan Keagamaan	T7 Peningkatan Ketahanan Sosial Daerah			Indeks Kesejahteraan Sosial	
	S7.1 Meningkatkan Harmonisasi dan Partisipasi Masyarakat			Indeks Kerukunan Umat Beragama	
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
			Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



VISI/MISI	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	INDIKATOR	BIDANG URUSAN
			Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya	
			Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase cakupan perlindungan masyarakat	
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran	Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
			Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	
		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan dalam dan luar negeri yang mendapatkan pelayanan pemulangan	Sosial
				Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani	
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Sosial





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



VISI/MISI	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	INDIKATOR	BIDANG URUSAN
				Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	
				Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	
				Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase penerimaan manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Sosial
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Sosial
				Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial	





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



VISI/MISI	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	INDIKATOR	BIDANG URUSAN
				Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya	
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAN PAHLAWAN	Meningkatnya tata kelola taman makan pahlawan	Persentase taman makam pahlawan yang mendapatkan pengelolaan	Sosial
		PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase anggaran responsif gender (ARG)	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Perempuan	
		PROGRAM PERLINDNGAN PEREMPUAN	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Meningkatnya kualitas dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



VISI/MISI	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	INDIKATOR	BIDANG URUSAN
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender Dan Anak Dalam Perencanaan, Evaluasi dan/ atau Penyusunan Kebijakan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)	





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



VISI/MISI	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	INDIKATOR	BIDANG URUSAN
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Needs)	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		PROGRAM PENGUATAN PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kesatuan Bangsa dan Politik
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN	Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	Kesatuan Bangsa dan Politik





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



VISI/MISI	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	INDIKATOR	BIDANG URUSAN
		ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Kesatuan Bangsa dan Politik
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya kemasyarakatan	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	Kesatuan Bangsa dan Politik
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITAS PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Kesatuan Bangsa dan Politik
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	Kepemudaan dan Olahraga





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



VISI/MISI	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	INDIKATOR	BIDANG URUSAN
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	Kepemudaan dan Olahraga
	S7.2 Meningkatkan Ketahanan Pangan			Indeks Ketahanan Pangan	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Meningkatnya pengelolaansumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase cadangan pangan	Pangan
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Pangan
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Pangan
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	Pangan
	S7.3 Meningkatkan Pelestarian Budaya Lokal			Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas yang Terlibat sebagai	





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



VISI/MISI	TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	INDIKATOR	BIDANG URUSAN
				Pelaku/Pendukung Pertunjukan Seni	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Kebudayaan
		PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian TRADISIONAL	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Pengembangan Kesenian Tradisional	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	Kebudayaan
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Meningkatnya Warisan Budaya yang Dilestarikan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	Kebudayaan
				Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	

Sumber: Hasil Analisis, 2025





Di samping itu, pada periode RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029, terdapat 9 program unggulan yang disebut dengan “Nawa Bhakti Satya”. Program ini disusun guna menyelesaikan berbagai permasalahan dan merespon berbagai isu strategis yang ada di Kabupaten Sukamara. Berikut kesembilan program unggulan tersebut.

1. Sukamara Sejahtera

Program ini bertujuan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam menghadapi dampak sosial dan ekonomi pasca pandemi COVID-19 serta inflasi global. Pemerintah akan mengoordinasikan secara efektif berbagai skema bantuan sosial, baik dari APBN maupun APBD, seperti bantuan pangan, diskon listrik, BLT BBM, PKH, BPNT, dan Kartu Indonesia Sehat. Selain itu, program-program seperti PKG Lansia dan Makanan Bergizi Gratis (MBG), akan dipertahankan dan ditingkatkan untuk membangun kelompok rentan serta menurunkan kemiskinan secara berkelanjutan.

2. Sukamara Kerja

Dalam menghadapi perlambatan ekonomi yang terjadi secara global dan nasional, Kabupaten Sukamara berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan penurunan tingkat pengangguran. Program unggulan seperti Millenial Job Center (MJC) akan mendukung transformasi digital bagi UMKM dan memberdayakan talenta muda Sukamara. Selain itu, program Sukamara Mencari Entrepreneur Muda akan memberikan bantuan modal serta bimbingan bisnis kepada wirausaha muda agar lebih kompetitif.

3. Sukamara Cerdas dan Sehat

Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas utama dengan menghadirkan layanan pendidikan dan kesehatan yang modern serta berbasis teknologi. Dalam bidang pendidikan, pemerintah akan menyediakan sekolah unggulan, program Satu Rumah Satu Sarjana, dan seragam gratis bagi siswa baru dari jenjang SD hingga SMA. Di bidang kesehatan, pemerintah akan memperkuat layanan medis dengan menghadirkan dokter spesialis di puskesmas, memberikan layanan rawat inap gratis di RSUD Sukamara bagi seluruh warga tanpa diskriminasi ekonomi, serta menyediakan fasilitas kesehatan yang modern dan memadai.





4. Sukamara Akses

Program ini berfokus pada pengembangan infrastruktur yang meningkatkan konektivitas antarwilayah, seperti jalan, transportasi umum, energi, telekomunikasi, dan lingkungan permukiman. Dengan infrastruktur yang merata, diharapkan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan lebih lancar, mengurangi ketimpangan wilayah, serta menciptakan potensi ekonomi baru.

5. Sukamara Berkah

Pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga memperkuat nilai-nilai spiritual dan religius masyarakat. Pemerintah akan mendorong kehidupan beragama yang harmonis dengan mendukung pemuka agama, rumah ibadah, serta pendidikan keagamaan. Tujuannya adalah membangun masyarakat yang berakhlak, toleran, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.

6. Sukamara Agro

Program ini menegaskan pentingnya sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan sebagai pilar utama ketahanan pangan dan ekonomi daerah. Pemerintah akan mendukung petani dan nelayan dengan kebijakan yang berpihak kepada mereka, termasuk melalui program cetak sawah baru sesuai dengan kebijakan nasional serta pengembangan perikanan berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, sektor pertanian dan perikanan diharapkan tidak hanya menjadi sumber pendapatan, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan daerah.

7. Sukamara Berdaya

Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan inklusif yang memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang ditinggalkan (*No one left behind*). Program ini memberikan perhatian khusus kepada penyandang disabilitas, lansia, perempuan, dan masyarakat pedesaan agar memiliki akses yang setara terhadap peluang ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

8. Sukamara Amanah

Program ini menekankan pentingnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Pemerintah daerah berkomitmen untuk bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta meningkatkan kualitas layanan publik yang cepat, profesional, dan akuntabel.





9. Sukamara Harmoni

Melalui program ini, pemerintah akan menjaga keseimbangan antara pembangunan, pelestarian lingkungan, dan budaya lokal. Upaya ini dilakukan dengan mendorong kepedulian terhadap lingkungan, pengembangan sektor olahraga, serta pelestarian kebudayaan daerah. Selain itu, pemerintah juga akan memperkuat peran pemuda dalam pembangunan dan mempererat hubungan sosial antar warga guna menciptakan masyarakat yang harmonis dan saling mendukung.

Dengan implementasi sembilan program “Nawa Bhakti Satya”, Kabupaten Sukamara diharapkan dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat.





BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. Program Perangkat Daerah

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan jangka menengah daerah serta mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan, maka disusun program-program pembangunan perangkat daerah yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan, yang berlandaskan pada janji politik Bupati dan Wakil Bupati Sukamara. Dalam merencanakan alokasi pendanaan pembangunan, penting untuk mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan memastikan bahwa alokasi tersebut sejalan dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip penganggaran harus didasarkan pada transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

Pendekatan yang digunakan berfokus pada *money follows program* dan *money follows function*, dimana anggaran difokuskan pada program atau kegiatan yang langsung terkait dengan prioritas pembangunan daerah. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan sesuai dengan tugas dan fungsi utama perangkat daerah.

Perumusan program pembangunan yang mencakup kerangka pendanaan dilakukan untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah serta memenuhi layanan perangkat daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan daerah. Program pembangunan yang sudah mencantumkan kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun Renstra PD, termasuk rincinya ke dalam kegiatan atau sub-kegiatan.

Program-program perangkat daerah yang akan dilaksanakan selama periode 2025-2029 beserta kerangka pendanaannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.





Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara

BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
URUSAN PEMERINTAH WAJIB PELAYANAN DASAR												
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN			165,166,210,603		171.250.740.603		171.250.740.603		171.250.740.603		171.250.740.603	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	95%	101,857,16,963	100%	101,584,493,030	100%	101,584,493,030	100%	101,584,493,030	100%	101,584,493,030	100%
Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah 5-6	84.60%	8,630,364,280	100.00 %	8,630,364,280	100.00%	8,630,364,280	100.00%	8,630,364,280	100.00%	8,630,364,280	100.00%
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15	96.72	11,300,957,960	100.00 %	17,260,728,560	100.00%	17,260,728,560	100.00%	17,260,728,560	100.00%	17,260,728,560	100.00%
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Kesetaraan	-	8,630,364,280	20,22%	8,630,364,280	23,61%	8,630,364,280	27,01%	8,630,364,280	30,41%	8,630,364,280	33,80%
	Angka Partisipasi Murni Jenjang SD/MI/Paket A	-	8,630,364,280	100.00 %	8,630,364,280	100.00%	8,630,364,280	100.00%	8,630,364,280	100.00%	8,630,364,280	100.00%
	Angka Partisipasi Murni Jenjang SMP/MTs/Paket B	-	8,630,364,280	100.00 %	8,630,364,280	100.00%	8,630,364,280	100.00%	8,630,364,280	100.00%	8,630,364,280	100.00%
	Angka Putus Sekolah Jenjang SD/MI	0.14%	8,630,364,280	0	8,630,364,280	0	8,630,364,280	0	8,630,364,280	0	8,630,364,280	0
	Angka Putus Sekolah Jenjang SMP/MTs	0.12%	8,630,364,280	0	8,630,364,280	0	8,630,364,280	0	8,630,364,280	0	8,630,364,280	0
Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Indeks Pemerataan (Distribusi) Guru Jenjang PAUD	0.42%	22,871,428	0.44%	33,333,333	0.45%	33,333,333	0.46%	33,333,333	0.47%	33,333,333	0.48%
	Indeks Pemerataan (Distribusi) Guru Jenjang SD/MI	0.46%	22,871,428	0.48%	33,333,333	0.49%	33,333,333	0.50%	33,333,333	0.51%	33,333,333	0.52%





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Indeks Pemerataan (Distribusi) Guru SMP/MTs	0.43%	22,871,428	0.45%	33,333,333	0.46%	33,333,333	0.47%	33,333,333	0.48%	33,333,333	0.49%
	Presentase Guru PAUD yang bersertifikat pendidik	9.36%	22,871,428	11.00%	33,333,333	12.00%	33,333,333	13.00%	33,333,333	14.00%	33,333,333	14.00%
	Presentase Guru SD/MI yang bersertifikat pendidik	74.00%	22,871,428	100.00 %	33,333,333	100.00%	33,333,333	100.00%	33,333,333	100.00%	33,333,333	100.00%
	Presentase Guru SMP/MTs yang bersertifikat pendidik	70.00%	22,871,428	100.00 %	33,333,334	100.00%	33,333,334	100.00%	33,333,334	100.00%	33,333,334	100.00%
	Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi S1 / D4	59.20%	22,871,432	55,76%	33,333,334	56,51%	33,333,334	57,26%	33,333,334	58,01%	33,333,334	58,76%
Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	100.00%	65,850,000	100.00 %	390,000,000	100.00%	390,000,000	100.00%	390,000,000	100.00%	390,000,000	100.00%
URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN			143.829,498,635		149.229.639.796		158.231.571.926		166.250.301.911		174.969.702.435	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	100,00%	40,923,796,175	100,00 %	43,917,533,346	100,00%	44,795,884,004	100,00%	45,691,801,684	100,00%	46.605637.719	100,00%
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	84.53%	49,454,970,642	100,00 %	49,972,303,908	100,00%	52,949,812,905	100,00%	54,160,662,905	100,00%	55.937.862905	100.00%
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	90,4 / 100.0000 kelahiran hidup		0		0		0		0		0
	Prevalensi Stunting (pendek dan Sangat Pendek)	20%	50.105.010.913	17.00%	46.939.217.966	16.30%	51.743.139.762	15.60%	56.862.453.739	14.90%	62.484.699.133	14.20%





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Presentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang kesehatan	45%	2.653,47 7,485	50%	5,413,72 1,540	55%	5,643,09 3,694	60%	6,315,40 3,800	65%	6,592,9 43,370	70%
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Presentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	70%	426,343 ,500	70%	2,323,8 47,232	80%	2,370,32 4,177	90%	2,417,73 0,660	94%	2,466,0 85,273	96%
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Presentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	60%	265,899 ,920	60%	663,015, 804	65%	729,317, 384	70%	802,249 ,123	75%	882,474 ,035	80%
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEKE RJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			96,090, 792,92 9		137,385 ,694,32 3		144,563, 525,323		146,821, 494,32 3		150,085 ,694,32 3	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	100,00%	16,854,0 75,559	100,00 %	21,510,6 94,323	100,00%	19,988,5 25,323	100,00%	19,246,4 94,323	100,00%	22,510,6 94,323	100,00%
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Irigasi dalam kondisi baik	67.06%	10,839,5 66,933	67.41%	12,000, 000,00 0	67.58%	12,500,0 00,000	67.75%	12,500,0 00,000	67.93%	12,500,0 00,000	68.10%
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	21.82%	14,975,0 00,000	26.22%	25,000, 000,00 0	26.87%	26,100,0 00,000	27.12%	27,300, 000,00 0	27.37%	27,300, 000,00 0	28.00%
Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Prasarana Persampahan yang terbangun dan ditingkatkan	TAD	1,150,00 0,000	100.00 %	1,500,0 00,000	100.00%	2,000,0 00,000	100.00%	2,000,0 00,000	100.00%	2,000,0 00,000	100.00%
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian Dengan	18.82%	1,330,00 0,000	19.07%	5,300,0 00,000	19.20%	5,500,0 00,000	19.32%	5,600,0 00,000	19.45%	5,600,0 00,000	19.58%





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)											
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik	92.91%	8,412,50 0,000	93.43%	8,500,0 00,000	93.55%	8,700,0 00,000	93.60%	9,000,0 00,000	93.61%	9,000,0 00,000	93.62%
Program Penataan Bangunan Gedung	Presentase Bangunan Gedung dalam kondisi Baik	6.00%	244,00 0,000	6.38%	350,00 0,000	6.57%	400,000 ,000	6.76%	450,00 0,000	6.95%	450,00 0,000	7.14%
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	8.00%	9,235,45 9,437	13.64%	15,000, 000,00 0	16.00%	16,500,0 00,000	17.86%	18,000, 000,00 0	18.18%	18,000, 000,00 0	20.51%
Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Kondisi Mantap Jalan Kabupaten/Kota	37.99%	29,795,2 00,000	39.49%	45,000, 000,00 0	40.60%	50,000, 000,000	41.70%	50,000, 000,00 0	42.80%	50,000, 000,00 0	43.60%
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Analis/Teknisi Operator Terlatih dan Tersertifikasi	25 Orang	985,00 0,000	0 Orang	805,00 0,000	75 Orang	805,000 ,000	75 Orang	805,00 0,000	75 Orang	805,00 0,000	75 Orang
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang	50%	2,270,0 00,000	62.00%	2,420,0 00,000	65.00%	2,070,0 00,000	67.00%	1,920,00 0,000	70.00%	1,920,00 0,000	72.00%
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			10,610, 000,00 0		16,744, 840,00 0		17,417,3 40,000		18,089, 840,00 0		18,089, 840,00 0	
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase satuan Perumahan yang sudah dilengkapi PSU	21.50%	10,000, 000,00 0	31.58%	14,169,8 00,000	36.84%	14,669,8 00,000	42.11%	15,169,8 00,000	47.37%	15,169,8 00,000	52.63%
Program Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten/Kota ditangani	TAD	0	0	751,280, 000	0,51	751,280, 000	0,70	751,280, 000	0,70	751,280, 000	0,70





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Program Pengembangan Perumahan	Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni dan Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni	100.00%	110,000,000	100.00 %	1,021,140,000	100.00%	1,021,140,000	100.00%	1,021,140,000	100.00%	1,021,140,000	100.00%
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni)	1.00%	500,000,000	1.46%	802,620,000	1.98%	975,120,000	2.52%	1,147,620,000	3.10%	1,147,620,000	3.20%
URUSAN PEMERINTAH BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			20,792,469,003		32.498.259.526		29.537.135.233		27.921.660.449		27.776.848.002	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	100%	10,844,280,450	100,00 %	16,298,254,667	100,00%	14,788,254,667	100,00%	14,728,254,667	100,00%	14,283,254,667	100,00%
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	100,00%	3,633,128,038	100,00 %	7,549,088,605	100,00%	5,759,434,312	100,00%	5,256,459,528	100,00%	5,556,447,081	100,00%
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	100,00%	97.820.000	100,00 %	133.715.000	100,00%	133.715.000	100,00%	133.715.000	100,00%	133.715.000	100,00%
	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	100,00%	252.540.000	100,00 %	1.595.457.254	100,00%	1.595.457.254	100,00%	1.595.457.254	100,00%	1.595.457.254	100,00%
	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	100,00%	0	0,00%	53.000.000	100,00%	53.000.000	100,00%	53.000.000	100,00%	53.000.000	100,00%
	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	100,00%	126.825.000	100,00 %	40.000.000	100,00%	80.000.000	100,00%	40.000.000	100,00%	40.000.000	100,00%





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	50,00%	43.408.000	100,00 %	62.800.000	100,00%	62.800.000	100,00%	62.800.000	100,00%	62.800.000	100,00%
	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100,00%	2.414.467.514	100,00 %	2.536.400.000	100,00%	3.036.400.000	100,00%	1.936.400.000	100,00%	1.936.400.000	100,00%
Program Penanggulangan Bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	99,80%	2.129.315.721	100,00 %	2.980.000.000	100,00%	2.755.000.000	100,00%	2.835.000.000	100,00%	2.835.000.000	100,00%
	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	80,00%	696.531.780	100,00 %	627.044.000	100,00%	645.574.000	100,00%	645.574.000	100,00%	645.574.000	100,00%
	Persentase Penanganan Pasca Bencana	70,00%	554.152.500	100,00 %	622.500.000	100,00%	627.500.000	100,00%	635.000.000	100,00%	635.000.000	100,00%
URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL			22.549,063,670		23.360.287.004		22.948.395.673		24.346.315.074		25.388.741.415	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	100,00%	10,427,563,670	100,00 %	14,592,293,670	100,00%	15,101,293,670	100,00%	15,231,293,670	100,00%	15,371,611,670	100,00%
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	88,97%	9.291.500.000	100,00 %	3.610.290.582	100,00%	4.310.458.701	100,00%	5.148.471.441	100,00%	5.663.318.586	100,00%
	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100,00%		100,00 %		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100,00%		100,00 %		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
	Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100,00%		100,00 %		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	0		100,00 %		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan	0	25,000, 000	1	30,000, 000	2	30,000, 000	2	45,000, 000	3	45,000, 000	3
	Persentase warga migran korban tindak kekerasan yang tertangani	100.00%		100.00 %	30,000, 000	100.00%	30,000, 000	100.00%	45,000, 000	100.00%	45,000, 000	100.00%
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	68,18%	590.00 0.000	53,50	3.370.0 00.000, 00	53,55	1.571.80 0.000,0 0	53,56	1.768.73 8.000	53,58	1.945.21 8.000	53,60
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti Rehabilitasi Sosial	0	40.000. 000	100,00 %	139.200. 000	100,00%	146.800. 000	100,00%	153.600. 000	100,00%	168.960. 000	100,00%
	Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/ AIDS dan NAPZA	0	40.000. 000	100,00 %	139.200. 000	100,00%	146.800. 000	100,00%	153.600. 000	100,00%	168.960. 000	100,00%
	Persentase Pekerja Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/ atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Kabupaten pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar	100,00%	40.000. 000	100,00 %	139.200. 000	100,00%	146.800. 000	100,00%	153.600. 000	100,00%	168.960. 000	100,00%
	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	0	40.000. 000	100,00 %	139.200. 000	100,00%	146.800. 000	100,00%	153.600. 000	100,00%	168.960. 000	100,00%





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	100,00%	40.000.000	100,00 %	139.200.000	100,00%	146.800.000	100,00%	153.600.000	100,00%	168.960.000	100,00%
Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	100,00%	1.815.000.000	100,00 %	782.702.752	100,00%	916.843.302	100,00%	1.080.811.963	100,00%	1.188.893.159	100,00%
	Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkatkan Kesiapsiagaannya	0		100,00 %		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	100,00%		100,00 %		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang mendapatkan pengelolaan	100,00%	200.000.000	100,00 %	249000000	100,00%	254000000	100,00%	259.000.000	100,00%	284.900.000	100,00%
URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
URUSAN PEMERINTAH BIDANG TENAGA KERJA			9,505,999,000		11,171,935,969		12,317,350,969		13,084,350,969		13,728,550,969	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	100,00%	7,227,789,265	100,00 %	8,121,450,000	100,00%	9,209,865,000	100,00%	9,944,865,000	100,00%	10,557,065,000	100,00%
Program Perencanaan Tenaga Kerja	Tingkat cakupan perencanaan ketenagakerjaan	45.00%	0	0	78,833,610	55%	78,833,610	60%	78,833,610	65%	79,833,610	70%
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja di sektor prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya	25.00%	627,289,040	30%	500,000,000	33%	500,000,000	35%	500,000,000	38%	500,000,000	39%





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan di Dalam Negeri	62%	548,683,695	58.00%	1,436,652,359	60.00%	1,468,652,359	63.00%	1,500,652,359	66.00%	1,531,652,359	68.00%
Program Hubungan Industrial	Jumah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	7851	1,102,237,000	8636	1,035,000,000	8836	1,060,000,000	9036	1,060,000,000	9320	1,060,000,000	9520
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			11,169,307,371		10,455,337,709		11,729,275,480		12,189,275,480		12,204,275,480	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	100,00%	9,222,932,371	100,00 %	8,113,337,709	100,00%	8,890,275,480	100,00%	8,890,275,480	100,00%	8,890,275,480	100,00%
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	1.28	470,000,000	2.2	752,000,000	2.4	794,000,000	2.5	864,000,000	3	864,000,000	3
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	52,27	130,000,000	53	125,000,000	53,25	130,000,000	53,50	140,000,000	53,75	150,000,000	54
Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan Dan TPPO Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100	155,000,000	80	400,000,000	85	600,000,000	85	800,000,000	90	800,000,000	90
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	TAD	0	0	155,000,000	25	160,000,000	30	175,000,000	30	180,000,000	35
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender Dan Anak Dalam Perencanaan, Evaluasi dan/ atau Penyusunan Kebijakan	TAD	86,475,000	2	50,000,000	2	55,000,000	2	60,000,000	2	60,000,000	2





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	61.5	894,90 0,000	62.5	360,00 0,000	63	400,000 ,000	63.25	400,00 0,000	63.5	400,00 0,000	64
Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	79	125,000, 000	80	250,00 0,000	85	350,000, 000	85	430,00 0,000	90	430,00 0,000	90
	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	TAD	85,000, 000	80	250,00 0,000	85	350,000, 000	85	430000 000	90	430,00 0,000	90
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PANGAN			16,383, 474,89 3		14,917,5 26,945		15,052,0 36,245		15,273, 085,54 5		15,483, 777,84 5	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	100.00%	15,755,6 21,441	100.00 %	14,602,5 26,945	100.00%	14,687,0 36,245	100.00%	14,893,0 85,545	100.00%	15,048,7 77,845	100.00%
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Jumlah Cadangan pangan	1.7	50,000, 000	1.7	25,000, 000	1.72	30,000, 000	1.74	35,000, 000	1.77	40,000, 000	1.78
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor pola pangan harapan	88.5	497,090 ,000	90.5	185,000 ,000	91	215,000, 000	92	215,000, 000	93	245,000 ,000	94
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	9.37	10,763,4 52	6.25	35,000, 000	6.25	40,000, 000	6.25	40,000, 000	3.12	50,000, 000	3.12
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar Yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	90	70,000, 000	90	70,000, 000	90	80,000, 000	90	90,000, 000	90	100,000 ,000	90
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERTANAHAN			1,800,0 00,000		1,800,0 00,000		1,900,0 00,000		2,000,0 00,000		2,000,0 00,000	





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Persentase Luas Lahan Bersertifikat (%)	93.20%	200,00 0,000	93.74%	300,00 0,000	93.93%	300,000 ,000	94.13%	300,00 0,000	94.32%	300,00 0,000	94.42%
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat yang dilakukan mediasi	100.00%	500,00 0,000	100.00 %	500,00 0,000	100.00%	500,000 ,000	100.00%	500,00 0,000	100.00%	500,00 0,000	100.00%
Program Penetapan Tanah Ulayat	Persentase Tanah ulayat yang ditetapkan	100.00%	400,00 0,000	100.00 %	300,00 0,000	100.00%	400,000 ,000	100.00%	500,00 0,000	100.00%	500,00 0,000	100.00%
Program Penatagunaan Tanah	Persentase luas lokasi konsolidasi tanah	93.20%	400,00 0,000	93.74%	300,00 0,000	93.93%	300,000 ,000	94.13%	300,00 0,000	94.32%	300,00 0,000	94.42%
Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan untuk pembangunan	100.00%	300,00 0,000	100.00 %	400,00 0,000	100.00%	400,000 ,000	100.00%	400,00 0,000	100.00%	400,00 0,000	100.00%
URUSAN PEMERINTAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			15,572,5 74,268		15,425, 513,469		16,527,6 44,344		17,471,6 33,174		17,733, 087,22 3	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	100.00%	11,215,60 5,799	100.00 %	11,745,7 85,944	100.00%	12,070,1 95,944	100.00%	12,960,6 31,774	100.00%	12,960,6 31,774	100.00%
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	50	498,872 ,000	60.00%	498,87 2,000	70%	1,298,87 2,000	80%	1,100,00 0,000	90%	1,100,00 0,000	100.00%
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	PM 2.5	0	153,107, 272	15	147,473, 800	15	152,113,8 00	15	305,613, 800	15	614,317, 849	15
	BOD (Biological Oxygen Demand)	9.70		3		3		3		3		3





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	COD (Chemical Oxygen Demand)	19.51		25		25		25		25		25
	DO (Dissolved Oxygen)	5.80		4		4		4		4		4
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase RTH	100%	556,035,300	100.00 %	275,279,400	100.00%	234,275,000	100.00%	288,775,000	100.00%	241,525,000	100.00%
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase limbah B3 yang terkelola	100%	20,350,000	100.00 %	20,350,000	100.00%	20,350,000	100.00%	20,350,000	100.00%	20,350,000	100.00%
Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota	100%	12,201,000	100%	8,975,000	100%	11,350,000	100%	26,000,000	100%	26,000,000	100%
Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan MHA Terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang ditingkatkan kapasitasnya	100%	24,649,865	100%	22,950,000	100%	23,000,000	100%	30,000,000	100%	30,000,000	100%
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase penyuluh lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya	100	83,438,907	100%	81,132,725	100%	85,000,000	100%	100,000,000	100%	100,000,000	100%





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Perogram Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam perlindungan pengelolaan lingkungan hidup	100	23,987,500	100.00 %	29,432,000	100.00%	37,225,000	100.00%	45,000,000	100.00%	45,000,000	100.00%
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	100	41,899,425	100.00 %	11,599,800	100.00%	11,599,800	100.00%	11,599,800	100.00%	11,599,800	100.00%
Program Pengelolaan Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	46.90	2,942,427,200	47.40	2,583,662,800	47.75	2,583,662,800	48.10	2,583,662,800	48.55	2,583,662,800	49
URUSAN PEMERINTAH BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			7,260,395,070		7,637,862,921		7,637,862,921		7,637,862,921		7,637,862,921	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	100.00%	6,918,579,570	100.00 %	7,250,862,921	100.00%	7,250,862,921	100.00%	7,250,862,921	100.00%	7,250,862,921	100.00%
Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan KTP Elektronik	97.14%	19,171,833	98%	21,666,666	99%	21,666,666	99.50%	21,666,666	99.90%	21,666,666	100%
	Persentase Identitas Kependudukan Digital (IKD) dari jumlah penduduk yang ber-KTP Elektronik	5.08%	19,171,833	20%	21,666,666	30%	21,666,666	40%	21,666,666	50%	21,666,666	60%
	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	73.18%	19,171,834	74%	21,666,668	75%	21,666,668	76%	21,666,668	77%	21,666,668	78%
Program Pencatatan Sipil	Persentase Cakupan Akta Kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	100%	19,360,000	100%	21,400,000	100%	21,400,000	100%	21,400,000	100%	21,400,000	100%
	Persentase Cakupan Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan pada	100%	19,360,000	100%	21,400,000	100%	21,400,000	100%	21,400,000	100%	21,400,000	100%





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan											
	Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian pada semua individu yang Perceraianya dilaporkan	100%	19,360,000	100.00 %	21,400,000	100.00%	21,400,000	100.00%	21,400,000	100.00%	21,400,000	100.00%
	Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pada anak usia 0-4 tahun	96.41%	19,360,000	97%	21,400,000	98%	21,400,000	99%	21,400,000	99.8%	21,400,000	99.9%
	Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	96%	19,360,000	98%	21,400,000	98.50%	21,400,000	99%	21,400,000	99.80%	21,400,000	99.90%
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan	100%	142,500,000	100%	160,000,000	100%	160,000,000	100%	160,000,000	100%	160,000,000	100%
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Cakupan pengelolaan profil kependudukan	100%	45,000,000	100%	55,000,000	100%	55,000,000	100%	55,000,000	100%	55,000,000	100%
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			2,322,000,000		4,303,000,000		5,233,000,000		4,283,000		5,311,300,000	
Program Penataan Desa	Persentase Fasilitas Penataan Desa	3,45%	130.000.000	17,24%	330.000.000	34,48%	330.000.000	51,72%	200.000.000	51,72%	220.000.000	51,72%
Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa	0,00%	0	0%	30.000.000	25,00%	30.000.000	25,00%	30.000.000	25,00%	33.000.000	25,00%
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	15,30%	1.032.000	30,60%	751.500.000	30,60%	1.216.500.000	30,60%	806.500.000	30,60%	1.187.150.000	30,60%
	Persentase Fasilitas Tata kelola Desa	100,00%		100,00 %	751.500.000	100,00%	1.216.500.000	100,00%	806.500.000	100,00%	1.187.150.000	100,00%





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	100,00%	1.160.000,00	100,00 %	1.220.000,00	100,00%	1.220.000,00	100,00%	1.220.000,00	100,00%	1.342.000,00	100,00%
	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	100,00%		100,00 %	1.220.000,00	100,00%	1.220.000,00	100,00%	1.220.000,00	100,00%	1.342.000,00	100,00%
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			8,298,093,260		1,989,622,000		2,112,937,000		2,296,964,000		2,296,964,000	
Program Pengendalian Penduduk	TFR (Angka Kelahiran Total)	2.06	1,542,173,260	2.16	276,096,000	2.15	318,031,000	2.15	352,965,000	2.15	352,965,000	2.15
	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	27.87	60,750,000	39.1	15,295,000	38.6	17,290,000	38.1	17,290,000	37.6	17,290,000	37.1
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern / Modern Contraceptive (mCPR)	81.03	2,192,170,000	64.10	702,067,000	64.80	749,577,000	65.50	862,013,000	66.20	862,013,000	66.90
	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Needs)	7.61	2,192,170,000	7.7	212,500,000	7.3	244,375,000	7.0	281,032,000	6.7	281,032,000	6.4
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga Yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	66.67	2,310,830,000	69.00	783,664,000	70.1	783,664,000	71.1	783,664,000	72.00	783,664,000	72.00
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERHUBUNGAN			8,198,347,885		10,396.949.085		6,946,949,085		9,071,949,085		8,596,949,085	





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	100%	6.665,51 1.702	100%	6,196,94 9,085	100%	6,196,94 9,085	100%	6,196,94 9,085	100%	6,196,94 9,085	100%
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Konektivitas Darat	0	0	0	3,500,0 00,000	1	400,000 ,000	1	200,00 0,000	1	200,00 0,000	1
	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	25.38%	1,358,34 1,463	12.69%	100,000 ,000	12.59%	150,000, 000	19.03%	175,000, 000	22.21%	200,00 0,000	25.38%
Program Pengelolaan Pelayaran	Konektivitas Sungai Danau dan Penyebrangan	4	174,494, 720	0	600,00 0,000	1	200,000 ,000	1	2,500,0 00,000	1	2,000,0 00,000	1
URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			12,376, 651,470		10,456, 590,74 4		10,979, 420,281		11,528,3 91,295		12,104,8 10,859	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	100.00%	8,036,14 4,070	100.00 %	6,121,91 4,823	100.00%	6,428,01 0,564	100.00%	6,749,41 1,092	100.00%	7,086,8 81,647	100.00%
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah(survei)	65%	1,885,45 5,000	68%	1,507,161 ,600	70%	1,582,519 ,680	73%	1,661,64 5,664	75%	1,744,72 7,947	78%
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	2,75	2,455,0 52,400	2.8	2,827,51 4,321	2.85	2,968,89 0,037	3,01	3,117,33 4,539	,1631	3,273,20 1,266	3,30
URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			7,504,4 45,557		10,029, 490,50 0		10,031,4 90,500		10,033, 490,50 0		10,013,1 90,500	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	100.00%	5,429,4 45,577	100.00 %	7,112,761 ,915	100.00%	7,112,761, 915	100.00%	7,112,761 ,915	100.00%	7,092,4 61,915	100.00%





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi Simpan Pinjam	0.00%	0	0	40,000,000	0.60%	40,000,000	0.80%	40,000,000	1.00%	40,000,000	1.00%
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	29.54%	125,000,000	23%	45,000,000	23%	45,000,000	23%	45,000,000	23%	45,000,000	23%
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	0	0	0	34,000,000	65	36,000,000	66.60	38,000,000	67.50	38,000,000	68.30
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	11.36%	350,000,000	33%	135,000,000	33%	135,000,000	33%	135,000,000	33%	135,000,000	33%
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	37.78	25,000,000	42.22%	35,000,000	44.44%	35,000,000	46.67%	35,000,000	46.67%	35,000,000	46.67%
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Pertumbuhan Wirausaha	3.33%	275,000,000	5.00%	1,279,774,190	5.00%	1,279,774,190	5.00%	1,279,774,190	5.00%	1,279,774,190	5.00%
Program Pengembangan UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	0.07%	650,000,000	0.07%	673,977,197.50	0.07%	673,977,197.50	0.07%	673,977,197.50	0.07%	673,977,197.50	0.07%
	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	0.88%	650,000,000	0.95%	673,977,197.50	0.95%	673,977,197.50	0.95%	673,977,197.50	0.95%	673,977,197.50	0.95%
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENANAMAN MODAL			6,483,813,690		8,399,600,000		8,262,400,000		8,342,400,000		8,442,400,000	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	100.00%	6,174,913,690	100.00%	7,200,000,000	100.00%	7,500,000,000	100.00%	7,600,000,000	100.00%	7,900,000,000	100.00%
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Realisasi Total terhadap Target Investasi	16 investor	0	0	400,000,000	1	250,000,000	1	200,000,000	1	-	0





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	100.00%	81,100,000	100.00 %	368,000,000	100.00%	80,800,000	100.00%	80,800,000	100.00%	80,800,000	100.00%
Program Pengendalian Pelaksanaan Modal	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	100.00%	112,100,000	100.00 %	227,700,000	100.00%	227,700,000	100.00%	227,700,000	100.00%	227,700,000	100.00%
Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	100.00%	106,825,000	100.00 %	165,200,000	100.00%	165,200,000	100.00%	195,200,000	100.00%	195,200,000	100.00%
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi penanaman modal	100.00%	8,875,000	100.00 %	38,700,000	100.00%	38,700,000	100.00%	38,700,000	100.00%	38,700,000	100.00%
URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			22,457,384,363		22,044,290,240		21,258,199,775		22,230,515,360		24,221,952,356	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	100.00%	6,749,014,943	100.00 %	8,266,330,382	100.00%	6,863,330,382	100.00%	7,273,330,382	100.00%	7,273,330,382	100.00%
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	0.67%	1,370,805,120	0.69%	1,508,033,465	0.70%	1,644,870,361	0.71%	1,457,265,946	0.72%	1,748,719,135	0.73%
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	20.00%	14,227,564,300	25.00%	11,839,926,393	30.00%	12,239,919,032	35.00%	12,909,919,032	40.00%	14,491,902,839	42.00%
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	100.00%	110,000,000	100.00 %	430,000,000	100.00%	510,000,000	100.00%	590,000,000	100.00%	708,000,000	100.00%
URUSAN PEMERINTAH BIDANG STATISTIK			268,924,000		472,755,539		496,393,316		521,212,982		547,273,631	





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,85	268,924,000	2.85	472,755,539	2.9	496,393,316	2.9	521,212,982	2.9	547,273,631	2.95
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERSANDIAN			35,000,000		2,452,311,072		2,574,926,626		2,703,672,957		2,838,856,605	
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengembangan Informasi	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	11.76%	35,000,000	16.00%	2,452,311,072	18.00%	2,574,926,626	19.00%	2,703,672,957	22.00%	2,838,856,605	25.00%
URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEBUDAYAAN			3,895,916,666		3,450,000,000		3,450,000,000		3,450,000,000		3,450,000,000	
Program Pengembangan Kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	27%	3.717.116.666	27%	2.950.000.000	27%	2.950.000.000	27%	2.950.000.000	27%	2.950.000.000	27%
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	0	0	0	350.000.000	35%	350.000.000	35%	350.000.000	35%	350.000.000	35%
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	15%	178.800.000	15%	75,000,000	15%	75,000,000	15%	75,000,000	15%	75,000,000	15%
	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan	0		15%	75,000,000	15%	75,000,000	15%	75,000,000	15%	75,000,000	15%
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERPUSTAKAAN			7,304,475,795		11,461,228,890		12,235,228,890		12,809,228,890		13,969,228,890	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	100.00%	6,288,656,513	100.00%	10,276,847,840	100.00%	10,985,847,840	100.00%	11,493,847,840	100.00%	12,653,847,840	100.00%
Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	61	1,015,819,282	62	1,144,381,050	64	1,199,381,050	66	1,255,381,050	68	1,255,381,050	70





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	0	0	0	40,000,000	5.00%	50,000,000	5.00%	60,000,000	5.00%	60,000,000	5.00%
URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEARSIPAN			697,424,000		869,424,000		919,424,000		968,424,000		968,424,000	
Program Pengelolaan Arsip	Tingkat Ketersediaan Arsip	38%	446,927,500	80	497,927,500	80.83	516,927,500	81.67	534,927,500	82.50	534,927,500	83.33
Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase Cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip	0	250,496,500	66.67%	291,496,500	71.43%	302,496,500	75%	313,496,500	77.78%	313,496,500	80%
Program Perijinan Penggunaan Arsip	Persentase Akses Masyarakat Terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	0	0	0	80,000,000	60%	100,000,000	65%	120,000,000	70%	120,000,000	75%
URUSAN PEMERINTAH PILIHAN												
URUSAN PEMERINTAH BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			17,701,936,611		21,397,586,611		24,188,841,559		26,369,689,209		24,849,689,209	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	100.00%	7,516,936,611	100.00 %	7,747,586,611	100.00%	8,878,841,559	100.00%	9,159,689,209	100.00%	9,159,689,209	100.00%
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi perikanan tangkap	4,886.672	3,300,000,000	4960.22	5,850,000,000	5009.82	7,150,000,000	5059.19	8,750,000,000	5110.52	8,750,000,000	5110.52
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi perikanan budidaya	2,005.63	4,995,000,000	2169.57	5,860,000,000	2256.79	6,160,000,000	2347.7	6,410,000,000	2442.46	6,460,000,000	2541.22
	Peningkatan produksi benih (ekor)	255,920		265,000		270,000		280,000		290,000		300,000
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase Jumlah Pelaku Usaha Perikanan yang patuh terhadap peraturan	TAD	0	0	150,000,000	85	200,000,000	90	250,000,000	95	300,000,000	100





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan	58.8	1,890,000,000	61.18	1,790,000,000	62.28	1,800,000,000	63.4	1,800,000,000	64.67	180,000,000	64.67
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PARIWISATA			3,903,898,675		6,051,000,000		6,489,000,000		7,121,000,000		8,545,200,000	
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	66.75	2,558,657,441	76.75	4,600,000,000	81.75	4,900,000,000	86.75	5,450,000,000	91.75	6,540,000,000	96.75
Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	90	1,131,096,130	100.00 %	992,000,000	100.00%	1,095,000,000	100.00%	1,125,000,000	100.00%	1,350,000,000	100.00%
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	90	214,145,104	97.50	459,000,000	100	494,000,000	100	546,000,000	100	655,200,000	100
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERTANIAN			23,400,000,000		19,375,000,000		21,060,000,000		23,045,000,000		26,600,000,000	
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Ketersediaan sarana Pertanian yang Berkualitas	15%	11,750,000,000	16%	8,560,000,000	17%	9,470,000,000	18%	10,460,000,000	19%	12,195,000,000	20%
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian Yang Ditetapkan Menjadi LP2B	10	10,500,000,000	20	8,560,000,000	20	9,470,000,000	20	10,460,000,000	20	12,195,000,000	20
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	85%	100,000,000	85%	362,500,000	85%	375,000,000	85%	387,500,000	85%	400,000,000	85%
	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	20	100,000,000	20	362,500,000	20	375,000,000	20	387,500,000	20	400,000,000	20
Program Penyuluhan Pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian Yang Ditingkatkan	10	550,000,000	10	900,000,000	10	750,000,000	10	700,000,000	10	725,000,000	10





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	70	200,00 0,000	70	255,000 ,000	75	242,500, 000	80	250,00 0,000	85	260,00 0,000	90
	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan Yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	2	200,00 0,000	2	255,000 ,000	2	242,500, 000	2	250,00 0,000	2	260,00 0,000	2
Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian Yang Diterbitkan	7	0	0	120,000 ,000	7	135,000, 000	7	150,000 ,000	7	165,000, 000	7
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERDAGANGAN			3,575,0 00,000		2,608,1 85,764		2,653,18 5,764		2,673,1 85,764		2,718,18 5,764	
Program Perizinan dan pendaftaran perusahaan	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	TAD	0	0	50,00 0,000	50	75,000, 000	50	75,000 ,000	75	100,00 0,000	100
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan yang ditingkatkan Kualitasnya	TAD	100,000 ,000	33.33%	357,320, 014	33.33%	357,320, 014	33.33%	357,320, 014	33.33%	357,320, 014	33.33%
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100	175,000, 000	100	702,611, 250	100	702,611, 250	100	702,611, 250	100	702,611, 250	100
Program Pengembangan Ekspor	Persentase Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor yang difasilitasi	100	175,000, 000	100	468,58 9,500	100	468,589, 500	100	468,589 ,500	100	468,589 ,500	100
Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	0	1,500,0 00,000	20%	500,00 0	20%	500,000	20%	500,00 0	20%	500,00 0	20%
	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	12.17%	1,500,0 00,000	48.99%	104,200 ,000	56.23%	104,200, 000	63.48%	104,200 ,000	70.72%	104,200 ,000	77.97%





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang difasilitasi / dilaksanakan	100.00%	125,000,000	100.00 %	924,965,000	100.00%	944,965,000	100.00%	964,965,000	100.00%	984,965,000	100.00%
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERINDUSTRIAN			550,000,000		330,000,000		340,000,000		350,000,000		350,000,000	
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten	4.39%	275,000,000	7.13%	75,000,000	7.68%	75,000,000	8.23%	75,000,000	9.14%	75,000,000	9.14%
	Persentase Realiasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	TAD	275,000,000	70	75,000,000	70	75,000,000	70	75,000,000	70	75,000,000	70
Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Presentase Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin Usaha Industri	TAD	0	0	100,000,000	55	110,000,000	60	120,000,000	65	120,000,000	70
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat dan Terkini	100%	0	0	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%	80,000,000	100%
URUSAN PEMERINTAH BIDANG TRANSMIGRASI			6,059,006,000		19,240,000,000		20,650,000,000		21,890,000,000		24,340,000,000	
Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persentase program transmigrasi yang dilaksanakan	18.32%	0	0	920,000,000	32.60%	895,000,000	24.18%	820,000,000	22.30%	1,070,000,000	1.88%
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase luas kawasan transmigrasi yang berkembang	2.54%	5,910,123,700	2.92%	17,970,000,000	5.00%	19,255,000,000	7.10%	20,420,000,000	6.55%	22,490,000,000	0.55%
Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase transmigran yang dibina dan diberdayakan	98.18%	148,882,300	100.00 %	350,000,000	100.00%	500,000,000	100.00%	650,000,000	100.00%	780,000,000	100.00%
URUSAN PENDUKUNG												





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
URUSAN PEMERINTAHAN												
SEKRETARIAT DAERAH			46,220,989,000		46,943,274,000		43,814,267,000		46,037,467,000		55,244,960	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	100.00%	31,966,009,455	100.00 %	32,272,096,000	100.00%	29,099,255,000	100.00%	30,918,255,000	100.00%	37,101,906,000	100.00%
	Indeks Kematangan Organisasi	38.9		40.86		40.93		41.2		41.2		41.56
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Efektivitas Kerjasama Daerah	100.00%	11,784,737,495	100.00 %	690,900,000	100.00%	658,227,000	100.00%	658,227,000	100.00%	789,872,000	100.00%
	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	100.00%		100.00 %	1,421,293,000	100.00%	1,215,800,000	100.00%	1,450,000,000	100.00%	1,740,000,000	100.00%
	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100.00%		100.00 %	8,933,000,000	100.00%	9,150,000,000	100.00%	9,270,000,000	100.00%	11,124,000,000	100.00%
	Persentase Produk Hukum Yang Dihasilkan	100%		100%	1,273,555,000	100%	1,273,555,000	100%	1,273,555,000	100%	1,528,266,000	100%
Program Perekonomian dan Pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	100.00%	2,470,242,050	100.00 %	1,302,430,000	100.00%	1,367,430,000	100.00%	1,417,430,000	100.00%	1,700,916,000	100.00%
	Tingkat Kematangan UKPBJ	3		8	850,000,000	8	850,000,000	8	850,000,000	8	1,020,000,000	8
	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	100%		100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	200,000,000	100%	240,000,000	100%
SEKRETARIAT DPRD			23,035,752,322		25,356,961,190		26,131,361,190		26,502,736,690		27,270,138,690	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	95.34%	17,515,507,322	100.00 %	17,398,356,305	100.00%	17,703,356,305	100.00%	16,928,356,305	100.00%	17,703,356,305	100.00%





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Tepat	5,520,245,000	Tepat	175,600,000	Tepat	175,600,000	Tepat	187,600,000	Tepat	187,600,000	Tepat
	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	80.00%		80.00%	146,800,000	80.00%	146,800,000	80.00%	146,800,000	80.00%	146,800,000	80.00%
	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	90.00%		90.00%	7,636,204,885	90.00%	8,105,604,885	90.00%	9,239,980,385	90.00%	9,232,382,385	90.00%
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH												
PERENCANAAN			9,978,165,754		12,850,992,690		11,138,719,635		26,675,384,188		43,353,934,406	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	100.00%	8,925,431,754	100.00 %	11,303,903,048	100.00%	10,142,119,096	100.00%	25,650,937,046	100.00%	41,795,388,764	100.00%
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPd	100.00%	614,662,080	100.00 %	549,196,065	100.00%	288,603,315	100.00%	287,874,815	100.00%	554,924,065	100.00%
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	100.00%		100.00 %	549,196,065	100.00%	288,603,315	100.00%	287,874,815	100.00%	554,924,065	100.00%
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RKPd dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100.00%	438,071,920	100.00 %	129,574,614	100.00%	129,574,614	100.00%	129,574,614	100.00%	129,574,614	100.00%
	Persentase Keselarasan RKPd dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100.00%		100.00 %	215,000,000	100.00%	211,181,000	100.00%	215,000,000	100.00%	215,000,000	100.00%
	Persentase Keselarasan RKPd dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	100.00%		100.00 %	104,122,898	100.00%	78,638,295	100.00%	104,122,898	100.00%	104,122,898	100.00%





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
KEUANGAN			137,130, 371,621		151,193, 408,784,5		166,127, 749,661, 95		182,520, 524,629,345		201,047, 577,089,779	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	100.00%	16,949,780,995	100.00 %	18,994,759,094,5	100.00%	20,709,235,003,95	100.00%	22,560,158,504,345	100.00%	25,091,174,354,779	100.00%
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yg Di alokasikan melalui TKD	-	113.533.319.942	78	124.962.989.798	80	137.459.287.694	82	151.205.216.459	85	166.325.738.101	87
	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	-		23		25		27		30		32
	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	-	994.783.498	75	1.017.923.985	78	1.119.717.476	78	1.231.689.224	79	1.354.858.147	80
	Persentase Penurunan SILPA	22.72		24		25		26		27		28
	Persentase laporan Keuangan tepat Waktu	-	857.799.060	72	943.578.968	75	1.037.936.856	77	1.141.730.545	79	1.255.903.603	82
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	15.94	1,412,243,236	4	1,553,467,560	4	1,708,814,316	4	1,879,695,747	5	2,067,665,322	5
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	-	922.475.800	5.5	1,240,229,793	6	1,364,252,772	6.5	1,500,678,050	7	1,650,745,854	7.5
	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan	-	1.306.101.645	55	1,240,229,793	60	1,364,252,772	65	1,500,678,050	70	1,650,745,854	75
	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	-	1.153.867.445	55	1,240,229,793	60	1,364,252,772	65	1,500,678,050	68	1,650,745,854	70
KEPEGAWAIAN			10,429, 577,568		11,200, 000,000		12,095,000,000		12,840, 000,000		13,440, 000,000	
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	100.00%	8,275,970,068	100.00 %	8,680,000,000	100.00%	9,250,000,000	100.00%	9,770,000,000	100.00%	10,370,000,000	100.00%





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Program Kepegawaian Daerah	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan formasi	100.00%	355.460.000	100.00 %	510,000.000	100.00%	600,000.000	100.00%	650,000.000	100.00%	650,000.000	100.00%
	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100.00%	1.012.812.500	100.00 %	1,165,000.000	100.00%	1,270,000.000	100.00%	1,370,000.000	100.00%	1,370,000.000	100.00%
	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	100.00%	558.470.000	100.00 %	595,000.000	100.00%	625,000.000	100.00%	700,000.000	100.00%	700,000.000	100.00%
	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	96.46%	226.865.000	100.00 %	250,000.000	100.00%	350,000.000	100.00%	350,000.000	100.00%	350,000.000	100.00%
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			2,395,265,000		2,650,000,000		2,755,000,000		3,010,000,000		3,410,000,000	
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial, fungsional dan teknis	100.00%	2,395,265,000	100.00 %	2,650,000,000	100.00%	2,755,000.000	100.00%	3,010,000.000	100.00%	3,410,000.000	100.00%
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			430,402,800		4,750,000,000		3,700,000,000		2,450,000,000		3,150,000,000	
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	80.00%	430,402.800	80.00%	4,350,000.000	80.00%	3,300,000.000	80.00%	1,950,000.000	80.00%	2,650,000.000	80.00%
Program Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	0	0	0	400,000.000	80.00%	400,000.000	80.00%	500,000.000	80.00%	500,000.000.0	80.00%
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN												
INSPEKTORAT DAERAH			18,873,606,634		20,436,379,042		19,923,619,042		20,436,379,042		20,436,379,042	





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	100.00%	16,473,606,634	100.00 %	17,117,146,034	100.00%	16,604,386,034	100.00%	17,117,146,034	100.00%	17,117,146,034	100.00%
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Tindakanlanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	75%	1,485,000,000	75%	2,174,390,875	76%	2,174,390,875	76%	2,174,390,875	77%	2,174,390,875	77%
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	Cakupan Perangkat Daerah yang Melakukan Pengendalian Intern	100%	915,000,000	100%	1,144,842,133	100%	1,144,842,133	100%	1,144,842,133	100%	1,144,842,133	100%
UNSUR KEWILAYAHAN												
KECAMATAN BALAI RIAM			4,651,818,367		4,531,405,407		4,591,405,407		4,751,405,407		4,751,405,407	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	92.57%	3,433,847,447	100.00 %	3,603,847,447	100.00%	3,663,847,447	100.00%	3,823,847,447	100.00%	3,823,847,447	100.00%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik	100.00%	90,000,000	100.00 %	225,412,960	100.00%	225,412,960	100.00%	225,412,960	100.00%	225,412,960	100.00%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa Mandiri diwilayah Kecamatan Balai Riam	100.00%	370,412,960	100.00 %	235,000,000	100.00%	235,000,000	100.00%	235,000,000	100.00%	235,000,000	100.00%
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan gangguan Kamtibmas	100.00%	370,412,960	100.00 %	80,000,000	100.00%	80,000,000	100.00%	80,000,000	100.00%	80,000,000	100.00%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100.00%	207,145,000	100.00 %	207,145,000	100.00%	207,145,000	100.00%	207,145,000	100.00%	207,145,000	100.00%





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	100.00%	180,000,000	100.00 %	180000000	100.00%	180,000,000	100.00%	180000000	100.00%	180,000,000	100.00%
KECAMATAN JELAI			8,108,550,558		8,177,110,283		8,245,669,808		8,314,229,333		8,382,788,858	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	99.82%	6,855,952,519	100.00 %	6,924,512,044	100.00%	6,993,071,569	100.00%	7,061,631,094	100.00%	7,130,190,619	100.00%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik	83.00%	726,348,039	100.00 %	476,348,039	100.00%	476,348,039	100.00%	476,348,039	100.00%	476,348,039	100.00%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa Mandiri diwilayah Kecamatan Jelai	78.68%	226,250,000	100.00 %	476,250,200	100.00%	476,250,200	100.00%	476,250,200	100.00%	476,250,200	100.00%
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan gangguan Kamtibmas	86.00%	80,000,000	100.00 %	80,000,000	100.00%	80,000,000	100.00%	80,000,000	100.00%	80,000,000	100.00%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100.00%	120,000,000	100.00 %	120,000,000	100.00%	120,000,000	100.00%	120,000,000	100.00%	120,000,000	100.00%
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	95.00%	100,000,000	100.00 %	100,000,000	100.00%	100,000,000	100.00%	100,000,000	100.00%	100,000,000	100.00%
KECAMATAN PANTAI LUNCI			3,199,086,397		3,306,649,557		3,402,099,213		3,566,111,766		3,637,812,766	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	94.91%	2,732,197,747	95.00%	3,050,780,907	95.00%	2,975,577,263	95.00%	3,139,589,816	96.00%	3,139,589,816	96.00%





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik	100.00%	311,689,650	100.00 %	148,738,650	100.00%	254,121,950	100.00%	254,121,950	100.00%	325,822,950	100.00%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa Mandiri diwilayah Kecamatan Pantai Lunci	89.00%	7,000,000	90.00%	9,400,000	90.00%	9,400,000	93.00%	9,400,000	93.00%	9,400,000	95.00%
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan gangguan Kamtibmas	98.00%	7,000,000	98.00%	7,750,000	98.00%	18,800,000	98.00%	18,800,000	98.00%	18,800,000	98.00%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	99.00%	134,200,000	99.00%	79,980,000	99.00%	134,200,000	99.00%	134,200,000	99.00%	134,200,000	99.00%
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	92.00%	7,000,000	94.00%	10,000,000	94.00%	10,000,000	95.00%	10,000,000	95.00%	10,000,000	95.00%
KECAMATAN PERMATA KECUBUNG			16,589,491,309		3,879,562,050		7,355,348,130		4,014,295,650		4,031,595,650	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	94.91%	15,389,491,309	100%	3,327,625,650	100%	6,791,648,130	100%	3,442,595,650	100%	3,457,595,650	100%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik	98,56%	800,000,000	100	370,000,000	100	380,000,000	100	385,000,000	100	385,500,000	100
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa Mandiri diwilayah Kecamatan Permata Kecubung	74,86%	50,000,000	100	18,500,000	100	19,000,000	100	19,500,000	100	20,000,000	100
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan gangguan Kamtibmas	96,53%	100,000,000	100	25,292,400	100	25,700,000	100	25,700,000	100	25,700,000	100





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	91,36%	200,00 0,000	100	112,369, 000	100	113,000, 000	100	115,000, 000	100	116,000, 000	100
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	90,59%	50,000, 000	100	25,775, 000	100	26,000, 000	100	26,500, 000	100	26,800, 000	100
KECAMATAN SUKAMARA			8,979,2 32,946		8,765,6 82,900		8,850,9 82,900		8,715,6 82,900		8,861,9 82,900	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	100.00%	7,537,97 0,133	100.00 %	7,259,6 82,900	100.00%	7,344,98 2,900	100.00%	7,209,6 82,900	100.00%	7,355,98 2,900	100.00%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik	100	122,556, 600	100.00 %	242,00 0,000	100.00%	242,000 ,000	100.00%	242,00 0,000	100.00%	242,000 ,000	100.00%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa Mandiri diwilayah Kecamatan Sukamara	100	1,299,80 6,213	100.00 %	1,025,00 0,000	100.00%	1,025,00 0,000	100.00%	1,025,00 0,000	100.00%	1,025,00 0,000	100.00%
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penurunan gangguan Kamtibmas	100	18,900, 000	100.00 %	35,000, 000	100.00%	35,000,0 00	100.00%	35,000, 000	100.00%	35,000, 000	100.00%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100	0	0	124,000 ,000	100.00%	124,000, 000	100.00%	124,000 ,000	100.00%	124,000 ,000	100.00%
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	100	0	0	80,000, 000	100.00%	80,000, 000	100.00%	80,000, 000	100.00%	80,000, 000	100.00%
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM												





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



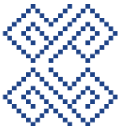
BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			9,700,7 76,021		12,751,4 17,388		12,935,8 17,388		21,720, 240,88 8		32,090, 740,88 8	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	100.00%	4,421,02 8,436	100.00 %	5,537,12 0,888	100.00%	5,721,52 0,888	100.00%	5,311,02 0,888	100.00%	5,531,52 0,888	100.00%
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100.00%	2,530,76 4,589	100.00 %	3,215,57 2,500	100.00%	3,215,57 2,500	100.00%	3,222,19 6,000	100.00%	3,272,19 6,000	100.00%
Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	100.00%	738,358 ,276	100.00 %	1,375,00 0,000	100.00%	1,375,00 0,000	100.00%	10,400, 000,00 0	100.00%	20,500, 000,00 0	100.00%
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	100.00%	75,000, 000	100.00 %	100,000 ,000	100.00%	100,000, 000	100.00%	150,000 ,000	100.00%	150,000, 000	100.00%
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	100.00%	493,974 ,600	100.00 %	871,224, 000	100.00%	871,224, 000	100.00%	871,224, 000	100.00%	871,224, 000	100.00%
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	100.00%	1,441,65 0,120	100.00 %	1,652,50 0,000	100.00%	1,652,50 0,000	100.00%	1,765,80 0,000	100.00%	1,765,80 0,000	100.00%





BIDANG URUSAN/ PROGRAM	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial												

Sumber: Hasil Analisis, 2025





4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kinerja merupakan hasil, keluaran, atau dampak yang dicapai dari suatu kegiatan, program, atau sasaran yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya pembangunan. Sementara itu, indikator kinerja berperan sebagai alat ukur untuk menilai pencapaian kinerja suatu kegiatan, program, atau sasaran dan tujuan, yang dapat berupa keluaran (*output*), hasil (*outcome*), maupun dampak (*impact*).

Bab ini menjelaskan tentang Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam mencapai visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Indikator tersebut terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah, yang menjadi tolok ukur utama pencapaian visi dan misi, serta Indikator Kinerja Kunci (IKK), yang digunakan untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir masa jabatan.





Tabel 4. 2 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sukamara

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Indeks Reformasi Birokrasi	angka	69,33	70	70	73	76	80	80	
2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Nilai	61,10	60	70	70	74,94	76,25	77,56	
3	Indeks Pelayanan Publik	indeks	3,01	3,05	3,15	3,2	3,3	3,51	3,51	
4	Persentase Desa Mandiri	%	37,93	41,38	44,83	48,28	51,72	55,17	58,62	
5	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	70,83	72,9	73,47	74,04	74,61	75,18	75,75	
6	Indeks Pendidikan	angka	0,61	0,62	0,62	0,62	0,63	0,63	0,63	
7	Usia Harapan Hidup	tahun	74,37	74,37	74,68	74,98	75,29	75,59	75,90	
8	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,89	5,4	5,67	5,73	5,8	5,86	5,93	
9	Tingkat inflasi	%	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	
10	PDRB per Kapita	Rp Juta	95,83	95,83	98,36	104	110,03	116,48	123,38	
11	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,40	3,40	3,47	3,54	3,61	3,68	4,00	
12	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Kabupaten (antar kecamatan)	angka	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	
13	Rasio Gini	Rasio	0,289	0,289	0,289	0,289	0,289	0,289	0,289	
14	Tingkat kemiskinan	%	4,14	3,67	3,46	3,25	3,04	2,83	2,62	
15	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,95	4,95	4,42	3,89	3,36	3,36	3,36	
16	Indeks Infrastruktur	Angka	81	82	82,5	83	84	84,5	85	
17	Indeks Pelayanan Kualitas Infrastruktur	Angka	50	52	54	57	60	62	64	
18	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	70,16	74,54	74,75	74,96	75,17	75,38	75,59	





No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
19	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Poin	TAD	0,557	0,567	0,577	0,587	0,597	0,607	
20	Tingkat pencemaran lingkungan	%	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	
21	Indeks Risiko Bencana	indeks	122,61	130,09	128,25	126,42	124,58	122,74	120,90	
22	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	1	5	8	10	12	15	18	
23	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	TAD	80,4	80,88	81,36	81,83	82,31	82,79	
24	Indeks Ketahanan Pangan	angka	60,4	61,78	63,52	65,26	67,00	68,74	70,48	
25	Indeks Kesejahteraan Sosial Daerah	angka	-	60	60,3	60,5	60,8	61	61,3	

Sumber: Hasil Analisis, 2025





Tabel 4. 3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Kabupaten
Sukamara

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI								
1	Indeks Ketahanan Pangan	angka	60,4	61,78	63,52	65,26	67	68,74	70,48
2	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	%	TAD	8,36	7,96	7,57	7,17	6,77	6,37
3	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/kapita	805	825	845	865	885	905	925
4	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	35,34	35,34	39,51	43,67	47,84	52	56,17
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	70,16	74,54	74,75	74,96	75,17	75,38	75,59
6	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	TAD	11,73	16,62	21,52	26,41	31,3	36,19
7	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	32,83	58,98	61,23	63,49	65,74	67,99	69,33
8	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	37,76	37,76	41,65	45,54	49,43	53,32	57,21
9	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Ton CO2 eq	TAD	431.401,84	487.195,3	555.082,56	632.908,53	708.125,36	772.690,80
10	Indeks Risiko Bencana	Angka	122,61	130,09	128,25	126,41	124,57	122,74	120,90
11	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,45	0,57	0,60	0,64	0,68	0,71	0,74
12	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,78	1,78	1,78	1,79	1,79	1,79	1,80
13	Rasio Penduduk	%	109,3	109,1	108,9	108,8	108,7	108,5	106,6
14	Kepadatan Penduduk	Orang/Km ²	18	18	18	19	19	19	19
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,89	5,4	5,67	5,73	5,8	5,86	5,93
2	Tingkat Kemiskinan	%	4,14	3,67	3,46	3,25	3,04	2,83	2,62





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	PDRB Per Kapita	Rp Juta	95,83	95,83	98,36	104	110,03	116,48	123,38
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,95	4,95	4,42	3,89	3,36	3,36	3,36
5	Rasio Gini	angka	0.289	0.289	0.289	0.289	0.289	0.289	0.289
6	Indeks Pembangunan Manusia	angka	70,83	72,9	73,47	74,04	74,61	75,18	75,75
7	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,37	74,37	74,68	74,98	75,29	75,59	75,90
8	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	%	20	17,5	17,5	16,3	15,2	14,2	13,2
9	Rata rata Lama Sekolah	tahun	8,18	8,84	9,0	9,2	9,3	9,63	9,77
10	Harapan Lama Sekolah	tahun	12,17	12,47	12,55	12,62	12,70	12,96	13,00
11	Skor Kemampuan Literasi SD	nilai	55,37	57,87	60,37	62,87	65,37	67,87	70,37
12	Skor Kemampuan Literasi SMP	nilai	69,66	70,76	71,86	72,96	74,06	75,16	76,26
13	Skor Kemampuan Numerasi SD	nilai	47,50	47,50	53,30	52,60	59,10	62,00	64,90
14	Skor Kemampuan Numerasi SMP	nilai	60,73	62,23	63,73	65,23	66,73	68,23	69,73
15	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	indeks	89.27	89,61	90,50	91,10	91,80	92,10	92,40
16	Indeks Masyarakat Digital	angka	41,69	42.73	43	43.47	44.74	45.47	46.15
17	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	79,57	80	85	87	89	90	95
18	Indeks Kerukunan Umat Beragama	skor	TAD	80,4	80,88	81,36	81,83	82,31	82,79
19	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	1	5	8	10	12	15	18
20	Indeks Perlindungan Anak	angka	62,14	63,03	63,03	63,10	63,15	63,20	63,24
21	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	angka	-	66	66,10	66,20	66,30	66,40	66,50
22	Indeks Ketimpangan Gender	poin	TAD	0,49	0,475	0,46	0,445	0,43	0,41
23	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	TAD	50	50	50	50	50	50





No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH								
1	Angka Ketergantungan	%	40,44	40,80	41,17	41,53	41,89	41,89	41,89
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	21,54	21,54	21,54	21,54	24,91	24,91	25,92
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	0,98	0,98	1,08	1,17	1,27	1,36	1,45
4	Rasio Kewirausahaan Daerah	Rasio	TAD	4,78	5,05	5,31	5,58	5,84	6,11
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	69,73	70,43	70,66	70,89	71,11	71,33	71,55
6	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	38,6	49,59	52,34	55,09	57,83	52,69	57,02
7	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Indeks		80,88	81,66	82,44	83,22	84	84,78
8	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	2.338,6	2.488,6	2.638,6	2.788,6	2.938,6	3.088,6	3.238,6
9	Indeks Infrastruktur	Angka	81	82	82,5	83	84	84,5	85
10	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Angka	50	52	54	57	60	62	64
11	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	TAD	23,68	28,42	33,16	37,89	42,63	47,37
12	Persentase Desa Mandiri	%	37,93	41,38	44,83	48,28	51,72	55,17	58,62
13	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,0022	0,0024	0,0026	0,0029	0,0032	0,0035	0,0038
14	Tingkat Inflasi	%	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64
15	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Indeks	TAD	3,73	3,87	4,01	4,15	4,30	4,44
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM								
1	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	66,36	68	70	73	76	80	85
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	2,75	2,54	2,80	2,85	3,01	3,16	3,30
3	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,01	3,05	3,15	3,2	3,3	3,51	3,51
4	Indeks Integritas Nasional	%		75	76,13	77,25	78,38	79,5	80,63
5	Persentase Penegakan Perda	%	100	100	100	100	100	100	100





No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6	Persentase Capaian Aksi HAM	%	100	100	100	100	100	100	100
7	Indeks Harmoni Indonesia	Indeks	0	0	6,58	6,62	6,62	6,70	6,72
8	Indeks Rasa Aman	Angka	75	80	80	80	80	80	80
9	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban	Angka	75	80	80	80	80	80	80
10	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,4	3,4	3,47	3,54	3,61	3,68	4
INDIKATOR KINERJA KUNCI									
URUSAN PEMERINTAH WAJIB PELAYANAN DASAR									
A	PENDIDIKAN								
1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	90,14	100	100	100	100	100	100
2	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	91,43	100	100	100	100	100	100
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Formal (TK/RA)	%	84,60	88	100	100	100	100	100
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Non Formal (KB/SPS/TPA)	%	43,63	46	49	52	55	58	58
5	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Kesetaraan	%	-	100	20,22	23,61	27,01	30,41	33,8
6	Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus APS	%	62,59	63	64	65	66	67	68
7	Angka Partisipasi Murni Jenjang SD/MI/Paket A	%	-	100	100	100	100	100	100
8	Angka Partisipasi Murni Jenjang SMP/MTs/Paket B	%	-	100	100	100	100	100	100
9	Angka Putus Sekolah Jenjang SD/MI	%	0,14	0	0	0	0	0	0





No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10	Angka Putus Sekolah Jenjang SMP/MTs	%	0,12	0	0	0	0	0	0
11	Presentase Jumlah Satuan PAUD terakreditasi minimal B	%	43,48	44	45	46	48	50	50
12	Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi S1 / D4	%	59,20	65,09	55,76	56,51	57,26	58,01	58,76
13	Presentase Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	%	46,19	48	50	54	58	61	61
14	Presentase Guru PAUD yang bersertifikat pendidik	%	9,36	10	11	12	13	14	14
15	Persentase sekolah menerapkan kurikulum muatan lokal	%	100	100	100	100	100	100	100
16	Presentase Guru SD/MI dengan Kualifikasi S1/D4	%	99	100	100	100	100	100	100
17	Presentase Guru SMP/MTs dengan Kualifikasi S1/D4	%	100	100	100	100	100	100	100
18	Presentase Guru SD/MI yang bersertifikat pendidik	%	74	100	100	100	100	100	100
19	Presentase Guru SMP/MTs yang bersertifikat pendidik	%	70	100	100	100	100	100	100
20	Indeks Pemerataan (Distribusi) Guru Jenjang PAUD	%	0,42	0,43	0,44	0,45	0,46	0,47	0,48
21	Indeks Pemerataan (Distribusi) Guru Jenjang SD/MI	%	0,46	0,47	0,48	0,49	0,50	0,51	0,52
22	Indeks Pemerataan (Distribusi) Guru SMP/MTs	%	0,43	0,44	0,45	0,46	0,47	0,48	0,49
23	Angka Partisipasi Sekolah 5-6	%	84,60	100	100	100	100	100	100





No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
24	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15	%	96,72	100	100	100	100	100	100
25	Iklim Keamanan SMP	nilai	68,63	70,13	71,63	73,13	74,63	76,13	77,63
26	Iklim Kebhinekaan SD	nilai	68,80	69,80	70,80	71,80	72,80	73,80	74,80
27	Iklim Kebinekaan SMP	nilai	68,75	69,75	70,75	71,75	72,75	73,75	74,75
28	Iklim Inklusivitas SD	nilai	53,72	56,22	58,72	61,22	63,72	66,22	68,72
29	Iklim Inklusivitas SMP	nilai	55,31	57,71	60,11	62,51	64,91	67,31	69,71
30	Iklim Keamanan SD	nilai	69,11	70,01	70,91	71,81	72,71	73,61	74,51
31	Skor Kemampuan Literasi SD	nilai	55,37	57,87	60,37	62,87	65,37	67,87	70,37
32	Skor kemampuan Numerasi SD	nilai	47,50	50,40	53,30	56,20	59,10	62,00	64,90
33	Skor Kemampuan Literasi SMP	nilai	69,66	70,76	71,86	72,96	74,06	75,16	76,26
34	Skor Kemampuan Numerasi SMP	nilai	60,73	62,23	63,73	65,23	66,73	68,23	69,73
35	Proporsi Jumlah Satuan PAUD terakreditasi Minimal B	%	51,11	65,09	84,31	100	100	100	100
B	KESEHATAN								
1	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	%	100	98	99	99	99	99	99
2	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta.	Kab/Kota	1	1	1	1	1	1	1
3	Angka Kematian Balita	Jumlah (per 100.000 kelahiran hidup)	-	11	11	10	10	9	9





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	persentase	20	17,5	17	16,3	15,6	14,9	14,2
5	Presentase lanjut usia yang mandiri	persentase	36,32	70	70	75	80	85	85
6	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	Persentase	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
7	Pravelensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun	persentase	-	12,4	11	11	11	10	9,5
8	Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksin IRL (Imunisasi Rutin Lengkap)	persentase	100	90	70	90	90	90	90
9	Persentase kab/kota yang memiliki Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/Kelurahan sesuai standar	persentase	30	30	100	45	45	45	45
10	Persentase puskesmas terakreditasi paripurna	persentase	100	100	100	100	100	100	100
11	Persentase rumah sakit pemerintah terakreditasi paripurna	persentase	100	100	100	100	100	100	100
12	Presentase puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standar	persentase	60	40	40	50	60	70	80
13	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	persentase	85	85	60	100	100	100	100
14	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	persentase	0	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4
15	Kab/Kota memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan	Kabupaten /kota	1	1	1	1	1	1	1
16	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	persentase	71,43	75	77,7	81	85	88	91





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
17	Insidensi Tuberkulosis	kasus	130	145	168	113	102	94	89
18	Angka Kematian Ibu (AKI)	Jumlah	90,4 / 100.0000 kelahiran hidup	0	0	0	0	0	0
19	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang kesehatan	%	45	50	50	55	60	65	70
20	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	%	70	70	70	80	90	94	96
21	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	%	60	60	60	65	70	75	80
22	Persentase Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi	%	80	80	82	84	86	88	90
C	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
1	Persentase Irigasi dalam kondisi baik	%	67,06	67,23	67,41	67,58	67,75	67,93	68,10
2	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	%	21,82	24,33	26,22	26,87	27,12	27,37	28
3	Persentase Prasarana Persampahan yang terbangun dan ditingkatkan	%	TAD	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian Dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	%	18,82	18,94	19,07	19,20	19,32	19,45	19,58
5	Persentase drainase dalam kondisi baik	%	92,91	93,23	93,43	93,55	93,60	93,61	93,62
6	Presentase Bangunan Gedung dalam kondisi Baik	%	6	6	6,38	6,57	6,76	6,95	7,14
7	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	%	8	10	13,64	16	17,86	18,18	20,51
8	Persentase Kondisi Mantap Jalan Kabupaten/Kota	%	37,99	38,49	39,49	40,60	41,70	42,80	43,60





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
9	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Analis/Teknisi Operator Terlatih dan Tersertifikasi	Orang	25	30	75	75	75	75	75
10	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang	%	50	52	62	65	67	70	72
D	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
1	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	21,50	26,32	31,58	36,84	42,11	47,37	52,63
2	Persentase Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten/Kota ditangani	%	TAD	0	0,51	0,70	0,70	0,70	0,70
3	Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni dan Warga Negara Yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah Layak Huni	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni)	%	1	1,15	1,46	1,98	2,52	3,10	3,20
E	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINUDUNGAN MASYARAKAT								
1	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Cakupan Perlindungan Masvarakat	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	%	50	50	100	100	100	100	100





No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100
7	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum	Nilai	100	65	65	70	75	80	80
8	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	Nilai	100	70	70	75	75	80	90
9	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	%	100	100	100	100	100	100	100
10	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dalam Penanggulangan Bencana	Nilai	0,45	0,57	0,60	0,64	0,68	0,71	0,74
11	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	%	99,8	100	100	100	100	100	100
12	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	%	80	100	100	100	100	100	100
13	Persentase Penanganan Pasca Bencana	%	70	100	100	100	100	100	100
14	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	nilai	74,34	75	75	76	77	78	79
F	SOSIAL								
1	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani	%	68,18	53	53,5	53,55	53,56	53,58	53,6
2	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	%	68,18	53	53,5	53,55	53,56	53,58	53,6
3	Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	Keluarga	70	70	70	70	70	70	70
4	Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	%		100	100	100	100	100	100
5	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan	Orang		0	1	2	2	3	3





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	88,97	100	100	100	100	100	100
8	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	100	100	100	100	100	100	100
10	Persentase Gelandang dan Pengemis yang Ternenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	100	100	100	100	100	100	100
11	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%		0	100	100	100	100	100
12	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	%	100	100	100	100	100	100	100
13	Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkatkan Kesiapsiagaannya	%	0	0	100	100	100	100	100
14	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	%	100	100	100	100	100	100	100
15	Persentase PSKS yang diberdayakan	%	100	100	100	100	100	100	100
16	Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti Rehabilitasi Sosial	%	0	100	100	100	100	100	100
17	Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/ AIDS dan NAPZA	%	0	100	100	100	100	100	100
18	Persentase Pekerja Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/ atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Kabupaten pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar	%	0	100	100	100	100	100	100





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
19	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	%	0	100	100	100	100	100	100
20	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	%	100	100	100	100	100	100	100
21	SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial ASN dan NON ASN yang Mengikuti Sertifikasi	orang	8	8	12	14	14	14	14
22	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kelembagaan yang Mengikuti Proses Akreditasi	Lembaga	1	1	1	1	1	1	1
23	Persentase Taman Makam Pahlawan yang mendapatkan pengelolaan	%	100	100	100	100	100	100	100
URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
A	TENAGA KERJA								
1	Tingkat cakupan perencanaan ketenagakerjaan	%	45	50	0	55	60	65	70
2	Persentase Tenaga Kerja di sektor prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya	%	25	30	30	33	35	38	39
3	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan di Dalam Negeri	Persentase	62	56	58	60	63	66	68
4	Jumah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Orang	7.851	8.636	8.636	8.836	9.036	9.320	9.520
5	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	79.57	80	85	87	89	90	95
6	Jumlah lulusan pelatihan vokasi yang bersertifikat	Orang	248	248	248	255	255	265	280
B	PERMBEDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								





No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persentase	1.28	2	2.2	2.4	2.5	3	3
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	52,27	52,75	53	53,25	53,50	53,75	54
3	Persentase Perempuan Korban Kekerasan Dan TPPO Yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	80	80	85	85	90	90
4	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	%	TAD	10	0	25	30	30	35
5	Tingkat Pemanfaatan Data Gender Dan Anak Dalam Perencanaan, Evaluasi dan/ atau Penyusunan Kebijakan	Dokumen	TAD	2	2	2	2	2	2
6	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	61,5	62	62,5	63	63,25	63,5	64
7	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persentase	79	80	80	85	85	90	90
8	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks	TAD	80	80	85	85	90	90
9	Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah	Nilai	299	400	500	500	500	500	500
C	PANGAN								
1	Persentase Jumlah Cadangan pangan	%	1.7	1.7	1.7	1.72	1.74	1.77	1.78
2	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	9.37	9.37	6.25	6.25	6.25	3.12	3.12
3	Persentase Pangan Segar Yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	%	90	90	90	90	90	90	90





No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	Rasio jumlah cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) terhadap target jumlah CBPD berdasarkan Perbadan 15/2023	%	48	48	48	48	48	48	48
5	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	88,5	90	90,5	91	92	93	94
D	PERTANAHAN								
1	Persentase Luas Lahan Bersertifikat (%)	%	93,20	93,74	93,74	93,93	94,13	94,32	94,42
2	Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat yang dilakukan mediasi	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Tanah ulayat yang ditetapkan	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase luas lokasi konsolidasi tanah	%	93,20	93,74	93,74	93,93	94,13	94,32	94,42
5	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan untuk pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	100
E	LINGKUNGAN HIDUP								
1	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	%	50	50	60	70	80	90	100
2	PM 2.5	Nilai	0	15	15	15	15	15	15
3	BOD (Biological Oxygen Demand)	Nilai	9.70	3	3	3	3	3	3
4	COD (Chemical Oxygen Demand)	Nilai	19.51	25	25	25	25	25	25
5	DO (Dissolved Oxygen)		5.8	4	4	4	4	4	4
6	Persentase RTH	%	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase limbah B3 yang dikelola	%	100	100	100	100	100	100	100





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota	%	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase MHA yang ditingkatkan kapasitasnya	%	100	100	100	100	100	100	100
10	Persentase penyuluh lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya	%	100	100	100	100	100	100	100
11	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam perlindungan pengelolaan lingkungan hidup	%	100	100	100	100	100	100	100
12	Persentase penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	%	100	100	100	100	100	100	100
13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	70,16	74,54	74,75	74,96	75,17	75,38	75,59
14	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Nilai	46,90	47,15	47,40	47,75	48,10	48,55	49,00
15	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah	%	37,76	37,76	41,65	45,54	49,43	53,32	57,21
F	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
1	Persentase kepemilikan KTP Elektronik	Persentase	97,14	97,50	98	99	99,5	99,9	100
2	Persentase Identitas Kependudukan Digital (IKD) dari jumlah penduduk yang ber-KTP Elektronik	Persentase	5,08	10	20	30	40	50	60
3	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Persentase	73,18	73,75	74	75	76	77	78
4	Persentase Cakupan Akta Kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	Persentase Cakupan kepemilikan buku nikah/Akta Perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	%	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian pada semua individu yang Perceraianya dilaporkan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pada anak usia 0-4 tahun	Persentase	96,41	96,8	97	98	99	99,8	99,9
8	Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	Persentase	96	97	98	98,5	99	99,8	99,9
9	Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
10	Cakupan pengelolaan profil kependudukan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
G	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA								
1	Capaian nilai dimensi tata kelola pemerintahan desa pada penilaian indeks desa	Angka	TAD	40	45	50	55	60	65
2	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya	%	15,3	30,6	30,6	30,6	30,6	30,6	30,6
4	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	%	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	%	3,45	3,45	17,24	34,48	51,72	51,72	51,72
7	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	%	0	0	0	25	25	25	25
8	Persentase Desa Mandiri	%	37,93	41,38	44,83	48,28	51,72	55,17	58,62





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
9	Persentase BUMDesa Maju	%	4,17	8,33	12,50	16,67	20,83	25	29,17
10	Persentase Desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa berbasis digital	%	100	100	100	100	100	100	100
H	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Jiwa	2,06	2.16	2.16	2.15	2.15	2.15	2.15
2	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	27,87	39,7	39,1	38,6	38,1	37,6	37,1
3	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern / Modern Contraceptive (mCPR)	Persentase	81,03	63.50	64.10	64.80	65.50	66.20	66.90
4	Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Needs)	Persentase	7,61	8.0	7.7	7.3	7.0	6.7	6.4
5	Presentase Keluarga Yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Persentase	66,67	67,9	69	70,1	71,1	72	72
6	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	%	57,40	60,1	65,2	66,4	68,9	69,3	69,9
7	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	63,1	71	76	79,2	81,3	82,6	82,6
8	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	Persentase	7,5	6,7	6	5,4	5	4,7	4,7
I	PERHUBUNGAN								
1	Konektivitas Darat	jumlah	0	0	0	1	1	1	1
2	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	25,38	12,69	12,69	12,59	19,03	22,21	25,38
3	Konektivitas Sungai Danau dan Penyebrangan	jumlah	4	0	0	1	1	1	1





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
J	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
1	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah(survei)	%	0	65	68	70	73	75	78
2	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,75	2,54	2,80	2,85	3,01	3,16	3,30
K	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH								
1	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi Simpan Pinjam	%	0	0	0	0.60	0,80	1,00	1,00
2	Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi	%	29,54	22,73	23	23	23	23	23
3	Persentase Koperasi Aktif	%	0	0	0	65,00	66,60	67,50	68,30
4	Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	%	11.36	28,41	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
5	Persentase Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	37.78	40	42.22	44.44	46.67	46.67	46.67
6	Pertumbuhan Wirausaha	%	3,33	4	5	5	5	5	5
7	Proporsi UKM Menjalinkan Kemitraan dan Ekspor	%	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
8	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	%	0.88	0.90	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
9	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	0.75	0.80	0.80	0.90	0.90	0.95	0.95
10	Update dan pengumpulan Data UMKM	Persentase	0.00	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29	1.29
11	Proporsi Jumlah UKM	Persentase	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
12	Rasio Kewirausahaan	Persentase	9.61	9.61	9.61	9.70	9.75	9.80	9.85
13	Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi	Persentase	84.7	84.8	85.7	85.8	85.9	86.0	86.0
14	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Berkoperasi	Persentase	1	1	1	1	1	1	1.00





No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
L	PENANAMAN MODAL								
1	Realisasi Total terhadap Target Investasi	jumlah investor	16	0	0	1	1	1	0
2	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi penanaman modal	%	100	100	100	100	100	100	100
6	Nilai Realisasi Penanaman Modal	triliun rupiah	5,48	0.938	0,938	0.100	0.100	0.100	0.100
M	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
1	Rasio Wirausaha Pemuda	%	0.67	0.68	0.69	0.70	0.71	0.72	0.73
2	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	%	20	25	25	30	35	40	42
3	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir	%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
5	Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan organisasi dalam 3 bulan terakhir	%	3.21	3.22	3.23	3.24	3.25	3.26	3.27
6	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	TAD	50	50	50	50	50	50





No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	Persentase Pemuda (16-30 Tahun) Yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja Atau Mengikuti Pelatihan	%	25.4	24	24	24	24	24	24
8	Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir	%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%
9	Jumlah kampanye olahraga yang terselenggara setahun terakhir	Kegiatan	4	4	4	4	4	4	4
10	Persentase Tenaga Keolahragaan yang Bersertifikat Nasional/Internasional	%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
11	Persentase Olahragawan dalam Pemusatan Latihan (Nasional/Daerah) yang Berprestasi di Tingkat (Nasional)/Internasional	%	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79
N	STATISTIK								
1	Indeks Pembangunan Statistik(IPS)	Indeks	2.85	2.85	2.85	2.9	2.9	2.9	2.95
O	PERSANDIAN								
1	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	%	11.76	13	16	18	19	22	25
P	KEBUDAYAAN								
1	Tingkat Partisipasi Terhadap Pengembangan Kebudayaan	%	27	27	27	27	27	27	27
2	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	%	0	0	0	35	35	35	35
3	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	%	15	15	15	15	15	15	15





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan	%	0	15	15	15	15	15	15
5	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton pertunjukan seni	%	-	40	60	62	64	65	68
6	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi tempat/peninggalan sejarah/warisan budaya bersifat kebendaan	%	-	5	15	18	19	20	25
7	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	1	5	8	10	12	15	18
8	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan atau menghadiri upacara adat dalam setahun terakhir	%	-	8	15	20	20	25	30
9	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	%	-	5	20	22	24	25	28
10	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal (bahasa daerah budaya lokal) dan/atau ekskul kesenian	%	-	2	10	15	17	18	20
11	Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan (dalam setahun terakhir)	%	-	2	5	8	10	15	20
Q	PERPUSTAKAAN								
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	61	61	62	64	66	68	70
2	Persentase Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	%	0	2	0	5	5	5	5
R	KEARSIPAN								
1	Tingkat Ketersediaan Arsip	Persentase	38	79.17	80	80.83	81.67	82.5	83.33





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Persentase Cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip	Persentase	0	60	66.67	71.43	75	77.78	80
3	Persentase Akses Masyarakat Terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Persentase	0	50	0	60	65	70	75
URUSAN PEMERINTAH PILIHAN									
A	KELAUTAN DAN PERIKANAN								
1	Jumlah Produksi perikanan tangkap	ton	4.886,672	4.741,2	4.960,21	5.009,82	5.059,19	5.110,52	5.110,52
2	Jumlah Produksi perikanan budidaya	ton	2.005,63	1.386,44	2.169,57	2.256,79	2.347,7	2.442,46	2.541,22
3	Peningkatan produksi benih	ekor	255.920	85.000	265.000	270.000	280.000	290.000	300.000
4	Persentase Jumlah Pelaku Usaha Perikanan yang patuh terhadap peraturan	%	TAD	TAD	80	85	90	95	100
5	Angka Konsumsi Ikan	kap/kg/thn	58.8	52.65	61.18	62.28	63.4	64.67	64.67
B	PARIWISATA								
1	Persentase pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	%	66.75	71.75	76.75	81.75	86.75	91.75	96.75
2	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	%	90	95	100	100	100	100	100
3	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	%	90	95	97.50	100	100	100	100
4	Jumlah devisa sektor pariwisata	Rp	1,100,000,000	1,200,00 0,000	1,200,00 0,000	1,452,00 0,000	1,597,200 ,000	1,750,00 0,000	1,925,00 0,000





No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	Perjalanan	62.484	68.732	96.159	100,967	106,015	111,316	116,882
6	Rasio PDB Pariwisata	%	4.8	5.2	5,2	5.9	6.2	6.6	6.9
C	PERTANIAN								
1	Ketersediaan Sarana Pertanian yang Berkualitas	%	15	15	16	17	18	19	20
2	Cakupan Luas Lahan Pertanian Yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Luasan	10	0	20	20	20	20	20
3	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	Persen	85	85	85	85	85	85	85
4	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	%	20	20	20	20	20	20	20
5	Persentase SDM Penyuluh Pertanian Yang Ditingkatkan	Persen	10	10	10	10	10	10	10
6	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Persen	70	70	70	75	80	85	90
7	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan Yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	Persen	2	2	2	2	2	2	2
8	Persentase Izin Usaha Pertanian Yang Diterbitkan	Persen	7	7	7	7	7	7	7
9	Jumlah Produksi Jagung	Ton	1.104	1.127	1.150	1.173	1.196	1.220	1.244





No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10	Jumlah Produksi Padi	Ton	1.920	1.960	2.000	2.040	2.081	2.122	2.164
11	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Jenis Cabai	Ton	1.63	1.67	1.7	1.73	1.77	1.80	1.84
12	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kelapa	Ton	40	40	40	40	40	40	40
13	Jumlah Produksi Daging (sapi, kerbau, domba, kambing, ayam, itik, babi)	Ton	940	970	1000	1030	1061	1093	1126
14	Jumlah Produksi Telur	Ton	28.2	29.1	30	30.9	31.83	32.78	33.77
15	Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Ha	373.42	440	440	440	440	440	440
D	PERDAGANGAN								
1	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	%	0%	0	0	50%	50%	75%	100%
2	Persentase Sarana Perdagangan yang ditingkatkan Kualitasnya	%	0%	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33	33.33
3	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor yang difasilitasi	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	%	0	20	20	20	20	20	20





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	%	12.17	41,74	48,99	56,23	63,48	70,72	77,97
7	Persentase Promosi Produk Lokal yang difasilitasi / dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	100	100
E	PERINDUSTRIAN								
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten	%	4.39	6.4	7.13	7.68	8.23	9.14	9.14
2	Persentase Realiasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	%	TAD	70	70	70	70	70	70
3	Presentase Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Izin Usaha Industri	%	TAD	0	0	55	60	65	70
4	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun)	Rp	0.0038529	0,004011 4	0,004169 9	0,00432 84	0,00446 89	0,00464 54	0,00480 39
F	TRANSMIGRASI								
1	Persentase program transmigrasi yang dilaksanakan	Persentase	18.32	19.05	0	32.6	24.18	22.3	1.88
2	Persentase luas kawasan transmigrasi yang berkembang	Persentase	2.54	2.92	2.92	5	7.1	6.55	0.55
3	Persentase transmigran yang dibina dan diberdayakan	Persentase	98.18	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Dukungan Kegiatan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan di Kawasan Transmigrasi	Persentase	30.00%	30%	35%	40%	45%	50%	55%
	URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAH								





No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A	SEKRETARIAT DAERAH								
1	Indeks Kematangan Organisasi	Indeks	38,9 (tinggi)	39,86 (tinggi)	40,86 (tinggi)	40,93 (tinggi)	41,2 (tinggi)	41,2 (tinggi)	41,56 (tinggi)
2	Efektivitas Kerjasama Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
4	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase produk hukum yang dihasilkan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
6	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
7	Tingkat kematangan UKPBJ	level	3	8	8	8	8	8	8
8	Efektifitas kebijakan administrasi pembangunan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
9	Indeks zakat nasional	Poin	0.25	0.28	0.31	0.34	0.37	0.40	0.43
B	SEKRETARIAT DPRD								
1	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Tepat/Tidak	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat
2	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	Persentase	80	80	80	80	80	80	80





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase	90	90	90	90	90	90	90
URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH									
A	PERENCANAAN								
1	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	%	100	100	100	100	100	100	100
B	KEUANGAN								
1	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yg Di alokasikan melalui TKD	%	-	75	78	80	82	85	87
2	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	-	20	23	25	27	30	32
3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Penurunan SILPA	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase laporan Keuangan tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	100





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	15.94	4	4	4	4	5	5
7	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	%	-	5	5.5	6	6.5	7	7.5
8	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan	%	-	50	55	60	65	70	75
9	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	%	-	50	55	60	65	70	75
C	KEPEGAWAIAN								
1	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan formasi	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	%	96.46	100	100	100	100	100	100
D	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
1	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangann kompetensi dasar, manajerial, fungsional dan teknis	%	100	100	100	100	100	100	100
E	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan	%	80	80	80	80	80	80	80
2	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	%	0	0	0	80	80	80	80





No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAH									
A	INSPEKTORAT								
1	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	75	75	75	76	76	77	77
2	Cakupan Perangkat Daerah yang Melakukan Pengendalian Intern	%	100	100	100	100	100	100	100
UNSUR KEWILAYAHAN									
A	KECAMATAN								
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik lingkup kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Desa Mandiri diwilayah Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase penurunan gangguan Kamtibmas	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	%	100	100	100	100	100	100	100
B	KECAMATAN JELAI								
1	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Desa Mandiri diwilayah Kecamatan Jelai	%	78,68	100	100	100	100	100	100





No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	Persentase penurunan gangguan Kamtibmas	%	86	100	100	100	100	100	100
4	Cakupan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik	%	80	100	100	100	100	100	100
5	Persentase cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	%	95	100	100	100	100	100	100
C.	KECAMATAN PANTAI LUNCI								
1	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	99	99	99	99	99	99	99
2	Persentase Desa Mandiri diwilayah Kecamatan Pantai Lunci	%	89	90	90	90	93	93	95
3	Persentase penurunan gangguan Kamtibmas	%	98	98	98	98	98	98	98
4	Cakupan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	%	92	94	94	95	95	95	95
D.	KECAMATAN PERMATA KECUBUNG								
1	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	91,63	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Desa Mandiri diwilayah Kecamatan Permata Kecubung	%	74,86	100	100	100	100	100	100
3	Persentase penurunan gangguan Kamtibmas	%	96,53	100	100	100	100	100	100





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	Cakupan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik	%	98,56	100	100	100	100	100	100
5	Persentase cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	%	90,59	100	100	100	100	100	100
E.	KECAMATAN SUKAMARA								
1	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Desa Mandiri diwilayah Kecamatan Sukamara	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase penurunan gangguan Kamtibmas	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Cakupan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	%	100	100	100	100	100	100	100
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM									
A	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
1	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	%	100	100	100	100	100	100	100





No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Hasil Analisis, 2025





Tabel 4. 4 Target SPM Tahun 2026-2030

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target SPM				
			2026	2027	2028	2029	2030
	Pendidikan						
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100	100	100	100	100
2.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	100	100	100	100
3.	Pendidikan Anak Usia dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	100	100	100	100	100
	Kesehatan						
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100	100	100	100
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100	100	100	100
3.	Pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100	100	100	100
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100	100	100	100





No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target SPM				
			2026	2027	2028	2029	2030
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia Pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100	100	100	100
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100	100	100	100
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100	100	100	100
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100	100	100	100
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warga Negara penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100	100	100	100
10.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100	100	100	100	100
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100	100	100	100	100
12	Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human Immunodeficiency	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human</i>	100	100	100	100	100





No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target SPM				
			2026	2027	2028	2029	2030
	Virus) mendapatkan layanan kesehatan.	<i>Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan.					
Pekerjaan Umum dan Penata Ruang							
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari Hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100	100	100	100	100
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok layanan pengolahan Air Limbah Domestik Regional Limbah Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman							
1.	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100	100	100	100
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100	100	100	100	100
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari	100	100	100	100	100





No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target SPM				
			2026	2027	2028	2029	2030
		penegakan hukum Perda dan perkada					
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	100	100	100	100
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100	100	100	100
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	100	100	100
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100	100	100	100
Sosial							
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	100	100	100	100
2.	Rehabilitas sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	100	100	100	100





No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target SPM				
			2026	2027	2028	2029	2030
3.	Rehabilitas sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	100	100	100	100
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100	100	100	100	100
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Kabupaten	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100	100	100	100	100





Tabel 4. 5 Penyelarasan Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2045
dengan IKU dan IKD RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029

No	Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2045	RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029		
			IKU	IKD
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	Usia Harapan Hidup	X	X
	Kesehatan Ibu dan Anak			
2	Angka Kematian Ibu (Per100.000 Kelahiran Hidup)	Angka Kematian Ibu (AKI)		X
	Prevelensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%)	Prevalensi Stunting		X
	Penanganan Tuberkulosis			
3	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage) (%)	Insidensi Tuberkulosis		X
	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate) (%)	Insidensi Tuberkulosis		X
4	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional			
5	Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca (%)			
	Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerisasi (%)			
	Persentase Kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca (%)	Angka Literasi/Numerasi		X
	Persentase Kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerisasi (%)	Angka Literasi/Numerasi		X





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



No	Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2045	RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029		
			IKU	IKD
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		X
	Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (Tahun)	Rata rata Lama Sekolah		X
	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Harapan Lama Sekolah		X
6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)			
7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)			
8	Tingkat Kemiskinan (%)	Tingkat kemiskinan	X	X
9	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja		X
10	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)			
11	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	Rasio PDRB Industri Pengolahan		X
12	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum		X
	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Ribuan Orang)	Persentase pertumbuhan Kunjungan Wisatawan		
13	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing daerah	X	X
	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD			
14	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian			
	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	Rasio Kewirausahaan		X
	Return on Aset (ROA) BUMD (%)			





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



No	Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2045	RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029		
			IKU	IKD
15	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Tingkat Pengangguran Terbuka	X	X
	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)			
16	Tingkat Partisipasi Angka Kerja Perempuan (%)			
17	Indeks Kapabilitas Inovasi			
	Indeks Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah		X
18	Nilai Tukar Petani (NTP)	Indeks Ekonomi Hijau		X
	Kontribusi PDRB Sub Sektor Perikanan	Indeks Ekonomi Hijau		X
19	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Internet (%)			
20	Koefisien Variasi Harga Antar wilayah Tingkat Kabupaten (antar kecamatan)	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Kabupaten (antar kecamatan)	X	
21	Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto (%)	Pembentukan Modal Tetap Bruto		X
22	Rumah tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan (%)	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak		X
23	Persentase Desa Mandiri (%)	Persentase Desa Mandiri	X	X
24	Indeks Reformasi Hukum	Indeks Reformasi Hukum		X
25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		X
26	Indeks Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	X	
27	Survei Penilaian Integritas			
28	Angka Kriminalitas	Indeks Rasa Aman		X
	Angka Kecelakaan Lalu Lintas	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban		X
29	Prosentase Kasus Ipoleksosbud berpotensi menimbulkan Konflik yang ditangani	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban		X





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



No	Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2045	RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029		
			IKU	IKD
30	Implementasi Rencana Aksi Daerah Penanganan Konflik Sosial (RAD PKS) (%)	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban		X
31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB		X
32	Tingkat Inflasi (%)	Tingkat inflasi	X	X
33	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)		X
	Total Kredit/PDRB (%)	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)		X
34	Persentase Individu Memiliki Rekening di Bank (%)	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)		X
35	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	X	
36	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	X	
	Nilai Maturitas SPIP	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		X
37	Persentase Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Pengarustamaan Kebudayaan (%)	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	X	X
38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks Kerukunan Umat Beragama	X	X
39	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga		X
40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks Ketimpangan Gender		X
41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	X	
	Indeks Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan		X
	Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara		X
42	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	X	X
	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman		X





No	Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2045	RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029		
			IKU	IKD
	Pengelolaan Sampah			
	Timbulan sampah terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah		X
	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan layanan penuh Pengumpulan Sampah (%RT)	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah		X
43	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan		
	Ketahanan Air			
	Kapasitas Air Baku (m3/detik)			
	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum		X
44	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks Risiko Bencana	X	X
45	Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif (%)	Penurunan Intensitas Emisi GRK		X





Tabel 4. 6 Penyelarasan Indikator RPJMN - RPJMD Provinsi – RPJMD Kabupaten

NO	NAMA INDIKATOR	TARGET RPJMN		TARGET RPJMD PROV.		TARGET RPJMD KAB.	
		2025	2029	2025	2029	2025	2029
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,1	7,3	5,60	7,30	5,4	5,86
2	PDRB per Kapita (Rp juta)	85,3	124,0	85,30	124,0	95,83	116,48
3	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	1,0	1,0	1,0	1,00	N/A	N/A
4	Tingkat Kemiskinan (%)	4,11 – 4,61	2,43 – 3,43	4,61	2,93	3,67	2,83
5	Rasio Gini	0,311 – 0,315	0,242 – 0,246	0,31	0,24	0,289	0,289
6	Indeks Modal Manusia	0,55	0,58	0,55	0,59	N/A	N/A
	Indeks Pembangunan Manusia					72,9	75,18
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	76,00	82,66	76,0	90,18	431.401,84	708.125,36
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	76,34	77,01	76,34	77,01	74,54	75,38
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	3,32 – 3,91	2,92 – 3,61	3,91	3,61	4,95	3,36
	KESEHATAN UNTUK SEMUA						
1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	73,65	74,38	74,43	75,4	74,37	75,59
2	Kesehatan Ibu dan Anak:						
	a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	190	117	122	77	0	0
	b) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	20,6	15,8	20,5	14,2	17,5	14,9
3	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)						





NO	NAMA INDIKATOR	TARGET RPJMN		TARGET RPJMD PROV.		TARGET RPJMD KAB.	
		2025	2029	2025	2029	2025	2029
	a) Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	92	90	80	89	145	94
	b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkolusis (treatment success rate) (%)	90	99	99,25	99,45	90	91,18
4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,6	99	99,25	99,45	101,39	≥100
	PENDIDIKAN BERKUALITAS YANG MERATA						
5	Hasil Pembelajaran:						
	a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:						
	i. Literasi Membaca	7.14 - 14.29	35.71 - 50.00	14,29	28,00	14,29	N/A
	ii. Numerasi	0.00 - 7.14	7.14 - 14.29	7,14	14,00	7,14	N/A
	b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:						
	i. Literasi Membaca	43.31 - 45.81	48.59 - 51.09	39,69	41,00	30	41,46
	ii. Numerasi	35.82 - 38.32	39.62 - 42.12	27,22	29,00	16,94	29,08
	c) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun(tahun)	9.29 - 9.31	9.76 - 9.77	9,41	9,82	8,84	9,63
	d) Harapan Lama Sekolah	12.88 - 12.91	13.12 - 13.13	13,32	14,58	12,47	12,7





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



NO	NAMA INDIKATOR	TARGET RPJMN		TARGET RPJMD PROV.		TARGET RPJMD KAB.	
		2025	2029	2025	2029	2025	2029
6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	11,23	11,23 - 11,84	11,23	11,71	9,55	N/A
7	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	72,82	77,66	72,82	75,94	25,52	N/A
	PERLINDUNGAN SOSIAL YANG ADAPTIF						
8	Tingkat Kemiskinan (%)	4,11-4,61	2,43-3,43	4,61	2,93	3,67	2,83
9	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	42,68	54,47	N/A	N/A	80	90
10	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%) diusulkan menggunakan proksi:			40	50		
	a) Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/atau dari Dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan	3.100	3.700	N/A	N/A	1,5	11,13
	b) Jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di tingkat kab/kota/provinsi	10	15	N/A	N/A	N/A	N/A
	IPTEK, INOVASI, DAN PRODUKTIVITAS EKONOMI						





NO	NAMA INDIKATOR	TARGET RPJMN		TARGET RPJMD PROV.		TARGET RPJMD KAB.	
		2025	2029	2025	2029	2025	2029
11	a) Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	15.76 - 16.00	14,5 - 14,4	15,76	18,57	21,54	24.91
	b) Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	6	8,4	N/A	N/A	N/A	N/A
12	Pengembangan Pariwisata						
	a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	1,94	2,02	1,94	2,37	0,98	1,36
	b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu Orang)	5,47	6,57	5,47	7,00	47,97	59,72
13	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap Nasional(%)*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN						
	a. Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	3,84	4,29	N/A	N/A	0,07	0,07
	b. Rasio kewirausahaan daerah (%)	3,81	4,24	3,33	4,8	4,78	5,84
	c. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	1,62	1,64	1,62	2,12	0.80	0,95
	d. Return on Asset (ROA) BUMD (%)	1,89	2,32	1,89	2,8	1,89	2,72
15	Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik						
	a) Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,32 - 3,91	2,92 - 3,61	3,91	3,66	4,95	3,36
	b) Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	52	59,6	52,00	60,00	52	60





NO	NAMA INDIKATOR	TARGET RPJMN		TARGET RPJMD PROV.		TARGET RPJMD KAB.	
		2025	2029	2025	2029	2025	2029
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	49,43 - 51,79	49,95 - 53,63	52,03	55,00	49,34	54,51
17	Tingkat Penguasaan IPTEK disesuaikan dengan karakteristik daerah	N/A	N/A	2,59	3,1	N/A	N/A
	PENERAPAN EKONOMI HIJAU						
18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau						
	a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah	80,88	82,73	80,88	84,00		
	Nilai Tukar Petani (NTP)					122,79	123,05
	Kontribusi PDRB Sub Sektor Perikanan					3,1	4,08
	b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	36,91	46,26	17,00	30,00	N/A	N/A
	TRANSFORMASI DIGITAL						
19	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	5,8	6,8	5,8	6,2	N/A	N/A
	INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL						
20	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	9,9	9,3	N/A	N/A	N/A	4,05
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	38,5	39,24 - 39,45	38,5	38,7	39,2	38,24
22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	29,55 - 29,68	30,22 - 30,27	45,6	46,00	N/A	N/A
	PERKOTAAN DAN PERDESAAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI						





NO	NAMA INDIKATOR	TARGET RPJMN		TARGET RPJMD PROV.		TARGET RPJMD KAB.	
		2025	2029	2025	2029	2025	2029
23	Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan						
	a) Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)					N/A	N/A
	b) Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	64,53	75	64,53	75	23,68	42,63
	c) Persentase Desa Mandiri (%)	20,46	22,35	20,18	21,86	41,38	55,17
	REGULASI DAN TATA KELOLA YANG BERINTEGRITAS DAN ADAPTIF						
24	Indeks Materi Hukum proksi di daerah: Indeks Reformasi Hukum (IRH)	70	71,5	70	75,00	70	80
25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,9	5	2,9	3,40	2,54	3,16
26	Indeks Pelayanan Publik	2,14	2,22	2,5	3,00	3,05	3,51
27	Indeks Integritas Nasional	69,54	72,39	69,54	73,00	75	79,5
	HUKUM BERKEADILAN, KEAMANAN NASIONAL TANGGUH, DAN DEMOKRASI SUBSTANSIAL						
28	Indeks Pembangunan Hukum proksi di daerah:						
	a) Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	70	75,7	N/A	N/A	100	100
	b) Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	60	70	N/A	N/A	100	100





Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029



NO	NAMA INDIKATOR	TARGET RPJMN		TARGET RPJMD PROV.		TARGET RPJMD KAB.	
		2025	2029	2025	2029	2025	2029
	HUKUM BERKEADILAN, KEAMANAN NASIONAL TANGGUH, DAN DEMOKRASI SUBSTANSIAL						
29	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	74,47	77,5	65,58	75,00	80	80
30	Indeks Demokrasi Provinsi / Indeks Harmoni	80.02 - 83.28	81.00 - 84.25	77,57	79,8	0	6,7
	STABILITAS EKONOMI MAKRO						
31	Rasio Pajak terhadap PDB (%)	1,62	1,86	1,62	1,43	0,24	0,35
32	Tingkat Inflasi (%)	2,8-3,6	1,5-3,5	3,7	3,5	2,64	2,64
33	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan						
	a) Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	22,24	26,56	23,19	30,00	23,19	33,12
	b) Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,05	0,06	0,05	0,42	N/A	N/A
	c) Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi (Rp)	5.388.734,85	8.199.499,64	5.388.734,85	16.100.000,00	N/A	N/A
	d) Total Kredit/PDRB (%)	21,8	24,53	21,8	30,00	21,8	31,5
34	Inklusi Keuangan (%)	87,74	90,62	87,74	91,00	3,73	4,3
	KETANGGUHAN DIPLOMASI DAN PERTAHANAN BERDAYA GENTAR KAWASAN						
35	Asia Power Index – Diplomatic Influence usulan proksi di daerah:	disesuaikan dengan karakteristik daerah				N/A	N/A





NO	NAMA INDIKATOR	TARGET RPJMN		TARGET RPJMD PROV.		TARGET RPJMD KAB.	
		2025	2029	2025	2029	2025	2029
	Jumlah Kerja Sama Provinsi/Kabupaten/ Kota Kembar/Bersaudara (Sister Province/Sister City)	disesuaikan dengan karakteristik daerah					
36	Asia Power Index – Military Capability	N/A	N/A	3,13	3,54	N/A	N/A
	BERAGAMA MASLAHAT DAN BERKEBUDAYAAN MAJU						
37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	62,13 - 62,24	64,41 - 64,69	60,89	61,81	5	15
38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	78,76 - 78,79	80,18 - 80,4	80,4	82	80,4	82,31
	KELUARGA BERKUALITAS, KESETARAAN GENDER, DAN MASYARAKAT INKLUSIF						
39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	70,97	73,62	66,05	67		
40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,525	0,493	0,49	0,27	0,49	0,43
	LINGKUNGAN HIDUP BERKUALITAS						
41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,557	0,572	0,557	0,6	0,557	0,597
42	Kualitas Lingkungan Hidup						
	a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	76,34	77,01	76,34	77,01	74,54	75,38
	b) Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	14,00%	18%	11,16	20,00	11,73	31,3
	c) Pengelolaan Sampah						





NO	NAMA INDIKATOR	TARGET RPJMN		TARGET RPJMD PROV.		TARGET RPJMD KAB.	
		2025	2029	2025	2029	2025	2029
	- Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	15,00%	26%	7,00	20,00	58,98	67,99
	- Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	64%	100%	38,00	40,00	37,76	53,32
44	Indeks Risiko Bencana (IRB) (untuk level provinsi)	94,85	91,85 - 88,92	94,85	91,33	130,09	122,74
45	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)					431.401,8 4	708.125,36
	a) Kumulatif	27,61	32,27	27,61	31,91		
	b) Tahunan	47,87	58,06	47,87	55,77		





BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran visi-misi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sukamara setiap tahun dalam 5 tahun mendatang. Dalam RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029 juga dijelaskan terkait cara dan langkah-langkah strategis yang perlu dilaksanakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, dan target program yang telah ditetapkan.

Dokumen RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029 disusun dengan mempertimbangkan hasil kajian dan konsepsi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2045, memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, serta mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan sebagaimana dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sukamara Tahun 2012-2032.

Dalam rangka memastikan RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029 dilaksanakan secara terpadu dan konsisten, maka perlu ditetapkan beberapa poin kaidah pelaksanaan dan pedoman transisi.

5.1. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029 meliputi:

- RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Oleh karena itu seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dan menjadikan Renstra PD yang disusun sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) setiap tahun.
- Penjabaran RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029 dilakukan melalui penyusunan RKPD Kabupaten Sukamara setiap tahun.
- Evaluasi hasil pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sukamara dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Kinerja pembangunan daerah akan diukur berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD ini.





- d. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Sukamara, berkewajiban melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Sukamara Tahun 2025-2029 dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- e. Bupati Sukamara wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 5 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029 kepada segenap masyarakat.
- f. DPRD Kabupaten Sukamara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 5 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029.

5.2. Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana pembangunan daerah setelah RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029 ini berakhir, diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun RKPD Tahun 2030, dan selanjutnya RKPD tersebut dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Sukamara Tahun 2030. Maka Dokumen RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029 disusun dengan periode 2025-2030, sehingga penyusunan RKPD Tahun 2030 tetap berdasarkan RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2029 dan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Sukamara Tahun 2025-2045 sesuai periode/tahapan berkenaan.





PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA